

Yth.

Direksi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi,
di tempat

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/SEOJK.06/2024
TENTANG
TATA CARA DAN MEKANISME PANYAMPAIAN DATA TRANSAKSI
PENDANAAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARA
LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Sehubungan dengan amanat Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2/OJK), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penyampaian data transaksi pendanaan dan pelaporan bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
2. Penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
3. Pendanaan adalah penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka tertentu dalam transaksi LPBBTI.
4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
5. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas

pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

6. Direksi adalah organ LPBBTI yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan LPBBTI untuk kepentingan LPBBTI, sesuai dengan maksud dan tujuan LPBBTI serta mewakili LPBBTI, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

II. BENTUK, SUSUNAN, WAKTU, DAN MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN DATA TRANSAKSI PENDANAAN

1. Penyelenggara wajib menyampaikan data transaksi Pendanaan dengan benar dan lengkap kepada pusat data *fintech lending* Otoritas Jasa Keuangan.
2. Data transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan perkembangan data transaksi Pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana.
3. Bentuk dan susunan data transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat:
 - a. informasi tentang pengguna;
 - b. informasi transaksi Pendanaan; dan
 - c. informasi kualitas Pendanaan.
4. Bentuk dan susunan penyampaian data transaksi Pendanaan pada pusat data *fintech lending* dilakukan dengan menggunakan pedoman dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Penyampaian data transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara waktu nyata (*real time*).
6. Penyampaian data transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan dengan mengintegrasikan Sistem Elektronik milik Penyelenggara pada pusat data *fintech lending*.
7. Dalam hal pusat data *fintech lending* belum dapat menerima data transaksi Pendanaan secara waktu nyata (*real time*) sebagaimana dimaksud pada angka 5, Penyelenggara melakukan penyampaian data transaksi Pendanaan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara harian.
8. Dalam hal pusat data *fintech lending* sebagaimana dimaksud pada angka 6 mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan jangka waktu penyampaian data transaksi Pendanaan kepada Penyelenggara melalui surat dan/atau atau pengumuman melalui pusat data *fintech lending*.
9. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 8 antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir.
10. Penyelenggara dinyatakan telah menyampaikan laporan data transaksi Pendanaan dengan ketentuan dibuktikan dengan tanda terima bahwa penyampaian transaksi Pendanaan telah berhasil beserta jumlah data yang telah dilaporkan.

III. BENTUK, SUSUNAN, WAKTU, DAN MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA SERTA PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

1. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penyelenggara wajib menyusun laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara benar dan lengkap.
3. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. laporan bulanan; dan
 - b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
4. Bentuk dan susunan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a antara lain terdiri atas:
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan laba/rugi;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. laporan arus kas;
 - e. *inclusivity*;
 - f. *transaction value*;
 - g. kualitas pendanaan, biaya modal, manfaat efektif ekonomi, *velocity*/tempo, sektor produktif, informasi terkait dengan kerjasama penyaluran pendanaan lainnya;
 - h. *outstanding* Penyelenggara;
 - i. kualitas pendanaan *outstanding*; dan
 - j. laporan kegiatan.
5. Bentuk dan susunan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b terdiri atas:
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan laba/rugi;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
6. Dalam menyusun laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 3, Penyelenggara mengacu pada pedoman akuntansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Tata cara dan mekanisme penyampaian laporan berkala dilakukan menggunakan pedoman dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
8. Penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir.
9. Penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
10. Apabila batas akhir penyampaian laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan huruf b jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah pada hari kerja pertama berikutnya.
11. Penyampaian laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan huruf b dilakukan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
12. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 10 belum tersedia, mengalami

- gangguan teknis, atau keadaan kahar, Penyelenggara menyampaikan laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan dalam bentuk dokumen elektronik secara daring dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
13. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 12, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan dalam situs *web* Otoritas Jasa Keuangan atau melalui surat elektronik kepada Penyelenggara.
 14. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir.
 15. Penyampaian dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 12 disampaikan melalui alamat mailingroommrp@ojk.go.id dan ditujukan kepada:
Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10110,
dengan tembusan kepada:
Direktur Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi
Gedung Wisma Mulia 2
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 42 Jakarta 12710.
 16. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data atau surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis, Penyelenggara menyampaikan laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan media penyimpanan data elektronik, yang dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi dan ditujukan kepada:
Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10110,
dengan tembusan kepada:
Direktur Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi
Gedung Wisma Mulia 2
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 42 Jakarta 12710.
 17. Penyampaian laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan dalam bentuk dokumen elektronik secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 15 dilakukan dengan cara:
 - a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
 18. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan angka 16, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat kepada Penyelenggara atau pengumuman melalui situs *web* Otoritas Jasa Keuangan.
 19. Penyelenggara dinyatakan telah menyampaikan laporan bulanan dan/atau laporan keuangan tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara daring melalui:

- 1) sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2) surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan bukti pengiriman surat elektronik, dalam hal pengiriman melalui jaringan komunikasi data tidak dapat dilakukan; atau
- b. untuk penyampaian secara luring dibuktikan dengan tanda terima dari surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
20. Penyelenggara wajib mempublikasikan kepada masyarakat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik beserta pendapat auditor atas laporan dimaksud pada sistem elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara.
 21. Selain publikasi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik beserta pendapat auditor sebagaimana dimaksud pada angka 20, Penyelenggara dapat mempublikasikan laporan lain dalam laporan keuangan tahunan yang telah diaudit pada sistem elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara.
 22. Publikasi sebagaimana dimaksud pada angka 20 wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu penyampaian laporan keuangan tahunan.
 23. Penyelenggara mempublikasikan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 20 pada halaman depan sistem elektronik Penyelenggara yang mudah dilihat dan diakses oleh masyarakat.
 24. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 20 dan perubahannya dipublikasikan selama Penyelenggara menjalankan kegiatan usaha LPBBTI.

IV. BENTUK, SUSUNAN, WAKTU, DAN MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN INSIDENTIL

1. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan insidentil kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penyelenggara wajib menyusun laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara benar dan lengkap.
3. Laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. laporan *fraud*, antara lain penggelapan aset perusahaan oleh Direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, atau karyawan Penyelenggara;
 - b. laporan pelaksanaan audit internal;
 - c. laporan pelaksanaan edukasi;
 - d. laporan sengketa hukum; dan
 - e. laporan gangguan operasional, antara lain kebakaran dan demonstrasi.
4. Bentuk dan susunan dari laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit memuat:
 - a. uraian singkat mengenai kejadian insidentil;
 - b. langkah penyelesaian yang diambil oleh Penyelenggara; dan
 - c. *action plan* untuk perbaikan ke depan yang dilakukan.
5. Penyampaian laporan insidentil disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya insiden dimaksud.
6. Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta laporan lain selain laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 3.

7. Bentuk dan susunan dari laporan lain selain laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dalam surat permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
 8. Penyampaian laporan lain selain laporan insidentil disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam surat permintaan.
 9. Apabila batas akhir penyampaian laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 5 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah pada hari kerja pertama berikutnya.
 10. Penyampaian laporan insidentil dan laporan lain selain laporan insidentil disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.
 11. Penyampaian dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 10 disampaikan melalui alamat mailingroommrp@ojk.go.id dan ditujukan kepada:
Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10110,
dengan tembusan kepada:
Direktur Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi
Gedung Wisma Mulia 2
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 42 Jakarta 12710.
 12. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 11, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat kepada Penyelenggara atau pengumuman melalui situs *web* Otoritas Jasa Keuangan.
 13. Penyelenggara dinyatakan telah menyampaikan laporan insidentil dan/atau laporan lain selain laporan insidentil dibuktikan dengan tanda terima dari surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- V. ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENYUSUN
1. Penyelenggara menunjuk anggota Direksi pada Penyelenggara yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Penyelenggara.
 2. Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 menunjuk petugas penyusun untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan laporan Penyelenggara.
- VI. KODE PENGGUNA DAN KATA SANDI ANGGOTA DIREKSI DAN PETUGAS PENYUSUN PENYAMPAIAN DATA TRANSAKSI PENDANAAN DAN LAPORAN BERKALA MELALUI SISTEM JARINGAN KOMUNIKASI DATA OTORITAS JASA KEUANGAN
1. Dalam menyampaikan data transaksi Pendanaan dan laporan berkala, anggota Direksi dan petugas penyusun sebagaimana dimaksud dalam Romawi V harus memiliki kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*).
 2. Untuk memperoleh kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*) dalam rangka menyampaikan data transaksi pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, anggota Direksi harus menyampaikan permohonan pendaftaran hak akses pusat data *fintech lending* melalui surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

3. Untuk memperoleh kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*) dalam rangka menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1, anggota Direksi harus menyampaikan permohonan pendaftaran hak akses sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan melalui surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Dalam hal terdapat perubahan anggota Direksi penanggung jawab dan/atau petugas penyusun data transaksi pendanaan dan/atau laporan berkala, Penyelenggara menyampaikan laporan perubahan anggota Direksi penanggung jawab dan/atau petugas penyusun data transaksi Pendanaan dan/atau laporan berkala sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VII. TATA CARA PERBAIKAN DATA TRANSAKSI PENDANAAN, LAPORAN BERKALA, DAN LAPORAN INSIDENTIL

1. Dalam hal terdapat kesalahan pada data transaksi Pendanaan, laporan berkala, dan/atau laporan insidentil yang disampaikan, Penyelenggara melakukan perbaikan pada data transaksi Pendanaan dan/atau laporan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Perbaikan data transaksi Pendanaan, laporan berkala, dan/atau laporan insidentil disampaikan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sesuai tata cara penyampaian data transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Romawi II angka 4 dan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 6 dan angka 7.
3. Perbaikan laporan insidentil disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 10.

VIII. KETENTUAN PERALIHAN

1. Kewajiban Penyelenggara untuk menyampaikan data transaksi Pendanaan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dimulai sejak tanggal 1 Juli 2024.
2. Penyelenggara harus melakukan uji coba penyampaian laporan data transaksi Pendanaan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.
3. Kewajiban Penyelenggara untuk menyampaikan laporan bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dimulai untuk periode laporan bulan Juli 2024 yang disampaikan sesuai dengan waktu penyampaian sebagaimana diatur dalam Romawi III angka 8.
4. Penyelenggara harus melakukan uji coba penyampaian laporan bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini untuk periode laporan bulan Februari 2024 sampai dengan periode laporan bulan Juni 2024.

IX. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL
VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO,
DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/SEOJK.06/2024
TENTANG
TATA CARA DAN MEKANISME PENYAMPAIAN DATA TRANSAKSI
PENDANAAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN
BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	- 1 -
BAB I UMUM	- 2 -
BAB II LAPORAN PENGGUNA	- 3 -
BAB III LAPORAN PRODUK	- 16 -
BAB IV LAPORAN PENDANAAN	- 21 -
BAB V LAPORAN PEMBAYARAN PENDANAAN	- 31 -
BAB VI LAPORAN STATUS PENDANAAN	- 41 -
BAB VII LAPORAN RESTRUKTURISASI PENDANAAN	- 47 -

BAB I UMUM

Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) secara periodik melakukan pelaporan transaksi LPBBTI yang terdiri dari 6 (enam) Laporan sebagai berikut:

1. Laporan Pengguna

Laporan ini memuat informasi mengenai Pengguna yang terdiri dari Pemberi Dana (*Lender*) dan Penerima Dana (*Borrower*) LPBBTI. Adapun detail laporan Pengguna antara lain memuat informasi mengenai identitas Pengguna, afiliasi dengan Penyelenggara, Informasi lain terkait Pengguna, waktu registrasi, dan perubahan data terakhir perorangan/ lembaga yang dapat bertindak sebagai *Lender*, *Borrower*, atau keduanya di satu Penyelenggara LPBBTI.

2. Laporan Produk

Laporan ini memuat informasi mengenai produk yang ditawarkan oleh Penyelenggara LPBBTI. Adapun detail laporan produk antara lain memuat informasi mengenai produk pendanaan, perjanjian kerja sama (jika ada) yang memuat informasi terkait kerja sama, periode perjanjian, dan periode aktif produk di sistem Penyelenggara LPBBTI.

3. Laporan Pendanaan

Laporan informasi transaksi pendanaan antara *Lender* dan *Borrower* sampai dengan pencairan ke rekening *Borrower*.

4. Laporan Pembayaran Pendanaan

Laporan ini berupa transaksi pembayaran *Borrower* atas pendanaan yang diterima sesuai dengan porsi pendanaan dan manfaat ekonomi yang diperjanjikan dalam perjanjian pendanaan.

5. Laporan Status Kualitas Pendanaan

Laporan ini dilaporkan oleh Penyelenggara saat pertama kali pendanaan dicairkan dan ketika jatuh tempo pembayaran cicilan terlewati atau sebab lainnya yang mengakibatkan perubahan kualitas pendanaan.

6. Laporan Restrukturisasi Pendanaan

Laporan restrukturisasi pendanaan hanya dilaporkan ketika adanya akad perjanjian restrukturisasi berupa kesepakatan antara *Lender* dan *Borrower* untuk transaksi restrukturisasi pendanaan. Didalam laporan ini memuat informasi kode pendanaan utama (sebelum restrukturisasi) dan kode pendanaan baru yang tercatat di laporan ini, serta periode, tenor, *outstanding* dan jumlah cicilan restrukturisasi yang disepakati.

BAB II LAPORAN PENGGUNA

1. Kode_Penyelenggara

- Kode ini diisikan dengan Kode_Penyelenggara yang diberikan oleh OJK untuk Penyelenggara sebagai Pelapor.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Kode Penyelenggara	Pengisian
1	Laporan disampaikan oleh Penyelenggara Konvensional	810001
2	Laporan disampaikan oleh Penyelenggara Syariah	810028

2. Kode_Pengguna_Sistem

- Kolom ini diisikan dengan Kode_Pengguna_Sistem yang dapat bertindak sebagai *Borrower* ataupun *Lender*.
- Apabila Penyelenggara melakukan pemisahan pengkodean untuk satu Pengguna yang sama sesuai dengan aktivitas (*Borrower/Lender*), maka Penyelenggara dapat memilih salah satu kode dan menambahkan informasi pada kolom keterangan terkait dan menyertakan pengkodean Pengguna dalam peran lainnya.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Kode Pengguna Sistem	Pengisian
1	PT XYZ dicatat sebagai <i>Borrower</i> pada Fintech ABC	PA0001
2	PT XYZ dicatat sebagai <i>Lender</i> pada Fintech ABC	PB0001
3	PT XYZ dicatat sebagai <i>Borrower</i> dan <i>Lender</i> pada Fintech ABC, maka dapat dicatat sebagai keduanya.	PC0001

3. Jenis_Pengguna

- kolom ini diisi jenis Pengguna sesuai dengan referensi sebagai berikut:

Kode	Jenis Pengguna
1	Perorangan
2	Lembaga

- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Jenis Pengguna	Pengisian
1	Dylan merupakan <i>Borrower</i> perorangan	1
2	PT XYZ merupakan <i>Lender</i> Lembaga	2

4. Nama_Pengguna

- Kolom ini diisi dengan nama Pengguna sesuai dengan nama lengkap tanpa gelar sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen identitas Pengguna.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Nama Pengguna	Pengisian
1	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur "Tomi, SE. MM." ("SE" dan "MM" adalah gelar pendidikan)	Tomi
2	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur "H. Megat" ("H" adalah gelar keagamaan)	Megat
3	Pada dokumen identitas tertulis nama "R. Agung Wiyono" ("R" bukan merupakan gelar kebangsawanan)	R. Agung Wiyono

5. Is_Lender

- Kolom ini bernilai TRUE atau FALSE. Jika bernilai TRUE menandakan Pengguna berperan sebagai *Lender*.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian:

No	Status sebagai <i>Lender</i>	Pengisian
1	Pengguna memiliki peran sebagai pemberi dana (<i>Lender</i>)	TRUE
2	Pengguna tidak memiliki peran sebagai pemberi dana (<i>Lender</i>)	FALSE

6. Is_Borrower

- Kolom ini bernilai TRUE atau FALSE. Jika bernilai TRUE menandakan Pengguna berperan sebagai *Borrower*.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Status sebagai <i>Borrower</i>	Pengisian
1	Pengguna memiliki peran sebagai penerima dana (<i>Borrower</i>)	TRUE
2	Pengguna tidak memiliki peran sebagai penerima dana (<i>Borrower</i>)	FALSE

7. Kode_warga_negara

- Kolom ini diisi dengan kode_warga_negara sesuai dengan referensi negara sesuai dengan ISO 3166-1 Alpha 2 Code.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Status warga negara	Pengisian
1	Bpk. Adiwena sebagai warga negara Indonesia	ID
2	Mr Park sebagai warga negara Korea Selatan	KR

8. Kode_jenis_tanda_pengenal

- Kolom ini diisi dengan kode jenis tanda pengenal sesuai referensi sebagai berikut:

Kode jenis tanda pengenal	Jenis Tanda Pengenal
1	KTP
2	NPWP
3	PASPOR
4	KITAS

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Tanda Pengenal	Pengisian
1	Bpk. Adiwena mengisi KTP sebagai warga negara Indonesia	1
2	Bapak Megat sebagai warga negara Amerika Serikat mengisi PASPOR	3
3	Bapak Wijaya sebagai warga negara Jepang mengisi KITAS	4
4	PT Sejahtera mengisi NPWP sebagai perusahaan/lembaga	2

9. No_tanda_pengenal

a. Kolom ini diisi dengan nomor tanda pengenal sesuai dengan jenis tanda pengenal yang dimasukkan pada kode jenis tanda pengenal.

b. Detail Pengisian:

- Diisi nomor KTP jika perorangan dan WNI;
- Diisi nomor PASPOR/KITAS jika perorangan dan WNA;
- Diisi nomor NPWP jika jenis Pengguna lembaga.

c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

d. Contoh pengisian data:

No	No Tanda Pengenal	Pengisian
1	Bpk. Adiwena mengisi KTP sebagai warga negara Indonesia	3214561304990023
2	Bpk. Udjang mengisi PASPOR sebagai warga negara Argentina	AB12FE345600
3	PT Sejahtera mengisi NPWP sebagai perusahaan/lembaga	123456789012345

10. NPWP_perorangan

a. Kolom ini diisi dengan NPWP Perorangan sesuai dengan panjang digit yang ditetapkan Pemerintah.

b. Kolom ini bersifat *optional* (dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	NPWP	Pengisian
1	Bpk. Adiwena mengisi NPWP perorangan	1234 (sesuai digit NPWP)
2	Bpk .Tomi mengisi NPWP perorangan	5678 (sesuai digit NPWP)

11. Tanggal_waktu_registrasi

a. Kolom ini diisi dengan Tanggal waktu registrasi *Borrower/Lender* sesuai data core system Penyelenggara dalam format WIB.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Waktu Registrasi	Pengisian
1	Bpk. Adiwena sebagai <i>Borrower</i> terdaftar pada system Penyelenggara PT Fintech XYZ	2023-03-14 21:22:54

No	Tanggal Waktu Registrasi	Pengisian
	pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 21:22:54 WIB	
2	Bpk. Irfan sebagai <i>Lender</i> terdaftar pada system Penyelenggara PT Fintech XYZ pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 01:22:59 WIT	2023-03-14 23:22:59

12. Tempat_lahir_berdiri

- Kolom ini diisi dengan diisikan nama kota
- Detail Pengisian:
 - jika perorangan diisikan dengan kota kelahiran.
 - jika lembaga diisikan dengan kota pendirian.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh *pengisian* data:

No	Tempat Lahir Berdiri	Pengisian
1	Bpk. Adiwena lahir di Jakarta	Jakarta
2	PT ABC berdiri di Bali	Bali

13. Tanggal_lahir_berdiri

- Kolom ini diisi dengan diisikan tanggal lahir berdiri.
- Detail Pengisian:
 - jika perorangan diisikan dengan tanggal lahir berdiri;
 - jika lembaga diisikan dengan tanggal lahir berdiri.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan);
- Contoh *pengisian* data:

No	Tanggal Lahir Berdiri	Pengisian
1	Bpk. Adiwena lahir tanggal 12 April 1988	1988-04-12
2	PT ABC berdiri tanggal 20 November 2020	2020-11-20

14. Kode_jenis_kelamin

- Kolom ini diisi dengan kode jenis kelamin sesuai referensi sebagai berikut:

Kode	Nama
L	Laki-Laki
P	Perempuan

- Kolom ini bersifat *conditional* (jika perorangan diisi sesuai dengan referensi).
- Contoh *pengisian* data:

No	Kode Jenis Kelamin	Pengisian
1	Bpk. Adiwena	Laki-Laki (sesuai dengan referensi)
2	Ibu Suci	Wanita (sesuai dengan referensi)
3	PT ABC	kolom dikosongkan

15. Alamat

- Kolom ini diisi dengan alamat rumah untuk perorangan dan alamat kantor untuk Perusahaan/lembaga.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Alamat	Pengisian
1	Bpk. Udjang tinggal di Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Jalan Meruya Selatan	Jalan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat
2	Ibu Nadhifa tinggal di Bali, Jl. Pantai Mengiat, Benoa, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung	Jl. Pantai Mengiat, Benoa, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung. Bali

16. Kode_negara_domisili

- Kolom ini diisi dengan kode negara domisili sesuai dengan referensi negara ISO 3166-1 Alpha 2 Code.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Kode Negara Domisili	Pengisian
1	Bpk. Adiwena sebagai warga negara Indonesia	ID
2	Mr Park So Young sebagai warga negara Korea	KR

17. Kode_provinsi

- Kolom ini diisi sesuai dengan dua digit kode provinsi sesuai keputusan lembaga yang berwenang.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Kode Provinsi	Pengisian
1	Bapak Adiwena tinggal di Sumatera Selatan (kode:16)	16
2	Ibu Azella tinggal di Jawa Barat (kode:32)	32

18. Kode_kota

- Kolom ini diisi sesuai dengan empat digit kombinasi dari kode provinsi dan kode kota tanpa tanda hubung sesuai keputusan lembaga yang berwenang.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Kode Provinsi	Pengisian
1	Bapak Joko tinggal di kota Semarang (kode: 74)	3374
2	Ibu Susi tinggal di kota Depok (kode:76)	3276

19. No_telepon

- Kolom ini diisi dengan no telepon pribadi untuk perorangan dan no telepon kantor untuk Perusahaan/lembaga.
- Detail Pengisian:
 - Jika no telepon diisi dengan angka (beserta kode area);
 - Jika no handphone diisi dengan angka, beserta kode negara.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	No Telepon	Pengisian
1	PT Fintech XYZ mendaftarkan no telepon kantor	02129600000
2	Ibu Susi tinggal mendaftarkan no telepon selular	62811123123

20. Email

- a. Kolom ini diisi dengan email pribadi untuk perorangan dan email kantor untuk Perusahaan/lembaga.
- b. Kolom ini bersifat *optional* (dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	No Telepon	Pengisian
1	PT XYZ mendaftarkan email kantor	Admin@fintech_abc.com
2	Ibu Anandhita tinggal mendaftarkan email pribadi	Anandhita@gmail.com

21. Kode_pekerjaan

- a. Kolom ini diisi dengan 3(tiga) digit referensi kode pekerjaan sebagai berikut:

Kode	Nama
001	<i>Accounting/finance officer</i>
002	<i>Customer service</i>
003	<i>Engineering</i>
004	Eksekutif
005	Administrasi umum
006	Teknologi informasi
007	Konsultan/Analisis
008	<i>Marketing</i>
009	Pengajar (Guru, Dosen)
010	Militer
011	Pensiunan
012	Pelajar/Mahasiswa
013	Wiraswasta
014	Polisi
015	Petani
016	Nelayan
017	Peternak
018	Dokter
019	Tenaga Medis (Perawat, Bidan, dan sebagainya)
020	Hukum (Pengacara, Notaris)
021	Perhotelan & restoran (Koki, Bartender, dan sebagainya)
022	Peneliti
023	Desainer

Kode	Nama
024	Arsitek
025	Pekerja seni (artis, musisi, pelukis, dan sebagainya)
026	Pengamanan
027	Pialang/Broker
028	Distributor
029	Transportasi udara (pilot, pramugari)
030	Transportasi laut (nahkoda, anak buah kapal)
031	Transportasi darat (masinis, sopir, kondektur)
032	Buruh (buruh pabrik, buruh bangunan, buruh tani)
033	Pertukangan dan pengrajin (tukang kayu, pengrajin kulit, dan lain-lain)
034	Ibu rumah tangga
035	Pekerja informal (asisten rumah tangga, asongan, dll)
036	Pejabat negara/Penyelenggara negara
037	Pegawai pemerintahan/lembaga negara (selain pejabat/ Penyelenggara negara)
099	Lain-lain

- b. Kolom ini bersifat kondisional (harus diisi jika jenis Pengguna perorangan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Pekerjaan	Pengisian
1	Bpk. Tomi merupakan seorang pelajar di SMA XYZ (kode:012)	012
2	Bpk. Megat merupakan seorang pekerja kontraktor (kode:033)	033
3	Bpk. Adiwena merupakan pegawai swasta yang memiliki pekerjaan dibidang marketing	008

22. Kode_bidang_usaha_pekerjaan

- a. Kolom ini diisi dengan 6 (enam) digit kode sektor ekonomi bidang usaha Pengguna sebagaimana tercantum pada referensi kode sektor ekonomi.
- b. Kolom ini bersifat kondisional (harus diisi jika jenis Pengguna perorangan dan kode pekerjaan selain pelajar/mahasiswa).
- c. Contoh pengisian data:

No	Pekerjaan	Pengisian
1	Bpk. Tomi merupakan seorang pelajar di SMA XYZ	Kolom dikosongkan
2	Bpk. Megat merupakan seorang pekerja kontraktor rumah tinggal lainnya.	410119

23. Kode_pendapatan

- a. Kolom ini diisi 1(satu) digit kode sesuai dengan kode pendapatan sebagai berikut:

Kode	Nama
1	<Rp 2.000.001
2	Rp. 2.000.001 - Rp 5.000.000
3	Rp. 5.000.001 - Rp 7.500.000
4	Rp. 7.500.001 - Rp 10.000.000
5	Rp. 10.000.001 - Rp 15.000.000
6	Rp. 15.000.001 - Rp 20.000.000
7	Rp. 20.000.001 - Rp 50.000.000
8	> Rp 50.000.000

- b. Kolom ini bersifat kondisional (harus diisi jika jenis Pengguna perorangan).

- c. Contoh pengisian data:

No	Pekerjaan	Pengisian
1	Bpk. Tomi merupakan seorang pelajar di SMA XYZ memiliki sumber penghasilan dari uang pemberian orang tua sebesar Rp1.500.000	1
2	Bpk. Megat merupakan seorang pekerja kontraktor mengaku memiliki pendapatan sebesar Rp4.800.000	2

24. Kode_sumber_penghasilan

- a. Kolom ini diisi dengan satu digit kode kode sumber penghasilan sesuai referensi sebagai berikut:

Kode	Nama
1	Gaji
2	Usaha
3	Lainnya

- b. Kolom ini bersifat kondisional (harus diisi jika jenis Pengguna perorangan).

- c. Contoh pengisian data:

No	Pekerjaan	Pengisian
1	Bpk. Tomi memiliki sumber penghasilan dari uang pemberian orang tua	3
2	Bpk. Megat merupakan seorang pekerja kontraktor memiliki sumber penghasilan dari Gaji bulanan	1

25. Kode_tingkat_pendidikan

- a. Kolom ini diisi dengan kode tingkat Pendidikan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

Kode	Nama
00A	SD

Kode	Nama
00B	SMP
00C	SMA
01	Diploma 1
02	Diploma 2
03	Diploma 3
04	S-1
05	S-2
06	S-3
99	Lainnya (Tidak Sekolah)

- b. Diisi jika jenis_Pengguna=1 (perorangan).
- c. Kolom ini bersifat kondisional (harus diisi jika jenis Pengguna perorangan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Pekerjaan	Pengisian
1	Bpk. Tomi memiliki Pendidikan saat ini SMA	00C
2	Bpk. Megat merupakan seorang pekerja kontraktor memiliki Pendidikan terakhir Diploma 3	03
3	Tidak bersekolah	99
4	Lembaga	Kolom dikosongkan

26. Kode_hubungan_dengan_Penyelenggara

- a. Kolom ini diisi dengan kode hubungan dengan Penyelenggara, sesuai dengan referensi sebagai berikut:

Kode	Hubungan_dengan_Penyelenggara
	Terkait dengan Pelapor Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Penyelenggara, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.
110	Perusahaan Induk Entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas, sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.
120	Perusahaan Anak Entitas yang dikendalikan oleh entitas Induk, sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.
130	Perusahaan Asosiasi Perusahaan dimana Penyelenggara memiliki pengaruh signifikan sesuai standar akuntansi keuangan tentang investasi pada entitas asosiasi.
140	<i>Sister company</i> Perusahaan Terelasi (<i>sister company</i>) adalah beberapa Perusahaan lain yang terpisah secara kelembagaan dan/atau

Kode	Hubungan_dengan_Penyelenggara
	secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama dengan Penyelenggara.
150	Terkait Lainnya Individu atau badan hukum selain perusahaan induk, perusahaan anak, perusahaan asosiasi, dan sister company.
9900	Tidak terkait dengan Pelapor Pihak yang tidak termasuk sebagai pihak terkait dengan Penyelenggara.

- b. Diisi jika isBorrower=True
- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Hubungan dengan Penyelenggara	Pengisian
1	PT XYZ merupakan holding company dari PT Fintech XYZ (Penyelenggara sebagai pelapor)	110
2.	Bpk. Joko Irianto merupakan Direktur Utama dari PT ABC merupakan sister company dari PT Fintech ABC	150
3.	Ibu Aleesha merupakan seorang pegawai yang tidak memiliki keterhubungan dengan Penyelenggara (sebagai pelapor)	9900

27. Kode_status_perkawinan

- a. Kolom ini diisi dengan referensi status perkawinan:

Kode	Nama
1	Kawin
2	Belum Kawin
3	Cerai

- b. Diisi jika isBorrower=True dan jenis_Pengguna=1 (perorangan).
- c. Kolom ini bersifat *conditional* (harus diisi jika jenis Pengguna perorangan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Status perkawinan	Pengisian
1	Bpk. Megat memiliki status perkawinan sudah menikah	1
2	Ibu Syarra memiliki status perkawinan belum menikah	2

28. Nama_kontak_darurat

- a. Kolom ini diisi dengan nama kontak darurat.
- b. Diisi jika isBorrower=True.
- c. Kolom ini bersifat *conditional* (harus diisi jika jenis Pengguna perorangan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Nama kontak darurat	Pengisian
1	Pada dokumen identitas tertulis nama kontak darurat "Tomi Joko Irianto, SE, MM." ("SE" dan "MM" adalah gelar pendidikan)	Tomi Joko Irianto
2	Pada dokumen identitas kontak darurat tertulis nama Debitur "H. Farhan" ("H" adalah gelar keagamaan)	Farhan

29. No_telp_seluler_kontak_darurat

- Kolom ini diisi dengan no telepon seluler kontak darurat.
- Diisi jika isBorrower=True.
- Kolom ini bersifat *conditional* (harus diisi jika jenis Pengguna perorangan).
- Contoh pengisian data:

No	No Telepon seluler kontak darurat	Pengisian
1	Ibu Suci tinggal mendaftarkan no telepon selular	62811123123

30. Kode_status_kepemilikan_rumah

- Kolom ini diisi dengan kode status kepemilikan rumah, sesuai dengan referensi sebagai berikut:

Kode	Nama
1	Memiliki Rumah Sendiri
2	Tidak Memiliki Rumah Sendiri

- Diisi jika isBorrower=True dan jenis_Pengguna=1 (perorangan).
- Kolom ini bersifat *conditional* (harus diisi jika jenis Pengguna perorangan).
- Contoh pengisian data:

No	Status kepemilikan rumah	Pengisian
1	Rumah tinggal kepemilikan pribadi	1
2	Tinggal bersama orang tua	2
3	Rumah tinggal atas nama orang lain (kontrak)	2

31. Kode_bentuk_badan_usaha

- Kolom ini diisi dengan 2 (dua) kode bentuk badan usaha, sesuai dengan referensi sebagai berikut:

Kode	Nama
01	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
02	Commanditer Venotschap (CV)
03	Debitur Kelompok
08	Koperasi
18	Perseroan Terbatas
21	Usaha Dagang
23	Yayasan
99	Lainnya

- b. Diisi jika jenis Pengguna = lembaga.
- c. Kolom ini bersifat *conditional*.
- d. Contoh pengisian data:

No	Bentuk badan usaha	Pengisian
1	Perusahaan XYZ diklasifikasikan sebagai Perseroan terbatas bertindak sebagai <i>Lender</i>	18
2	Perusahaan ABC diklasifikasikan sebagai CV serta bertindak sebagai <i>Borrower</i>	02
3	Bpk Park Dylan sebagai <i>Borrower</i> perorangan	Dikosongkan

32. No_akta_perubahan_terakhir_lembaga

- a. Kolom ini diisi dengan kode bentuk badan usaha.
- b. Diisi jika jenis Pengguna = lembaga.
- c. Kolom ini bersifat kondisional.
- d. Contoh pengisian data:

No	No Akta Perubahan Terakhir	Pengisian
1	PT Fintech ABC memiliki no akta terakhir adalah "ABC12345"	ABC12345

33. Tanggal_akta_perubahan_terakhir_lembaga

- a. Kolom ini diisi dengan kode bentuk badan usaha.
- b. Diisi jika jenis Pengguna = lembaga.
- c. Kolom ini bersifat kondisional.
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Akta Perubahan Terakhir	Pengisian
1	PT Fintech ABC melakukan perubahan akta tanggal 3 Maret 2023	20230303

34. Total_aset

- a. Kolom ini diisi dengan total aset dalam rupiah penuh untuk Perorangan atau Perusahaan/lembaga.
- b. Kolom ini bersifat *optional* (dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Total Aset	Pengisian
1	PT Fintech XYZ memiliki Aset 10 Miliar Rupiah	10000000000
2	Ibu Susi memiliki aset 200 Juta Rupiah	200000000
3	Bpk Dariel memiliki aset 1 Miliar Rupiah	1000000000

35. Keterangan

- a. Kolom ini diisi dengan keterangan yang dapat disampaikan pada laporan Pengguna.
- b. Kolom ini bersifat *optional* (dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Keterangan	Pengisian
1	Tidak ada keterangan	Dapat dikosongkan

36. Tanggal *update* data Pengguna terakhir

- a. Kolom ini diisi dengan Tanggal *update* data Pengguna terakhir sesuai data di *core system* Penyelenggara dalam format WIB.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Waktu Diubah Disistem	Pengisian
1	<i>Update</i> data laporan terakhir YYYY-MM-DD hh:mm:ss	2023-03-14 22:03:00

BAB III LAPORAN PRODUK

1. Kode_Penyelenggara

- a. Kode ini diisikan dengan Kode_Penyelenggara yang diberikan oleh OJK untuk Penyelenggara sebagai Pelapor.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Penyelenggara	Pengisian
1	Laporan disampaikan oleh Penyelenggara Konvensional	810001
2	Laporan disampaikan oleh Penyelenggara Syariah	810028

2. Kode_produk

- a. Kolom ini diisi dengan kode pencatatan produk di sistem Penyelenggara.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak boleh dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode produk	Pengisian
1	Kode produk XYZ-PR-01	XYZ-PR-01
2	Kode Produk ABC-CL-01	ABC-CL-01

3. Nama_produk

- a. Kolom ini diisi dengan nama produk di sistem Penyelenggara.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak boleh dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nama produk	Pengisian
1	Nama produk Usaha Maju	Usaha Maju
2	Nama produk Uang Mepet	Uang Mepet

4. Kode_akad_pendanaan

- a. Kolom ini diisi dengan kode akad pendanaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

Kode	Nama
00	Konvensional pendanaan atau pembiayaan yang disalurkan dengan skema konvensional.
99	Syariah

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak boleh dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Akad pendanaan	Pengisian
1	Produk Usaha Maju diklasifikasi sebagai produk produktif memiliki akan pendanan Syariah (kode:99)	99
2	Produk Uang Mepet diklasifikasi sebagai produk <i>cash loan</i> memiliki akan pendanan Syariah (kode:00)	00

5. Kode_jenis_Penggunaan

- a. Kolom ini diisi dengan kode jenis penggunaan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

Kode	Nama
1	Produktif Pendanaan produktif antara lain <i>invoice financing</i> , pengadaan barang pesanan (<i>purchase order</i>), pengadaan barang untuk jualan secara daring (<i>seller online</i>), fasilitas modal usaha, atau Pendanaan proyek
3	Konsumtif Pendanaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh Penerima Dana untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak boleh dikosongkan).

- c. Contoh pengisian data:

No	Jenis Penggunaan	Pengisian
1	Produk Usaha Maju dari PT Fintech XYZ diklasifikasi sebagai produk untuk bidang produktif	1
2	Produk Uang Mepet dari PT Fintech ABC diklasifikasi sebagai produk <i>cash loan</i>	3

6. is_bermitra

- a. Kolom diisi dengan status kemitraan sebuah produk pendanaan. Jika memiliki mitra maka diisi dengan TRUE, sebaliknya jika tidak bermitra diisi dengan FALSE.

- b. Mitra adalah bentuk kerja sama dengan LJK / non-LJK (seperti *e-commerce* atau *platform* digital lainnya).

- c. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak boleh dikosongkan).

- d. Contoh pengisian data:

No	bekerja sama dengan mitra	Pengisian
1	Produk Usaha Maju dari PT Fintech XYZ bekerja sama dengan Bank ABC	TRUE
3	Produk XYZ Bersama dari PT Fintech XYZ merupakan produk yang melibatkan <i>Lender</i> umum dan tidak bekerja sama dengan pihak ketiga	FALSE

7. is_LJK

- a. Kolom diisi dengan status memiliki mitra LJK produk pendanaan. Jika memiliki mitra LJK maka diisi dengan TRUE, sebaliknya jika bermitra non LJK diisi dengan FALSE.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak boleh dikosongkan).

- c. Contoh pengisian data:

No	bekerja sama dengan LJK	Pengisian
1	Produk Usaha Maju dari PT Fintech XYZ bekerja sama dengan Bank ABC (LJK)	TRUE
2	Produk Uang Mepet dari PT Fintech ABC bekerja sama dengan PT QCY (non LJK)	FALSE

No	bekerja sama dengan LJK	Pengisian
3	Produk XYZ Bersama dari PT Fintech XYZ merupakan produk yang melibatkan <i>Lender</i> umum dan tidak bekerja sama dengan pihak ketiga (tidak terafiliasi)	FALSE

8. Nama_mitra

- Kolom ini diisi dengan nama mitra.
- Kolom ini bersifat kondisional (tidak boleh dikosongkan jika *is_bermitra* berisi TRUE).
- Contoh pengisian data:

No	Nama mitra	Pengisian
1	Produk Usaha Maju dari PT Fintech XYZ bekerja sama dengan Bank ABC (LJK)	Bank ABC
2	Produk Uang Mepet dari PT Fintech ABC bekerja sama dengan PT QCY (non LJK)	PT QCY
3	Produk XYZ Bersama dari PT Fintech XYZ merupakan produk yang melibatkan <i>Lender</i> umum dan tidak bekerja sama dengan pihak ketiga (tidak terafiliasi)	kolom dikosongkan

9. No_surat_perjanjian_kerja_sama

- Kolom ini diisi no surat perjanjian kerja sama dengan mitra produk
- Kolom ini bersifat kondisional (tidak boleh dikosongkan jika *is_bermitra* berisi TRUE).
- Contoh pengisian data:

No	No surat perjanjian kerja sama	Pengisian
1	Produk Usaha Maju dari PT Fintech XYZ bekerja sama dengan Bank ABC (LJK) dengan nomor perjanjian kerja sama PK_XYZ_2023_01	PK_XYZ_2023_01
2	Produk Uang Mepet dari PT Fintech ABC bekerja sama dengan PT QCY (non LJK) dengan nomor perjanjian kerja sama PK_ABC_2023_01	PK_ABC_2023_01
3	Produk XYZ Bersama dari PT Fintech XYZ merupakan produk yang melibatkan <i>Lender</i> umum dan tidak bekerja sama dengan pihak ketiga (tidak terafiliasi)	kolom dikosongkan

10. Teknologi_yang_digunakan

- kolom ini diisi teknologi yang digunakan dalam kerja sama dengan mitra produk.
- Kolom ini bersifat kondisional (tidak boleh dikosongkan jika *is_bermitra* berisi TRUE).
- Contoh pengisian data:

No	Teknologi yang digunakan	Pengisian
1	Produk Usaha Maju dari PT Fintech XYZ bekerja sama dengan Bank ABC (LJK) dengan nomor perjanjian kerja sama PK_XYZ_2023_01 dengan teknologi API	API

No	Teknologi yang digunakan	Pengisian
2	Produk Uang Mepet dari PT Fintech ABC bekerja sama dengan PT QCY (non LJK) dengan nomor perjanjian kerja sama PK_ABC_2023_01 dengan teknologi <i>Web Services</i>	<i>Web Services</i>
3	Produk XYZ Bersama dari PT Fintech XYZ merupakan produk yang melibatkan <i>Lender</i> umum dan tidak bekerja sama dengan pihak ketiga (tidak terafiliasi)	kolom dikosongkan

11. Tanggal_awal_perjanjian

- kolom ini diisi tanggal awal perjanjian kerja sama dengan mitra produk.
- Kolom ini bersifat kondisional (tidak boleh dikosongkan jika `is_bermitra` berisi TRUE).
- Contoh pengisian data:

No	Tanggal awal perjanjian	Pengisian
1	Produk Usaha Maju dari PT Fintech XYZ bekerja sama dengan Bank ABC (LJK) tanggal awal perjanjian 1 Januari 2023	2023-01-01
2	Produk Uang Mepet dari PT Fintech ABC bekerja sama dengan PT QCY (non LJK) tanggal awal perjanjian 27 April 2023	2023-04-27

12. Tanggal_akhir_perjanjian

- Kolom ini diisi tanggal akhir perjanjian kerja sama dengan mitra produk.
- Kolom ini bersifat kondisional (tidak boleh dikosongkan jika `is_bermitra` berisi TRUE).
- Contoh pengisian data:

No	Tanggal akhir perjanjian	Pengisian
1	Produk Usaha Maju dari PT Fintech XYZ bekerja sama dengan Bank ABC (LJK) tanggal akhir perjanjian 31 Desember 2023	2023-12-31
2	Produk Uang Mepet dari PT Fintech ABC bekerja sama dengan PT QCY (non LJK) tanggal awal perjanjian 27 April 2023	2023-04-27

13. Tanggal_waktu_launching_produk

- Kolom ini diisi tanggal waktu *launching* produk dapat diakses oleh *Lender* dan *Borrower* disampaikan dalam Waktu Indonesia Barat (WIB).
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak boleh dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Tanggal waktu <i>launching</i> produk	Pengisian
1	Produk Usaha Maju dari PT Fintech XYZ bekerja sama dengan Bank ABC (LJK) tanggal waktu <i>launching</i> produk 1 Februari 2023 pukul 00:00:01 WIB	2023-02-01 00:00:01

No	Tanggal waktu <i>launching</i> produk	Pengisian
2	Produk Uang Mepet dari PT Fintech ABC bekerja sama dengan PT QCY (non LJK) tanggal awal perjanjian 27 April 2023 pukul 09:00:00 WIT	2023-04-27 07:00:00

14. Tanggal_Waktu_Penutupan_Produk

- Kolom ini diisi tanggal waktu penutupan produk disampaikan dalam Waktu Indonesia Barat (WIB).
- Kolom ini bersifat kondisional (tidak boleh dikosongkan jika is_aktif diisi dengan FALSE).
- Contoh pengisian data:

No	Tanggal Waktu Penutupan Produk	Pengisian
1	Produk Usaha Maju dari PT Fintech XYZ bekerja sama dengan Bank ABC (LJK) tanggal waktu penutupan produk 31 Desember 2023 pukul 23:59:59 WIB	2023-12-31 23:59:59
2	Produk Uang Mepet dari PT Fintech ABC bekerja sama dengan PT QCY (non LJK) tanggal penutupan produk 27 April 2023 pukul 08:59:59 WITA	2023-04-27 07:59:59

15. is_aktif

- Kolom ini diisi dengan status produk. Jika produk masih aktif dan digunakan maka isi dengan TRUE, jika sudah tidak digunakan maka isi dengan FALSE.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak boleh dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	status produk	Pengisian
1	Status produk aktif	TRUE
2	Status produk tidak aktif	FALSE

16. Keterangan

- Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait produk yang dilaporkan.
- Kolom ini bersifat *optional* (dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Keterangan	Pengisian
1	Produk memiliki izin ojk dengan nomor S-1/P.01/2023	Surat Izin OJK nomor: S-1/P.01/2023
2	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	kolom dikosongkan

BAB IV LAPORAN PENDANAAN

1. Kode_Penyelenggara

- a. Kode ini diisikan dengan Kode_Penyelenggara yang diberikan oleh OJK untuk Penyelenggara sebagai Pelapor.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Penyelenggara	Pengisian
1	Laporan disampaikan oleh Penyelenggara Konvensional	810001
2	Laporan disampaikan oleh Penyelenggara Syariah	810028

2. Kode_Pendanaan_Sistem

- a. Kolom ini diisi dengan kode pendanaan pada sistem Penyelenggara.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian:

No	Kode Pendanaan Sistem	Pengisian
1	Pada sistem Penyelenggara PT Fintech XYZ kode pendanaan tercatat XYZ-SL-20230301-000001	XYZ-SL-20230301-000001
2	Pada sistem Penyelenggara PT Fintech ABC kode pendanaan tercatat PRABC_20230301_000023	PRABC_20230301_000023

3. Kode_Transaksi_Sistem

- a. Kolom ini diisi dengan kode pencatatan transaksi pendanaan yang mewakili satu waktu transaksi antara *Lender* dan *Borrower* pada sistem Penyelenggara.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian:

No	kode transaksi sistem	Pengisian
1	Pada sistem Penyelenggara PT Fintech XYZ kode transaksi antara <i>Lender</i> Suherman Santoso (mendanai Rp700.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1000000) dan <i>Borrower</i> Bpk. Tomi tercatat XYZ-SL-TR-20230301-1002	XYZ-SL-TR-20230301-1002
2	Pada sistem Penyelenggara PT Fintech XYZ kode transaksi antara <i>Lender</i> Rianto Anggoro (mendanai Rp300.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1000000) dan <i>Borrower</i> Bpk. Tomi tercatat XYZ-SL-TR-20230301-1003	XYZ-SL-TR-20230301-1003

4. Kode_Pengguna_Borrower_Sistem

- a. Kolom ini diisi dengan kode *Borrower* yang sudah didaftarkan sebelumnya di laporan Pengguna pada *field* *ikode_Pengguna_sistem*.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Pengguna <i>Borrower</i> Sistem	Pengisian
1	PT XYZ dicatat sebagai <i>Borrower</i> pada Fintech ABC	PA0001

5. Kode_Pengguna_Lender_Sistem

- a. Kolom ini diisi dengan kode *Lender* yang sudah didaftarkan sebelumnya di laporan Pengguna pada *field* *kode_Pengguna_sistem*
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Pengguna <i>Lender</i> Sistem	Pengisian
1	PT ABC dicatat sebagai <i>Lender</i> pada Fintech ABC	PA0001

6. Tanggal_Waktu_Pengajuan_Pendanaan

- a. Kolom ini diisi dengan Tanggal waktu pengajuan pendanaan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Waktu Pengajuan Pendanaan	Pengisian
1	Tanggal 12 Maret 2023	2023-03-12

7. Kode_Produk_Pendanaan

- a. Kolom ini diisi dengan Kode produk pendanaan yang ada di Laporan Produk Pendanaan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Produk Pendanaan	Pengisian
1	Fintech ABC memiliki Produk konsumtif	Mul1234
2	Fintech XYZ memiliki Produk Cashloan	Cashloan

8. No_Surat_Perjanjian_Borrower_dengan_Lender

- a. Kolom ini diisi dengan nomor surat perjanjian antara *Borrower* dengan *Lender* bisa berupa karakter/angka/kombinasi keduanya.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	No Surat Perjanjian <i>Borrower</i> dengan <i>Lender</i>	Pengisian
1	Surat perjanjian XXY1234	XXY1234
2	Surat perjanjian 1234567	1234567

9. Tanggal_Waktu_Perjanjian_Borrower_dengan_Lender

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal beserta waktu surat perjanjian antara *Borrower* dengan *Lender*.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Surat Perjanjian <i>Borrower</i> dengan <i>Lender</i>	Pengisian
1	Tanggal 12 April 2023	2023-04-12 12:00:34

10. *No_Surat_Perjanjian_Lender_dengan_Penyelenggara*
- Kolom ini diisi dengan nomor surat perjanjian antara *Lender* dengan *Penyelenggara* bisa berupa karakter/angka/kombinasi keduanya.
 - Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
 - Contoh pengisian data:

No	No Surat Perjanjian <i>Borrower</i> dengan <i>Lender</i>	Pengisian
1	Surat perjanjian XXY1234	XXY1234

11. *Tanggal_Waktu_Perjanjian_Lender_dengan_Penyelenggara*
- Kolom ini diisi dengan tanggal beserta waktu surat perjanjian antara *Lender* dengan *Penyelenggara*.
 - Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
 - Contoh pengisian data:

No	Tanggal Surat Perjanjian <i>Lender</i> dengan <i>Penyelenggara</i>	Pengisian
1	Tanggal 12 April 2023	2023-04-12 17:10:30

12. *Is_Agunan*
- Kolom ini diisi dengan nilai *true* atau *false* untuk agunan yang dimiliki
 - Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
 - Contoh pengisian data:

No	Is Agunan	Pengisian
1	<i>Borrower</i> ABC tidak memiliki Agunan	<i>False</i>
2	<i>Borrower</i> CDE memiliki Agunan	<i>True</i>

13. *Kode_Jenis_Agunan*
- Kolom ini diisi dengan kode jenis agunan, sesuai dengan referensi sebagai berikut:

Kode	Nama
001	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
002	Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
003	Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)
004	Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) dalam Valuta Asing
005	Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
006	Surat Perbendaharaan Negara Syariah
007	Reksadana
008	Sertifikat Reksadana Syariah
009	Reksadana Dana Pendapatan Tetap
010	Obligasi Negara (ON)

Kode	Nama
011	Obligasi Ritel Indonesia (ORI)
012	Obligasi Daerah
013	Sukuk Bank Indonesia
014	Sukuk Negara
015	Sukuk Ritel
016	Sukuk Lainnya
017	Ijarah <i>Fixed Rate</i>
018	Resi Gudang
019	Saham
020	Asuransi pendanaan/Pembiayaan
021	Surat Berharga Lainnya
022	Giro
023	Tabungan
024	Deposito
025	Setoran Jaminan
026	Emas dan mata uang emas
027	L/C
028	SKBDN
029	Garansi
030	Tanah
031	Gedung/Ruang kantor
032	Gudang
033	Rumah Toko/Rumah Kantor
034	Hotel
035	Properti Komersial Lainnya
036	Rumah
037	Apartemen/Rumah Susun
038	Mesin
039	Kendaraan
040	Aset Tetap dan Inventaris Lainnya
041	Pesawat Udara
042	Kapal Laut/Transportasi Air
043	Persediaan
091	<i>Invoice</i>
099	Lainnya

- b. Agunan yang dilaporkan merupakan agunan yang memiliki nilai terbesar dari agunan lainnya (jika ada).
- c. Diisi jika is Agunan = *True*.
- d. Kolom ini bersifat kondisional.
- e. Contoh pengisian data:

No	Agunan	Pengisian
1	Agunan yang digunakan dalam sebuah pendanaan adalah sebidang tanah yang akan digunakan untuk semua transaksi	030
2	Agunan yang digunakan adalah <i>invoice</i> dari pekerjaan yang akan didanai dari permintaan pendanaan	099
3	Pendanaan tidak memiliki agunan	Kolom dikosongkan

14. Kode_Perikatan_Agunan

- a. Kolom ini diisi dengan kode perikatan agunan, sesuai dengan referensi sebagai berikut:

Kode	Perikatan Agunan
01	Hak Tanggungan Penjaminan atas barang tidak bergerak dan/atau barang-barang yang ditentukan oleh pemerintah yang diserahkan Debitur kepada Pelapor sebagai jaminan atas fasilitas pendanaan yang diberikan kepada Debitur.
02	Gadai Hak tanggungan atas barang bergerak yang diserahkan Debitur kepada Pelapor, yang sifat barang jaminan ini lepas dari kekuasaan Debitur.
03	Fidusia Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.
04	Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Surat kuasa untuk membebankan hak jaminan yang berupa hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.
05	Cessie Cessie Cara penyerahan barang sebagai jaminan piutang dari Pelapor kepada pihak ketiga. Dalam proses penyerahan ini harus dilakukan dengan pembuatan akta, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan yang menegaskan tentang pengalihan tersebut dan pengalihan ini harus berdasarkan persetujuan dari Debitur bersangkutan.
06	Belum Diikat
99	Lainnya

- b. Diisi jika is Agunan = *True*.
c. Kolom ini bersifat kondisional.
d. Contoh pengisian data:

No	Pengikatan Agunan	Pengisian
1	Agunan diikat dengan <i>cessie</i>	05
2	Agunan belum diikat	06

15. Tanggal_Perikatan_Agunan

- Kolom ini diisi dengan tanggal perikatan agunan dalam format WIB.
- Diisi jika is Agunan = *True*.
- Kolom ini bersifat kondisional.
- Contoh pengisian data:

No	Tanggal Perikatan Agunan	Pengisian
1	Agunan tanggal 14 Maret 2023 pukul 21:22 WIB	2023-03-14
2	Agunan tanggal 15 Maret 2023 pukul 01:22 WIT	2023-03-14

16. Nama_Pemilik_Agunan

- Kolom ini diisi dengan nama pemilik agunan.
- Diisi jika is Agunan = *True*.
- Kolom ini bersifat kondisional.
- Contoh pengisian data:

No	Nama Pemilik Agunan	Pengisian
1	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur "Tomi Joko, SE. MM." ("SE" dan "MM" adalah gelar pendidikan)	Tomi Joko
2	Pada dokumen identitas tertulis nama Debitur "Hj. Suci" ("H" adalah gelar keagamaan)	Suci

17. Nomor_Agunan

- Kolom ini diisi dengan nomor agunan, seperti (BPKP/ sertifikat tanah/ dan lain-lain) yang dijadikan agunan oleh *Borrower*.
- Diisi jika is Agunan = *True*.
- Kolom ini bersifat kondisional.
- Contoh pengisian data:

No	Nomor Agunan	Pengisian
1	No Agunan yang tercatat ABCD1234	ABCD1234

18. Nilai_Agunan

- Kolom ini diisi dengan nilai agunan.
- Diisi jika is Agunan = *True*.
- Kolom ini bersifat kondisional.
- Contoh pengisian data:

No	Nilai Agunan	Pengisian
1	Agunan rumah dinilai 1 Miliar Rupiah	1000000000
2	Agunan invoice senilai Rp5 Miliar Rupiah	5000000000

19. Tanggal_Penilaian_Agunan

- Kolom ini diisi dengan tanggal penilaian agunan dalam format WIB.
- Diisi jika is Agunan = *True*.

- c. Kolom ini bersifat kondisional (boleh dikosongkan).
- d. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Penilaian Agunan	Pengisian
1	Agunan tanggal 14 Maret 2023 pukul 21:22 WIB	2023-03-14
2	Agunan tanggal 15 Maret 2023 pukul 01:22 WIT	2023-03-14

20. Is_Asuransi

- a. Kolom ini diisi dengan nilai *true* atau *false* untuk asuransi yang digunakan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Is Asuransi	Pengisian
1	<i>Borrower</i> ABC tidak menggunakan asuransi	False
2	<i>Borrower</i> CDE menggunakan asuransi	True

21. Nama_Asuransi

- a. Kolom ini diisi dengan nama asuransi.
- b. Diisi jika is Agunan = *True*.
- c. Kolom ini bersifat kondisional.
- d. Contoh pengisian data:

No	Nama Asuransi	Pengisian
1	<i>Lender</i> menggunakan Asuransi Kredit PT Asuransi ABC	Asuransi ABC

22. Rating_Pengajuan_Pendanaan

- a. Kolom ini diisi dengan rating pengajuan pendanaan berdasarkan hasil *credit scoring* yang dihasilkan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Rating Pengajuan Pendanaan	Pengisian
1	PT Makmur Sejahtera atas pengajuan pendanaan diberikan rating Kredit A+	A+
2	Bpk. Adiwena atas pengajuan pendanaan yang diajukan diberikan angka 500 dari skala 600.	500

23. Nilai_Pengajuan_Pendanaan

- a. Kolom ini diisi dengan nilai pendanaan yang diajukan oleh *Borrower*.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nilai Pengajuan Pendanaan	Pengisian
1	<i>Borrower</i> ABC mengajukan pendanaan 2 Miliar Rupiah	2000000000

24. Plafon_Pendanaan

- a. Kolom ini diisi dengan plafon pendanaan yang disetujui untuk *Borrower*.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Plafon Pendanaan	Pengisian
1	<i>Borrower</i> ABC diberikan plafon 1,5 Miliar Rupiah	1500000000

25. Kode_Sektor_Ekonomi_Pendanaan

a. Kolom ini diisi dengan kode sektor ekonomi pendanaan.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Sektor Ekonomi Pendanaan	Pengisian
1	Pendanaan diperuntukkan untuk membayar uang sekolah. Maka diklasifikasikan sebagai A.4.8.RUMAH TANGGA UNTUK KEPERLUAN MULTIGUNA LAINNYA dengan kode 004190	004190
2	Pendanaan digunakan untuk usaha peternakan sapi potong Maka diklasifikasikan sebagai - PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG kode 014110	014110

26. Tenor_Hari

a. Kolom ini diisi dengan tenor hari.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Tenor Hari	Pengisian
1	<i>Borrower</i> ABC diberikan tenor 15 hari	15
2	<i>Borrower</i> XYX diberikan tenor 1 bulan atas pencairan dana dibulan maret 2023	31

27. Bunga(%)

a. Kolom ini diisi dengan besaran bunga yang disepakati oleh *Lender* dan *Borrower*.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Tenor Hari	Pengisian
1	<i>Borrower</i> ABC diberikan bunga 0,27% perhari	0.27
2	<i>Borrower</i> XYX diberikan bunga 24,32% per tahun	24.32

28. Satuan_waktu

a. Kolom ini diisi dengan satuan waktu sesuai dengan referensi sebagai berikut:

Kode	Nama
1	Hari
2	Minggu
3	Bulan
4	Triwulan
5	Semester

Kode	Nama
6	Tahun

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nilai cicilan	Pengisian
1	Bunga tertulis dalam jangka waktu 2 minggu	2
2	Bunga tertulis dalam jangka waktu bulanan	3

29. Sandi_Bank_EA

- a. Kolom ini diisi dengan Sandi Bank *Escrow Account* yang digunakan Penyelenggara sesuai dengan referensi bank.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Bank <i>Escrow Account</i>	Pengisian
1	<i>Escrow Account</i> menggunakan Bank Mandiri	008
2	<i>Escrow Account</i> menggunakan Bank BCA	014

30. No_EA

- a. Kolom ini diisi dengan Nomor *Escrow Account* yang digunakan Penyelenggara.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nomor <i>Escrow Account</i>	Pengisian
1	Nomor EA dengan nomor 03340000321	03340000321
2	Nomor EA dengan nomor 90330030011	90330030011

31. Nama_lembaga_Pencairan

- a. Kolom ini diisi dengan Nama Bank yang dikeluarkan oleh Sistem Pembayaran.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Lembaga pencairan	Pengisian
1	Bpk. Goldion menggunakan rekening Bank XYX sebagai Lembaga pencairan	Bank XYZ
2	Bpk. Adiwena menggunakan Rekening Bank ABC sebagai Lembaga pencairan	Bank ABC

32. Tanggal_Waktu_Pencairan

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal waktu pencairan dalam format WIB.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Waktu Pencairan	Pengisian
1	<i>Borrower</i> ABC menerima pencairan dana 14 Maret 2023 pukul 21:22 WIB	2023-03-14 21:22:10

33. Nilai_Pencairan_Pendanaan

- a. Kolom ini diisi dengan nilai pencairan pendanaan.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Nilai Pencairan Pendanaan	Pengisian
1	<i>Borrower</i> ABC diberikan dana 1,5 Miliar Rupiah	1500000000

34. Tanggal_Jatuh_Tempo_Pendanaan

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo pendanaan dalam format WIB.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Tanggal Jatuh Tempo Pendanaan	Pengisian
1	<i>Borrower</i> ABC jatuh tempo 14 Maret 2023	2023-03-14

35. Keterangan

- a. Kolom ini diisi dengan keterangan tambahan yang dapat disampaikan pada laporan pendanaan.
- b. Kolom ini bersifat *optional* (dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Keterangan	Pengisian
1	Terdapat pengkinian nilai agunan dari pendanaan	pengkinian nilai agunan karena perubahan nilai
2	Tidak ada keterangan tambahan	Kolom dikosongkan

BAB V LAPORAN PEMBAYARAN PENDANAAN

1. Kode_Penyelenggara

- Kode ini diisikan dengan Kode_Penyelenggara yang diberikan oleh OJK untuk Penyelenggara sebagai Pelapor.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Kode Penyelenggara	Pengisian
1	Laporan disampaikan oleh Penyelenggara Konvensional	810001
2	Laporan disampaikan oleh Penyelenggara Syariah	810028

2. Kode_Pendanaan_Sistem

- Kolom ini diisi dengan kode pencatatan pendanaan pada sistem Penyelenggara.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian:

No	Kode Pendanaan Sistem	Pengisian
1	Pada sistem Penyelenggara PT Fintech XYZ kode pendanaan tercatat XYZ-SL-20230301-000001	XYZ-SL-20230301-000001
2	Pada sistem Penyelenggara PT Fintech ABC kode pendanaan tercatat PRABC_20230301_000023	PRABC_20230301_000023

3. Kode_Transaksi_Sistem

- Kolom ini diisi dengan kode pencatatan transaksi pendanaan yang mewakili satu waktu transaksi antara *Lender* dan *Borrower* pada sistem Penyelenggara.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian:

No	Kode Transaksi Sistem	Pengisian
1	Pada sistem Penyelenggara PT Fintech XYZ kode transaksi antara <i>Lender</i> Suherman Santoso (mendanai Rp700.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1000000) dan <i>Borrower</i> Bpk. Tomi tercatat XYZ-SL-TR-20230301-1002	XYZ-SL-TR-20230301-1002
2	Pada sistem Penyelenggara PT Fintech XYZ kode transaksi antara <i>Lender</i> Rianto Anggoro (mendanai Rp300.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1000000) dan <i>Borrower</i> Bpk. Tomi tercatat XYZ-SL-TR-20230301-1003	XYZ-SL-TR-20230301-1003

4. Kode_Pengguna_Borrower_sistem

- Kolom ini diisikan dengan kode_Pengguna_sistem bertindak sebagai *Borrower*.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Kode Pengguna <i>Borrower</i> Sistem	Pengisian
1	Bpk. Tomi terdaftar di PT Fintech XYZ dicatat berperan sebagai <i>Borrower</i> dengan kode PA0001	PA0001
2	Sdr. Megat terdaftar di PT Fintech ABC dicatat berperan sebagai <i>Borrower</i> dengan kode PABC0303	PABC0303

5. Kode_Pengguna_Lender_sistem

- Kolom ini diisi dengan kode_Pengguna_sistem bertindak sebagai *Lender*.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Kode Pengguna <i>Lender</i> Sistem	Pengisian
1	Sdr. Suherman Santoso terdaftar di PT Fintech XYZ dicatat berperan sebagai <i>Lender</i> dengan kode LP003	LP003
2	PT XYZ Sejahtera terdaftar di PT Fintech ABC dicatat berperan sebagai <i>Lender</i> dengan kode LABC0003	LABC0003

6. Cicilan_ke

- Kolom ini diisi dengan urutan cicilan yang dibayarkan oleh *Borrower* melalui Penyelenggara untuk selanjutnya diserahkan kepada *Lender*.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian:

No	Cicilan Ke	Pengisian
1	Bpk. Tomi membayar pendanaan XYZ-SL-20230301-000001 dengan transaksi (XYZ-SL-TR-20230301-1002) untuk <i>Lender</i> Suherman Santoso (mendanai Rp700.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1000000) sebesar Rp739.200 dengan tenor 14 hari yang merupakan cicilan ke 1 (<i>bullet payment</i>)	1
2	Megat membayar pendanaan PRABC_20230301_000023 dengan transaksi (PRABC_TR_0301000023_0002) untuk <i>Lender</i> PT XYZ Sejahtera (mendanai Rp1.000.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1.000.000) sebesar Rp103.000 dengan tenor 1 tahun cicilan ke 2.	2

7. Nilai_Pokok_Cicilan

- Kolom ini diisi dengan nilai pokok cicilan dibayarkan oleh *Borrower* melalui Penyelenggara untuk selanjutnya diserahkan kepada *Lender*.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian:

No	Cicilan Ke	Pengisian
1	Bpk. Tomi membayar pendanaan XYZ-SL-20230301-000001 dengan transaksi (XYZ-SL-	700000

No	Cicilan Ke	Pengisian
	TR-20230301-1002) untuk <i>Lender</i> Suherman Santoso (mendanaikan Rp700.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1000000) sebesar Rp739.200 dengan tenor 14 hari, dengan rincian nilai sebagai berikut: a. Nilai pokok Rp700.000 b. Nilai bunga Rp39.200 c. Nilai denda Rp0	
2	Megat membayar pendanaan PRABC_20230301_000023 dengan transaksi (PRABC_TR_0301000023_0002) untuk <i>Lender</i> PT XYZ Sejahtera (mendanaikan Rp1.000.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp100.000) sebesar Rp103.000 dengan tenor 1 tahun dengan rincian nilai sebagai berikut: a. Nilai pokok Rp100.000 b. Nilai bunga Rp3.000 c. Nilai denda Rp900(dikarenakan keterlambatan pembayaran 3 hari x 0,3 % per hari)	100000

8. Nilai_Bunga_Cicilan

- Kolom ini diisi dengan nilai bunga cicilan dibayarkan oleh *Borrower* melalui Penyelenggara untuk selanjutnya diserahkan kepada *Lender*.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian:

No	Nilai Bunga Cicilan	Pengisian
1	Bpk. Tomi membayar pendanaan XYZ-SL-20230301 dengan transaksi (XYZ-SL-TR-20230301-1002) untuk <i>Lender</i> Suherman Santoso (mendanaikan Rp700.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1000000) sebesar Rp739.200 dengan tenor 14 hari, dengan rincian nilai sebagai berikut: a. Nilai pokok Rp700.000 b. Nilai bunga Rp39.200 c. Nilai denda Rp0	39200
2	Megat membayar pendanaan PRABC_20230301 dengan transaksi (PRABC_TR_0301000023_0002) untuk <i>Lender</i> PT XYZ Sejahtera (mendanaikan Rp1.000.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1.000.000) sebesar Rp103.000 dengan tenor 1 tahun dengan rincian nilai sebagai berikut: a. Nilai pokok Rp100.000 b. Nilai bunga Rp3.000 c. Nilai denda Rp900 (dikarenakan keterlambatan pembayaran 3 hari x 0,3% per hari)	3000

9. Nilai_Akumulasi_Denda

- a. Kolom ini diisi dengan nilai akumulasi denda sampai dengan sebelum pembayaran yang wajib dibayarkan oleh *Borrower* melalui Penyelenggara untuk selanjutnya diserahkan kepada *Lender*.
- b. Kolom ini bersifat *optional* (dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian:

No	Nilai Akumulasi Denda	Pengisian
1	Bpk. Tomi membayar pendanaan XYZ-SL-20230301-000001 dengan transaksi (XYZ-SL-TR-20230301-1002) untuk <i>Lender</i> Suherman Santoso (mendanaikan Rp700.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1000000) sebesar Rp739.200 dengan tenor 14 hari, dengan rincian nilai sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">a. Nilai pokok Rp700.000b. Nilai bunga Rp39.200c. Nilai denda Rp0	0
2	Megat membayar pendanaan PRABC_20230301_000023 dengan transaksi (PRABC_TR_0301000023_0002) untuk <i>Lender</i> PT XYZ Sejahtera (mendanaikan Rp1.000.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1.000.000) sebesar Rp103.000 dengan tenor 1 tahun dengan rincian nilai sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">a. Nilai pokok Rp100.000b. Nilai bunga Rp3.000c. Nilai denda Rp900 (dikarenakan keterlambatan pembayaran 3 hari x 0,3% per hari)	900

10. Nilai_jasa

- a. Kolom ini diisi dengan nilai jasa jika ada pengenaan nilai jasa pada setiap pembayaran cicilan.
- b. Kolom ini bersifat *optional* (dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian:

No	nilai jasa	Pengisian
1	Bpk. Tomi membayar pendanaan XYZ-SL-20230301-000001 dengan transaksi (XYZ-SL-TR-20230301-1002) untuk <i>Lender</i> Suherman Santoso (mendanaikan Rp700.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1000000) sebesar Rp740.200 dengan tenor 14 hari, dengan rincian nilai sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">a. Nilai pokok Rp700.000b. Nilai bunga Rp39.200c. Nilai jasa Rp1.000	1000

11. Nilai_pembayaran

- a. Kolom ini diisi dengan nilai pembayaran dibayarkan oleh *Borrower* melalui Penyelenggara untuk selanjutnya diserahkan kepada *Lender* (per transaksi).
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian:

No	nilai pembayaran	Pengisian
1	Bpk. Farhan membayar pendanaan XYZ-SL-20230301-000001 dengan transaksi (XYZ-SL-TR-20230301-1002) untuk <i>Lender</i> Suherman Santoso (mendanaikan Rp700.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1000000) sebesar Rp739.200 dengan tenor 14 hari, dengan rincian nilai sebagai berikut: d. Nilai pokok Rp700.000 e. Nilai bunga Rp39.200	739200
2	Megat membayar pendanaan PRABC_20230301_000023 dengan transaksi (PRABC_TR_0301000023_0002) untuk <i>Lender</i> PT XYZ Sejahtera (mendanaikan Rp1.000.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1.000.000) sebesar Rp103.000 dengan tenor 1 tahun dengan rincian nilai sebagai berikut: a. Nilai pokok Rp100.000 b. Nilai bunga Rp3.000 c. Nilai denda Rp900 (dikarenakan keterlambatan pembayaran 3 hari x 0,3% per hari)	103900

12. Nilai Pokok Tunggakan

- Kolom ini diisi dengan nilai pokok tunggakan yang tidak dibayarkan oleh *Borrower* melalui Penyelenggara untuk selanjutnya diserahkan kepada *Lender*.
- Kolom ini bersifat *optional* (dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian:

No	Nilai Pokok Tunggakan	Pengisian
1	Bpk. Tomi membayar pendanaan XYZ-SL-20230301-000001 dengan transaksi (XYZ-SL-TR-20230301-1002) untuk <i>Lender</i> Suherman Santoso (mendanaikan Rp700.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1000000) sebesar Rp739.200 dengan tenor 14 hari, dengan rincian nilai sebagai berikut: a. Nilai pokok Rp700.000 b. Nilai bunga Rp39.200 Dikarenakan semua nilai cicilan terpenuhi maka nilai pokok tunggakan bernilai Rp0	0
2	Bpk. Megat membayar pendanaan PRABC_20230301_000023 dengan transaksi (PRABC_TR_0301000023_0002) untuk <i>Lender</i> PT XYZ Sejahtera (mendanaikan Rp1.000.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1.000.000) sebesar Rp103.000 dengan tenor 1 tahun dengan rincian nilai per cicilan tiap bulan sebagai berikut: a. Nilai pokok Rp100.000 b. Nilai bunga Rp3.000 Hanya membayar Rp90.000 pada cicilan ke 3, dengan rincian pengakuan dari Penyelenggara sebagai berikut:	13000

No	Nilai Pokok Tunggalan	Pengisian
	a. Nilai pokok Rp87.000 b. Nilai bunga Rp3.000	

13. Nilai_Bunga_Tunggalan

- Kolom ini diisi dengan nilai bunga tunggalan yang tidak dibayarkan oleh *Borrower* melalui Penyelenggara untuk selanjutnya diserahkan kepada *Lender*.
- Kolom ini bersifat *optional* (dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian:

No	Nilai Bunga Tunggalan	Pengisian
1	Bpk. Tomi membayar pendanaan XYZ-SL-20230301-000001 dengan transaksi (XYZ-SL-TR-20230301-1002) untuk <i>Lender</i> Suherman Santoso (mendanai Rp700.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1000000) sebesar Rp739.200 dengan tenor 14 hari, dengan rincian nilai sebagai berikut: a. Nilai pokok Rp700.000 b. Nilai bunga Rp39.200 Dikarenakan semua nilai cicilan terpenuhi maka nilai bunga tunggalan bernilai Rp0	0
2	Bpk Megat membayar pendanaan PRABC_20230301_000023 dengan transaksi (PRABC_TR_0301000023_0002) untuk <i>Lender</i> PT XYZ Sejahtera (mendanai Rp1.000.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1.000.000) sebesar Rp103.000 dengan tenor 1 tahun dengan rincian nilai sebagai berikut: a. Nilai pokok Rp100.000 b. Nilai bunga Rp3.000 Hanya membayar Rp90.000 pada cicilan ke 3, dengan rincian pengakuan dari Penyelenggara sebagai berikut: a. Nilai pokok Rp90.000 b. Nilai bunga Rp0.000	0

14. Kode_jenis_pembayaran

- Kolom ini diisi dengan kode jenis pembayaran dengan daftar referensi kode jenis pembayaran sebagai berikut:

Kode	Jenis Pembayaran
1	<i>Installment</i>
2	<i>Bullet Payment</i>
3	Lainnya

- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian:

No	Jenis Pembayaran	Pengisian
1	Bpk. Tomi membayar pendanaan XYZ-SL-20230301-000001 dengan transaksi (XYZ-SL-TR-20230301-1002) untuk <i>Lender</i> Suherman Santoso (mendanai Rp700.000 dari total	2

No	Jenis Pembayaran	Pengisian
	pinjaman <i>Borrower</i> Rp1000000) sebesar Rp739.200 dengan tenor 14 hari, dengan rincian nilai sebagai berikut: a. Nilai pokok Rp700.000 b. Nilai bunga Rp39.200 Pinjaman ini berjenis pembayaran <i>bullet payment</i> (kode: 2) dengan pembayaran nilai pokok dan bunga pada akhir tenor	
2	Megat membayar pendanaan PRABC_20230301_000023 dengan transaksi (PRABC_TR_0301000023_0002) untuk <i>Lender</i> PT XYZ Sejahtera (mendanaai Rp1.000.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1.000.000) sebesar Rp103.000 dengan tenor 1 tahun dengan rincian nilai sebagai berikut: a. Nilai pokok Rp100.000 b. Nilai bunga Rp3.000 Pinjaman ini memiliki tenor 1 tahun dengan cicilan sebanyak 12 kali dibayarkan setiap bulan, maka tipe pembayaran adalah <i>installment</i> (kode:1)	1

15. No_va_pembayaran

- Kolom ini diisi dengan nomor *virtual account* (va) yang menjadi tujuan *Borrower* untuk membayar cicilan atau melunasi pendanaan yang diterima.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian:

No	No Va Pembayaran	Pengisian
1	Bpk. Tomi membayar pendanaan XYZ-SL-20230301-000001 dengan transaksi (XYZ-SL-TR-20230301-1002) untuk <i>Lender</i> Suherman Santoso (mendanaai Rp700.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1000000) sebesar Rp739.200 dengan tenor 14 hari, dengan rincian nilai sebagai berikut: a. Nilai pokok Rp700.000 b. Nilai bunga Rp39.200 dengan no va pembayaran Bank ABC : 234298000992311	234298000 992311
2	Megat membayar pendanaan PRABC_20230301_000023 dengan transaksi (PRABC_TR_0301000023_0002) untuk <i>Lender</i> PT XYZ Sejahtera (mendanaai Rp1.000.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1.000.000) sebesar Rp103.000 dengan tenor 1 tahun dengan rincian nilai sebagai berikut: a. Nilai pokok Rp100.000 b. Nilai bunga Rp3.000 dengan no va pembayaran Bank XYZ : 345464563333000	345464563 333000

16. Tanggal_waktu_pembayaran_Borrower

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal waktu pembayaran *Borrower* yang disampaikan dalam zona Waktu Indonesia Barat (WIB).
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian:

No	tanggal waktu pembayaran <i>Borrower</i>	Pengisian
1	Bpk. Tomi membayar pendanaan XYZ-SL-20230301-000001 dengan transaksi (XYZ-SL-TR-20230301-1002) untuk <i>Lender</i> Suherman Santoso (mendanaikan Rp700.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1000000) sebesar Rp739.200 dengan tenor 14 hari, dengan rincian nilai sebagai berikut: c. Nilai pokok Rp700.000 d. Nilai bunga Rp39.200 dengan waktu pembayaran 14 Januari 2023 pukul 23:47:45 WIB	2023-01-14 23:47:45
2	Megat membayar pendanaan PRABC_20230301_000023 dengan transaksi (PRABC_TR_0301000023_0002) untuk <i>Lender</i> PT XYZ Sejahtera (mendanaikan Rp1.000.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1.000.000) sebesar Rp103.000 dengan tenor 1 tahun dengan rincian nilai sebagai berikut: a. Nilai pokok Rp100.000 b. Nilai bunga Rp3.000 dengan waktu pembayaran 4 Maret 2023 pukul 01:50:42 WIT (jika tercatat pada server dalam bentuk Waktu Indonesia Timur)	2023-03-03 23:50:42

17. Tanggal_waktu_pembayaran_Lender

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal waktu pembayaran ke *Lender* yang disampaikan dalam zona Waktu Indonesia Barat (WIB).
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian:

No	tanggal waktu pembayaran <i>Lender</i>	Pengisian
1	PT XYZ menyampaikan pembayaran oleh Bpk. Tomi membayar pendanaan XYZ-SL-20230301-000001 dengan transaksi (XYZ-SL-TR-20230301-1002) untuk <i>Lender</i> Suherman Santoso (mendanaikan Rp700.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1000000) sebesar Rp739.200 dengan tenor 14 hari, dengan rincian nilai sebagai berikut: a. Nilai pokok Rp700.000 b. Nilai bunga Rp39.200 dengan waktu transfer 14 Januari 2023 pukul 23:50:59 WIB	2023-01-14 23:50:59
2	PT Fintech ABC menyampaikan pembayaran oleh Megat membayar pendanaan PRABC_20230301_000023 dengan transaksi (PRABC_TR_0301000023_0002) untuk <i>Lender</i> PT XYZ Sejahtera (mendanaikan Rp1.000.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1.000.000) sebesar	2023-03-03 23:55:23

No	tanggal waktu pembayaran <i>Lender</i>	Pengisian
	Rp103.000 dengan tenor 1 tahun dengan rincian nilai sebagai berikut: a. Nilai pokok Rp100.000 b. Nilai bunga Rp3.000 dengan waktu pembayaran 4 Maret 2023 pukul 01:55:23 WIT (jika tercatat pada server dalam bentuk Waktu Indonesia Timur)	

18. Nilai_pembayaran_*Lender*

- Kolom ini diisi dengan nilai pembayaran dibayarkan oleh Penyelenggara kepada *Lender* (per transaksi).
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian:

No	nilai pembayaran <i>Lender</i>	Pengisian
1	Bpk. Tomi membayar pendanaan XYZ-SL-20230301-000001 dengan transaksi (XYZ-SL-TR-20230301-1002) untuk <i>Lender</i> Suherman Santoso (mendanaikan Rp700.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1000000) sebesar Rp729.400 dengan tenor 14 hari, dengan rincian nilai sebagai berikut: a. Nilai pokok Rp700.000 b. Nilai bunga (4,2%) Rp29.400 Dengan rincian kepemilikan nilai bunga sebagai berikut: a. 1,4% dari nilai pokok merupakan hak Penyelenggara sebagai penyedia layanan atau sebesar Rp9.800 b. 2,8% dari nilai pokok merupakan hak <i>lender</i> sebesar Rp19.600 Total pembayaran kepada <i>Lender</i> Rp729.400	729400
2	Megat membayar pendanaan PRABC_20230301_000023 dengan transaksi (PRABC_TR_0301000023_0002) untuk <i>Lender</i> PT XYZ Sejahtera (mendanaikan Rp1.000.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1.000.000) sebesar Rp103.000 dengan tenor 1 tahun dengan rincian nilai sebagai berikut: a. Nilai pokok Rp100.000 b. Nilai bunga Rp3.000 c. Nilai denda Rp1.200 (dikarenakan keterlambatan pembayaran 3 hari x 0,4% per hari) Dengan rincian kepemilikan nilai bunga sebagai berikut: a. 1% dari nilai pokok merupakan hak Penyelenggara sebagai penyedia layanan atau sebesar Rp1.000 b. 2% dari nilai pokok merupakan hak Penyelenggara sebagai penyedia layanan atau sebesar Rp2.000	102300

No	nilai pembayaran <i>Lender</i>	Pengisian
	Dengan rincian kepemilikan nilai denda sebagai berikut: a. 75% dari nilai akumulasi denda merupakan hak Penyelenggara sebagai penyedia layanan atau sebesar Rp900 b. 25% dari nilai akumulasi denda merupakan hak <i>Lender</i> atau sebesar Rp300 Total pembayaran kepada <i>Lender</i> Rp102.300	

19. *Sandi_bank_ea*

- Kolom ini diisi dengan kode sandi bank terdaftar di OJK.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian:

No	Sandi bank	Pengisian
1	<i>Escrow Account</i> menggunakan Bank Mandiri dengan kode bank 008	008
2	<i>Escrow Account</i> menggunakan Bank BCA dengan kode bank 014	014

20. *No_ea*

- Kolom ini diisi dengan no *escrow account Lender* (per transaksi).
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian:

No	Sandi Bank	Pengisian
1	<i>Escrow Account</i> menggunakan Bank Mandiri dengan kode bank 008 dengan no ea: 1200003321455	1200003321455
2	<i>Escrow Account</i> menggunakan Bank BCA dengan kode bank 014 dengan no ea: 4440059333221	4440059333221

21. Keterangan

- Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait pembayaran pendanaan yang dilaporkan.
- Kolom ini bersifat *optional* (dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Keterangan	Pengisian
1	Pemberian diskon denda atas keterlambatan pembayaran sebesar Rp5000	diskon denda sebesar Rp5000
2	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	

BAB VI LAPORAN STATUS PENDANAAN

1. Kode_Penyelenggara

- a. Kode ini diisikan dengan Kode_Penyelenggara yang diberikan oleh OJK untuk Penyelenggara sebagai Pelapor.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Penyelenggara	Pengisian
1	Laporan disampaikan oleh Penyelenggara Konvensional	810001
2	Laporan disampaikan oleh Penyelenggara Syariah	810028

2. kode_pendanaan_sistem

- a. Kolom ini diisi dengan kode pencatatan pendanaan pada sistem Penyelenggara.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian:

No	kode pendanaan sistem	Pengisian
1	Pada sistem Penyelenggara PT Fintech XYZ kode pendanaan tercatat XYZ-SL-20230301-000001	XYZ-SL-20230301-000001
2	Pada sistem Penyelenggara PT Fintech ABC kode pendanaan tercatat PRABC_20230301_000023	PRABC_20230301_000023

3. kode_transaksi_sistem

- a. Kolom ini diisi dengan kode pencatatan transaksi pendanaan yang mewakili satu waktu transaksi antara *Lender* dan *Borrower* pada sistem Penyelenggara.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian:

No	kode transaksi sistem	Pengisian
1	Pada sistem Penyelenggara PT Fintech XYZ kode transaksi antara <i>Lender</i> Bpk. Suherman Santoso dan <i>Borrower</i> Bpk. Tomi tercatat memiliki kode transaksi XYZ-SL-TR-20230301-1002	XYZ-SL-TR-20230301-1002
2	Pada sistem Penyelenggara PT Fintech XYZ kode transaksi antara <i>Lender</i> Bpk. Rianto Anggoro dan <i>Borrower</i> Bpk. Tomi tercatat memiliki kode transaksi XYZ-SL-TR-20230301-1003	XYZ-SL-TR-20230301-1003

4. kode_Pengguna_Borrower_sistem

- a. Kolom ini diisikan dengan kode Pengguna_sistem bertindak sebagai *Borrower*.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Pengguna Sistem	Pengisian
1	Bpk. Tomi terdaftar di PT Fintech XYZ dicatat berperan sebagai <i>Borrower</i> dengan kode PA0001	PA0001
2	Sdr. Megat terdaftar di PT Fintech ABC dicatat berperan sebagai <i>Borrower</i> dengan kode PABC0303	PABC0303

5. kode_Pengguna_Lender_sistem

- Kolom ini diisi dengan kode Pengguna_sistem bertindak sebagai *Lender*.
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Kode Pengguna Sistem	Pengisian
1	Sdr. Farhan terdaftar di PT Fintech XYZ dicatat berperan sebagai <i>Lender</i> dengan kode LP003	LP003
2	PT XYZ Sejahtera terdaftar di PT Fintech ABC dicatat berperan sebagai <i>Lender</i> dengan kode LABC0003	LABC0003

6. no_surat_perjanjian_Lender

- Kolom ini diisi dengan nomor surat perjanjian *Lender*, jika ada hapus buku/ hapus tagih.
- Kolom ini bersifat *conditional* (tidak dapat dikosongkan - jika kondisi pendanaan Dihapusbukukan dan Hapustagih (kode:03)).
- Contoh pengisian data:

No	no surat perjanjian <i>Lender</i>	Pengisian
1	Kondisi pendanaan dalam kondisi Hapusbuku dan Hapustagih (kode:03), maka Penyelenggara meminta persetujuan <i>Lender</i> dengan menghasilkan nomor perjanjian: XYZ-2023-HT-0001	XYZ-2023-HT-0001

7. kode_kualitas_pendanaan

- Kolom ini diisi dengan kode kualitas pendanaan dengan referensi sebagai berikut:

Kode	Nama	Keterangan
1	Lancar	Tepat waktu
2	Dalam Perhatian Khusus	Rasio Pendanaan Dalam Perhatian Khusus (1 s.d. 30 hari)
3	Kurang Lancar	Rasio Pendanaan Kurang Lancar (>30 hari s.d. 60 hari)
4	Diragukan	Rasio Pendanaan Diragukan (>60 hari s.d 90 hari)
5	Macet	Rasio Pendanaan Macet (>90 hari)

- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Kualitas pendanaan	Pengisian
1	PT Fintech XYZ menyampaikan data pendanaan <i>Borrower</i> pada tanggal 15 Maret 2023 dan jatuh tempo 15 April 2023, sehingga pada posisi 16 April 2023 dan belum melakukan pembayaran maka sudah menunggak selama 1 hari (kode:2)	2
2	PT Fintech XYZ menyampaikan data pendanaan <i>Borrower</i> pada tanggal 15 Maret 2023 dan jatuh tempo 15 April 2023, sehingga pada posisi 16 Juni dan belum melakukan pembayaran maka sudah menunggak selama 31 hari (kode:3)	3

8. Tanggal_waktu_kualitas_pendanaan

- Kolom ini diisi dengan tanggal waktu kualitas pendanaan dilaporkan oleh Penyelenggara dalam Waktu Indonesia Barat (WIB).
- Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- Contoh pengisian:

No	tanggal waktu kualitas pendanaan	Pengisian
1	Tanggal waktu jatuh tempo terlewati dilaporkan 1 Juli 2023 pukul 00:01 WIB	2023-07-01 00:01:00
2	Tanggal waktu jatuh tempo terlewati dilaporkan 3 April 2023 pukul 15:31 WITA	2023-04-03 14:31:00

9. Kode_sebab_macet

- Kolom ini diisi dengan kode sebab macet dengan referensi sebagai berikut:

Kode	Sebab Macet	Keterangan
01	Kesulitan Pemasaran/ Usaha	
02	Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja	
03	Perusahaan Grup atau Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur	
04	Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	
05	Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian pendanaan atau Pembiayaan	
06	Kelemahan Dalam Analisa pendanaan atau Pendanaan	
08	Itikad Tidak Baik	
09	Keadaan Kahar (<i>Force Majeur</i>)	
10	Pailit	

Kode	Sebab Macet	Keterangan
11	<i>Uniform Classification</i>	Dalam hal <i>Borrower</i> memiliki lebih dari satu pinjaman, satu pinjaman lancar sedangkan pinjaman lainnya macet maka <i>Borrower</i> dimaksud dapat diklasifikasikan langsung menjadi macet.
99	Lainnya	

- b. Kolom ini bersifat kondisional (harus diisi jika kode_kualitas_pendanaan macet (kode:5)).
- c. Contoh pengisian data:

No	kode sebab macet	Pengisian
1	Pendanaan dengan kode PRABC_20230301_000023 telah mengalami keterlambatan dengan kondisi tidak dapat dihubungi oleh <i>collection</i> internal ataupun eksternal sampai dengan melewati tenor lebih dari 90 hari. Sehingga dapat disimpulkan ada itikad tidak baik (kode:08) dari Sdr. Megat	08
2	Pendanaan dengan kode XYZ-SL-20230301-000001 telah mengalami keterlambatan 14 hari dalam kondisi normal tidak akan diberikan kode kondisi macet namun ditemukan Bpk. Tomi memiliki pendanaan lainnya yang tidak lancar di PT Fintech XYZ. Sehingga dapat dinilai oleh PT Fintech XYZ <i>Uniform Classification</i> (kode:11)	11
3	Tidak dalam kondisi macet	

10. Tanggal_waktu_macet

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal macet dilaporkan oleh Penyelenggara terhadap satu pendanaan (per transaksi) dalam Waktu Indonesia Barat (WIB).
- b. Kolom ini bersifat kondisional (harus diisi jika kode_kualitas_pendanaan macet (kode:5)).
- c. Contoh pengisian:

No	tanggal waktu kualitas pendanaan	Pengisian
1	PT Fintech XYZ menyampaikan pada tanggal 15 April 2023 pukul 00:00:00 WIB pendanaan dengan kode XYZ-SL-20230301-000001 dengan transaksi (XYZ-SL-TR-20230301-1002) telah melewati tanggal jatuh tempo 14 Januari 2023 selama 91 hari.	2023-04-15 00:00:00

No	tanggal waktu kualitas pendanaan	Pengisian
	Rentang keterlambatan dihitung dari tanggal_waktu_pencairan pada laporan pendanaan.	
2	Tidak dalam kondisi macet	

11. Kode_kondisi_pendanaan

- a. Kolom ini diisi dengan kode sebab macet dengan referensi sebagai berikut:

Kode	Kondisi Pendanaan
00	Fasilitas Aktif
01	Dibatalkan
02	Lunas
04	Hapus Buku dan Hapus Tagih
05	Lunas karena pengambilalihan agunan
06	Lunas karena diselesaikan melalui pengadilan
12	Lunas Dengan Diskon
16	Lunas karena klaim asuransi
17	Restrukturisasi

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

- c. Contoh pengisian data:

No	kode kondisi pendanaan	Pengisian
1	Kondisi fasilitas pendanaan yang dilaporkan adalah "Lunas"	02
2	Pendanaan masih aktif	00

12. Tanggal_waktu_kondisi_pendanaan

- a. Kolom ini diisi dengan tanggal waktu kondisi pendanaan dilaporkan oleh Penyelenggara terhadap satu pendanaan (per transaksi) dalam Waktu Indonesia Barat (WIB).

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

- c. Contoh pengisian:

No	tanggal waktu kondisi pendanaan	Pengisian
1	Kondisi fasilitas pendanaan yang dilaporkan adalah "Lunas" pada 15 April 2023 pukul 10:00:00 WIB	2023-04-15 10:00:00
2	Pendanaan dilaporkan memiliki kualitas pendanaan menurun dengan kondisi masih aktif pada 27 April 2023 pukul 00:00:00 WIT	2023-04-26 22:00:00

13. Outstanding_pendanaan

- a. Kolom ini diisi *outstanding* pendanaan per transaksi.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

- c. Contoh pengisian data:

No	<i>Outstanding</i> pendanaan	Pengisian
1	Pendanaan masih aktif dengan <i>outstanding</i> Rp1.300.000	1300000
2	Kondisi fasilitas pendanaan yang dilaporkan adalah "Lunas"	0
3	Kondisi fasilitas pendanaan yang dilaporkan adalah "Restrukturisasi" dengan nilai <i>outstanding</i> yang akan direstrukturisasi dengan nilai sebesar Rp1.000.000	1000000

14. Keterangan

- a. Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait status pendanaan yang dilaporkan.
- b. Kolom ini bersifat *optional* (dapat diisi atau dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Keterangan	Pengisian
1	Fasilitas pendanaan sedang dalam sengketa dengan <i>Borrower</i>	sedang dalam sengketa dengan <i>Borrower</i>
2	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	

BAB VII LAPORAN RESTRUKTURISASI PENDANAAN

1. Kode_Penyelenggara

- a. Kode ini diisikan dengan Kode_Penyelenggara yang diberikan oleh OJK untuk Penyelenggara sebagai Pelapor.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Penyelenggara	Pengisian
1	Laporan disampaikan oleh Penyelenggara Konvensional	810001
2	Laporan disampaikan oleh Penyelenggara Syariah	810028

2. Kode_pendanaan_sistem_utama

- a. Kolom ini diisi dengan kode pencatatan pendanaan awal/ utama sebelum restrukturisasi pada sistem Penyelenggara.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian:

No	kode pendanaan sistem lama	Pengisian
1	Pada sistem Penyelenggara PT Fintech XYZ kode pendanaan tercatat XYZ-SL-20230301-000001 akan direstrukturisasi	XYZ-SL-20230301-000001
2	Pada sistem Penyelenggara PT Fintech ABC kode pendanaan tercatat PRABC_20230301_000023 akan direstrukturisasi	PRABC_20230301_000023

3. Kode_pendanaan_sistem_restrukturisasi

- a. Kolom ini diisi dengan kode pencatatan pendanaan terbaru setelah restrukturisasi pada sistem Penyelenggara.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)
- c. Contoh pengisian:

No	kode pendanaan sistem restrukturisasi	Pengisian
1	Pada sistem Penyelenggara PT Fintech XYZ kode pendanaan tercatat sebelumnya XYZ-SL-20230301-000001 menjadi XYZ-SL-20230301-000001-R-01 setelah direstrukturisasi	XYZ-SL-20230301-000001-R-01
2	Pada sistem Penyelenggara PT Fintech ABC kode pendanaan tercatat sebelumnya PRABC_20230301_000023 menjadi PRABC_20230301_000023-RES01 setelah direstrukturisasi	PRABC_20230301_000023-RES01

4. Kode_transaksi_sistem_utama

- a. Kolom ini diisi dengan kode pencatatan transaksi pendanaan awal sebelum di restrukturisasi yang mewakili satu waktu transaksi antara *Lender* dan *Borrower* pada sistem Penyelenggara.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian:

No	kode transaksi sistem utama	Pengisian
1	Pada sistem Penyelenggara PT Fintech XYZ kode transaksi antara <i>Lender</i> Suherman Santoso (mendanaikan Rp700.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1000000) dan <i>Borrower</i> Bpk. Tomi tercatat XYZ-SL-TR-20230301-1002	XYZ-SL-TR-20230301-1002
2	Pada sistem Penyelenggara PT Fintech ABC kode transaksi antara <i>Lender</i> Rianto Anggoro (mendanaikan Rp300.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1000000) dan <i>Borrower</i> Bpk. Tomi tercatat ABC-SL-TR-20230301-1003	XYZ-SL-TR-20230301-1003

5. Kode_transaksi_sistem_restrukturisasi

- a. Kolom ini diisi dengan kode pencatatan transaksi pendanaan setelah di restrukturisasi yang mewakili satu waktu transaksi antara *Lender* dan *Borrower* pada sistem Penyelenggara.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian:

No	kode transaksi sistem restrukturisasi	Pengisian
1	Pada sistem Penyelenggara PT Fintech XYZ kode transaksi antara <i>Lender</i> Farhan (mendanaikan Rp700.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1000000) dan <i>Borrower</i> Bpk. Tomi sebelumnya tercatat XYZ-SL-TR-20230301-1002 menjadi XYZ-SL-TR-20230301-1002-R-01 setelah direstrukturisasi	XYZ-SL-TR-20230301-1002-R-01
2	Pada sistem Penyelenggara PT Fintech ABC kode transaksi antara <i>Lender</i> Rianto Anggoro (mendanaikan Rp300.000 dari total pinjaman <i>Borrower</i> Rp1000000) dan <i>Borrower</i> Bpk. Tomi sebelumnya tercatat ABC-SL-TR-20230301-1003 menjadi ABC-SL-TR-20230301-1003-RES01 setelah direstrukturisasi	ABC-SL-TR-20230301-1003-RES01

6. Kode_Pengguna_Borrower_sistem

- a. Kolom ini diisi dengan kode_Pengguna_sistem bertindak sebagai *Borrower*.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Pengguna Sistem	Pengisian
1	Bpk. Tomi terdaftar di PT Fintech XYZ dicatat berperan sebagai <i>Borrower</i> dengan kode PA0001	PA0001
2	Sdr. Megat terdaftar di PT Fintech ABC dicatat berperan sebagai <i>Borrower</i> dengan kode PABC0303	PABC0303

7. *No_surat_perjanjian_Borrower*

- a. Kolom ini diisi dengan nomor surat perjanjian *Borrower* baru setelah restrukturisasi.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	no surat perjanjian <i>Borrower</i>	Pengisian
1	Kondisi pendanaan dalam kondisi Restrukturisasi (kode:17), maka Penyelenggara meminta persetujuan <i>Borrower</i> dengan menghasilkan nomor perjanjian: XYZ-2023-BR-0001	XYZ-2023-BR-0001
2	Kondisi pendanaan dalam kondisi Restrukturisasi (kode:17), maka Penyelenggara meminta persetujuan <i>Borrower</i> dengan menghasilkan nomor perjanjian: XYZ-2023-BRES-0001	XYZ-2023-BRES-0001

8. *Kode_Pengguna_Lender_sistem*

- a. Kolom ini diisi dengan kode *Pengguna_sistem* bertindak sebagai *Lender*.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	Kode Pengguna Sistem	Pengisian
1	Sdr. Suherman Santoso terdaftar di PT Fintech XYZ dicatat berperan sebagai <i>Lender</i> dengan kode LP003	LP003
2	PT XYZ Sejahtera terdaftar di PT Fintech ABC dicatat berperan sebagai <i>Lender</i> dengan kode LABC0003	LABC0003

9. *No_surat_perjanjian_Lender*

- a. Kolom ini diisi dengan nomor surat perjanjian *Lender*.
- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).
- c. Contoh pengisian data:

No	no surat perjanjian <i>Lender</i>	Pengisian
1	Kondisi pendanaan dalam kondisi Restrukturisasi (kode:17), maka Penyelenggara meminta persetujuan <i>Lender</i> dengan menghasilkan nomor perjanjian: XYZ-2023-LR-0001	XYZ-2023-LR-0001
2	Kondisi pendanaan dalam kondisi Restrukturisasi (kode:17), maka Penyelenggara meminta persetujuan <i>Lender</i> dengan menghasilkan nomor perjanjian: XYZ-2023-LRES-0001	XYZ-2023-LRES-0001

10. *Kode_kualitas_pendanaan*

- a. Kolom ini diisi dengan kode kualitas pendanaan sebelum restrukturisasi dengan referensi sebagai berikut:

Kode	Nama	Keterangan
1	Lancar	Tepat waktu
2	Dalam Perhatian Khusus	Rasio Pendanaan Dalam Perhatian Khusus (1 s.d. 30 hari)
3	Kurang Lancar	Rasio Pendanaan Kurang Lancar (>30 hari s.d. 60 hari)
4	Diragukan	Rasio Pendanaan Diragukan (>60 hari s.d 90 hari)
5	Macet	Rasio Pendanaan Macet (>90 hari)

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Kualitas pendanaan	Pengisian
1	Kualitas pendanaan saat direstrukturisasi <i>borrower</i> tidak pernah melewati jatuh tempo/ belum pernah melakukan pembayaran cicilan	1
2	Kualitas pendanaan telat membayar cicilan selama dua minggu	2

11. Frekuensi_restrukturisasi

a. Kolom ini diisi dengan 1(satu) jika pertama kali direstrukturisasi atau frekuensi restrukturisasi (akumulasi).

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Frekuensi restrukturisasi	Pengisian
1	Sudah pernah restrukturisasi satu kali dan dilakukan restrukturisasi kembali	2
2	Pertama kali dilakukan restrukturisasi	1

12. Tanggal_waktu_awal_restrukturisasi

a. Kolom ini diisi dengan tanggal waktu persetujuan restrukturisasi di setuju oleh *Lender* dilaporkan oleh Penyelenggara dalam Waktu Indonesia Barat (WIB).

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan)

c. Contoh pengisian:

No	tanggal waktu awal restrukturisasi	Pengisian
1	<i>Lender</i> menyetujui pendanaan untuk direstrukturisasi pada 15 Maret 2023 pukul 15:29:57 WIB	2023-03-15 15:29:57
2	<i>Lender</i> menyetujui pendanaan untuk direstrukturisasi pada 16 Maret 2023 pukul 01:48:35 WIT	2023-03-15 23:48:35

13. Tanggal_waktu_akhir_restrukturisasi

a. Kolom ini diisi dengan tanggal jatuh tempo restrukturisasi yang di setuju oleh *Lender* dilaporkan oleh Penyelenggara dalam Waktu Indonesia Barat (WIB).

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian:

No	tanggal waktu awal restrukturisasi	Pengisian
1	<i>Lender</i> menyetujui pendanaan untuk direstrukturisasi pada 31 Desember 2023 pukul 21:29:57 WIB	2023-12-31 21:29:57
2	<i>Lender</i> menyetujui pendanaan untuk direstrukturisasi pada 1 Januari 2024 pukul 01:32:39 WIT	2023-12-31 23:32:39

14. Kode_cara_restrukturisasi

- a. Kolom ini diisi dengan kode cara restrukturisasi dengan referensi sebagai berikut:

Kode	Cara Restrukturisasi
01	Penurunan suku bunga pendanaan
02	Perpanjangan jangka waktu pendanaan
03	Pengurangan tunggakan pokok pendanaan
04	Pengurangan tunggakan bunga pendanaan
05	Penambahan fasilitas pendanaan atau pembiayaan
06	Konversi pendanaan atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara
07	Penambahan fasilitas pendanaan dan pengurangan tunggakan bunga pendanaan
08	Penambahan fasilitas pendanaan dan perpanjangan jangka waktu pendanaan
09	Penambahan fasilitas pendanaan dan penurunan suku bunga pendanaan
10	Penambahan fasilitas pendanaan, pengurangan tunggakan bunga kredit dan penurunan suku bunga pendanaan
11	Penambahan fasilitas pendanaan, pengurangan tunggakan bunga pendanaan dan perpanjangan jangka waktu pendanaan
12	Penjadwalan Kembali (Syariah)
13	Perubahan jadwal pembayaran (Syariah)
14	Perubahan jumlah angsuran (Syariah)
15	Perubahan jangka waktu (Syariah)
16	Perubahan nisbah dalam pembiayaan Mudharabah atau Pembiayaan Musyarakah (Syariah)
17	Perubahan Porsi Bagi Hasil (PBH) dalam pembiayaan Mudharabah atau Pembiayaan Musyarakah (Syariah)
18	Pemberian potongan (Syariah)
19	Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank (Syariah)
20	Konversi akad pembiayaan (Syariah)

Kode	Cara Restrukturisasi
21	Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal pada perusahaan nasabah (Syariah)
22	pendanaan atau Pembiayaan yang Direstrukturisasi dalam rangka stimulus program pemerintah
99	Lainnya

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Cara restrukturisasi	Pengisian
1	Restrukturisasi pendanaan dengan cara Pengurangan tunggakan bunga pendanaan	04
2	Restrukturisasi pendanaan dengan cara Penambahan fasilitas pendanaan, pengurangan tunggakan bunga pendanaan dan perpanjangan jangka waktu pendanaan	11
3	Restrukturisasi dengan cara yang tidak dapat dikategorikan dalam referensi	99

15. Outstanding

a. Kolom ini diisi dengan jumlah nilai *outstanding* yang akan direstrukturisasi dari pendanaan sebelumnya.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	Outstanding	Pengisian
1	Pada sistem Penyelenggara PT Fintech XYZ kode pendanaan utama tercatat XYZ-SL-20230301-000001 dan kode transaksi utama tercatat XYZ-SL-TR-20230301-1002 dengan <i>outstanding</i> pendanaan Rp729.400	729400
2	Pada sistem Penyelenggara PT Fintech ABC kode pendanaan utama tercatat PRABC_20230301_000023 dan kode transaksi utama tercatat PRABC_TR_0301000023_0002 dengan <i>outstanding</i> pendanaan Rp903.000	903000

16. Bunga (%)

a. Kolom ini diisi dengan jumlah persentase bunga yang disetujui dalam restrukturisasi.

b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

c. Contoh pengisian data:

No	bunga (%) harian	Pengisian
1	Pada sistem Penyelenggara PT Fintech XYZ tercatat Pendanaan terstrukturisasi dengan kode XYZ-SL-20230301-000001-R-01 dan kode transaksi XYZ-SL-TR-20230301-1002-R-01 memiliki bunga selama 14 hari sebesar 4,2%	4.20
2	Pada sistem Penyelenggara PT Fintech ABC tercatat Pendanaan terstrukturisasi dengan kode PRABC_20230301_000023-RES01 dan kode transaksi ABC-SL-TR-20230301-1003-RES01	3.00

No	bunga (%) harian	Pengisian
	memiliki tenor satu tahun dengan bunga sebulan sebesar 3% definis tenor (1 tahun harus dikonfirmasi menjadi hari)	

17. Satuan_waktu

- a. Kolom ini diisi dengan satuan waktu sesuai dengan referensi sebagai berikut:

Kode	Nama
1	Hari
2	Minggu
3	Bulan
4	Triwulan
5	Semester
6	Tahun

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

- c. Contoh pengisian data:

No	Nilai cicilan	Pengisian
1	Bunga tertulis dalam jangka waktu	2
2	Bunga tertulis dalam jangka waktu bulanan	3

18. Nilai_cicilan

- a. Kolom ini diisi dengan nilai cicilan yang disetujui dalam restrukturisasi.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

- c. Contoh pengisian data:

No	Nilai cicilan	Pengisian
1	nilai cicilan yang disepakati Rp104.200	104200
2	nilai cicilan yang disepakati Rp301.000	301000

19. Nilai_pokok_cicilan

- a. Kolom ini diisi dengan nilai pokok cicilan yang disetujui dalam restrukturisasi.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

- c. Contoh pengisian data:

No	Nilai pokok cicilan	Pengisian
1	nilai pokok cicilan yang disepakati Rp100.000	100000
2	nilai pokok cicilan yang disepakati Rp300.000	300000

20. Nilai_bunga_cicilan

- a. Kolom ini diisi dengan nilai bunga cicilan yang disetujui dalam restrukturisasi.

- b. Kolom ini bersifat *mandatory* (tidak dapat dikosongkan).

- c. Contoh pengisian data:

No	Nilai bunga cicilan	Pengisian
1	nilai bunga cicilan yang disepakati Rp4.200	4200
2	nilai bunga cicilan yang disepakati Rp1.000	1000

21. Nilai_jasa

- Kolom ini diisi dengan nilai jasa yang harus dibayarkan penerima dana yang diakui oleh Penyelenggara sebagai pendapatan didalam proses restrukturisasi.
- Kolom ini bersifat *optional* (dapat diisi atau dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Nilai Jasa	Pengisian
1	nilai jasa yang dikenakan dalam proses restrukturisasi sebesar Rp10.000	10000
2	Penyelenggara tidak mengenakan nilai jasa dalam proses restrukturisasi	

22. Keterangan

- Kolom ini diisi jika ada keterangan tambahan atau keterangan lain yang diperlukan terkait restrukturisasi pendanaan yang dilaporkan.
- Kolom ini bersifat *optional* (dapat diisi atau dikosongkan).
- Contoh pengisian data:

No	Keterangan	Pengisian
1	Fasilitas pendanaan sedang dalam sengketa dengan <i>Borrower</i>	sedang dalam sengketa dengan <i>Borrower</i>
2	Tidak ada keterangan tertentu yang perlu ditambahkan	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL
VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO,
DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/SEOJK.06/2024
TENTANG
TATA CARA DAN MEKANISME PENYAMPAIAN DATA TRANSAKSI
PENDANAAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN
BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

DAFTAR ISI

.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	- 4 -
PENDAHULUAN	- 4 -
A. Latar Belakang.....	- 4 -
B. Maksud dan Tujuan.....	- 4 -
C. Ruang Lingkup	- 5 -
D. Acuan Penyusunan	- 5 -
E. Istilah-Istilah yang Digunakan Dalam Pedoman Akuntansi untuk Penyelenggara LPBBTI.....	- 5 -
F. Proses Penyusunan Pedoman Akuntansi.....	- 6 -
G. Sistematika Penulisan Pedoman Akuntansi Penyelenggara LPBBTI -	7
-	
BAB II	- 8 -
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN.....	- 8 -
A. Definisi	- 8 -
B. Dasar Pengaturan	- 8 -
C. Tujuan Laporan Keuangan	- 9 -
D. Laporan Keuangan Lengkap.....	- 9 -
E. Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan	- 9 -
F. Bahasa Laporan Keuangan	- 9 -
G. Mata Uang Fungsional dan Mata Uang Pelaporan.....	- 9 -
H. Penyajian Laporan Keuangan	- 10 -
I. Konsistensi Penyajian	- 10 -
J. Dasar AkruaI, Materialitas, Penggabungan, dan Saling Hapus....	- 10 -
K. Periode Pelaporan.....	- 10 -
L. Informasi Komparatif	- 10 -
M. Laporan Keuangan Konsolidasian	- 11 -
N. Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan	- 11 -
O. Penyajian Kembali (<i>Restatement</i>)	- 12 -
P. Laporan Posisi Keuangan	- 12 -
Q. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.....	- 12 -
R. Laporan Arus Kas	- 13 -
S. Catatan atas Laporan Keuangan	- 14 -
BAB III	- 15 -
AKUNTANSI ASET	- 15 -
A. Pengertian dan Karakteristik.....	- 15 -

B. Aset Lancar.....	- 15 -
C. Aset Tidak Lancar	- 22 -
BAB IV	- 35 -
AKUNTANSI LIABILITAS DAN EKUITAS.....	- 35 -
A. Liabilitas	- 35 -
B. Ekuitas	- 44 -
BAB V	- 51 -
PENGHASILAN DAN BEBAN.....	- 51 -
A. Penghasilan	- 51 -
B. Beban	- 55 -

PEDOMAN AKUNTANSI PENYELENGGARAAN
LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Keuangan perusahaan disusun dan disajikan dengan tujuan utama untuk menyediakan informasi bagi para pengguna Laporan Keuangan terkait posisi keuangan perusahaan pada tanggal pelaporan, kinerja perusahaan, serta perubahan posisi keuangan, yang akan digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Untuk dapat memenuhi tujuan tersebut, informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan perusahaan harus memenuhi karakteristik kualitatif yang membuat informasi keuangan menjadi berguna yang terdiri dari karakteristik kualitatif fundamental dan karakteristik kualitatif peningkat. Karakteristik kualitatif fundamental terdiri dari relevansi, materialitas, representasi tepat, dan penerapan karakteristik kualitatif fundamental. Karakteristik kualitatif peningkat terdiri dari keterbandingan, keterverifikasian, ketepatanwaktuan, keterpahaman, penerapan karakteristik kualitatif peningkat.

Sebagai sebuah entitas, penting untuk memastikan bahwa Laporan Keuangan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Laporan Keuangan Penyelenggara LPBBTI) mencapai tujuan utama tersebut dengan memenuhi berbagai karakteristik kualitatif dalam sebuah Laporan Keuangan Penyelenggara LPBBTI. Untuk memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, Laporan Keuangan Penyelenggara LPBBTI harus disusun dengan mengacu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Namun pada praktiknya, kompleksitas bisnis pada Penyelenggara LPBBTI membuat penyusunan Laporan Keuangan Penyelenggara LPBBTI yang sesuai SAK yang berlaku cukup rumit. Oleh karena itu, penting untuk menyusun sebuah pedoman akuntansi Penyelenggara LPBBTI sebagai panduan dalam penyusunan Laporan Keuangan Penyelenggara LPBBTI.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Pedoman Akuntansi untuk Penyelenggara LPBBTI adalah menyediakan panduan bagi regulator dan penyusun Laporan Keuangan Penyelenggara LPBBTI sehingga Laporan Keuangan Penyelenggara LPBBTI lebih informatif.

Tujuan dari Pedoman Akuntansi untuk Penyelenggara LPBBTI adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan yang tertulis dan terstandardisasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan dan acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan guna menyediakan informasi bagi pihak eksternal maupun internal sesuai dengan SAK yang berlaku, yang:

1. menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara LPBBTI dalam menyusun laporan keuangan; dan
2. membantu manajemen Penyelenggara LPBBTI dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan agar sesuai dengan tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan, yaitu menyediakan informasi bagi para pengguna Laporan Keuangan tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal pelaporan, kinerja perusahaan, serta

perubahan posisi keuangan yang akan digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Akuntansi ini berlaku untuk Penyelenggara LPBBTI konvensional. Apabila Penyelenggara LPBBTI memiliki produk berbasis syariah, maka perlakuan akuntansi untuk transaksi dari produk berbasis syariah tersebut menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang relevan.

Pedoman Akuntansi ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan produk dari Penyelenggara LPBBTI, Standar Akuntansi Keuangan (SAK), ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan ketentuan lainya yang terkait dengan Penyelenggara LPBBTI.

Apabila dari waktu ke waktu terdapat perbedaan dengan SAK, maka Penyelenggara LPBBTI mengacu pada SAK yang berlaku.

D. Acuan Penyusunan

Penyusunan Pedoman Akuntansi Penyelenggara LPBBTI didasarkan pada acuan yang relevan, yaitu:

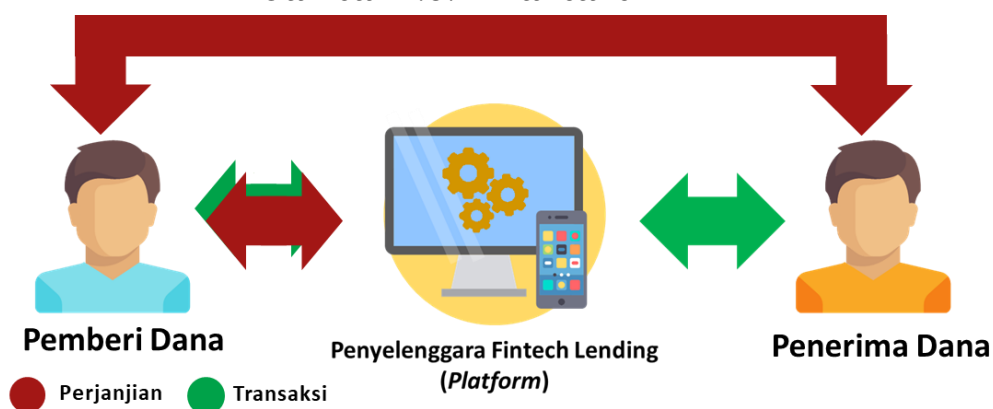
1. kerangka konseptual laporan keuangan;
2. SAK;
3. ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
4. praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum.

E. Istilah-Istilah yang Digunakan Dalam Pedoman Akuntansi untuk Penyelenggara LPBBTI.

1. Penyelenggara LPBBTI

Penyelenggara LPBBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Gambar 1.5.1 Transaksi LPBBTI



Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Dalam rangka mempertemukan pemberi dana (*Lender*) dengan penerima dana (*Borrower*), uang atau dana yang dipinjamkan/dialurkan adalah milik pemberi dana, bukan milik

Penyelenggara LPBBTI. Oleh karena itu, penyaluran pinjaman maupun pengembalian pinjaman yang difasilitasi oleh Penyelenggara LPBBTI tidak dicatat dalam laporan posisi keuangan sebagai aset maupun liabilitas. Penyelenggara LPBBTI wajib menyajikan informasi tambahan mengenai saldo *escrow* yang digunakan dalam kegiatan usaha dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

SAK adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

3. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

- a. aset, yaitu sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikendalikan oleh sebuah entitas yang diharapkan akan memberikan manfaat di masa yang akan datang.
- b. liabilitas, yaitu kewajiban yang dimiliki oleh sebuah entitas yang harus dibayarkan dalam suatu periode tertentu dan dalam pembayarannya tersebut mengakibatkan arus aset keluar bagi entitas.
- c. ekuitas, yaitu porsi kepemilikan atas aset entitas setelah dikurangi dengan liabilitas yang dimiliki oleh entitas.
- d. pendapatan, yaitu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode tertentu.
- e. beban, yaitu penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

4. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Manajemen Penyelenggara LPBBTI adalah pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

F. Proses Penyusunan Pedoman Akuntansi

Dalam proses penyusunan Pedoman Akuntansi untuk Penyelenggara LPBBTI, terdapat tahapan yang dilakukan, yaitu:

1. *Focus Group Discussion* (FGD) – Pencatatan Akuntansi LPBBTI

Tahapan awal dalam proses penyusunan Pedoman Akuntansi ini adalah melaksanakan FGD yang membahas terkait pencatatan akuntansi LPBBTI. Tujuan FGD ini adalah untuk mengidentifikasi pencatatan akuntansi dan penyelesaiannya.

2. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, antara lain pada masalah-masalah spesifik terkait pendapatan utama, beban utama, aset-aset utama, dan liabilitas-liabilitas spesifik yang ada di Penyelenggara LPBBTI, baik pada pengukuran, pencatatan, dan pengungkapannya. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, Otoritas Jasa Keuangan meminta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menunjuk Penyelenggara LPBBTI mewakili keberagaman model bisnis dalam industri LPBBTI memaparkan masalah-masalah spesifik yang dihadapi dalam implementasi SAK di perusahaannya.

3. Penyusunan Draf Pedoman Akuntansi

Draf Pedoman Akuntansi ini disusun berdasarkan ketentuan yang ada di Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, SAK, dan hasil pendalaman terkait masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh Penyelenggara LPBBTI.

4. Pembahasan Draf Pedoman Akuntansi

Setelah proses pembuatan draf Pedoman Akuntansi selesai, tahapan selanjutnya adalah membahas draf tersebut dengan akademisi dan AFPI yang diwakili oleh Penyelenggara LPBBTI selaku subjek dari Pedoman Akuntansi ini.

G. Sistematika Penulisan Pedoman Akuntansi Penyelenggara LPBBTI

Pedoman Akuntansi Penyelenggara LPBBTI ini terdiri dari 5 bab utama, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan;

Bab 2 Penyajian Laporan Keuangan;

Bab 3 Akuntansi untuk Aset;

Bab 4 Akuntansi untuk Liabilitas dan Ekuitas;

Bab 5 Akuntansi untuk Penghasilan dan Beban.

BAB II PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

A. Definisi

1. Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.
2. Laporan Posisi Keuangan adalah laporan yang menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas dari Penyelenggara LPBBTI pada akhir periode.
3. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain adalah laporan yang menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode.
4. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas Penyelenggara LPBBTI yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan bersih selama periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dalam aktivitas Penyelenggara LPBBTI selama periode pelaporan dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
6. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang berisi informasi tambahan atas pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.
7. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah Laporan Keuangan kelompok usaha yang didalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal.
8. Laporan Keuangan Interim adalah Laporan Keuangan yang periodenya kurang dari setahun.
9. Penerapan Retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan.
10. Penerapan Prospektif adalah suatu perubahan kebijakan akuntansi dan pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi, masing-masing adalah:
 - a. penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang terjadi setelah tanggal perubahan kebijakan tersebut, dan
 - b. pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi pada periode berjalan dan periode mendatang yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut.
11. Penyajian Kembali Retrospektif adalah koreksi pengakuan, pengukuran dan pengungkapan jumlah unsur-unsur Laporan Keuangan seolah-olah kesalahan periode sebelumnya tidak pernah terjadi.

B. Dasar Pengaturan

1. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan
2. PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan
3. PSAK 2 Laporan Arus Kas
4. PSAK 3 Laporan Keuangan Interim

5. PSAK 8 Peristiwa setelah Periode Pelaporan
6. PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
7. PSAK 65 Laporan Keuangan Konsolidasian

C. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan Laporan Keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna Laporan Keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

1. aset;
2. liabilitas;
3. ekuitas;
4. penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian;
5. kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
6. arus kas.

D. Laporan Keuangan Lengkap

Laporan Keuangan lengkap terdiri dari:

1. laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. laporan arus kas selama periode;
5. catatan atas laporan keuangan; dan
6. laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya apabila ada kebijakan akuntansi baru yang diterapkan secara retrospektif atau ada penyajian kembali Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK 25.

E. Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Manajemen Penyelenggara LPBBTI adalah pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

F. Bahasa Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Penyelenggara LPBBTI disusun dalam Bahasa Indonesia. Apabila manajemen Penyelenggara LPBBTI menyusun Laporan Keuangan dalam bahasa selain Bahasa Indonesia, maka informasi yang disajikan dalam bahasa asing tersebut harus memuat informasi yang sama dan juga waktu yang sama, serta disajikan berdampingan dengan Bahasa Indonesia (*bilingual*). Laporan Keuangan Penyelenggara LPBBTI yang disusun dalam bahasa lain selain Bahasa Indonesia juga harus diterbitkan bersamaan dengan penerbitan Laporan Keuangan yang disusun dalam Bahasa Indonesia.

G. Mata Uang Fungsional dan Mata Uang Pelaporan

Mata uang fungsional adalah mata uang yang digunakan di lingkungan ekonomi tempat Penyelenggara LPBBTI beroperasi. Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan oleh manajemen Penyelenggara LPBBTI dalam menyusun Laporan Keuangan. Mata uang fungsional dan

pelaporan Penyelenggara LPBBTI menggunakan mata uang rupiah. Akun moneter yang diakui dalam mata uang asing, dihitung ulang pada tanggal pelaporan menggunakan kurs pada tanggal pelaporan, selisih kurs diakui dalam laba/rugi.

H. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan perusahaan, perubahan posisi keuangan, dan arus kas. Penyajian yang wajar merujuk pada penyajian yang jujur atas dampak dari setiap transaksi, peristiwa lain, dan kondisi ekonomi yang sesuai dengan definisi dari aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Laporan Keuangan harus disajikan dengan informasi komparatif dari tahun terdekat sebelumnya.

Aset disajikan menjadi aset lancar dan tidak lancar yang diurutkan berdasarkan tingkat likuiditas. Liabilitas disajikan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang yang diurutkan menurut tanggal jatuh tempo dari setiap liabilitas.

Arus kas disajikan dalam kelompok arus kas operasional, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Laporan perubahan ekuitas disajikan dalam format yang memudahkan pembaca memahami perubahan setiap pos ekuitas.

I. Konsistensi Penyajian

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam Laporan Keuangan antar periode harus dilakukan secara konsisten, kecuali:

1. terjadi perubahan yang signifikan terhadap operasi bisnis perusahaan;
2. penyajian dan klasifikasi yang baru menghasilkan penyajian yang lebih baik, sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi;
3. dipersyaratkan oleh SAK.

J. Dasar Akrua, Materialitas, Penggabungan, dan Saling Hapus

Penyelenggara LPBBTI menyusun Laporan Keuangan atas dasar akrua, kecuali untuk laporan arus kas. Penyelenggara LPBBTI harus menyajikan secara tersendiri setiap kelas pos serupa yang material. Penyelenggara LPBBTI menyajikan secara tersendiri pos sesuai dengan sifat atau fungsinya, kecuali pos tersebut bersifat tidak material.

Penyelenggara LPBBTI tidak boleh menyajikan jumlah aset dan liabilitas, serta penghasilan dan beban secara saling hapus, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh SAK.

K. Periode Pelaporan

Laporan Keuangan tahunan disajikan untuk periode tahunan yang berakhir pada 31 Desember. Laporan Keuangan Interim disajikan untuk periode kurang dari 12 bulan sesuai dengan periode interimnya, misalnya Laporan Keuangan Interim triwulanan atau tengah tahunan.

L. Informasi Komparatif

Penyelenggara LPBBTI menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan periode berjalan. Informasi komparatif yang

bersifat naratif dan deskriptif dari Laporan Keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman Laporan Keuangan periode berjalan.

Penyelenggara LPBBTI minimal menyajikan 2 (dua) laporan posisi keuangan, 2 (dua) laporan laba rugi dan penghasilan komperhensif lain, 2 (dua) laporan perubahan ekuitas, 2 (dua) laporan arus kas, serta catatan atas Laporan Keuangan terkait.

Laporan Keuangan Interim juga harus disajikan dengan informasi komparatif periode interim sebelumnya kecuali untuk laporan interim posisi keuangan. Untuk laporan interim posisi keuangan, informasi komparatifnya selalu disajikan dengan laporan posisi keuangan akhir periode tahun sebelumnya.

M. Laporan Keuangan Konsolidasian

Penyelenggara LPBBTI yang memiliki pengendalian atas entitas lain wajib mengonsolidasikan Laporan Keuangan entitas di bawah pengendalian tersebut dalam Laporan Keuangan Konsolidasian.

Dalam menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Keuangan entitas induk dan entitas anak digabungkan satu per satu (*line by line basis*) dengan menjumlahkan pos yang sejenis dari aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Transaksi antar entitas dalam satu grup dieliminasi terlebih dahulu sebelum dilakukan konsolidasian.

Laporan Keuangan Konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan serupa.

N. Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

1. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Penyelenggara LPBBTI dapat mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya apabila perubahan tersebut:

- a. dipersyaratkan oleh PSAK;
- b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undang; dan/atau
- c. menghasilkan Laporan Keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas Penyelenggara LPBBTI.

2. Perubahan Estimasi Akuntansi

- a. Perubahan estimasi akuntansi terjadi karena adanya perubahan keadaan, informasi baru, perkembangan baru, atau tambahan pengalaman, dan oleh karena itu tidak terkait dengan periode sebelumnya dan bukan merupakan koreksi suatu kesalahan.
- b. Penyelenggara LPBBTI mengakui dampak perubahan estimasi akuntansi secara prospektif apabila dalam laba rugi pada periode pelaporan:
 - 1) terjadi perubahan, jika dampak perubahan hanya periode itu; atau
 - 2) periode perubahan dan periode mendatang, apabila perubahan berdampak pada keduanya.

3. Kesalahan

Penyelenggara LPBBTI wajib mengoreksi kesalahan periode sebelumnya yang material secara retrospektif pada Laporan Keuangan

lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan terjadi.

Kesalahan periode sebelumnya dikoreksi dengan menyajikan kembali secara retrospektif (lihat poin 2.15) kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif kesalahan.

O. Penyajian Kembali (*Restatement*)

Dalam hal Penyelenggara LPBBTI menyajikan kembali atas Laporan Keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya, maka keterangan “disajikan kembali” diberikan secara jelas. Laporan Keuangan juga wajib menyediakan nomor referensi yang mengacu kepada catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan penyajian kembali tersebut pada kolom periode saat Laporan Keuangan tersebut disajikan kembali. Keterangan “disajikan kembali” dan referensi angka revisian dilaporkan masing-masing pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

Dalam hal Penyelenggara LPBBTI menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali secara retrospektif atas pos dalam Laporan Keuangan atau mereklasifikasi pos dalam Laporan Keuangan, maka Penyelenggara LPBBTI wajib menyajikan paling sedikit 3 (tiga) laporan posisi keuangan, 2 (dua) laporan untuk tiap jenis laporan lainnya, dan catatan atas laporan keuangan. Penyelenggara LPBBTI menyajikan laporan posisi keuangan pada:

1. akhir periode berjalan;
2. akhir periode terdekat sebelumnya; dan
3. awal periode terdekat sebelumnya.

P. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yang menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas Penyelenggara LPBBTI pada akhir periode.

Pada laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas harus dikelompokkan dalam aset lancar dan aset tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Akun aset disajikan berdasarkan urutan likuiditas, sedangkan akun liabilitas dilaporkan berdasarkan urutan jatuh tempo.

Q. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (laporan penghasilan komprehensif) merupakan laporan yang menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain terdiri dari dua komponen yaitu:

1. laba rugi; dan
2. penghasilan komprehensif lain.

Penyelenggara LPBBTI wajib menyajikan seluruh penghasilan dan beban yang diakui dalam satu periode dilaporkan dalam satu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Komponen utama laporan laba rugi komprehensif disajikan dengan menggunakan metode fungsi beban. Penyelenggara LPBBTI wajib mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban.

Penghasilan komprehensif lain berisi pos penghasilan dan beban termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh SAK.

Komponen penghasilan komprehensif lain meliputi:

1. yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi, antara lain:
 - a. saldo surplus revaluasi aset tetap;
 - b. pengukuran kembali atas program imbalan pasti;
 - c. bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan/atau ventura bersama; dan
 - d. keuntungan dan kerugian dari investasi pada instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan SAK.
2. yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi, antara lain:
 - a. selisih kurs penjabaran Laporan Keuangan dalam valuta asing;
 - b. keuntungan dan kerugian dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai SAK; dan
 - c. bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas.
3. Penyelenggara LPBBI menyajikan komponen penghasilan komprehensif lain sebesar jumlah sebelum dampak pajak terkait, kecuali untuk bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan/atau ventura bersama disajikan setelah dampak pajak terkait.

R. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam aktivitas Penyelenggara LPBBI selama periode pelaporan dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Komponen Utama Laporan Arus Kas meliputi:

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - a. Arus kas dari aktivitas operasi merupakan arus kas yang terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan Penyelenggara LPBBI. Oleh karena itu, arus kas ini pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba rugi.
 - b. Penyelenggara LPBBI wajib menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung (*direct method*).
 - c. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan wajib diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali apabila secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas investasi dan pendanaan.
2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan perolehan dan/atau pelepasan sumber daya yang bertujuan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.
3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan arus kas yang timbul dari penerimaan dan pengeluaran kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas dan pinjaman Penyelenggara LPBBI.

S. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan berisi informasi tambahan atas pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

Penyelenggara LPBBTI wajib menyajikan catatan atas Laporan Keuangan yang memberikan deskriptif naratif atas pemisahan pos-pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan dan informasi mengenai pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Penyelenggara LPBBTI wajib menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan dengan urutan sebagai berikut:

1. gambaran umum Penyelenggara LPBBTI;
2. dasar penyusunan Laporan Keuangan dan ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan;
3. informasi tambahan untuk pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos; dan
4. pengungkapan lainnya yang antara lain meliputi:
 - a. informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam Laporan Keuangan; dan
 - b. informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan, akan disajikan sebagai *supplementary information*.

Penyelenggara LPBBTI wajib menyajikan catatan atas Laporan Keuangan secara sistematis dan membuat referensi silang atas setiap pos dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penyelenggara LPBBTI wajib menambahkan informasi tambahan mengenai saldo *escrow* yang digunakan dalam kegiatan usaha dengan merinci hak *lender*, *borrower*, pihak ketiga, dan hak Penyelenggara LPBBTI sendiri. Pengungkapan saldo *escrow* merinci nilai awal, total mutasi dan nilai akhir dari total saldo *escrow* yang dimiliki oleh *lender*, *borrower*, pihak ketiga dan Penyelenggara LPBBTI sendiri.

Penyelenggara LPBBTI wajib mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi. Pihak berelasi terdiri dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) sesuai dengan definisi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan juga pihak pihak berelasi lainnya sesuai dengan definisi dalam PSAK 7 Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Hal hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah sebagaimana yang diminta oleh PSAK 7.

BAB III AKUNTANSI ASET

A. Pengertian dan Karakteristik

1. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomis di masa depan diharapkan akan diperoleh.
2. Manfaat ekonomis masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan aktivitas operasional perusahaan. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas.
3. Aset perusahaan berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Perusahaan biasanya memperoleh aset melalui pembelian, tetapi transaksi atau peristiwa lain juga dapat menghasilkan aset, misalnya dengan pembangunan sendiri atau properti perusahaan yang diterima dari pemerintah.
4. Aset yang dimiliki perusahaan antara lain:
 - a. Aset lancar
Aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonominya melalui penjualan atau pemakaian dalam kurun waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - b. Aset tidak lancar
Aset tidak lancar adalah aset yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi melalui pemakaian atau pelepasan dalam kurun waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

B. Aset Lancar

1. Kas dan Setara Kas
 - a. Definisi
 - 1) Kas adalah uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan rekening giro.
 - 2) Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.
 - b. Dasar Pengaturan
 - 1) Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.
 - 2) PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan.
 - 3) PSAK 2 Laporan Arus Kas.
 - c. Penjelasan
 - 1) Kas antara lain terdiri atas kas rupiah dan valuta asing, giro pada bank, dan *deposit on call*.
 - 2) Kas juga dapat berupa saldo rupiah atau valuta asing pada *e-wallet* milik Penyelenggara LPBBTI yang telah menjadi hak perusahaan untuk penggunaannya.
 - 3) Kas juga termasuk saldo rupiah pada *escrow account* Penyelenggara LPBBTI yang telah menjadi hak perusahaan untuk penggunaannya. Saldo pada *escrow account* yang diakui

tidak termasuk saldo yang menjadi hak *lender* maupun *borrower* atau pihak ketiga lainnya.

- 4) Manajemen kas Penyelenggara LPBBTI wajib menggunakan rekening bank tersendiri untuk kebutuhan operasional. Rekening operasional ini wajib terpisah dengan rekening *escrow account*.
 - 5) Aset kripto (seperti *bitcoin* dan *ethereum*) dan logam mulia (seperti emas dan koin dirham) tidak bisa diakui sebagai kas walaupun bersifat likuid.
 - 6) Setara kas antara lain terdiri dari deposito dengan jangka waktu tiga bulan, meliputi *deposit on call*, deposito berjangka, dan sertifikat deposito yang berjangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan (walaupun deposito tersebut *automatic roll over*).
 - 7) Cakupan kas dan setara kas tidak termasuk kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya lebih dari satu tahun, misalnya deposito yang dijaminan.
 - 8) Kas dan setara kas merupakan salah satu komponen alat likuid untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan sebagai setara kas, suatu investasi harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Oleh karena itu, investasi pada umumnya memenuhi syarat sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu singkat, misalnya tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya.
- d. Perlakuan Akuntansi
- 1) Pengakuan dan Pengukuran
 - a) Kas dan setara kas diakui pada saat diterima sebesar nilai nominal.
 - b) Kas valuta asing diakui pada saat diperoleh sebesar nilai nominal dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.
 - c) Giro bank dan deposito diakui pada saat penempatan dana sebesar nilai nominal. Biaya materai, administrasi, dan biaya lain yang dibebankan oleh pihak bank diakui sebagai beban.
 - d) Pendapatan bunga deposito (*deposit on call*, deposito berjangka, dan sertifikat deposito) diakui secara akrual sesuai dengan besarnya bunga yang akan diterima.
 - e) Kas dan setara kas dihentikan pengakuannya pada saat digunakan.
 - 2) Penyajian
Kas dan setara kas disajikan dalam kelompok aset lancar pada laporan posisi keuangan.
 - 3) Pengungkapan
Perusahaan mengungkapkan:
 - a) komponen kas dan setara kas serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas;
 - b) kas dan setara kas yang mengalami penurunan nilai apabila ada perubahan selisih kurs, misalnya untuk setara kas dalam mata uang asing;

- c) pengungkapan lain yang dapat membantu pengguna laporan keuangan memahami kondisi posisi kas perusahaan.
- e. Ilustrasi Jurnal
 - 1) Pada saat penerimaan kas
 - Db Kas dan setara kas
 - Kr Pos terkait
 - 2) Pada saat pengeluaran/penggunaan kas
 - Db Pos terkait
 - Kr Kas dan setara kas
- 2. Piutang Usaha dan Piutang Lain Lain
 - a. Definisi

Piutang usaha adalah hak perusahaan untuk menagih kepada pihak lain dalam bentuk uang yang timbul dari transaksi usaha perusahaan. Piutang lain-lain adalah piutang lainnya selain piutang usaha.
 - b. Dasar Pengaturan
 - 1) Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.
 - 2) PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan.
 - 3) PSAK 71 Instrumen Keuangan.
 - c. Penjelasan
 - 1) Piutang usaha meliputi piutang yang timbul dari jasa yang diterima perusahaan dari usaha pinjam meminjam/pendanaan bersama.
 - 2) Piutang usaha adalah piutang yang diharapkan dapat tertagih dalam satu tahun atau siklus usaha normal.
 - 3) Piutang usaha merupakan aset keuangan dalam kelompok aset keuangan biaya diamortisasi (*amortised cost*).
 - 4) Penurunan nilai atas piutang ditentukan secara kolektif menggunakan metode kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*).
 - d. Perlakuan Akuntansi
 - 1) Pengakuan dan Pengukuran
 - a) Piutang usaha diakui pada saat perusahaan telah menyerahkan jasa namun belum dilunasi oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal pelaporan.
 - b) Pengukuran awal piutang usaha sebesar nilai yang disepakati dalam perjanjian. Namun jika pembayaran ditangguhkan melebihi jangka waktu kredit normal (satu tahun) maka piutang usaha diakui sebesar nilai kini dari perkiraan arus kas masuk masa depan.
 - c) Penurunan nilai atas piutang usaha diakui sebagai kerugian dengan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) berdasarkan data historis dan potensi gagal bayar pelanggan di masa depan.
 - d) Bukti objektif bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai meliputi data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa-peristiwa yang merugikan berikut ini:
 - (1) kesulitan keuangan signifikan yang dialami pihak yang berutang;

- (2) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran;
 - (3) pihak yang berpiutang, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak yang berutang;
 - (4) memberikan keringanan (konsesi) pada pihak yang berutang yang tidak mungkin diberikan jika pihak berutang tidak mengalami kesulitan tersebut;
 - (5) terdapat kemungkinan bahwa pihak berutang akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
 - (6) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok piutang usaha sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap piutang usaha secara individual dalam kelompok piutang usaha tersebut, termasuk:
 - (a) memburuknya status pembayaran pihak berutang dalam kelompok tersebut (misalnya meningkatnya tunggakan pembayaran dan hanya mampu membayar cicilan bulanan minimal); atau
 - (b) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.
- e) Penentuan besarnya CKPN piutang usaha dilakukan sebagai berikut:
- (1) untuk piutang usaha yang signifikan dilakukan secara individual;
 - (2) untuk piutang usaha yang tidak signifikan jika tersedia data yang memadai dilakukan secara individual, namun jika tidak terdapat data yang memadai dilakukan secara kolektif;
 - (3) Umur piutang di bawah 12 bulan dapat menggunakan metode *simplified approach* (pendekatan yang disederhanakan), sedangkan untuk umur piutang usaha lebih dari 12 bulan dapat menggunakan metode *general approach* (pendekatan umum) sesuai dengan Par. 5.5.1 PSAK 71 “Instrumen Keuangan”. CKPN kolektif yang diukur dengan metode *simplified approach* (dalam PSAK 71) dibentuk cadangan apabila piutang memiliki bukti adanya kenaikan risiko kredit yang signifikan;
 - (4) besarnya CKPN kolektif diukur dengan mengalikan *probability of default (PD)* dikalikan *Loss Given Default (LGD)* dan dikalikan dengan *Exposure At Default (EAD)*;
 - (5) *Probability of Default (PD)* diukur sesuai dengan klasifikasi umur tunggakan piutang. Besaran PD diukur dengan melakukan analisis migrasi piutang di masa lalu dan menambahkan unsur “forward looking” dengan melihat kemungkinan ke depan dari pelanggan mengalami gagal bayar;
 - (6) *Loss Given Default (LGD)* adalah besaran kerugian yang akan tercapai bila pelanggan mengalami gagal bayar.

Bila pelanggan tidak memberikan jaminan atas piutang maka LGD dianggap 100%;

- (7) *Exposure At Default* (EAD) adalah besaran jumlah eksposur piutang untuk setiap klasifikasi umur tunggakan piutang, dengan mempertimbangkan nilai waktu atas uang (*time value of money*);
 - (8) klasifikasi umur tunggakan piutang dapat berbeda-beda untuk setiap Penyelenggara LPBBTI. Klasifikasi umur tunggakan piutang dapat mempertimbangkan data historis tunggakan piutang;
 - (9) persentase besarnya CKPN untuk setiap klasifikasi umur piutang ditentukan oleh manajemen dan ditinjau ulang sedikitnya 1 tahun sekali.
- f) Pemulihan nilai atas piutang usaha diakui sebagai keuntungan atau beban penyisihan negatif dan mengurangi cadangan kerugian penurunan nilai maksimal sebesar jumlah penurunan nilai yang diakui sebelumnya. Hal-hal yang dapat dijadikan indikasi terjadinya pemulihan nilai antara lain:
- (1) terdapat perubahan estimasi arus kas dari pembayaran piutang yang lebih baik;
 - (2) terdapat perubahan estimasi persentase penyisihan piutang secara kolektif menjadi lebih kecil dari persentase kolektif sebelumnya;
 - (3) penerimaan kas dari piutang yang sudah dihapusbukukan dianggap nol (CKPN 100%).

2) Penyajian

Piutang usaha disajikan sebagai pos tersendiri dalam kelompok aset lancar pada laporan posisi keuangan dinilai sebesar nilai neto yaitu jumlah piutang yang akan diterima dikurangi dengan cadangan kerugian piutang.

3) Pengungkapan

Perusahaan mengungkapkan:

- a) klasifikasi piutang usaha berdasarkan jenis usaha dan jumlah brutonya, diikuti dengan CKPN;
- b) klasifikasi piutang usaha atas umur piutang;
- c) dasar pembentukan penurunan nilai atas piutang usaha;
- d) pengungkapan lain.

Penghapusbukuan piutang diatur lebih lanjut dalam kebijakan Penyelenggara LPBBTI. Piutang dihapusbukukan apabila memenuhi syarat penghapusbukuan (*derecognition*) pada PSAK 71.

e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat pengakuan awal piutang
Db Piutang usaha/lain lain
Kr Pendapatan terkait
- 2) Pada saat pelunasan/pembayaran
Db Kas dan setara kas
Kr Piutang usaha
- 3) Pada saat pembentukan CKPN
Db Rugi penurunan nilai piutang usaha

- Kr CKPN piutang usaha
 - 4) Pada saat pemulihan nilai piutang
 - Db CKPN piutang usaha
 - Kr Keuntungan pemulihan nilai piutang usaha atau
 - Db CKPN piutang usaha
 - Kr Rugi penurunan nilai piutang usaha
 - 5) Saat penghapusbukuan piutang (piutang *fee* atas klaim asuransi)
 - Db CKPN piutang usaha
 - Kr Piutang usaha
 - 6) Pada saat penerimaan kas atas piutang yang sudah dihapusbukukan
 - Db CKPN piutang usaha
 - Kr Untung pemulihan nilai piutang usaha dan
 - Db Kas dan setara kas
 - Kr Piutang usaha
3. Biaya Dibayar di Muka
- a. Definisi

Biaya dibayar di muka adalah pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak ketiga namun manfaatnya belum dinikmati seluruhnya dalam satu periode pelaporan.
 - b. Dasar Pengaturan
 - 1) Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.
 - 2) PSAK 73 Sewa.
 - c. Penjelasan
 - 1) Biaya dibayar di muka merupakan jumlah beban yang sudah dibayarkan oleh perusahaan dalam tahun berjalan namun manfaatnya baru akan dinikmati seluruhnya pada masa yang akan datang.
 - 2) Biaya dibayar di muka dicatat dengan menggunakan pendekatan aset (*financial position approach*).
 - 3) Biaya dibayar di muka berkurang pada saat jasa atau manfaat diterima atau habis masanya.
 - 4) Biaya dibayar di muka antara lain beban asuransi atau beban sewa yang dibayar di muka.
 - d. Perlakuan Akuntansi
 - 1) Pengakuan dan Pengukuran
 - a) Biaya dibayar di muka diakui pada saat akhir periode pelaporan sebesar jumlah manfaat yang belum dinikmati dan akan dibebankan pada periode berikutnya.
 - b) Biaya dibayar di muka akan berkurang secara sistematis dan proporsional sejalan dengan berlalunya waktu.
 - 2) Penyajian

Biaya dibayar di muka disajikan sebagai pos tersendiri dalam aset lancar pada laporan posisi keuangan.
 - 3) Pengungkapan
 - a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan.

- b) Rincian biaya dibayar di muka kepada pihak ketiga dan pihak berelasi.
 - c) Pengungkapan lain.
 - e. Ilustrasi Jurnal
 - 1) Pada saat pembayaran biaya dibayar di muka
 - Db Biaya dibayar di muka
 - Kr Kas dan setara kas
 - 2) Pada saat dilakukan penyesuaian pada akhir periode perolehan
 - Db Beban asuransi/beban lain
 - Kr Biaya dibayar di muka
4. Uang Jaminan/Deposit
- a. Definisi

Uang jaminan/deposit adalah yang dipakai sebagai jaminan atas transaksi yang telah disepakati dengan pihak ketiga sampai batas waktu yang telah ditentukan. Uang jaminan termasuk dalam aset karena suatu saat akan dapat ditagih kembali ke perusahaan apabila syarat pengembalian terpenuhi.
 - b. Dasar Pengaturan
 - 1) Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan
 - 2) PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan
 - c. Penjelasan
 - 1) Uang jaminan merupakan jumlah jaminan yang harus diserahkan oleh perusahaan atas transaksi yang telah disepakati dengan pihak ketiga.
 - 2) Pengukuran awal uang jaminan sebesar nilai yang disepakati dalam perjanjian.
 - 3) Uang jaminan akan diterima kembali jika transaksi kepada pihak ketiga telah habis masanya.
 - 4) Uang jaminan antara lain uang jaminan gedung, uang deposit asuransi, uang deposit *credit scoring*, dan uang deposit tanda tangan elektronik.
 - d. Perlakuan Akuntansi
 - 1) Pengakuan dan Pengukuran
 - a) Uang jaminan diakui pada saat akhir periode pelaporan sebesar jumlah yang telah diserahkan pada pihak ketiga.
 - b) Untuk uang jaminan yang signifikan dilakukan secara individual, namun jika tidak signifikan dilakukan secara kolektif.
 - 2) Penyajian

Uang jaminan disajikan sebagai pos tersendiri dalam aset lancar pada laporan posisi keuangan apabila uang jaminannya dicairkan dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan.
 - 3) Pengungkapan
 - a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan.
 - b) Rincian uang jaminan kepada pihak ketiga dan pihak berelasi.
 - c) Pengungkapan lain.
 - e. Ilustrasi Jurnal
 - 1) Pada saat pembayaran uang jaminan

Db Uang jaminan

Kr Kas dan setara kas

2) Pada saat dilakukan pengembalian uang jaminan

Db Kas dan setara kas

Kr Uang jaminan

C. Aset Tidak Lancar

1. Aset Tetap

a. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang:

1) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atas jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi; dan

2) diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain, contohnya PSAK 53 Pembayaran Berbasis Saham.

b. Dasar Pengaturan

1) PSAK 16 Aset Tetap

2) PSAK 73 Sewa

3) PSAK 48 Penurunan Nilai Aset

4) PSAK 58 Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan.

c. Penjelasan

1) Aset tetap terdiri dari:

a) tanah yang:

(1) digunakan sendiri bukan untuk tujuan dijual dalam kegiatan sehari-hari;

(2) dimiliki untuk digunakan sendiri di masa depan;

b) bangunan, meliputi gedung kantor, yaitu bangunan yang dipergunakan untuk tempat kegiatan operasional perusahaan;

c) kendaraan, meliputi mobil, sepeda motor, dan kendaraan lain;

d) peralatan kantor, meliputi:

(1) mesin kantor, antara lain: mesin ketik, mesin arsip, mesin penghancur dokumen, mesin fotokopi, mesin PABX, dan mesin laminating;

(2) perabot/meubelair, antara lain: sofa, meja, kursi, lemari, dan *filing cabinet*.

e) peralatan komputer, antara lain: seperangkat komputer (*CPU, keyboard, monitor*), mesin cetak (*printer*), *server*, dan jaringan;

f) peralatan lain, antara lain: *air conditioner*, generator listrik, dan brankas.

- 2) Aset tetap dapat diperoleh antara lain dibeli dalam kondisi siap pakai, dibangun terlebih dahulu sampai siap pakai, atau dari transaksi sewa.
 - 3) Aset tetap yang dibeli dalam kondisi siap pakai adalah aset yang dibeli perusahaan dengan nilai nominal tertentu sesuai dengan kebijakan masing-masing Penyelenggara LPBBTI. Batasan nilai ini dievaluasi secara periodik oleh manajemen puncak Penyelenggara LPBBTI.
 - 4) Aset tetap yang didapatkan dari transaksi sewa dicatat sebagai aset hak guna apabila kontrak sewa melebihi periode 12 bulan atau aset yang disewa bukan aset yang bernilai rendah. Sesuai dengan PSAK 73 sewa aset yang bernilai rendah biasanya adalah aset peralatan kantor yang dapat dipindahkan seperti mesin fax, printer, laptop, dan dispenser air. Penyewaan kendaraan tidak dapat dianggap aset bernilai rendah sekalipun nilai sewanya tidak besar (mobil bekas) karena kendaraan memiliki nilai perolehan awal yang tidak rendah. Tidak ada batasan minimum/maksimum harga untuk definisi aset bernilai rendah.
 - 5) Jika aset utama sudah habis umur ekonomisnya, maka renovasi yang menambah umur dikapitalisasi dan didepresiasi sesuai dengan estimasi manfaat aset setelah renovasi. Estimasi manfaat ekonomis dari aset tetap ditetapkan oleh direksi setelah mempertimbangkan pendapat ahli.
 - 6) Pengeluaran untuk perolehan aset tetap yang diakui sebagai aset tetap mengacu pada batasan jumlah yang ditetapkan manajemen.
 - 7) Pada setiap tanggal pelaporan, perusahaan harus melakukan revaluasi umur manfaat, metode penyusutan, dan nilai residu aset tetap.
 - 8) Biaya perawatan sehari-hari tidak boleh diakui sebagai bagian dari aset bersangkutan tetapi diakui dalam laba rugi saat terjadinya.
 - 9) Entitas juga dapat memperoleh komponen aset tetap tertentu untuk melakukan penggantian yang tidak terlalu sering dilakukan, seperti mengganti dinding interior suatu bangunan atau melakukan suatu penggantian yang tidak berulang. Sesuai dengan prinsip pengakuan, entitas mengakui biaya penggantian komponen suatu aset dalam jumlah tercatat aset saat biaya itu terjadi jika pengeluaran tersebut memenuhi kriteria untuk diakui sebagai bagian dari aset.
- d. Perlakuan Akuntansi
- 1) Pengakuan Awal dan Penghentian Pengakuan
Aset tetap diakui pertama kali sesuai dengan harga perolehannya.
Biaya-biaya perolehan awal:
 - a) biaya perolehan aset tetap terdiri dari:
 - (1) harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak yang tidak dapat dikreditkan (*non-refundable*), serta diskon dan potongan lain;
 - (2) biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen;

- (3) estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap, serta restorasi lokasi aset tetap.
- b) contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung:
 - (1) biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap;
 - (2) biaya penyiapan lahan;
 - (3) biaya handling dan penyerahan;
 - (4) biaya perakitan dan instalasi;
 - (5) biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik;
 - (6) komisi profesional, misalnya biaya arsitek;
 - (7) biaya pinjaman untuk pendanaan pembangunan aset tetap selama konstruksi.
- c) contoh biaya-biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset tetap adalah:
 - (1) biaya pembukaan fasilitas baru dan biaya peresmian;
 - (2) biaya pengenalan, termasuk biaya iklan, dan aktivitas promosi;
 - (3) biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru, termasuk biaya pelatihan staf;
 - (4) biaya administrasi dan biaya *overhead* umum lainnya.
- d) harga perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian dengan aset tetap yang tidak serupa/tidak sejenis atau aset lain. Biaya dari pos semacam itu diukur pada nilai wajar aset yang dilepas atau diperoleh, mana yang lebih andal, setelah disesuaikan dengan jumlah dana yang diterima/diserahkan.

2) Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberikan manfaat ekonomis di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, diakui sebagai tambahan nilai aset yang bersangkutan. Pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi dan diakui sebagai penambah jumlah tercatat aset tetap dengan mengurangi akumulasi penyusutan jika menambah umur manfaat. Namun jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis selain umur manfaat, maka menambah biaya perolehan.

3) Penghentian Pengakuan

- a) Aset tetap dihentikan pengakuannya dari kelompok aset tetap jika:
 - (1) dijual;
 - (2) dihibahkan; atau
 - (3) tidak lagi memiliki manfaat ekonomis masa depan (ditarik secara permanen dari penggunaannya).

- b) Laba atau rugi dari penghentian pengakuan diakui pada periode terjadinya.
- 4) Penyusutan
- a) Aset tetap harus disusutkan secara sistematis selama umur manfaatnya.
 - b) Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan aset tetap dikurangi nilai residunya.
 - c) Umur manfaat adalah periode penggunaan yang diharapkan dari suatu aset tetap.
 - d) Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diperkirakan pada akhir umur manfaatnya.
 - e) Umur ekonomis aset tetap tanah dengan hak hukum berupa hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai tidak terbatas sehingga tidak disusutkan, kecuali terdapat bukti sebaliknya bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.
 - f) Beberapa contoh yang menyebabkan umur ekonomis tanah menjadi terbatas antara lain:
 - (1) kondisi kualitas tanah tidak layak lagi digunakan dalam operasi utama;
 - (2) sifat operasi utama meninggalkan tanah dan bangunan begitu saja jika proyek selesai;
 - (3) prediksi manajemen atas kepastian perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.
- 5) Penurunan Nilai
- a) Pada setiap tanggal pelaporan, perusahaan mereviu ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi penurunan nilai aset, maka harus menaksir jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut.
 - b) Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, entitas minimal mempertimbangkan hal-hal berikut ini:
 - (1) informasi dari sumber-sumber eksternal:
 - (a) terdapat indikasi yang dapat diobservasi bahwa nilai aset telah turun secara signifikan selama periode tersebut lebih dari yang diperkirakan sebagai akibat dari berjalannya waktu atau pemakaian normal;
 - (b) perubahan signifikan dalam hal teknologi, pasar, ekonomi atau lingkup hukum tempat entitas beroperasi atau di pasar tempat aset dikaryakan, yang berdampak merugikan terhadap entitas, telah terjadi selama periode tersebut, atau akan terjadi dalam waktu dekat;
 - (c) suku bunga pasar atau tingkat imbal hasil pasar lain atas investasi telah meningkat selama periode tersebut, dan kenaikan tersebut mungkin akan memengaruhi tingkat diskonto yang digunakan

dalam menghitung nilai pakai aset dan menurunkan jumlah terpulihkan aset secara material.

- (d) jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya.
- (2) informasi dari sumber-sumber internal:
 - (a) terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset;
 - (b) telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang berdampak merugikan sehubungan dengan seberapa jauh, atau cara, aset digunakan atau diperkirakan akan digunakan. Perubahan ini termasuk dalam hal aset menjadi tidak digunakan, rencana untuk menghentikan atau restrukturisasi operasi yang di dalamnya aset digunakan, rencana untuk melepas aset sebelum tanggal yang diperkirakan sebelumnya, dan penilaian kembali umur manfaat aset dari takterbatas menjadi terbatas;
 - (c) terdapat bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk, atau akan lebih buruk, dari yang diperkirakan.
- c) Indikasi penurunan nilai aset yang disajikan di atas belum meliputi seluruh indikasi yang mungkin muncul. Perseroan mungkin mengidentifikasi hal-hal lain yang secara potensial berpengaruh terhadap penurunan nilai aset tetap dan menjadikan indikasi tersebut sebagai dasar untuk menentukan niat yang dapat diperoleh kembali.
- d) Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali lebih rendah dibandingkan jumlah tercatat, maka perusahaan mengakui kerugian penurunan nilai.
- e) Aset tetap tanah yang secara fisik menyusut luasnya karena pengikisan alam, secara proporsional mengurangi nilai tercatatnya dan dibebankan pada laporan laba rugi.
- f) Seluruh kerugian tersebut diakui pada laporan laba rugi pada periode terjadinya.
- g) Pemulihan nilai aset tetap diakui sebagai keuntungan:
 - (1) sebesar jumlah yang tidak melampaui rugi penurunan nilai yang pernah diakui sebelumnya; dan
 - (2) tidak mengakibatkan jumlah tercatat aset tetap melampaui biaya perolehan seandainya didepresiasi secara normal (tanpa penurunan nilai).
- 6) Model Pengukuran
Pedoman ini menerapkan model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk pengukuran setelah pengakuan awal untuk aset tetap. Apabila Penyelenggara LPBBI ingin menggunakan model revaluasi, maka perusahaan wajib menerapkan persyaratan model revaluasi dalam PSAK 16.
- 7) Penyajian
 - a) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, jika ada.

- b) Aset yang diperoleh dengan cara sewa sesuai dengan PSAK 73 disajikan sebagai bagian aset tetap dalam kelompok tersendiri. Liabilitas pembiayaan yang bersangkutan harus terpisah dari liabilitas lainnya.

8) Pengungkapan

Perusahaan harus mengungkapkan:

- a) kebijakan akuntansi yang diterapkan, misalnya dasar pengukuran;
- b) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto aset tetap;
- c) metode penyusutan yang digunakan;
- d) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- e) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal dan akhir periode;
- f) jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan;
- g) perubahan metode penyusutan harus diperlakukan sebagai suatu perubahan kebijakan akuntansi dengan alasan perubahan;
- h) pengungkapan lainnya.

e. Ilustrasi Jurnal

1) Perolehan Aset tetap dapat dilakukan melalui:

- a) Pembelian
 - Db Aset tetap
 - Kr Kas dan setara kas/utang
- b) Pembelian tanah
 - Db Tanah
 - Db Beban yang ditangguhkan - hak atas tanah
 - Kr Kas dan setara kas/utang
- c) Pertukaran aset
 - Db Aset tetap (baru)
 - Db Akumulasi penyusutan
 - Kr Aset tetap (lama)

Dalam pertukaran aset tetap yang tidak sejenis dimungkinkan terjadi keuntungan atau kerugian pertukaran aset tetap dan pengeluaran atau penerimaan kas.
- d) Penerimaan hibah berupa aset tetap
 - Db Aset tetap
 - Kr Penghasilan tangguhan

Pada saat penyusutan aset yang berasal dari hibah

 - Db Beban penyusutan
 - Kr Akumulasi penyusutan
 - Db Penghasilan tangguhan
 - Kr Penghasilan (pada jumlah yang proporsional dengan beban penyusutan)
- e) Sewa
 - Db Aset hak guna
 - Kr Liabilitas sewa

- f) Alokasi Penyusutan
 - Db Beban penyusutan
 - Kr Akumulasi penyusutan
 - g) Pengeluaran setelah perolehan
 - (1) Penggantian/*replacement* (menambah masa manfaat)
 - Db Akumulasi penyusutan
 - Kr Kas dan setara kas
 - (2) Penggantian/*replacement* (menambah kapasitas)
 - Db Aset tetap
 - Kr Kas dan setara kas
 - (3) Pada saat penurunan nilai
 - Db Rugi penurunan nilai
 - Kr Akumulasi penurunan nilai (*contra account*)
 - (4) Pada saat pemulihan
 - (a) Pada saat pemulihan aset tetap yang tidak terdepresiasi (*non-depreciable asset*)
 - Db Akumulasi penurunan nilai (*contra account*)
 - Kr Untung pemulihan nilai
 - (b) Pada saat pemulihan aset tetap yang terdepresiasi (*depreciable asset*)
 - Db Akumulasi penurunan nilai (*contra account*)
 - Kr Untung pemulihan nilai
 - Kr Akumulasi penyusutan
 - (5) Pada saat penghentian aset tetap
 - Db Kerugian dari penghentian aset tetap (jika ada)
 - Db Akumulasi penurunan nilai
 - Db Akumulasi penyusutan
 - Kr Aset tetap
 - (6) Pada saat penjualan
 - Db Kas dan setara kas
 - Db Akumulasi penyusutan
 - Kr Aset tetap
- Dalam penjualan aset tetap dimungkinkan adanya keuntungan/kerugian.

2. Aset Takberwujud

a. Definisi

Aset takberwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administrasi.

b. Dasar Pengaturan

- 1) PSAK 19 Aset Takberwujud.
- 2) PSAK 48 Penurunan Nilai Aset.

c. Penjelasan

- 1) Aset takberwujud antara lain berupa lisensi atas penggunaan perangkat lunak.
- 2) Suatu aset takberwujud dapat timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan pada suatu proyek internal).

Biaya pengembangan atas aset takberwujud baik yang dilakukan secara proyek internal maupun eksternal dikapitalisasi, jika dan hanya jika, perusahaan dapat menunjukkan semua hal berikut ini:

- a) kelayakan teknis penyelesaian aset takberwujud tersebut sehingga dapat digunakan;
 - b) niat untuk menyelesaikan aset takberwujud dan menggunakannya;
 - c) kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset takberwujud tersebut;
 - d) cara aset takberwujud menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomis masa depan, yaitu perusahaan harus mampu menunjukkan kegunaan aset takberwujud tersebut;
 - e) tersedianya sumber daya teknis, keuangan dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan aset takberwujud dan menggunakan aset tersebut; dan
 - f) kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset takberwujud selama pengembangannya.
- 3) Aset takberwujud memiliki kriteria sebagai berikut:
- a) dapat diidentifikasi;
 - b) adanya pengendalian sumber daya; dan
 - c) adanya manfaat ekonomis di masa depan.
- 4) Pengeluaran untuk riset tidak boleh diakui sebagai aset takberwujud.
Contoh-contoh kegiatan riset adalah:
- a) kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru;
 - b) pencarian, evaluasi, dan seleksi penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya;
 - c) pencarian alternatif produk, proses, sistem, atau jasa;
 - d) perumusan, desain, evaluasi, dan seleksi berbagai alternatif kemungkinan produk, proses, sistem, atau jasa.
- 5) Pengeluaran untuk pengembangan diakui sebagai aset takberwujud sepanjang memenuhi seluruh kriteria aset takberwujud. Contoh-contoh kegiatan pengembangan adalah:
- a) pengembangan piranti lunak komputer;
 - b) desain, konstruksi, dan pengujian alternatif produk, proses, sistem, atau jasa yang baru atau yang diperbaiki.
- 6) Biaya perolehan aset takberwujud yang dihasilkan terdiri dari semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung atau dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dilakukan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset mencakup, jika dapat diterapkan:
- a) pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset takberwujud;
 - b) gaji, upah, dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut;

- c) pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum dan amortisasi paten dan lisensi yang digunakan untuk menghasilkan aset; dan
 - d) *overhead* yang dibutuhkan untuk menghasilkan aset dan yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten kepada aset tersebut. Contohnya, alokasi dari depresiasi aset tetap yang digunakan dalam mengembangkan aset takberwujud.
- 7) Pengeluaran untuk perolehan aset takberwujud yang diakui sebagai aset takberwujud mengacu pada batasan jumlah yang ditetapkan manajemen.
- 8) Perusahaan menggunakan model biaya untuk pengukuran setelah perolehan awal atas aset takberwujud.
- d. Perlakuan Akuntansi
- 1) Pengakuan dan Pengukuran
 - a) Aset takberwujud diakui pada saat terjadinya beban untuk memperoleh aset tersebut sebesar biaya perolehan.
 - b) Biaya perolehan untuk pengembangan diakui sebagai beban pengembangan yang ditangguhkan.
 - c) Nilai residu aset takberwujud sama dengan nol, kecuali terdapat pasar aktif untuk aset takberwujud tersebut pada akhir pemanfaatan atau terdapat kesepakatan nilai jual aset tersebut kepada pihak ketiga.
 - d) Aset takberwujud yang tidak dapat ditentukan umur manfaatnya tidak diamortisasi, akan tetapi dilakukan tes penurunan nilai setiap akhir periode pelaporan.
 - e) Aset takberwujud yang memiliki umur manfaat diamortisasi dan dilakukan tes penurunan nilai jika terdapat indikasi penurunan nilai.
 - f) Aset takberwujud diamortisasi sebesar jumlah alokasi yang sistematis selama umur manfaatnya. Jumlah alokasi yang sistematis tersebut diakui sebagai beban amortisasi pada saat terjadinya.
 - 2) Penyajian

Aset takberwujud disajikan sebagai pos tersendiri dalam aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan.
 - 3) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

 - a) kebijakan akuntansi;
 - b) rincian aset takberwujud;
 - c) untuk setiap kelompok aset takberwujud yang dihasilkan secara internal dan lainnya;
 - d) masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan;
 - e) metode amortisasi yang digunakan;
 - f) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - g) unsur pada Laporan Keuangan yang di dalamnya terdapat amortisasi aset takberwujud dan rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan:

- (1) penambahan aset takberwujud yang terjadi dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam perusahaan dan dari penggabungan usaha;
- (2) penghentian dan pelepasan aset takberwujud;
- (3) amortisasi yang diakui selama periode berjalan; dan
- (4) perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.

e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat perolehan

Db Aset takberwujud
Kr Kas dan setara kas

- 2) Amortisasi aset takberwujud

Db Beban amortisasi
Kr Akumulasi amortisasi

- 3) Pada saat pengakuan penurunan nilai

Db Rugi penurunan nilai
Kr Akumulasi rugi penurunan nilai

- 4) Pada saat pemulihan nilai

Db Akumulasi rugi penurunan nilai
Kr Untung pemulihan nilai
Kr Akumulasi amortisasi (untuk aset takberwujud yang umur manfaatnya dapat ditentukan)

- 5) Pada saat penjualan

Db Kas dan setara kas
Db Akumulasi amortisasi (jika ada)
Kr Aset takberwujud

Dalam penjualan aset takberwujud dimungkinkan terjadi keuntungan atau kerugian.

- 6) Pada saat penghapusan

Db Rugi penghapusan
Db Akumulasi amortisasi
Db Akumulasi penurunan nilai (jika ada)
Kr Aset takberwujud

3. Aset Pajak Tangguhan

a. Definisi

- 1) Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya:
 - a) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; dan
 - b) sisa kompensasi kerugian.
- 2) Perbedaan temporer atau beda waktu adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas secara akuntansi (*accounting base*) dengan dasar pengenaan pajak (*tax base*). Perbedaan temporer dapat berupa:
 - a) perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas tersebut diselesaikan; atau

- b) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas tersebut diselesaikan.
- b. Dasar Pengaturan
PSAK 46 Pajak Penghasilan.
- c. Penjelasan
- 1) Pengakuan aset pajak tangguhan berarti perusahaan akan dapat memulihkan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut.
 - 2) Pengakuan aset pajak tangguhan pada saat pengakuan awal, besar kemungkinan bahwa pemulihan aset akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang yang lebih kecil, kecuali pengakuan awal aset atau liabilitas pada suatu transaksi yang:
 - a) bukan transaksi kombinasi bisnis; dan
 - b) tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba fiskal.
 - 3) Perseroan memperlakukan konsekuensi pajak dari suatu transaksi dan kejadian lain sama dengan cara dalam memperlakukan transaksi dan kejadian tersebut.
 - 4) Transaksi dan kejadian lain yang diakui pada laporan laba rugi, konsekuensi, atau pengaruh pajak dari transaksi dan kejadian tersebut harus diakui pula pada laporan laba rugi.
 - 5) Transaksi dan kejadian lain yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas, konsekuensi, atau pengaruh pajak dari transaksi dan kejadian tersebut harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
 - 6) Pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan pada suatu kombinasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, mempengaruhi saldo goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis tersebut.
- d. Perlakuan Akuntansi
- 1) Pengakuan dan Pengukuran
 - a) Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (nilai basis akuntansi lebih kecil dari pada nilai basis pajak).
 - b) Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan diakui sebagai aset pajak tangguhan.
 - c) Apabila diperkirakan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tidak dapat direalisasikan pada periode mendatang, maka jumlahnya harus diturunkan.
 - d) Penyisihan aset pajak tangguhan harus dievaluasi secara periodik dan apabila pada akhir periode selanjutnya ternyata aset pajak tangguhan diperkirakan dapat direalisasikan sepenuhnya atau dalam jumlah yang lebih besar, maka dapat dinaikan kembali.
 - 2) Penyajian
 - a) Aset pajak harus disajikan dalam aset.
 - b) Aset pajak tangguhan harus dibedakan dari piutang pajak/pajak dibayar dimuka.

- c) Entitas melakukan saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika:
 - (1) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
 - (2) memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.
 - d) Entitas melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:
 - (1) entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
 - (2) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.
- 3) Pengungkapan
- Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:
- a) kebijakan akuntansi yang diterapkan;
 - b) unsur-unsur utama beban (penghasilan) pajak;
 - c) jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas;
 - d) penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut ini:
 - (1) rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak hasil perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku; atau
 - (2) jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasi ke periode berikut, yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan pada laporan posisi keuangan;
 - e) untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap kelompok rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut:
 - (1) jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian;
 - (2) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi jika jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan
 - (3) untuk operasi yang tidak dilanjutkan, beban pajak yang berasal dari:
 - (a) keuntungan atau kerugian atas penghentian operasi; dan
 - (b) laba atau rugi dari aktivitas normal operasi yang tidak dilanjutkan untuk periode pelaporan, bersama

dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya yang disajikan pada laporan keuangan;

- f) Jumlah aset pajak tangguhan dan sifat bukti yang mendukung pengakuannya, jika:
 - (1) penggunaan aset pajak tangguhan bergantung pada apakah laba fiskal yang dapat dihasilkan pada periode mendatang melebihi laba dari realisasi perbedaan temporer kena pajak yang telah ada; dan
 - (2) perusahaan telah menderita kerugian pada periode berjalan atau periode sebelumnya;
 - g) pengungkapan lainnya.
- e. Ilustrasi Jurnal
- Pada saat pembentukan aset pajak tangguhan
- Db Aset Pajak Tangguhan
- Kr Pendapatan Pajak Tangguhan

BAB IV AKUNTANSI LIABILITAS DAN EKUITAS

A. Liabilitas

1. Pengertian dan Karakteristik

- a. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi.
- b. Karakteristik dasar liabilitas adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban. Kewajiban merupakan tugas atau tanggung jawab di mana entitas tidak memiliki kemampuan praktis untuk menghindarinya. Kewajiban selalu terutang kepada pihak (atau pihak-pihak) lain. Pihak lain dapat berupa orang atau entitas lain, sekelompok orang atau entitas lain, atau masyarakat pada umumnya. Tidak perlu mengetahui identitas pihak (atau pihak-pihak) kepada siapa kewajiban tersebut terutang. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundang-undangan yang disertai jumlah terutang untuk pembayaran barang dan jasa yang telah diterima. Kewajiban juga dapat timbul dari praktik bisnis yang lazim, kebiasaan, dan keinginan untuk memelihara hubungan bisnis yang baik atau bertindak dengan cara yang adil.
- c. Penyelesaian kewajiban kini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan:
 - 1) kewajiban untuk membayar kas.
 - 2) kewajiban untuk mengirim barang atau memberikan jasa.
 - 3) kewajiban untuk menukar sumber daya ekonomi dengan pihak lain dengan persyaratan yang tidak menguntungkan. Kewajiban tersebut termasuk, misalnya, kontrak serah (*forward contract*) untuk menjual sumber daya ekonomi dengan persyaratan yang saat ini tidak menguntungkan atau opsi yang memberikan hak kepada pihak lain untuk membeli sumber daya ekonomi dari entitas.
 - 4) kewajiban untuk mengalihkan sumber daya ekonomi jika peristiwa masa depan tertentu yang tidak pasti telah terjadi.
 - 5) kewajiban untuk menerbitkan instrumen keuangan jika instrumen keuangan tersebut akan mewajibkan entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi.
- d. Kewajiban timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Sebagai contoh, pembelian barang atau penggunaan jasa dapat menimbulkan utang usaha (kecuali kalau dibayarkan dimuka atau pada saat penyerahan).
- e. Kewajiban diakui dalam laporan posisi keuangan apabila kemungkinan besar akan mengakibatkan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.
- f. Liabilitas diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:
 - 1) Liabilitas jangka pendek.
 - 2) Liabilitas jangka Panjang.
- g. Pedoman ini tidak merinci semua jenis liabilitas jangka pendek yang mungkin dimiliki oleh Penyelenggara LPBBTI, pertimbangan

profesional atas materialitas perlu diterapkan jika suatu jenis liabilitas jangka pendek perlu disajikan terpisah dari liabilitas jangka pendek lainnya. Contoh pos liabilitas jangka pendek yang dapat disajikan terpisah jika nilainya material antara lain utang sewa, pendapatan ditangguhkan, dan lain lain.

2. Utang Usaha

a. Definisi

Utang usaha adalah liabilitas perusahaan untuk melunasi tagihan pihak lain dalam bentuk uang, yang timbul dari transaksi usaha perusahaan.

b. Dasar Pengaturan

- 1) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.
- 2) PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan.
- 3) PSAK 7 Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

c. Penjelasan

- 1) Utang usaha meliputi liabilitas kepada pemasok untuk pengadaan peralatan, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Contoh: pengadaan *server*, utang kartu kredit, utang jasa *payment gateway*, atau utang kepada pihak ketiga dalam mendukung operasional yang sudah disepakati diawal untuk dibayarkan perbulan.
- 2) Nilai utang usaha terdiri dari jumlah pokok utang dan bunga (jika ada), dan umumnya tidak ada diskonto atau premium atas utang usaha tersebut. Secara umum, jumlah tercatat utang usaha sama dengan biaya perolehan dan tidak ada amortisasi diskon atau premium.

d. Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan dan Pengukuran

a) Utang usaha diakui pada saat:

- (1) perusahaan telah menerima atau memiliki atau mengendalikan barang dan jasa yang diterima dari pemasok;
- (2) timbulnya liabilitas perusahaan untuk membayar atau menyerahkan sumber daya ekonomi lain yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

b) Pada awalnya utang usaha diakui sebesar biaya perolehan atau nilai yang disepakati dalam kontrak. Namun jika pembayaran ditangguhkan melebihi jangka waktu kredit normal (satu tahun) maka utang usaha diakui sebesar nilai kini dari perkiraan arus kas keluar masa depan.

c) Perusahaan mengeluarkan liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

2) Penyajian

Utang usaha disajikan sebagai pos tersendiri dalam kelompok liabilitas jangka pendek pada laporan posisi keuangan.

3) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- a) kebijakan akuntansi yang diterapkan, termasuk klasifikasi utang usaha dalam katagori diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
 - b) rincian utang usaha kepada pihak ketiga dan pihak berelasi;
 - c) risiko secara kualitatif termasuk tujuan, kebijakan dan proses pengelolaan risiko dan metode pengukuran risiko, serta perubahan dari periode sebelumnya;
 - d) risiko secara kuantitatif mencakup ringkasan data kuantitatif untuk risiko pada tanggal pelaporan, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar;
 - e) pengungkapan lainnya.
- e. Ilustrasi Jurnal
- 1) Pada saat diakui sebagai utang usaha
Db Pos terkait
Kr Utang usaha
 - 2) Pada saat pelunasan/pembayaran utang usaha
Db Utang usaha
Kr Kas dan setara kas

3. Utang Pajak

a. Definisi

Utang pajak adalah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tetapi belum disetorkan ke kas negara berdasarkan ketentuan yang berlaku.

b. Dasar Pengaturan

- 1) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.
- 2) PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan.
- 3) PSAK 46 Pajak Penghasilan.

c. Penjelasan

- 1) Utang pajak antara lain:
 - a) utang PPh Pasal 21;
 - b) utang PPh Pasal 23;
 - c) utang PPh Pasal 25;
 - d) utang PPh Pasal 26
 - e) utang PPh Pasal 29;
 - f) PPN keluaran dan masukan;
 - g) utang PPh final sewa tanah dan bangunan
- 2) Pembayaran utang pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 3) Apabila pada akhir tahun jumlah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPN dan PPh 25 yang disetorkan lebih kecil dari pajak terutang (kurang bayar), maka perusahaan mencatat sebagai utang pajak.

d. Perlakuan Akuntansi

- 1) Pengakuan dan Pengukuran
 - a) Utang pajak diakui pada saat terjadinya transaksi atau kejadian yang telah mewajibkan perusahaan untuk membayar atau menyetor pajak kepada negara.
 - b) Utang pajak dinilai sebesar:

- (1) PPh yang dipotong/dipungut tetapi belum disetorkan ke kas negara;
 - (2) PPN keluaran yang belum disetor ke kas negara;
 - (3) PPh pasal 29 yang belum dibayar berdasarkan SPT tahunan;
 - (4) pajak yang terutang berdasarkan SKPKB, SKPKBT, STP dan SK peninjauan kembali.
- 2) Penyajian
Utang pajak disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek pada laporan posisi keuangan.
 - 3) Pengungkapan
Pengungkapan atas utang pajak perusahaan merujuk pada pengungkapan aset pajak tangguhan.
- e. Ilustrasi Jurnal
- 1) Pada saat pengakuan utang pajak untuk PPh 21 dan 23
Db Beban terkait
Kr Utang pajak
 - 2) Pada saat pembayaran/penyetoran PPh 21 dan 23
Db Utang pajak
Kr Kas dan setara kas
 - 3) Pada saat pengakuan PPh pasal 25 pada setiap akhir bulan
Db Beban pajak
Kr Utang pajak
 - 4) Pada saat pembayaran angsuran PPh pasal 25
Db Uang muka pajak
Kr Kas dan setara kas
 - 5) Perhitungan PPh sementara (SPT) pada akhir tahun
 - a) Pada saat pengakuan beban pajak jika kurang bayar
Db Beban pajak
Kr Utang pajak
 - b) Pada saat pengakuan beban pajak jika lebih bayar
Tidak ada jurnal
 - c) Jumlah pajak berdasarkan SKP lebih kecil dari SPT tahunan (lebih bayar)
 - (1) Jika restitusi
Db Kas dan setara kas
Kr Pendapatan lain
 - (2) Jika kompensasi
Db Utang pajak
Kr Pendapatan lain
 - (3) Pada saat pembayaran/penyetoran PPN
Db PPN keluaran
Kr Kas dan setara kas
Kr PPN masukan
4. Biaya yang Masih Harus Dibayar
 - a. Definisi
Biaya yang masih harus dibayar adalah beban yang harus diakui hingga tanggal laporan posisi keuangan. Pada umumnya beban ini

belum dibayar karena dokumen penagihan belum diterima atau akibat jatuh tempo pembayaran.

b. Dasar Pengaturan

- 1) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
- 2) PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan
- 3) PSAK 24 Imbalan Kerja
- 4) PSAK 57 Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

c. Penjelasan

Beban yang masih harus dibayar terdiri dari:

- 1) beban langganan antara lain listrik, telepon, air, gas, internet kantor, dan lain lain;
- 2) beban yang sudah diterima manfaatnya dan belum dilunasi pada tanggal pelaporan, misalnya beban gaji dan tunjangan.

d. Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan dan Pengukuran

- a) Biaya yang harus dibayar diakui pada saat perusahaan menerima manfaat ekonomi dari pihak lain tetapi belum melunasi pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima tersebut.
- b) Biaya yang harus dibayar dinilai sebesar jumlah rupiah atau nilai tunai sumber daya ekonomi yang harus diserahkan kepada pihak lain untuk menyelesaikan liabilitas tersebut.

2) Penyajian

Biaya yang harus dibayar disajikan sebagai pos tersendiri dalam kelompok liabilitas jangka pendek pada laporan posisi keuangan.

3) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- a) kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- b) rincian biaya yang masih harus dibayar kepada pihak ketiga dan pihak berelasi;
- c) pengungkapan lain.

e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat pengakuan beban yang masih harus dibayar
Db Pos terkait
Kr Beban yang harus dibayar
- 2) Pada saat pembayaran/penyetoran
Db Beban yang harus dibayar
Kr Kas dan setara kas

5. Liabilitas Jangka Pendek Lain

a. Definisi

Liabilitas jangka pendek lain adalah pos yang dimaksudkan untuk menampung liabilitas perusahaan yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos liabilitas jangka pendek yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

b. Dasar Pengaturan

- 1) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

- 2) PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan.
- c. Penjelasan
 - 1) Seluruh liabilitas jangka pendek yang tidak memenuhi kriteria pos liabilitas jangka pendek diatas ditampung pada pos liabilitas jangka pendek lain.
 - 2) Pos liabilitas jangka pendek lain yang jumlahnya material harus disajikan dalam pos tersendiri.
 - 3) Salah satu contoh liabilitas jangka pendek lainnya adalah utang asuransi yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan.
 - 4) Liabilitas sewa yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 bulan kedepan termasuk dalam liabilitas jangka pendek lainnya.
- d. Perlakuan Akuntansi
 - 1) Pengakuan dan Pengukuran
 - a) Liabilitas jangka pendek lain diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diselesaikan.
 - b) Liabilitas jangka pendek lain dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan.
 - 2) Penyajian
Liabilitas jangka pendek lain disajikan sebagai pos tersendiri dalam kelompok liabilitas jangka pendek pada laporan posisi keuangan.
 - 3) Pengungkapan
Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:
 - a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan;
 - b) Rincian liabilitas jangka pendek lain kepada pihak ketiga dan pihak berelasi;
 - c) Pengungkapan lain.
- e. Ilustrasi Jurnal
 - 1) Pada saat pengakuan
Db Pos terkait (kas)
Kr Liabilitas jangka pendek lain
 - 2) Pada saat pelunasan
Db Liabilitas jangka pendek lain
Kr Pos terkait (kas)
6. Liabilitas Imbalan Pascakerja
 - a. Definisi
Liabilitas imbalan pascakerja adalah imbalan yang akan diterima oleh karyawan perusahaan setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya.
 - b. Dasar Pengaturan
Dasar pengaturan untuk liabilitas imbalan pascakerja antara lain:
 - 1) PSAK 24 Imbalan Kerja
 - 2) ISAK 15 PSAK 24 – Batas Aset imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan minimum, dan Interaksinya.
 - c. Penjelasan
 - 1) Imbalan pascakerja meliputi:
 - a) tunjangan punakarya, seperti pensiun dan pembayaran *lump sum* pada saat purnakarya; dan

- b) imbalan pascakerja lainnya, seperti asuransi jiwa pascakerja dan fasilitas pelayanan kesehatan pascakerja.
 - 2) Program imbalan pascakerja dapat diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti tergantung substansi ekonomis dari program tersebut.
 - 3) Perusahaan menggunakan program imbalan pasti untuk menentukan liabilitas imbalan pascakerja.
 - 4) Karakteristik program imbalan pasti adalah:
 - a) kewajiban perusahaan adalah menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun mantan pekerja.
 - b) risiko aktuarial dan risiko investasi ditanggung oleh perusahaan.
 - 5) Perusahaan menggunakan metode *projected unit credit (PUC)* untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu.
- d. Perlakuan Akuntansi
- 1) Pengakuan dan Pengukuran
 - a) Liabilitas imbalan pascakerja diakui pada saat pekerja/pegawai telah memberikan jasanya kepada perusahaan dalam suatu periode akuntansi.
 - b) Liabilitas imbalan pascakerja berkurang pada saat dibayarkan.
 - c) Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti merupakan jumlah neto dari:
 - (1) nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan;
 - (2) ditambah keuntungan aktuarial (dikurangi kerugian aktuarial) yang tidak diakui;
 - (3) dikurang biaya jasa lalu yang belum diakui;
 - (4) dikurangi nilai wajar aset program pada akhir periode pelaporan (jika ada) yang akan digunakan untuk penyelesaian kewajiban secara langsung;
 - (5) Jumlah yang diakui sebagai liabilitas iuran pasti sebesar iuran yang terutang oleh perusahaan kepada program pada tanggal pelaporan.
 - 2) Penyajian
Liabilitas imbalan pascakerja disajikan sebagai pos tersendiri dalam liabilitas jangka panjang dalam laporan posisi keuangan.
 - 3) Pengungkapan
Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:
 - a) kebijakan akuntansi perusahaan dalam mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial;
 - b) rincian liabilitas pascakerja berdasarkan jenisnya;
 - c) gambaran umum program;
 - d) rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini kewajiban imbalan pasti yang disajikan secara terpisah, jika dapat diterapkan, pengaruh selama periode yang dapat diatribusikan pada setiap hal berikut:
 - (1) biaya jasa kini;
 - (2) penghasilan atau biaya bunga;

- (3) iuran oleh peserta program;
 - (4) kentungan dan kerugian aktuarial;
 - (5) perubahan kurs valuta asing pada program yang diukur dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang penyajian;
 - (6) imbalan yang dibayarkan;
 - (7) biaya jasa lalu;
 - (8) kombinasi bisnis;
 - (9) kurtailmen; dan
 - (10) penyelesaian.
- e) Asumsi aktuarial yang digunakan;
 - f) Pengungkapan lain.
- e. Ilustrasi Jurnal
- 1) Pada saat pengakuan utang imbalan pascakerja
 - Db Beban imbalan pascakerja
 - Kr Liabilitas imbalan pascakerja
 - 2) Pada saat penyelesaian
 - Db Liabilitas imbalan pascakerja
 - Kr Kas dan setara kas

7. Liabilitas Sewa

a. Definisi

Liabilitas sewa adalah pembayaran suatu kontrak yang merupakan atau mengandung sewa yang belum dibayar sampai pada tanggal pelaporan.

b. Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk liabilitas jangka panjang lain antara lain: PSAK 73 Sewa.

c. Penjelasan

- 1) Liabilitas sewa berlaku untuk seluruh kontrak yang mengandung komponen sewa, termasuk sewa aset hak guna dalam subsewa.
- 2) Liabilitas sewa contohnya adalah sewa atas bangunan dan sewa kendaraan.
- 3) Kontrak sewa masuk dalam kategori sewa PSAK 73 apabila memiliki aset identifikasian yang jelas, misalnya suatu lantai tertentu dalam sebuah gedung. Penyewa harus memiliki hak yang substansial atas manfaat ekonomi aset identifikasian selama umur kontrak dan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset. Dengan demikian sewa lisensi atas akses pada platform tertentu biasanya tidak memenuhi syarat kontrak sewa karena aset yang disewa sulit untuk diidentifikasi.
- 4) Kontrak sewa yang dibawah 12 bulan atau aset pendasarnya bernilai rendah (misalnya sewa laptop) tidak perlu diakui liabilitasnya melainkan dibebankan langsung sebagai beban operasional.

d. Perlakuan Akuntansi

- 1) Pengakuan dan Pengukuran

- a) Pengukuran awal liabilitas sewa diukur pada nilai sekarang pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut.
- b) Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam kontrak sewa, jika suku bunga tersebut dapat ditentukan.
- c) Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Penyelenggara LPBBTI.
- d) Setelah tanggal pengakuan awal, liabilitas sewa diukur dengan:
 - (1) meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
 - (2) mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan biaya sewa yang telah dibayar;
 - (3) mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali apabila ada modifikasi kontrak sewa.

2) Penyajian

Liabilitas sewa disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang. Untuk liabilitas sewa yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan, maka direklasifikasi menjadi liabilitas jangka pendek.

3) Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- a) informasi atas sewa dalam catatan atas laporan keuangan;
- b) mengungkapkan jumlah berikut untuk periode pelaporan:
 - (1) beban depresiasi untuk aset hak-guna berdasarkan kelas aset pendasar;
 - (2) beban bunga atas liabilitas sewa;
 - (3) beban yang terkait dengan sewa jangka-pendek sesuai dengan SAK yang berlaku. Beban ini tidak termasuk beban yang terkait dengan sewa dengan masa sewa 1 bulan atau kurang;
 - (4) beban yang terkait dengan sewa aset bernilai-rendah sesuai dengan SAK yang berlaku;
 - (5) beban yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa;
 - (6) pendapatan dari mensubsewakan aset hak-guna;
 - (7) total pengeluaran kas untuk sewa;
 - (8) penambahan aset hak-guna;
 - (9) keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan sewa-balik; dan
 - (10) jumlah tercatat aset hak-guna pada akhir periode pelaporan berdasarkan kelas aset pendasar.

e. Ilustrasi Jurnal

1) Pada awal mengakui liabilitas sewa

Db Aset hak guna
Kr Liabilitas sewa
Kr Kas dan setara kas

- 2) Pada saat terdapat biaya atas tambahan hak penggunaan (modifikasi kontrak)
Db Aset hak guna
Kr Liabilitas sewa
- 3) Pada saat sewa telah berakhir sebelum akhir masa kontrak
Db Liabilitas sewa
Kr Aset hak guna

B. Ekuitas

1. Pengertian dan Karakteristik

- a. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitasnya.
- b. Meskipun ekuitas didefinisikan sebagai residual, unsur ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan menjadi pos-pos ekuitas. Misalnya, dalam perseroan terbatas, setoran pemegang saham, saldo laba, penyisihan saldo laba, dan penyisihan pemeliharaan modal disajikan dalam pos-pos yang terpisah. Klasifikasi semacam itu dapat menjadi relevan untuk pengambilan keputusan pemakai Laporan Keuangan apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap kemampuan perusahaan untuk membagikan atau menggunakan ekuitas.
- c. Pembentukan cadangan kadang-kadang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan perlindungan tambahan kepada perusahaan terhadap kerugian yang terjadi. Pembentukan cadangan tersebut lebih merupakan penyisihan saldo laba. Eksistensi cadangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan informasi yang relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan bagi para pemakai laporan keuangan.
- d. Jumlah ekuitas yang disajikan dalam laporan posisi keuangan bergantung pada pengukuran aset dan liabilitas. Ekuitas perusahaan antara lain terdiri dari:
 - 1) modal saham;
 - 2) tambahan modal disetor;
 - 3) saldo laba;
 - 4) komponen ekuitas Lainnya.

2. Modal Saham

a. Definisi

- 1) Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan anggaran dasar.
- 2) Modal ditempatkan adalah modal dasar yang telah ditempatkan secara notarial.
- 3) Modal disetor adalah modal yang telah efektif diterima perusahaan dari pemegang saham sebesar nilai nominal saham.

b. Dasar Pengaturan

- 1) Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.
- 2) PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan.
- 3) PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian.
- 4) UU PT No. 40/2007.

- c. Penjelasan
 - 1) Modal saham merupakan bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang saham.
 - 2) Modal saham akan berkurang karena kerugian yang disetujui sebagai pengurang modal disetor oleh RUPS apabila tidak dapat ditutupi oleh cadangan.
- d. Perlakuan Akuntansi
 - 1) Pengakuan dan Pengukuran
 - a) Modal saham diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pemilik perusahaan baik berupa dana kas maupun aset nonkas.
 - b) Setoran modal berupa kas dinilai sebesar kas yang diterima.
 - c) Setoran modal berupa aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar aset nonkas yang diterima.
 - d) Pengurangan modal saham lazimnya dicatat berdasarkan:
 - (1) jumlah uang yang dibayarkan.
 - (2) nilai wajar aset nonkas yang diserahkan.
 - e) Pengurangan modal saham dinilai sebesar kerugian yang disetujui sebagai pengurang modal saham oleh RUPS.
 - f) Penambahan modal saham lazimnya dicatat berdasarkan:
 - (1) jumlah uang yang diterima;
 - (2) nilai wajar aset nonkas yang diterima.
 - g) Penambahan modal saham diakui pada saat:
 - h) dilakukan penambahan setoran kas oleh pemilik modal sebesar kas yang diterima;
 - (1) dilakukan penambahan setoran aset nonkas sebesar nilai wajar aset nonkas yang diterima;
 - (2) dilakukan kapitalisasi cadangan.
 - 2) Penyajian

Modal saham disajikan sebagai pos tersendiri dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan.
 - 3) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

 - a) informasi kualitatif tentang tujuan, kebijakan dan proses entitas dalam mengelola permodalannya, termasuk:
 - (1) uraian tentang apa yang dikelola sebagai modal;
 - (2) ketika entitas diharuskan untuk memenuhi persyaratan permodalan eksternal, sifat persyaratan, dan bagaimana persyaratan tersebut diimplementasikan ke dalam pengelolaan permodalan; dan
 - (3) bagaimana entitas memenuhi tujuannya dalam mengelola permodalannya.
 - b) ringkasan data kuantitatif tentang apa yang diatur sebagai modal.
 - c) setiap perubahan pada angka 1) dan 2) dari periode sebelumnya.
 - d) apakah selama periode entitas mematuhi setiap persyaratan permodalan eksternal, misalnya aturan

mengenai sumber dana tidak boleh dari utang dan maksimal persentase kepemilikan asing.

e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat penyeteroran modal dalam bentuk kas sebesar nilai nominal
Db Kas dan setara kas
Kr Modal saham
- 2) Penyeteroran modal dalam bentuk aset nonkas
Db Aset yang diterima (nilai wajar)
Kr Modal saham
- 3) Kapitalisasi cadangan
Db Cadangan
Kr Modal saham
- 4) Pengurangan modal saham akibat adanya kerugian
Db Modal saham
Kr Saldo laba

3. Tambahan Modal Disetor

a. Definisi

Tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambah modal, seperti agio saham, selisih modal dari transaksi saham treasury, selisih transaksi dengan pihak nonpengendali, dan selisih dari kombinasi dan pelepasan bisnis entitas sependengali.

b. Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan untuk tambahan modal disetor antara lain:

- 1) PSAK 38 Kombinasi Bisnis Entitas Sependengali;
- 2) PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian;
- 3) PSAK 53 Pembayaran Berbasis Saham;
- 4) PSAK 65 Laporan Keuangan Konsolidasian.

c. Penjelasan

- 1) Tambahan modal disetor terdiri dari agio saham, selisih transaksi saham treasury, selisih transaksi dengan entitas tidak sependengali, dan selisih kombinasi dan pelepasan bisnis entitas sependengalian.
- 2) Agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
- 3) Selisih transaksi saham treasury merupakan selisih yang timbul dari perolehan dan pelepasan kembali atas saham yang diterbitkan perusahaan.
- 4) Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali timbul dari transaksi pelepasan sebagian kepemilikan pada anak perusahaan tetapi tidak menyebabkan perusahaan kehilangan pengendalian atas anak perusahaan tersebut.
- 5) Selisih kombinasi dan pelepasan bisnis entitas sependengali timbul dari transaksi perolehan bisnis dari, atau pelepasan bisnis kepada, entitas sependengali.

d. Perlakuan Akuntansi

- 1) Pengakuan dan Pengukuran

- a) Agio saham diakui sebesar selisih antara jumlah neto yang diterima setelah biaya penerbitan saham dan nilai nominal saham.
 - b) Selisih transaksi saham treasury diakui sebesar jumlah hasil pelepasan dari jumlah tercatat saham treasury yang dilepas.
 - c) Selisih transaksi dengan entitas tidak sependengali diakui sebesar hasil pelepasan anak perusahaan yang tidak menyebabkan hilang pengendalian dan jumlah tercatat bagian kepemilikan pada anak perusahaan yang lepas.
 - d) Selisih kombinasi dan pelepasan bisnis entitas sependengali diakui sebesar jumlah pembayaran yang diberikan/diterima dan jumlah tercatat bisnis yang diperoleh/dilepas.
- 2) Penyajian
- Tambahan modal disetor disajikan sebagai pos tersendiri dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan.
- 3) Pengungkapan
- Hal-hal yang diungkapkan antara lain:
- a) rincian pos tambahan modal disetor;
 - b) jumlah lembar saham treasury (apabila ada);
 - c) rincian yang menunjukkan dampak setiap perubahan bagian kepemilikan perusahaan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian atas anak perusahaan tersebut;
 - d) pengungkapan lain.
- e. Ilustrasi Jurnal
- Ketika pengakuan agio saham
- Db Kas dan setara kas
- Kr Modal disetor
- Kr Agio saham
4. Uang Muka Setoran Modal
- a. Uang muka setoran modal adalah modal yang telah disetorkan oleh pemegang saham (pemilik) dengan tujuan untuk penambahan ekuitas.
 - b. Dasar Pengaturan

PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan

Ketentuan OJK yang relevan. - c. Penjelasan
 - 1) Berdasarkan peraturan OJK, modal yang disetorkan oleh pemegang saham harus mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan hasil revidi terkait dengan legalitas dana tersebut.
 - 2) Modal yang telah disetorkan oleh pemilik sebagai uang muka setoran modal tidak dapat ditarik kembali kecuali atas persetujuan OJK.
 - 3) Proses revidi dan pemenuhan kelengkapan persyaratan oleh penyelenggara LPBBTI dapat berjalan dalam periode yang melewati pergantian bulan sehingga dimungkinkan pada tanggal periode pelaporan, penyelenggara LPBBTI sedang menunggu hasil revidi atau memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.

- 4) Apabila hasil reviu OJK menunjukkan penambahan modal telah sesuai dengan persyaratan, maka uang muka setoran modal akan direklasifikasi menjadi modal saham mengacu pada SAK yang berlaku. Sedangkan bila hasil reviu OJK menyatakan sebaliknya, maka uang muka setoran modal akan dikembalikan kepada pemegang saham atau direklasifikasi menjadi liabilitas dengan persetujuan OJK.
- d. Perlakuan Akuntansi
 - 1) Uang muka setoran modal diakui ketika dana diterima perusahaan sebesar nilai nominal yang diterima.
 - 2) Uang muka setoran modal disajikan terpisah dari pos ekuitas lainnya.
 - 3) Pengungkapan mengenai pos ini harus mampu memberikan penjelasan mengapa pos uang muka setoran modal muncul. Misalnya ketika pemilik modal menyetorkan dananya secara bertahap dari keseluruhan rencana penyerahan modal, atau ketika perusahaan masih melakukan proses untuk mendapatkan persetujuan OJK terkait dengan setoran modal.
 - e. Ilustrasi Jurnal
 - 1) Ketika dana diterima dan sudah diaktakan
Db Kas
Kr Uang muka setoran modal
 - 2) Ketika disetujui OJK sebagai tambahan modal disetor
Db Uang muka setoran modal
Kr Modal saham
 - 3) Apabila hasil reviu OJK hasilnya tidak disetujui
Db Uang muka setoran modal
Kr Liabilitas
 - 4) Ketika dana dikembalikan kepada pemilik modal akibat reviu OJK yang hasilnya tidak disetujui
Db Liabilitas
Kr Kas
5. Saldo Laba
- a. Definisi
Saldo laba adalah pemupukan laba setelah pajak yang belum didistribusikan yang terdiri dari:
 - 1) laba atau rugi tahun tahun sebelumnya yang penggunaannya belum ditetapkan oleh RUPS;
 - 2) laba atau rugi tahun berjalan.
 - b. Dasar Pengaturan
 - 1) Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan
 - 2) PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan.
 - c. Penjelasan
 - 1) Pos saldo laba harus dinyatakan secara terpisah dari pos modal disetor.
 - 2) Saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba-rugi periode lalu. Akun ini harus dinyatakan terpisah dari akun modal saham. Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen, kecuali jika terdapat indikasi pembatasan terhadap saldo laba, misalnya dicadangkan atau

untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan maupun ikatan tertentu.

- 3) Saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan-pembatasan tersebut, dilaporkan dalam akun tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan yang dimaksud.
- 4) Ketentuan di atas merupakan karekteristik umum saldo laba, namun dalam penerapan perusahaan umumnya saldo laba yang timbul dari periode berjalan tidak ada bagian untuk dividen dan seluruhnya didistribusikan berdasarkan keputusan RUPS.
- 5) Saldo laba tahun lalu tidak boleh didebit atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laba/rugi tahun berjalan.
- 6) Kewajiban yang timbul dalam program bagi laba dan bonus merupakan akibat dari jasa pekerja dan bukan transaksi dengan pemilik perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan mengakui bagi laba dan bonus tersebut sebagai beban tahun berjalan dan bukan sebagai distribusi saldo laba.

d. Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan dan pengukuran

- a) Saldo laba diakui pada akhir periode laporan sebesar laba tahun berjalan.
- b) Akumulasi saldo laba pada akhir tahun dinilai sebesar:
 - (1) laba rugi tahun tahun lalu yang belum didistribusikan;
 - (2) laba rugi periode berjalan selama periode laporan interim.

2) Penyajian

Saldo laba disajikan sebagai pos tersendiri dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan.

3) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- a) kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- b) penjelasan jenis, tujuan, jumlah, untuk setiap alokasi saldo laba;
- c) dasar pelaksanaan pendistribusian saldo laba;
- d) peraturan, perikatan, pembatasan dan jumlah pembatasan atas saldo laba;
- e) koreksi periode lalu, baik bruto maupun neto setelah pajak, dengan menjelaskan bentuk kesalahan Laporan Keuangan terdahulu, dampak koreksi terhadap laba rugi dan nilai saham per lembar;
- f) jumlah dividen yang ditetapkan tetapi belum dibayarkan sebelum Laporan Keuangan diterbitkan untuk diotorisasi pada pihak eksternal;
- g) Pengungkapan lain.

e. Ilustrasi Jurnal

1) Pemindahan laba tahun berjalan ke saldo laba

Db Ikhtisar laba/rugi

Kr Saldo laba (laba tahun berjalan)

- 2) Pada saat pengalokasian laba tahun lalu oleh RUPS
 - a) Pada saat ditetapkan dan Laporan Keuangan telah diotorisasi untuk diterbitkan pada pihak eksternal tetapi belum dibayarkan
 - Db Saldo laba
 - Kr Utang dividen
 - b) Pada saat pembayaran dividen
 - Db Utang dividen
 - Kr Kas dan setara kas

BAB V PENGHASILAN DAN BEBAN

A. Penghasilan

1. Definisi

Penghasilan adalah peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan peningkatan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Penghasilan meliputi:

a. Pendapatan (*Revenue*)

Pendapatan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa (rutin) dan memiliki beberapa bentuk atau sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, dan bunga.

b. Keuntungan (*gain*)

Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan tidak timbul dari pelaksanaan aktivitas utama perusahaan. Misalnya keuntungan yang didapatkan dari penjualan aset tetap.

2. Dasar Pengaturan

- a. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.
- b. PSAK 1 Penyajian Laporan Laporan Keuangan.
- c. PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

3. Penjelasan

Nama-nama akun pendapatan dapat bervariasi sesuai dengan kontrak antara Penyelenggara LPBBTI dan penerima dana/pemberi dana dengan esensi yang sama.

a. Pendapatan dari komisi/*ujrah*

- 1) Pendapatan dari komisi adalah arus masuk yang diterima oleh Penyelenggara LPBBTI karena telah mempertemukan antara penerima dana dan pemberi dana.
- 2) Pendapatan dari komisi merupakan penghasilan utama dari Penyelenggara LPBBTI.

b. Pendapatan atas Denda

Pendapatan atas denda adalah arus masuk yang diterima oleh Penyelenggara LPBBTI sebagai imbalan atas keterlambatan penyelesaian kewajiban dari pihak penerima dana.

c. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain adalah arus masuk yang diterima oleh Penyelenggara LPBBTI yang timbul bukan dari operasi utama perusahaan antara lain pendapatan yang bersumber dari *referral*.

Contoh ilustrasi:

Sebuah Penyelenggara LPBBTI ABC menyalurkan dana pinjaman selama 3 bulan dengan komisi total 3% dari total dana Rp3 juta rupiah pada 1 Desember 2021. Perusahaan ABC memotong dana 3% dari total dana penyaluran ketika dana disalurkan ke penerima dana dari pemberi dana pada tanggal 1 Desember 2021. Total potongan adalah Rp90.000.

Sementara itu Penyelenggara LPBBTI XYZ pada saat yang sama juga menyalurkan pinjaman dengan jumlah dan ketentuan yang sama. Namun komisi ditarik ketika penerima pinjaman mencicil. Pendapatan Rp90.000 tersebut diterima selama 3 bulan secara garis lurus Rp30.000 per bulan.

Penyelenggara LPBBTI ABC dan Penyelenggara LPBBTI XYZ memiliki kebijakan bahwa 30% dari potongan tersebut mencerminkan pendapatan komisi atas penyediaan platform selama tiga bulan ke depan, dan 70% dari potongan tersebut mencerminkan pendapatan Komisi (*administrative*) karena sudah mempertemukan antara pembeli dan penjual.

Ilustrasi jurnal:

Jurnal Penyelenggara LPBBTI ABC pada 1 Desember 2021

Dr. Kas Rp90.000

Kr. Pendapatan komisi diterima dimuka Rp27.000

Kr. Pendapatan komisi Rp63.000

Jurnal Penyelenggara LPBBTI XYZ pada 1 Desember 2021

Dr. Piutang pada pelanggan Rp63.000

Kr. Pendapatan komisi Rp63.000

Cicilan pertama dibayarkan pada 20 Desember 2021 (jurnal yang sama untuk setiap cicilan)

Dr. Kas Rp30.000

Kr. Piutang pendapatan Rp21.000

Kr. Pendapatan komisi Rp9.000

Tanggal 31 Desember 2021, jurnal penyesuaian

Penyelenggara LPBBTI ABC

Dr. Pendapatan komisi diterima dimuka Rp9.000

Kr. Pendapatan komisi Rp9.000

4. Perlakuan Akuntansi

a. Pengakuan dan Pengukuran

Prinsip utama dalam pengakuan pendapatan adalah saat semua kewajiban pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak dengan pelanggan telah dipenuhi oleh Penyelenggara LPBBTI. Contohnya, dalam suatu kontrak pelanggan terdapat persyaratan Penyelenggara LPBBTI berhak untuk membebaskan komisi sebesar $n\%$ dari total dana pinjaman bruto yang disalurkan selama jangka waktu tiga bulan. Atas pendapatan tersebut Penyelenggara LPBBTI berkewajiban untuk menyediakan jasa platform LPBBTI dan memiliki kewajiban melakukan penagihan setiap bulannya kepada penerima dana. Maka, pengakuan pendapatan dapat dilakukan sepanjang waktu, yaitu secara proporsional setiap periode pembayaran kembali yang dilakukan oleh penerima dana.

PSAK 72 mensyaratkan pendapatan diakui berdasarkan model pengakuan lima tahap. Lima tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan;
- 2) mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang terdapat dalam kontrak dengan pelanggan;
- 3) menentukan harga transaksi;
- 4) mengalokasikan harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak; dan
- 5) mengakui pendapatan ketika entitas melakukan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak.

Secara umum pengakuan dan pengukuran pendapatan dapat dibedakan menjadi pendapatan dari komisi, pendapatan atas jasa penagihan dan pendapatan lain-lain dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) pendapatan dapat diakui jika perusahaan telah menyelesaikan semua kewajiban yang disyaratkan di dalam kontrak;
- 2) jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- 3) kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke perusahaan;
- 4) pendapatan dari komisi diakui sebesar nilai wajar setelah dikurangi dengan elemen-elemen pengurangan seperti rabat, diskon, atau voucher kepada pelanggan.

b. Penyajian

Pendapatan disajikan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Penyajian pendapatan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya dibedakan berdasarkan jenis pendapatannya. Kategori jenis pendapatan ditujukan untuk memudahkan pembaca Laporan Keuangan memperoleh informasi atas jenis dan besaran jumlah dari tiap jenis-jenis pendapatan yang diterima oleh Penyelenggara LPBBTI.

c. Pengungkapan

Perusahaan harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- 1) kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk metode pengukuran pendapatan yang diakui secara proporsional sepanjang waktu.
- 2) rincian jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode tersebut berdasarkan klasifikasi pendapatan yang signifikan.
- 3) pendapatan yang ditunda pengakuan pendapatannya.

5. Ilustrasi Jurnal

a. Pendapatan dari Komisi

- 1) Pengakuan pendapatan dari komisi dengan persyaratan komisi dibebankan kepada penerima dana/pemberi dana saat penyaluran dana kepada penerima dana, dengan memperhatikan kontrak yang telah dibuat dengan pemberi dana dan penerima dana.

Db Kas ditangan/kas di bank

Kr Pendapatan diterima di muka

Seiring berjalannya waktu, pengakuan pendapatan diakui secara proporsional sebagai berikut:

Db Pendapatan diterima di muka – komisi

Kr Pendapatan dari komisi

- 2) Pengakuan pendapatan dari komisi dengan klausul setiap terjadi pembayaran kembali dan dibayarkan secara *lump sum* di akhir periode perikatan perjanjian.

Pada saat kriteria pengakuan pendapatan dari komisi sudah terpenuhi secara proporsional:

Db Piutang

Kr Pendapatan dari komisi

Pada saat penerimaan pembayaran piutang:

Db Kas ditangan/kas di bank

Kr Piutang

- b. Pendapatan atas jasa penagihan/denda

Pada saat kriteria pengakuan pendapatan sudah terpenuhi:

Db Kas ditangan/kas di bank

Kr Pendapatan penagihan/denda

- c. Ilustrasi Komprehensif

Misal dalam sebuah kontrak dengan pelanggan antara PT X sebagai Penyelenggara LPBBTI, Y sebagai pemberi dana, dan Z sebagai penerima dana. Dalam kontrak tersebut, terdapat beberapa poin perjanjian kontrak sebagai berikut:

- 1) komisi dibebankan diawal dan sebagai pengurang dari bagian yang diterima Z penerima dana;
- 2) bagian komisi yang diberikan kepada PT X sebagai Penyelenggara LPBBTI sesuai porsi dana yang telah dibayarkan oleh Z sebagai penerima dana dan dibayarkan secara *lump sum* diakhir periode perjanjian;
- 3) terdapat kewajiban untuk melakukan penagihan oleh PT X sebagai Penyelenggara LPBBTI dan X memiliki kebijakan internal bahwasanya besaran biaya penagihan yang dibebankan kepada Y sebagai pemberi dana adalah sebesar x% dari porsi dana yang telah dibayarkan oleh Z dan dibayarkan secara *lump sum* diakhir periode perjanjian.

Maka jurnal yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- 1) pada saat perjanjian kredit telah disetujui dan kredit telah disalurkan

Db Kas ditangan/kas di bank

Kr Pendapatan Komisi

- 2) pada saat Z sebagai penerima dana membayarkan angsuran porsi dana yang diterima

Db Piutang

Kr Pendapatan komisi

Kr Pendapatan jasa penagihan

- 3) Pada saat pembayaran komisi dan jasa penagihan secara *lump sum* diakhir periode kontrak

Db Kas ditangan/kas di bank

Kr Piutang

B. Beban

1. Definisi

Beban adalah penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi ke pemegang klaim ekuitas.

Kerugian adalah pos lainnya yang memenuhi definisi beban dan mungkin timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komperhensif lain.

2. Dasar Pengaturan

- a. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.
- b. PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan.
- c. PSAK 16 Aset Tetap.
- d. PSAK 19 Aset Takberwujud.
- e. PSAK 24 Imbalan Kerja.
- f. PSAK 71 Instrumen Keuangan.

3. Penjelasan

a. Beban atas Pendapatan (*Cost of Revenue*)

Beban atas pendapatan adalah biaya yang timbul berkaitan langsung atas penyediaan jasa Penyelenggara LPBBTI dalam periode pelaporan tertentu.

b. Beban Pemasaran

Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang timbul dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran produk.

c. Beban Operasional terkait IT

Beban operasional terkait IT adalah biaya-biaya yang timbul dari penggunaan IT dalam kegiatan operasional perusahaan, contohnya adalah beban sewa *server* dan beban sewa *cloud*.

d. Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi adalah biaya-biaya yang muncul dari kegiatan kantor dan tidak berhubungan secara langsung dengan operasi utama perusahaan.

e. Beban Penyisihan Piutang Ragu-Ragu

Beban penyisihan piutang ragu-ragu adalah biaya yang muncul dari pembuatan penyisihan piutang yang tidak akan tertagih.

f. Beban lain-lain

Beban insidental yang tidak berhubungan dengan operasi bisnis utama perusahaan.

g. Kerugian

Kerugian perusahaan, antara lain namun tidak terbatas pada, kerugian dalam penjualan aset tetap perusahaan, dan kerugian penurunan nilai.

h. Beban Pajak

Beban pajak adalah jumlah pajak terutang dari penghasilan kena pajak pada tahun berjalan. Beban Pajak diakui dalam laporan laba rugi sebesar penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif PPh Badan yang berlaku.

4. Perlakuan Akuntansi

a. Pengakuan dan Pengukuran

Prinsip utama dalam pengakuan beban-beban adalah diakui dengan menerapkan basis akrual, yaitu saat beban-beban tersebut

terjadi atau dalam periode terjadinya beban tersebut. Misal, Penyelenggara LPBBTI X membayar dimuka sewa untuk jangka waktu 2 tahun sebesar xxx rupiah. Maka, setiap akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian untuk mengakui bagian dari sewa dibayar dimuka tersebut yang menjadi beban sewa pada periode tersebut.

b. Penyajian

Beban disajikan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain berdasarkan sifatnya atau fungsinya, mana yang dapat menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan. Entitas dapat mengelompokkan beban berdasarkan sifatnya (seperti misalnya depresiasi, biaya iklan, imbalan kerja, dll). Entitas juga dapat menyajikan kelompok beban berdasarkan fungsi di dalam entitas (seperti misalnya beban penjualan, beban operasional IT, beban administratif, beban marketing). Entitas yang menyajikan beban berdasarkan dengan fungsinya juga mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban termasuk beban depresiasi dan amortisasi dan beban imbalan kerja.

c. Pengungkapan

- 1) Perusahaan mengungkapkan rincian beban atas pendapatan berdasarkan sifat beban, dengan rincian beban-beban yang berkaitan dengan pendapatan, namun tidak terbatas pada, sebagai berikut:
 - a) beban yang timbul dari aktivitas business development;
 - b) beban yang timbul dari aktivitas penilaian risiko calon penerima dana;
 - c) beban yang timbul dari aktivitas antifraud;
 - d) beban yang timbul dari aktivitas penagihan.
- 2) Perusahaan mengungkapkan rincian beban pemasaran berdasarkan sifat beban.
- 3) Perusahaan mengungkapkan rincian beban umum dan administrasi berdasarkan sifat beban.
- 4) Perusahaan mengungkapkan rincian beban lain-lain berdasarkan sifat beban.

5. Ilustrasi Jurnal

a. Beban atas pendapatan

- 1) Pada saat pengeluaran kas dan pengakuan beban atas pendapatan

Db Beban atas pendapatan

Kr Kas di tangan/di bank

- 2) Pembayaran/pengeluaran kas untuk beban atas pendapatan dilakukan di awal

Pada saat pembayaran di awal:

Db Beban dibayar di muka

Kr Kas di tangan/di bank

Pada saat penyesuaian di akhir periode:

Db Beban atas pendapatan

Kr Beban dibayar di muka

b. Beban Pemasaran

- 1) Pada saat pengeluaran kas dan pengakuan beban pemasaran

- Db Beban pemasaran
Kr Kas di tangan/di bank
- 2) Pembayaran/pengeluaran kas untuk beban pemasaran dilakukan diawal
Pada saat pembayaran di awal:
Db Beban dibayar dimuka
Kr Kas di tangan/di bank
Pada saat penyesuaian di akhir periode:
Db Beban pemasaran
Kr Beban dibayar dimuka
- c. Beban administrasi dan umum
- 1) Pada saat pengeluaran kas dan pengakuan beban pemasaran
Db Beban administrasi
Kr Kas di tangan/di bank
- 2) Pembayaran/pengeluaran kas untuk beban pemasaran dilakukan di awal
Pada saat pembayaran di awal
Db Beban dibayar di muka
Kr Kas di tangan/di bank
Pada saat penyesuaian di akhir periode
Db Beban administrasi
Kr Beban dibayar di muka.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL
VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO,
DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN III
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/SEOJK.06/2024
TENTANG
TATA CARA DAN MEKANISME PENYAMPAIAN DATA TRANSAKSI
PENDANAAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN
BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

PETUNJUK TEKNIS DATA LAPORAN BERKALA
PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI (LPBBI)



DAFTAR ISI

LATAR BELAKANG	- 5 -
A. Laporan Bulanan	- 6 -
1. Profil Perusahaan	- 6 -
2. Rincian <i>Escrow Account</i>	- 8 -
3. Rincian <i>Payment Gateway</i>	- 9 -
4. Rincian <i>E-Wallet</i>	- 9 -
5. Laporan Posisi Keuangan	- 9 -
6. Laporan Laba/Rugi	- 16 -
7. Laporan Perubahan Ekuitas	- 19 -
8. Laporan Arus Kas.....	- 20 -
9. Catatan atas Laporan Keuangan.....	- 22 -
10. <i>Inclusivity</i>	- 22 -
11. <i>Transaction Value</i>	- 49 -
12. Kualitas Pendanaan, Biaya Modal, Manfaat Efektif Ekonomi, <i>Velocity</i> /Tempo, Sektor Produktif, Informasi terkait dengan Kerja Sama Penyaluran Pendanaan, lainnya.....	- 59 -
13. Detil <i>Outstanding</i> Pendanaan Penyelenggara	- 79 -
14. Data Kualitas Pendanaan <i>Outstanding</i>	- 85 -
15. Data Hapus Buku & Hapus Tagih dan Klaim Asuransi/Penjaminan	- 119 -
16. Laporan Kegiatan Yang Telah Dilakukan	- 120 -
17. Rincian Kas dan Setara Kas.....	- 120 -
18. Rincian Piutang Lancar Lainnya	122
19. Rincian Aset Takberwujud	124
20. Rincian Piutang Tidak Lancar Lainnya	125
21. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya.....	127
22. Rincian Utang Jangka Panjang Lainnya.....	129
23. Rincian Biaya yang masih harus dibayar	131
24. Rincian Pendapatan Komisi <i>Platform</i>	132
25. Rincian Pendapatan Denda	132
26. Rincian Pendapatan Non Operasional.....	133
27. Rincian Beban Pemasaran dan Periklanan.....	134
28. Rincian Beban Pengembangan dan Pemeliharaan IT	134
29. Rincian Laporan Arus Kas	135
30. Rincian Pendanaan yang Dihapus Buku dan Dihapus Tagih	141
31. Rincian Penggunaan Asuransi/Penjaminan	142
32. Rincian Pengalihan Kuasa Penagihan Kepada Penyelenggara Jasa Penagihan Pihak Ketiga	144
33. Rincian Pendanaan Outstanding	145
B. Laporan Tahunan	147
1. Profil Perusahaan	147
2. Laporan Posisi Keuangan	149
3. Laporan Laba/Rugi	155
4. Laporan Perubahan Ekuitas	158
5. Laporan Arus Kas.....	159
6. Catatan atas Laporan Keuangan.....	161
7. Rincian Kas dan Setara Kas	162
8. Rincian Piutang Lancar Lainnya	163
9. Rincian Aset Takberwujud	164
10. Rincian Piutang Tidak Lancar Lainnya	165
11. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya.....	167
12. Rincian Biaya yang masih harus dibayar	169
13. Rincian Utang Jangka Panjang Lainnya.....	170
11. Rincian Beban Pemasaran dan Periklanan.....	171

12. Rincian Beban Pengembangan dan Pemeliharaan IT.....	173
13. Rincian Pendapatan Non Operasional.....	173
14. Rincian Laporan Arus Kas	174

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI), disebutkan bahwa Penyelenggara LPBBTI yang dalam hal ini merupakan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 65 POJK LPBBTI mengatur bahwa Penyelenggara wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan. Adapun laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah laporan bulanan dan tahunan. Selanjutnya Pasal 66 ayat (3) POJK LPBBTI mengatur bahwa Penyelenggara wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir dan dalam Pasal 66 ayat (4) POJK LPBBTI mengatur bahwa Penyelenggara wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

Pelaporan Penyelenggara LPBBTI di Indonesia yang disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, dimaksudkan untuk mendukung fungsi pengawasan bagi penyelenggaraan LPBBTI di Indonesia. Untuk mendukung dan mengoptimalkan fungsi pengawasan serta percepatan analisis terhadap laporan berkala Penyelenggara LPBBTI di Indonesia maka dibangunlah sistem elektronik dalam rangka penyampaian laporan berkala dari penyelenggara LPBBTI dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sistem ini diharapkan dapat mengakselerasi kinerja pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam menganalisis kinerja industri LPBBTI.

A. Laporan Bulanan
1. Profil Perusahaan

No	Uraian	Informasi Umum
1	Nama Perusahaan	
2	Nama <i>Platform</i>	
3	Alamat <i>Website</i>	
4	<i>Mobile Platform</i> (ada atau tidak ada)	
5	Nama <i>Mobile Platform</i>	
6	Bulan dan Tahun mulai beroperasi	
7	Tanggal Terdaftar	
8	Tanggal Berizin	
9	Nama Direktur Utama	
10	Nomor HP Direktur Utama	
11	Email Direktur Utama	
12	Nama <i>Contact Person</i>	
13	Jabatan <i>Contact Person</i>	
14	Nomor HP <i>Contact Person</i>	
15	Email <i>Contact Person</i>	
16	Alamat Kantor	
17	DATI I (Provinsi)	
18	DATI II (Kabupaten/Kotamadya)	
19	Telepon Kantor	
20	TKB 90 (dalam %)	
21	Nilai Pendanaan <i>Outstanding</i>	
22	Nama Produk Layanan Pendanaan	
23	Jumlah Tenaga Kerja Pria	
24	Jumlah Tenaga Kerja Wanita	
25	Jumlah Kantor Cabang	

Petunjuk Pengisian:

No	Uraian / Nama Komponen	Details Pengisian (Informasi Umum)
1	Nama Perusahaan	Diisi dengan Nama Perusahaan Penyelenggara
2	Nama <i>Platform</i>	Diisi dengan Nama <i>Platform</i> Penyelenggara
3	Alamat <i>Website</i>	Diisi dengan Alamat <i>Website</i> Penyelenggara
4	<i>Mobile Platform</i> (ada atau tidak ada)	Ada / Tidak <i>Mobile Platform</i> Penyelenggara. Input berupa angka (jika ada: 1; tidak ada: 0)
5	Nama <i>Mobile Platform</i>	Jika pada komponen <i>Mobile Platform</i> diisi 1 (ada), maka wajib isi dengan Nama <i>Mobile Platform</i> Penyelenggara
6	Bulan dan Tahun mulai beroperasi	Diisi dengan Bulan Tahun beroperasi (format isi: yyyyymmdd)
7	Tanggal Terdaftar	Diisi dengan Tanggal terdaftar (format isi: yyyyymmdd)
8	Tanggal Berizin	Diisi dengan Tanggal Berizin (format isi: yyyyymmdd)
9	Nama Direktur Utama	Diisi dengan Nama Direktur Utama Penyelenggara

No	Uraian / Nama Komponen	Details Pengisian (Informasi Umum)
10	Nomor HP Direktur Utama	Diisi dengan Nomor HP Direktur Utama Penyelenggara (format isi berupa angka, contoh: 628123456789)
11	<i>Email</i> Direktur Utama	Diisi dengan <i>email</i> Direktur Utama Penyelenggara (format isi email, contoh: xxxx@xxx.com)
12	Nama <i>Contact Person</i>	Diisi dengan Nama <i>Contact Person</i> Penyelenggara yang membidangi pelaporan
13	Jabatan <i>Contact Person</i>	Diisi dengan Jabatan <i>Contact Person</i> Penyelenggara yang membidangi pelaporan
14	Nomor HP <i>Contact Person</i>	Diisi dengan Nomor HP <i>Contact Person</i> yang membidangi pelaporan (format isi berupa angka, contoh: 628123456789)
15	<i>Email Contact Person</i>	Diisi dengan <i>email Contact Person</i> Penyelenggara yang membidangi pelaporan (format isi email, contoh: xxxx@xxx.com)
16	Alamat Kantor	Diisi dengan Alamat Kantor Penyelenggara
17	DATI I (Provinsi)	Diisi dengan kode sandi DATI I (Provinsi) yang terdaftar pada tabel referensi
18	DATI II (Kabupaten/Kotamadya)	Diisi dengan kode sandi DATI II (Kabupaten/Kotamadya) yang terdaftar pada tabel referensi.
19	Telepon Kantor	Diisi dengan No. Telepon Kantor Penyelenggara (format diisi dengan angka dan char “(-)”, contoh: (021)-1234567)
20	TKB 90 (dalam %)	Disisi dengan Tingkat Keberhasilan Bayar 90 hari setelah jatuh tempo dengan formula 100% (-) Rasio Pendanaan Macet (>90 hari), dengan format persen 2 (dua) desimal, contoh: 95,00%.
21	Nilai Pendanaan Outstanding	Diisi dengan nilai Agregat (Total) <i>Outstanding</i> per Bulan Laporan dalam satuan Rupiah
22	Nama Produk Layanan Pendanaan	Diisi dengan Nama-Nama Produk Layanan Pendanaan dengan pemisah tanda koma (,) dan spasi ()
23	Jumlah Tenaga Kerja Pria	Diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Pria (format isi berupa angka)
24	Jumlah Tenaga Kerja Wanita	Diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Wanita (format isi berupa angka)
25	Jumlah Kantor Cabang	Diisi dengan jumlah Tenaga Cabang/Kantor selain Kantor Pusat (format isi berupa angka)

2. Rincian *Escrow Account*

No	Uraian	Sandi Bank (<i>Escrow</i>)	Nama Bank	Nomor Rekening	Rincian Mutasi <i>Escrow</i>			
					Saldo Awal Bulan (Rp)	Total Debit (Rp)	Total Kredit (Rp)	Saldo Akhir Bulan (Rp)
1	Rincian <i>Escrow</i> baris ke-1							
2	Rincian <i>Escrow</i> baris ke-2							

No	Uraian	Rincian Saldo Akhir				Keterangan Penggunaan <i>Escrow Account</i>
		Hak Lender (Rp)	Hak Borrower (Rp)	Hak Pihak Ketiga (Rp)	Hak Platform (Rp)	
1	Rincian <i>Escrow</i> baris ke-1					
2	Rincian <i>Escrow</i> baris ke-2					

Keterangan:

- Lender merupakan Pemberi Dana dalam LPBBTI.
- Borrower merupakan Penerima Dana dalam LPBBTI.

Petunjuk Pengisian:

No	Sandi Bank (<i>Escrow</i>)	Nama Bank	Nomor Rekening
1	Diisi dengan kode Sandi Bank <i>Escrow</i> yang terdaftar pada Tabel Referensi.	Nama Bank dari Kode Sandi yang diinput pada kolom Sandi Bank <i>Escrow Account</i> .	Diisi dengan Nomor Rekening <i>Escrow Account</i> .

No	Saldo Awal Bulan (Rp)	Total Debit (Rp)	Total Kredit (Rp)	Saldo Akhir Bulan (Rp)
2 (Lanjutan)	Diisi dengan Saldo Awal Bulan <i>Escrow Account</i> .	Diisi dengan nilai Total Debit pada rekening koran <i>Escrow Account</i> per akhir bulan.	Diisi dengan nilai Total Kredit pada rekening koran <i>Escrow Account</i> per akhir bulan.	Diisi dengan Saldo Akhir Bulan <i>Escrow Account</i> .

No	Hak Lender (Rp)	Hak Borrower (Rp)	Hak Pihak Ketiga (Rp)	Hak Platform (Rp)	Keterangan Penggunaan Escrow Account
3 (Lanjutan)	Diisi dengan porsi nilai hak untuk Lender dari nominal saldo akhir bulan pada Escrow Account.	Diisi dengan porsi nilai hak untuk borrower dari nominal saldo akhir bulan pada Escrow Account.	Diisi dengan porsi nilai hak untuk pihak ketiga dari nominal saldo akhir bulan pada Escrow Account.	Diisi dengan porsi nilai hak untuk Platform dari nominal saldo akhir bulan pada Escrow Account.	Diisi dengan Keterangan (Penggunaan rekening Escrow Account tertentu).

3. Rincian Payment Gateway

No	Uraian/ Nama Komponen	Payment Gateway	Saldo Akhir Bulan (Rp)
1	Rincian Payment Gateway baris ke-1		
2	Rincian Payment Gateway baris ke-2		
3 dst	Rincian Payment Gateway baris ke-3 dan seterusnya		

Petunjuk Pengisian:

No	Uraian / Nama Komponen	Payment Gateway	Saldo Akhir Bulan (Rp)
1	Rincian Payment Gateway ke-1, dst.	Diisi dengan Payment Gateway penyelenggara	Diisi dengan Saldo Akhir bulan Payment Gateway penyelenggara.

4. Rincian E-Wallet

No	Uraian/ Nama Komponen	e-Wallet
1	Rincian e-Wallet baris ke-1	
2	Rincian e-Wallet baris ke-2	
3 dst	Rincian e-Wallet baris ke-3 dan seterusnya	

Petunjuk Pengisian:

No	Uraian / Nama Komponen	e-Wallet
1	Rincian e-Wallet Penyelenggara baris ke-1, dst	Diisi dengan e-Wallet penyelenggara

5. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi Keuangan Penyelenggara yaitu Aset, Liabilitas,

dan Ekuitas pada akhir periode laporan. Mata uang pelaporan adalah Rupiah. Nilai akun pada Laporan Posisi Keuangan Bulanan diisi dalam satuan Rupiah untuk posisi per akhir periode laporan.

No.	Informasi	Nominal
1	Aset	
2	Aset Lancar	
3	Kas dan Setara Kas	
4	Piutang Usaha	
5	Pihak Berelasi	
6	Pihak Ketiga	
7	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	
8	Pajak dibayar di muka	
9	Biaya dibayar di muka	
10	Uang Jaminan/Deposit	
11	Investasi Jangka Pendek	
12	Piutang Lancar Lainnya	
13	Pihak Berelasi	
14	Pihak Ketiga	
15	Aset Lancar Lainnya	
16	Jumlah Aset Lancar	
17	Aset Tidak Lancar	
18	Aset Takberwujud	
19	Akumulasi Amortisasi	
20	Gedung, Tanah dan Peralatan	
21	Akumulasi Penyusutan	
22	Investasi Jangka Panjang	
23	Aset Pajak Tangguhan	
24	Piutang Tidak Lancar Lainnya	
25	Pihak Berelasi	
26	Pihak Ketiga	
27	Aset Tidak Lancar Lainnya	
28	Jumlah Aset Tidak Lancar	
29	Jumlah Aset	
30	Liabilitas	
31	Liabilitas Jangka Pendek	
32	Pendapatan Diterima Di Muka	
33	Utang Usaha - Pihak Ketiga	
34	Utang Jangka Pendek lainnya	
35	Pihak Berelasi	
36	Pihak Ketiga	
37	Utang Pajak	
38	Beban yang masih harus dibayar	
39	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	
40	Liabilitas Jangka Panjang	
41	Utang Jangka Panjang Lainnya	
42	Pihak Berelasi	
43	Pihak Ketiga	
44	Liabilitas imbalan pasca kerja	
45	Liabilitas Sewa	
46	Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	
47	Jumlah Liabilitas	
48	Ekuitas	

No.	Informasi	Nominal
49	Modal Saham	
50	Tambahan Modal Disetor	
51	Uang Muka Setoran Modal	
52	Laba (Rugi) Ditahan	
53	Laba (Rugi) Periode Berjalan	
54	Kepentingan Non-Pengendali	
55	Ekuitas Lainnya	
56	Jumlah Ekuitas	
57	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	

Petunjuk Pengisian:

No	Informasi	Nominal
1	Aset	
2	Aset Lancar	Aset Lancar adalah aset yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonominya melalui penjualan atau pemakaian, dalam kurun waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.
3	Kas dan Setara Kas	Kas antara lain terdiri atas kas rupiah dan valuta asing, giro pada bank, dan <i>deposit on call</i> . Kas juga dapat berupa saldo rupiah atau valuta asing pada <i>e-wallet</i> milik Penyelenggara LPBBI yang telah menjadi hak perusahaan untuk penggunaannya. Kas juga termasuk saldo rupiah pada <i>escrow account</i> Penyelenggara LPBBI yang telah menjadi hak Penyelenggara untuk penggunaannya. Setara kas antara lain terdiri dari deposito dengan jangka waktu tiga bulan, meliputi <i>deposit on call</i> , deposito berjangka dan sertifikat deposito yang berjangka waktu maksimal 3 bulan (walaupun deposito tersebut <i>automatic roll over</i>).
4	Piutang Usaha	Piutang usaha adalah hak perusahaan untuk menagih kepada pihak lain dalam bentuk uang yang timbul dari transaksi usaha LPBBI.
5	Pihak Berelasi	Diisi dengan nilai Piutang Usaha kepada orang atau perusahaan yang terkait dengan Penyelenggara.
6	Pihak Ketiga	Diisi dengan nilai Piutang Usaha kepada pihak selain pihak berelasi atau yang tidak ada hubungannya dengan Penyelenggara.
7	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai dari piutang usaha berdasarkan data historis dan potensi gagal bayar pelanggan di masa depan dengan menambah simbol negatif (-) di depan angka nominal.
8	Pajak dibayar di muka	Diisi dengan nilai Pajak Dibayar Di Muka.

No	Informasi	Nominal
9	Biaya dibayar di muka	Diisi dengan nilai pembayaran yang dilakukan oleh Penyelenggara kepada pihak ketiga namun manfaatnya belum dinikmati seluruhnya dalam satu periode pelaporan.
10	Uang Jaminan/Deposit	Diisi dengan nilai yang dipakai sebagai jaminan atas transaksi yang telah disepakati dengan pihak ketiga sampai batas waktu yang telah ditentukan. Uang jaminan termasuk dalam aset karena suatu saat akan dapat ditagih kembali ke perusahaan apabila syarat pengembalian terpenuhi.
11	Investasi Jangka Pendek	Diisi dengan nilai Investasi Jangka Pendek yang dilakukan oleh Penyelenggara.
12	Piutang Lancar Lainnya	Piutang Lancar Lainnya merupakan piutang lancar Penyelenggara yang belum diungkapkan dalam akun tersendiri. Nilai ini sama dengan nilai Piutang Lancar Lainnya Pihak Berelasi ditambah Piutang Lancar Lainnya Pihak Ketiga.
13	Pihak Berelasi	Diisi dengan nilai Piutang Lancar Lainnya kepada orang atau perusahaan yang terkait dengan Penyelenggara.
14	Pihak Ketiga	Diisi dengan nilai Piutang Lancar Lainnya kepada pihak selain pihak berelasi atau yang tidak ada hubungannya dengan Penyelenggara.
15	Aset Lancar Lainnya	Diisi dengan nilai Aset Lancar Lainnya yang belum diungkapkan dalam akun tersendiri.
16	Jumlah Aset Lancar	Jumlah Aset Lancar = Kas dan Setara Kas (+) Piutang Usaha (+) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (+) Pajak Dibayar Di Muka (+) Biaya Dibayar Di Muka (+) Uang Jaminan/Deposit (+) Investasi Jangka Pendek (+) Piutang Lancar Lainnya (+) Aset Lancar Lainnya
17	Aset Tidak Lancar	Aset yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi melalui pemakaian atau pelepasan, dalam kurun waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
18	Aset Takberwujud	Aset Takberwujud antara lain berupa lisensi atas penggunaan perangkat lunak. Aset Tidak Berwujud diakui pada saat terjadinya beban untuk memperoleh aset tersebut sebesar biaya perolehan.
19	Akumulasi Amortisasi	Diisi dengan nilai Akumulasi Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud milik Penyelenggara dengan menambah simbol negatif (-) di depan angka nominal.
20	Gedung, Tanah dan Peralatan	Diisi dengan nilai perolehan Gedung, Tanah dan Peralatan milik Penyelenggara. Nilai ini diakui pertama kali sesuai dengan harga perolehannya.
21	Akumulasi Penyusutan	Diisi dengan nilai Akumulasi Penyusutan atas Gedung, Tanah dan Peralatan milik

No	Informasi	Nominal
		Penyelenggara dengan menambah simbol negatif (-) di depan angka nominal.
22	Investasi Jangka Panjang	Diisi dengan nilai Investasi Jangka Panjang yang dilakukan oleh Penyelenggara.
23	Aset Pajak Tangguhan	Diisi dengan nilai Aset Pajak Tangguhan.
24	Piutang Tidak Lancar Lainnya	Piutang Tidak Lancar Lainnya merupakan piutang tidak lancar Penyelenggara yang belum diungkapkan dalam akun tersendiri. Nilai ini sama dengan nilai Piutang Tidak Lancar Lainnya Pihak Berelasi ditambah Piutang Tidak Lancar Lainnya Pihak Ketiga.
25	Pihak Berelasi	Diisi dengan nilai Piutang Tidak Lancar Lainnya kepada orang atau Perusahaan yang terkait dengan Penyelenggara.
26	Pihak Ketiga	Diisi dengan nilai Piutang Tidak Lancar Lainnya kepada pihak selain pihak berelasi atau yang tidak ada hubungannya dengan Penyelenggara.
27	Aset Tidak Lancar Lainnya	Diisi dengan nilai Aset Tidak Lancar Lainnya yang belum diungkapkan dalam akun tersendiri.
28	Jumlah Aset Tidak Lancar	Jumlah Aset Tidak Lancar = Aset Tidak Berwujud (+) (Akumulasi Amortisasi) (+) Gedung, Tanah dan Peralatan (+) (Akumulasi Penyusutan) (+) Investasi Jangka Panjang (+) Aset Pajak Tangguhan (+) Piutang Tidak Lancar Lainnya (+) Aset Tidak Lancar Lainnya.
29	Jumlah Aset	Jumlah Aset = Jumlah Aset Lancar (+) Jumlah Aset Tidak Lancar.
30	Liabilitas	Liabilitas adalah kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi.
31	Liabilitas Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Pendek adalah kewajiban perusahaan yang jatuh tempo pembayarannya dalam kurun waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.
32	Pendapatan Diterima Di Muka	Diisi dengan nilai Pendapatan Diterima Di Muka. Pendapatan ini timbul karena Penyelenggara telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut.
33	Utang Usaha - Pihak Ketiga	Diisi dengan nilai utang usaha yang meliputi antara lain liabilitas kepada pemasok untuk pengadaan peralatan, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Contoh: pengadaan server, utang kartu kredit, utang jasa <i>payment gateway</i> , atau utang kepada pihak ketiga dalam mendukung operasional yang sudah disepakati diawal untuk dibayarkan.

No	Informasi	Nominal
34	Utang Jangka Pendek lainnya	Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek Penyelenggara yang belum diungkapkan dalam akun tersendiri. Nilai ini sama dengan nilai Utang Jangka Pendek Lainnya Pihak Berelasi ditambah Utang Jangka Pendek Lainnya Lainnya Pihak Ketiga.
35	Pihak Berelasi	Diisi dengan nilai Utang Jangka Pendek Lainnya kepada orang atau Perusahaan yang terkait dengan Penyelenggara.
36	Pihak Ketiga	Diisi dengan nilai Utang Jangka Pendek Lainnya kepada pihak selain pihak berelasi atau yang tidak ada hubungannya dengan Penyelenggara.
37	Utang Pajak	Diisi dengan nilai pajak yang harus dibayar oleh Penyelenggara tetapi belum disetorkan ke kas negara berdasarkan ketentuan yang berlaku. Utang pajak diakui pada saat terjadinya transaksi atau kejadian yang telah mewajibkan Penyelenggara untuk membayar atau menyetor pajak kepada negara.
38	Beban yang masih harus dibayar	Diisi dengan nilai beban yang masih harus dibayarkan, tetapi pembayarannya belum dilakukan sampai periode selanjutnya. Pada umumnya beban ini belum dibayar karena dokumen penagihan belum diterima atau akibat jatuh tempo pembayaran. Nilai ini antara lain berupa beban langganan listrik, telepon, air, gas, internet kantor, dan lain lain serta beban yang sudah diterima manfaatnya dan belum dilunasi pada tanggal pelaporan, misalnya beban gaji dan tunjangan.
39	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek = Pendapatan Diterima Di Muka (+) Utang Usaha Pihak Ketiga (+) Utang Jangka Pendek Lainnya (+) Utang Pajak (+) Beban yang masih harus dibayar.
40	Liabilitas Jangka Panjang	Liabilitas Jangka Panjang adalah kewajiban perusahaan yang jatuh tempo pembayarannya dalam kurun waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
41	Utang Jangka Panjang Lainnya	Utang Jangka Panjang Lainnya merupakan utang jangka panjang Penyelenggara yang belum diungkapkan dalam akun tersendiri. Nilai ini sama dengan nilai Utang Jangka Panjang Lainnya Pihak Berelasi ditambah Utang Jangka Panjang Lainnya Lainnya Pihak Ketiga.
42	Pihak Berelasi	Diisi dengan nilai Utang Jangka Panjang lainnya kepada orang atau Perusahaan yang terkait dengan Penyelenggara.
43	Pihak Ketiga	Diisi dengan nilai Utang Jangka Panjang lainnya kepada pihak selain pihak berelasi

No	Informasi	Nominal
		atau yang tidak ada hubungannya dengan Penyelenggara.
44	Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	Diisi dengan nilai imbalan yang akan diterima oleh karyawan perusahaan setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pasca kerja meliputi tunjangan purna karya seperti pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya: asuransi jiwa pasca kerja, tunjangan kesehatan pasca kerja, tunjangan penghargaan, dan pesangon.
45	Liabilitas Sewa	Diisi dengan nilai pembayaran suatu kontrak yang merupakan atau mengandung sewa yang belum dibayar sampai pada tanggal pelaporan.
46	Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	Jumlah Liabilitas Jangka Panjang = Utang Jangka Panjang Lainnya (+) Liabilitas Imbalan Pasca Kerja (+) Liabilitas Sewa
47	Jumlah Liabilitas	Jumlah Liabilitas = Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (+) Jumlah Liabilitas Jangka Panjang.
48	Ekuitas	Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitasnya.
49	Modal Saham	Diisi dengan nilai Modal Disetor oleh pemegang saham sesuai dengan nilai nominal sahamnya.
50	Tambahannya Modal Disetor	Diisi dengan tambahan modal disetor antara lain terdiri dari agio saham, selisih transaksi saham treasuri, selisih transaksi dengan entitas tidak sependengali, dan selisih kombinasi dan pelepasan bisnis entitas sependengalian. Agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. Selisih transaksi saham treasuri merupakan selisih yang timbul dari perolehan dan pelepasan kembali atas saham yang diterbitkan perusahaan. Selisih transaksi dengan pihak nonpendengali timbul dari transaksi pelepasan sebagian kepemilikan pada anak perusahaan tetapi tidak menyebabkan perusahaan kehilangan pengendalian atas anak perusahaan tersebut. Selisih kombinasi dan pelepasan bisnis entitas sependengali timbul dari transaksi perolehan bisnis dari, atau pelepasan bisnis kepada, entitas sependengali.
51	Uang Muka Setoran Modal	Diisi dengan nilai penempatan dana oleh pemegang saham yang ditujukan untuk modal disetor dan akan/masih diproses persetujuan OJK.

No	Informasi	Nominal
52	Laba (Rugi) Ditahan	Diisi dengan nilai Laba (Rugi) Komprehensif yang belum didistribusikan periode sebelumnya.
53	Laba (Rugi) Periode Berjalan	Diisi dengan nilai Laba (Rugi) Komprehensif yang belum didistribusikan periode berjalan.
54	Kepentingan Non-Pengendali	Diisi dengan nilai Kepentingan Non-Pengendali.
55	Ekuitas Lainnya	Diisi dengan komponen ekuitas lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain kepemilikan saham oleh karyawan atau <i>employee stock option plan</i> (ESOP).
56	Jumlah Ekuitas	Jumlah Ekuitas = Modal Saham (+) Tambahan Modal Disetor (+) Uang Muka Setoran Modal (+) Laba (Rugi) Ditahan (+) Laba (Rugi) Periode Berjalan (+) Kepentingan Non-Pengendali+ Ekuitas Lainnya.
57	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas = Jumlah Liabilitas (+) Jumlah Ekuitas.

6. Laporan Laba/Rugi

Laporan Laba/Rugi merupakan laporan keuangan yang menyajikan seluruh pos pendapatan dan beban yang diakui dalam suatu periode laporan. Mata uang pelaporan adalah Rupiah. Nilai akun pada Laporan Laba/Rugi Bulanan diisi dalam satuan Rupiah merupakan akumulasi Pendapatan atau Beban dari awal tahun laporan (1 Januari) hingga akhir periode laporan (akhir bulan laporan).

No.	Informasi	Nominal
1	Pendapatan Operasional	
2	Pendapatan atas Komisi/Ujrah	
3	Pendapatan atas Denda	
4	Jumlah Pendapatan Operasional	
5	Beban Operasional	
6	Beban atas Pendapatan	
7	Beban atas Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	
8	Beban Ketenagakerjaan	
9	Beban Peningkatan Kompetensi dan Keahlian SDM	
10	Beban Pemasaran dan Periklanan	
11	Beban Umum dan Administrasi	
12	Beban Pengembangan dan Pemeliharaan IT	
13	Beban Penyusutan	
14	Beban Amortisasi	
15	Jumlah Beban Operasional	
16	Laba (Rugi) Operasional	
17	Pendapatan Non Operasional	
18	Pendapatan Bunga (Konvensional) / Pendapatan Bagi Hasil (Syariah)	
19	Pendapatan Lainnya	
20	Jumlah Pendapatan Non Operasional	
21	Beban Non Operasional	
22	Beban Bunga (Konvensional) / Distribusi Bagi Hasil (Syariah)	
23	Beban Administrasi Bank	
24	Laba (Rugi) Selisih Kurs	

No.	Informasi	Nominal
25	Beban Lainnya	
26	Jumlah Beban Non Operasional	
27	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	
28	Beban Pajak	
29	Laba (Rugi) Setelah Pajak	
30	Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya	
31	Laba (Rugi) Komprehensif	

Petunjuk Pengisian:

No	Informasi	Nominal
1	Pendapatan Operasional	
2	Pendapatan atas Komisi/Ujrah	Diisi dengan pendapatan dari arus masuk yang diterima oleh Penyelenggara LPBBI karena telah mempertemukan antara penerima dana dan pemberi dana.
3	Pendapatan atas Denda	Diisi dengan pendapatan dari arus masuk yang diterima oleh Penyelenggara LPBBI sebagai imbalan atas keterlambatan penyelesaian kewajiban dari pihak penerima dana.
4	Jumlah Pendapatan Operasional	Jumlah Pendapatan Operasional = Pendapatan atas Komisi/Ujrah (+) Pendapatan atas Denda
5	Beban Operasional	
6	Beban atas Pendapatan	Diisi dengan biaya yang timbul berkaitan langsung atas penyediaan jasa Penyelenggara LPBBI.
7	Beban atas Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	Diisi dengan biaya yang muncul dari pembuatan penyisihan piutang yang tidak akan tertagih.
8	Beban Ketenagakerjaan	Diisi dengan nilai Beban Ketenagakerjaan.
9	Beban Peningkatan Kompetensi dan Keahlian SDM	Diisi dengan nilai alokasi dari beban ketenagakerjaan (SDM) untuk peningkatan kompetensi dan keahlian SDM.
10	Beban Pemasaran dan Periklanan	Diisi dengan nilai beban yang timbul dari kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran produk.
11	Beban Umum dan Administrasi	Diisi dengan nilai beban yang muncul dari kegiatan kantor dan tidak berhubungan secara langsung dengan operasi utama perusahaan.
12	Beban Pengembangan dan Pemeliharaan IT	Diisi dengan nilai beban pengembangan dan pemeliharaan IT.
13	Beban Penyusutan	Diisi dengan nilai Beban Penyusutan.
14	Beban Amortisasi	Diisi dengan nilai Beban Amortisasi.

No	Informasi	Nominal
15	Jumlah Beban Operasional	Jumlah Beban Operasional = Beban atas Pendapatan (+) Beban atas Penyisihan Piutang + Ragu-Ragu+ Beban Ketenagakerjaan (+) Beban Pemasaran dan Periklanan (+) Beban Umum dan Administrasi (+) Beban Pengembangan dan Pemeliharaan IT (+) Beban Penyusutan (+) Beban Amortisasi
16	Laba (Rugi) Operasional	Laba (Rugi) Operasional = Jumlah Pendapatan Operasional (-) Jumlah Beban Operasional.
17	Pendapatan Non Operasional	
18	Pendapatan Bunga (Konvensional) Pendapatan Bagi Hasil (Syariah)	Konvensional: Diisi dengan nilai Pendapatan Bunga. Syariah: Diisi dengan nilai Pendapatan Bagi Hasil.
19	Pendapatan Lainnya	Diisi dengan nilai Pendapatan Lainnya yang belum diungkapkan dalam akun tersendiri.
20	Jumlah Pendapatan Non Operasional	Jumlah Pendapatan Non Operasional = Pendapatan Bunga (Konvensional) atau Pendapatan Bagi Hasil (Syariah) (+) Pendapatan Lainnya
21	Beban Non Operasional	
22	Beban Bunga (Konvensional) Distribusi Bagi Hasil (Syariah)	Konvensional: Diisi dengan nilai Beban Bunga. Syariah: Diisi dengan nilai Distribusi Bagi Hasil.
23	Beban Administrasi Bank	Diisi dengan nilai Beban Administrasi Bank.
24	Laba (Rugi) Selisih Kurs	Diisi dengan nilai Laba (Rugi) dari Selisih Kurs. Apabila terjadi Laba Selisih Kurs, nilainya negatif dan apabila terjadi Rugi Selisih Kurs, nilainya positif.
25	Beban Lainnya	Diisi dengan nilai Beban Lainnya yang belum diungkapkan dalam akun tersendiri.
26	Jumlah Beban Non Operasional	Jumlah Beban Non Operasional = Beban Bunga (Konvensional) atau Distribusi Bagi Hasil (Syariah) (+) Beban Administrasi Bank (+) Laba (Rugi) Selisih Kurs (+) Beban Lainnya
27	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Laba (Rugi) Sebelum Pajak = Laba (Rugi) Operasional (+) Jumlah Pendapatan Non Operasional (-) Jumlah Beban Non Operasional.

No	Informasi	Nominal
28	Beban Pajak	Diisi dengan jumlah pajak terutang dari penghasilan kena pajak pada tahun berjalan. Beban Pajak diakui dalam laporan laba rugi sebesar penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif PPh Badan yang berlaku.
29	Laba (Rugi) Setelah Pajak	Laba (Rugi) Setelah Pajak = Laba (Rugi) Sebelum Pajak (-) Beban Pajak
30	Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya	Diisi dengan nilai Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya.
31	Laba (Rugi) Komprehensif	Laba (Rugi) Komprehensif = Laba (Rugi) Setelah Pajak (+) Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya.

7. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan ekuitas yang terjadi selama periode laporan. Mata uang pelaporan adalah Rupiah. Nilai akun pada Laporan Perubahan Ekuitas Bulanan diisi dalam satuan Rupiah untuk posisi dari awal tahun hingga akhir periode laporan.

No.	Informasi	Nominal
1	Saldo Ekuitas Awal Periode	
2	Penambahan (Pengurangan) Ekuitas	
3	Tambahan modal selama periode berjalan	
4	Laba (Rugi) Komprehensif periode berjalan	
5	Transaksi Lainnya yang menyebabkan perubahan kepemilikan	
6	Dividen	
7	Saldo Ekuitas Akhir Periode	

Petunjuk Pengisian:

No	Informasi	Nominal
1	Saldo Ekuitas Awal Periode	Diisi dengan nilai Saldo Ekuitas pada Awal Periode.
2	Penambahan (Pengurangan) Ekuitas	
3	Tambahan Modal Selama Periode Berjalan	Diisi dengan nilai Tambahan Modal Selama Periode Berjalan.
4	Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	Diisi dengan nilai Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan dari Laporan Laba/Rugi.
5	Transaksi Lainnya Yang Menyebabkan Perubahan Kepemilikan	Diisi dengan nilai Transaksi Lainnya Yang Menyebabkan Perubahan Kepemilikan. Apabila transaksi tersebut bersifat mengurangi ekuitas, maka diberikan simbol negatif (-) di depan angka nominal.
6	Dividen	Diisi dengan nilai Dividen.
7	Saldo Ekuitas Akhir Periode	Saldo Ekuitas Akhir Periode = Saldo Ekuitas Awal Periode (+) Tambahan Modal Selama Periode

No	Informasi	Nominal
		Berjalan (+) Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan (+) Transaksi Lainnya Yang Menyebabkan Perubahan Kepemilikan (-) Dividen

8. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam aktivitas Penyelenggara selama periode pelaporan dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan/pembiayaan. Mata uang pelaporan adalah Rupiah. Nilai akun pada Laporan Arus Kas Bulanan diisi dalam satuan Rupiah untuk posisi dari awal tahun hingga akhir periode laporan.

No.	Informasi	Nominal
1	A. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi	
2	1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi	
3	2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi	
4	B. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi	
5	1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi	
6	2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi	
7	C. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pembiayaan	
8	1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan	
9	2. Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pembiayaan	
10	D. Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas	
11	E. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	
12	F. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	
13	G. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	

Petunjuk Pengisian:

No.	Informasi	Nominal
1	A. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi	Arus kas dari kegiatan operasi merupakan arus kas yang diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan Penyelenggara, oleh karena itu, arus kas ini pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba rugi. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi = Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi (-) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi
2	1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi	Diisi dengan nilai Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi.

No.	Informasi	Nominal
3	2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi	Diisi dengan nilai Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi.
4	B. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi	Arus kas dari kegiatan investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan perolehan dan/atau pelepasan sumber daya yang bertujuan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi = Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi (-) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi
5	1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi	Diisi dengan nilai Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi.
6	2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi	Diisi dengan nilai Arus Kas Keluar dari Kegiatan Investasi.
7	C. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pembiayaan	Arus kas dari kegiatan pembiayaan merupakan arus kas yang timbul dari penerimaan dan pengeluaran kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas dan Pendanaan Penyelenggara. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pembiayaan = Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan (-) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan
8	1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan	Diisi dengan nilai Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan.
9	2. Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pembiayaan	Diisi dengan nilai Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pembiayaan.
10	D. Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas	Diisi dengan nilai Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas.
11	E. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas = Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi (+) Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi (+) Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pembiayaan (+) Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas
12	F. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	Diisi dengan nilai Kas dan Setara Kas pada Awal Periode.

No.	Informasi	Nominal
13	G. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode = Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas + Kas dan Setara Kas pada Awal Periode.

9. Catatan atas Laporan Keuangan

PT XXX
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE YANG BERAKHIR PADA DD MM YYYY
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Diisi dengan catatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan berupa informasi tambahan untuk jumlah yang diungkapkan dalam laporan 'utama' kecuali yang telah diungkapkan pada formulir/tabel pelaporan lainnya, termasuk diantaranya kebijakan akuntansi, estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting untuk diungkapkan, pengungkapan atas modal dan instrumen keuangan lain yang dapat diklasifikasikan sebagai ekuitas.

10. *Inclusivity*

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
1	Akumulasi jumlah <i>Unique Lender</i> dan <i>Unique Borrower</i> (Satuan entitas)		
2	1) Akumulasi jumlah <i>Unique Lender</i> (Satuan entitas)		
3	a. Jawa (<i>Unique Lender</i> dari Jawa)		
4	1. Banten		
5	2. DKI Jakarta		
6	3. Jawa Barat		
7	4. Jawa Tengah		
8	5. DI Yogyakarta		
9	6. Jawa Timur		
10	b. Luar Jawa (<i>Unique Lender</i> dari Luar Jawa)		
11	1. Nangroe Aceh Darussalam		
12	2. Sumatera Utara		
13	3. Sumatera Barat		
14	4. Riau		
15	5. Kepulauan Riau		
16	6. Kepulauan Bangka Belitung		
17	7. Jambi		
18	8. Sumatera Selatan		
19	9. Bengkulu		
20	10. Lampung		

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
21	11. Kalimantan Barat		
22	12. Kalimantan Tengah		
23	13. Kalimantan Utara		
24	14. Kalimantan Timur		
25	15. Kalimantan Selatan		
26	16. Sulawesi Utara		
27	17. Gorontalo		
28	18. Sulawesi Tengah		
29	19. Sulawesi Barat		
30	20. Sulawesi Selatan		
31	21. Sulawesi Tenggara		
32	22. Bali		
33	23. Nusa Tenggara Barat		
34	24. Nusa Tenggara Timur		
35	25. Maluku Utara		
36	26. Maluku		
37	27. Papua Barat		
38	28. Papua		
39	29. Papua Tengah		
40	30. Papua Pegunungan		
41	31. Papua Selatan		
42	32. Papua Barat Daya		
43	c. Luar Negeri		
44	d. Agregat (Total)		
45	- Laki-laki		
46	- Perempuan		
47	- Badan Usaha		
48	e. Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> Berdasarkan Usia (Bagi <i>Unique Lender</i> perseorangan)		
49	- <19 tahun		
50	- 19-34 Tahun		
51	- 35-54 Tahun		
52	- >54 Tahun		
53	2) Akumulasi jumlah <i>Unique Borrower</i> (Satuan entitas)		
54	a. Jawa (<i>Unique Borrower</i> dari Jawa)		
55	1. Banten		
56	2. DKI Jakarta		
57	3. Jawa Barat		
58	4. Jawa Tengah		
59	5. DI Yogyakarta		
60	6. Jawa Timur		
61	b. Luar Jawa (<i>Unique Borrower</i> dari Luar Jawa)		
62	1. Nangroe Aceh Darussalam		

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
63	2. Sumatera Utara		
64	3. Sumatera Barat		
65	4. Riau		
66	5. Kepulauan Riau		
67	6. Kepulauan Bangka Belitung		
68	7. Jambi		
69	8. Sumatera Selatan		
70	9. Bengkulu		
71	10. Lampung		
72	11. Kalimantan Barat		
73	12. Kalimantan Tengah		
74	13. Kalimantan Utara		
75	14. Kalimantan Timur		
76	15. Kalimantan Selatan		
77	16. Sulawesi Utara		
78	17. Gorontalo		
79	18. Sulawesi Tengah		
80	19. Sulawesi Barat		
81	20. Sulawesi Selatan		
82	21. Sulawesi Tenggara		
83	22. Bali		
84	23. Nusa Tenggara Barat		
85	24. Nusa Tenggara Timur		
86	25. Maluku Utara		
87	26. Maluku		
88	27. Papua Barat		
89	28. Papua		
90	29. Papua Tengah		
91	30. Papua Pegunungan		
92	31. Papua Selatan		
93	32. Papua Barat Daya		
94	c. Agregat (Total)		
95	- Laki-laki		
96	- Perempuan		
97	- Badan Usaha		
98	d. Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> Berdasarkan Usia (Bagi <i>Unique Borrower</i> Perseorangan)		
99	- <19 tahun		
100	- 19-34 Tahun		
101	- 35-54 Tahun		
102	- >54 Tahun		
103	Akumulasi Jumlah <i>Lender Lending Account</i> dan <i>Borrower Credit Account</i> (Satuan Akun)		

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
104	1) Akumulasi Jumlah <i>Lender Lending Account</i> (Satuan Akun)		
105	a. Jawa (Jumlah <i>Lending Account</i> dari <i>Lender Jawa</i>)		
106	1. Banten		
107	2. DKI Jakarta		
108	3. Jawa Barat		
109	4. Jawa Tengah		
110	5. DI Yogyakarta		
111	6. Jawa Timur		
112	b. Luar Jawa (Jumlah <i>Lending Account</i> dari <i>Lender Luar Jawa</i>)		
113	1. Nangroe Aceh Darussalam		
114	2. Sumatera Utara		
115	3. Sumatera Barat		
116	4. Riau		
117	5. Kepulauan Riau		
118	6. Kepulauan Bangka Belitung		
119	7. Jambi		
120	8. Sumatera Selatan		
121	9. Bengkulu		
122	10. Lampung		
123	11. Kalimantan Barat		
124	12. Kalimantan Tengah		
125	13. Kalimantan Utara		
126	14. Kalimantan Timur		
127	15. Kalimantan Selatan		
128	16. Sulawesi Utara		
129	17. Gorontalo		
130	18. Sulawesi Tengah		
131	19. Sulawesi Barat		
132	20. Sulawesi Selatan		
133	21. Sulawesi Tenggara		
134	22. Bali		
135	23. Nusa Tenggara Barat		
136	24. Nusa Tenggara Timur		
137	25. Maluku Utara		
138	26. Maluku		
139	27. Papua Barat		
140	28. Papua		
141	29. Papua Tengah		
142	30. Papua Pegunungan		
143	31. Papua Selatan		
144	32. Papua Barat Daya		

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
145	c. Luar Negeri (Jumlah <i>Lending Account</i> dari <i>Lender</i> Luar Negeri)		
146	d. Agregat (Total)		
147	- Laki-laki		
148	- Perempuan		
149	- Badan Usaha		
150	e. Akumulasi Jumlah Akun <i>Lender</i> Berdasarkan Usia (Bagi <i>Lending Account</i> dari <i>Lender</i> perseorangan)		
151	- <19 tahun		
152	- 19-34 Tahun		
153	- 35-54 Tahun		
154	- >54 Tahun		
155	2) Akumulasi Jumlah <i>Borrower Credit Account</i> (Satuan Akun)		
156	a. Jawa (Jumlah <i>Credit Account</i> dari <i>Borrower</i> Jawa)		
157	1. Banten		
158	2. DKI Jakarta		
159	3. Jawa Barat		
160	4. Jawa Tengah		
161	5. DI Yogyakarta		
162	6. Jawa Timur		
163	b. Luar Jawa (Jumlah <i>Credit Account</i> dari <i>Borrower</i> Luar Jawa)		
164	1. Nangroe Aceh Darussalam		
165	2. Sumatera Utara		
166	3. Sumatera Barat		
167	4. Riau		
168	5. Kepulauan Riau		
169	6. Kepulauan Bangka Belitung		
170	7. Jambi		
171	8. Sumatera Selatan		
172	9. Bengkulu		
173	10. Lampung		
174	11. Kalimantan Barat		
175	12. Kalimantan Tengah		
176	13. Kalimantan Utara		
177	14. Kalimantan Timur		
178	15. Kalimantan Selatan		
179	16. Sulawesi Utara		
180	17. Gorontalo		

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
181	18. Sulawesi Tengah		
182	19. Sulawesi Barat		
183	20. Sulawesi Selatan		
184	21. Sulawesi Tenggara		
185	22. Bali		
186	23. Nusa Tenggara Barat		
187	24. Nusa Tenggara Timur		
188	25. Maluku Utara		
189	26. Maluku		
190	27. Papua Barat		
191	28. Papua		
192	29. Papua Tengah		
193	30. Papua Pegunungan		
194	31. Papua Selatan		
195	32. Papua Barat Daya		
196	c. Agregat (Total)		
197	- Laki-laki		
198	- Perempuan		
199	- Badan Usaha		
200	d. Akumulasi Jumlah Akun <i>Borrower</i> Berdasarkan Usia (Bagi <i>Credit Account</i> dari <i>Borrower</i> perseorangan)		
201	- <19 tahun		
202	- 19-34 Tahun		
203	- 35-54 Tahun		
204	- >54 Tahun		

Keterangan:

1. *Unique Lender* adalah jumlah unik orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha baru yang memberikan Pendanaan.
2. *Unique Borrower* adalah jumlah unik orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha baru yang menerima Pendanaan.
3. *Lender Lending Account* adalah jumlah frekuensi transaksi pemberi dana yang memberikan Pendanaan.
4. *Borrower Credit Account* adalah jumlah frekuensi transaksi penerima dana yang menerima Pendanaan.

Petunjuk Pengisian:

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
1	Akumulasi jumlah <i>Unique Lender</i> dan <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas)		

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
2	1) Akumulasi jumlah <i>Unique Lender</i> (satuan entitas)		
3	a. Jawa (<i>Unique Lender</i> dari Jawa)	Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> (satuan entitas) dari Jawa Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> dari wilayah Jawa.	Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> (satuan entitas) dari Jawa Posisi Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> dari wilayah Jawa.
4	1. Banten	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> (satuan entitas) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Jawa.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> (satuan entitas) Posisi Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Jawa.
5	2. DKI Jakarta		
6	3. Jawa Barat		
7	4. Jawa Tengah		
8	5. DI Yogyakarta		
9	6. Jawa Timur		
10	b. Luar Jawa (<i>Unique Lender</i> dari Luar Jawa)	Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> (satuan entitas) dari Luar Jawa Sejak Perusahaan	Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> (satuan entitas) dari Luar Jawa Posisi Bulan

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan		
		Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> dari wilayah Luar Jawa.	Laporan merupakan penjumlahan dari Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> dari wilayah Luar Jawa.		
11	1. Nangroe Aceh Darussalam	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> (satuan entitas) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Luar Jawa.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> (satuan entitas) Posisi Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Luar Jawa.		
12	2. Sumatera Utara				
13	3. Sumatera Barat				
14	4. Riau				
15	5. Kepulauan Riau				
16	6. Kepulauan Bangka Belitung				
17	7. Jambi				
18	8. Sumatera Selatan				
19	9. Bengkulu				
20	10. Lampung				
21	11. Kalimantan Barat				
22	12. Kalimantan Tengah				
23	13. Kalimantan Utara				
24	14. Kalimantan Timur				
25	15. Kalimantan Selatan				
26	16. Sulawesi Utara				
27	17. Gorontalo				
28	18. Sulawesi Tengah				
29	19. Sulawesi Barat				
30	20. Sulawesi Selatan				
31	21. Sulawesi Tenggara				
32	22. Bali				
33	23. Nusa Tenggara Barat				
34	24. Nusa Tenggara Timur				
35	25. Maluku Utara				
36	26. Maluku				
37	27. Papua Barat				
38	28. Papua				
39	29. Papua Tengah				
40	30. Papua Pegunungan				
41	31. Papua Selatan				
42	32. Papua Barat Daya				
43	c. Luar Negeri	Diisi dengan Akumulasi	Diisi dengan Akumulasi		

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
		Jumlah <i>Unique Lender</i> (satuan entitas) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan dari <i>Lender</i> Luar Negeri.	Jumlah <i>Unique Lender</i> (satuan entitas) Posisi Bulan Laporan dari <i>Lender</i> Luar Negeri.
44	d. Agregat (Total)	Agregat (Total) Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> (satuan entitas) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan = Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> dari Jawa (+) Luar Jawa (+) Luar Negeri.	Agregat (Total) Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> (satuan entitas) Posisi Bulan Laporan = Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> dari Jawa (+) Luar Jawa (+) Luar Negeri.
45	- Laki-laki	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> (satuan entitas) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan pada <i>Lender</i> Perseorangan	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> (satuan entitas) Posisi Bulan Laporan pada <i>Lender</i> Perseorangan dengan jenis kelamin Laki-Laki.

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
		n dengan jenis kelamin Laki-Laki.	
46	- Perempuan	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> (satuan entitas) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan pada <i>Lender Perseorangan</i> dengan jenis kelamin Perempuan.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> (satuan entitas) Posisi Bulan Laporan pada <i>Lender Perseorangan</i> dengan jenis kelamin Perempuan.
47	- Badan Usaha	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> (satuan entitas) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan pada <i>Lender Badan Usaha</i> .	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> (satuan entitas) Posisi Bulan Laporan pada <i>Lender Badan Usaha</i> .
48	e. Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> Berdasarkan Usia (Bagi <i>Unique Lender Perseorangan</i>)		
49	- <19 tahun	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> (satuan entitas)	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> (satuan entitas)

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
		Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Lender</i> kurang dari 19 tahun.	Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Lender</i> kurang dari 19 tahun.
50	- 19-34 Tahun	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> (satuan entitas) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Lender</i> dari 19 sampai dengan 34 tahun.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> (satuan entitas) Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Lender</i> kurang dari 19 sampai dengan 34 tahun.
51	- 35-54 Tahun	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> (satuan entitas) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Lender</i> dari 35 sampai dengan 54 tahun.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Lender</i> (satuan entitas) Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Lender</i> kurang dari 35 sampai dengan 54 tahun.
52	- >54 Tahun	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique</i>	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique</i>

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
		<i>Lender</i> (satuan entitas) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Lender</i> lebih dari 54 tahun.	<i>Lender</i> (satuan entitas) Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Lender</i> lebih dari 54 tahun.
53	2) Akumulasi jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas)		
54	a. Jawa (<i>Unique Borrower</i> dari Jawa)	Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) dari Jawa Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) dari wilayah Jawa.	Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) dari Jawa Posisi Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) dari wilayah Jawa.
55	1. Banten	Diisi dengan	Diisi dengan
56	2. DKI Jakarta	Akumulasi	Akumulasi
57	3. Jawa Barat	Jumlah	Jumlah
58	4. Jawa Tengah	<i>Unique</i>	<i>Unique</i>
59	5. DI Yogyakarta	<i>Borrower</i>	<i>Borrower</i>
60	6. Jawa Timur	(satuan entitas) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	(satuan entitas) Posisi Bulan Laporan untuk masing-masing

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
		Laporan untuk masing-masing wilayah Jawa.	wilayah Jawa.
61	b. Luar Jawa (Unique Borrower dari Luar Jawa)	Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) dari Luar Jawa Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) dari wilayah Luar Jawa.	Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) dari Luar Jawa Posisi Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) dari wilayah Luar Jawa.
62	1. Nangroe Aceh Darussalam	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Luar Jawa.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) Posisi Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Luar Jawa.
63	2. Sumatera Utara		
64	3. Sumatera Barat		
65	4. Riau		
66	5. Kepulauan Riau		
67	6. Kepulauan Bangka Belitung		
68	7. Jambi		
69	8. Sumatera Selatan		
70	9. Bengkulu		
71	10. Lampung		
72	11. Kalimantan Barat		
73	12. Kalimantan Tengah		
74	13. Kalimantan Utara		
75	14. Kalimantan Timur		
76	15. Kalimantan Selatan		
77	16. Sulawesi Utara		
78	17. Gorontalo		

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
79	18. Sulawesi Tengah		
80	19. Sulawesi Barat		
81	20. Sulawesi Selatan		
82	21. Sulawesi Tenggara		
83	22. Bali		
84	23. Nusa Tenggara Barat		
85	24. Nusa Tenggara Timur		
86	25. Maluku Utara		
87	26. Maluku		
88	27. Papua Barat		
89	28. Papua		
90	29. Papua Tengah		
91	30. Papua Pegunungan		
92	31. Papua Selatan		
93	32. Papua Barat Daya		
94	c. Agregat (Total)	Agregat (Total) Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan = Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) dari Jawa (+) Luar Jawa.	Agregat (Total) Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) Posisi Bulan Laporan = Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) dari Jawa (+) Luar Jawa.
95	- Laki-laki	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) Posisi Bulan Laporan dari <i>Borrower</i> Perseoranga

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
		Laporan dari <i>Borrower</i> Perseorangan dengan jenis kelamin Laki-Laki.	n dengan jenis kelamin Laki-Laki.
96	- Perempuan	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan dari <i>Borrower</i> Perseorangan dengan jenis kelamin Perempuan.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) Posisi Bulan Laporan dari <i>Borrower</i> Perseorangan dengan jenis kelamin Perempuan.
97	- Badan Usaha	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan dari <i>Borrower</i> Badan Usaha.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) Posisi Bulan Laporan dari <i>Borrower</i> Badan Usaha.
98	d. Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> Berdasarkan Usia (Bagi <i>Unique Borrower</i> Perseorangan)		

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
99	- <19 tahun	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> kurang dari 19 tahun.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> kurang dari 19 tahun.
100	- 19-34 Tahun	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> dari 19 sampai dengan 34 tahun.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> kurang dari 19 sampai dengan 34 tahun.
101	- 35-54 Tahun	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan dengan usia	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> kurang dari 35 sampai

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
		<i>Borrower</i> dari 35 sampai dengan 54 tahun.	dengan 54 tahun.
102	- >54 Tahun	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> lebih dari 54 tahun.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Unique Borrower</i> (satuan entitas) Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> lebih dari 54 tahun.
103	Akumulasi Jumlah <i>Lender Lending Account</i> dan <i>Borrower Credit Account</i> (satuan akun)		
104	1) Akumulasi Jumlah <i>Lender Lending Account</i> (satuan akun)		
105	a. Jawa (Jumlah <i>Lending Account</i> dari <i>Lender Jawa</i>)	Akumulasi Jumlah <i>Lending Account</i> (satuan akun) dari <i>Lender Jawa</i> Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Akumulasi Jumlah <i>Lender Lending Account</i> (satuan	Akumulasi Jumlah <i>Lending Account</i> (satuan akun) dari <i>Lender Jawa</i> Posisi Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Akumulasi Jumlah <i>Lender Lending Account</i> (satuan akun) dari <i>Lender</i>

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
		akun) dari <i>Lender</i> wilayah Jawa.	wilayah Jawa.
106	1. Banten	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Lending Account</i> (satuan akun) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan dari <i>Lender</i> untuk masing-masing wilayah Jawa.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Lending Account</i> (satuan akun) Posisi Bulan Laporan dari <i>Lender</i> untuk masing-masing wilayah Jawa.
107	2. DKI Jakarta		
108	3. Jawa Barat		
109	4. Jawa Tengah		
110	5. DI Yogyakarta		
111	6. Jawa Timur		
112	b. Luar Jawa (Jumlah <i>Lending Account</i> dari <i>Lender</i> Luar Jawa)	Akumulasi Jumlah <i>Lending Account</i> (satuan akun) dari <i>Lender</i> Luar Jawa Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Akumulasi Jumlah <i>Lending Account</i> (satuan akun) dari <i>Lender</i> wilayah Luar Jawa.	Akumulasi Jumlah <i>Lending Account</i> (satuan akun) dari <i>Lender</i> Luar Jawa Posisi Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Akumulasi Jumlah <i>Lending Account</i> (satuan akun) dari <i>Lender</i> wilayah Luar Jawa.
113	1. Nangroe Aceh Darussalam	Diisi dengan Akumulasi Jumlah	Diisi dengan Akumulasi Jumlah
114	2. Sumatera Utara		

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan		
115	3. Sumatera Barat	<i>Lending Account</i> (satuan akun) sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Luar Jawa.	<i>Lending Account</i> (satuan akun) Posisi Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Luar Jawa.		
116	4. Riau				
117	5. Kepulauan Riau				
118	6. Kepulauan Bangka Belitung				
119	7. Jambi				
120	8. Sumatera Selatan				
121	9. Bengkulu				
122	10. Lampung				
123	11. Kalimantan Barat				
124	12. Kalimantan Tengah				
125	13. Kalimantan Utara				
126	14. Kalimantan Timur				
127	15. Kalimantan Selatan				
128	16. Sulawesi Utara				
129	17. Gorontalo				
130	18. Sulawesi Tengah				
131	19. Sulawesi Barat				
132	20. Sulawesi Selatan				
133	21. Sulawesi Tenggara				
134	22. Bali				
135	23. Nusa Tenggara Barat				
136	24. Nusa Tenggara Timur				
137	25. Maluku Utara				
138	26. Maluku				
139	27. Papua Barat				
140	28. Papua				
141	29. Papua Tengah				
142	30. Papua Pegunungan				
143	31. Papua Selatan				
144	32. Papua Barat Daya				
145	c. Luar Negeri (Jumlah <i>Lending Account</i> dari <i>Lender</i> Luar Negeri)			Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Lending Account</i> (satuan akun) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan dari <i>Lender</i> Luar Negeri.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Lending Account</i> (satuan akun) Posisi Bulan Laporan dari <i>Lender</i> Luar Negeri.
146	d. Agregat (Total)			Agregat (Total) Akumulasi Jumlah	Agregat (Total) Akumulasi Jumlah

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
		<i>Lending Account</i> (satuan akun) dari <i>Lender</i> Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan = Akumulasi Jumlah <i>Lending Account</i> (satuan akun) dari <i>Lender</i> Jawa (+) Luar Jawa (+) Luar Negeri.	<i>Lending Account</i> (satuan akun) dari <i>Lender</i> Posisi Bulan Laporan = Akumulasi Jumlah <i>Lending Account</i> (satuan akun) dari <i>Lender</i> Jawa (+) Luar Jawa (+) Luar Negeri.
147	- Laki-laki	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Lending Account</i> (satuan akun) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan pada <i>Lender</i> Perseorangan dengan jenis kelamin Laki-Laki.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Lending Account</i> (satuan akun) Posisi Bulan Laporan pada <i>Lender</i> Perseorangan dengan jenis kelamin Laki-Laki.
148	- Perempuan	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Lending Account</i> (satuan akun) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Lending Account</i> (satuan akun) Posisi Bulan Laporan pada <i>Lender</i> Perseorangan

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
		Laporan pada <i>Lender</i> Perseorangan dengan jenis kelamin perempuan.	n dengan jenis kelamin perempuan.
149	- Badan Usaha	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Lending Account</i> (satuan akun) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan pada <i>Lender</i> Badan Usaha.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Lending Account</i> (satuan akun) Posisi Bulan Laporan pada <i>Lender</i> Badan Usaha.
150	e. Akumulasi Jumlah Akun <i>Lender</i> Berdasarkan Usia (Bagi <i>Lending Account</i> dari <i>Lender</i> Perseorangan)		
151	- <19 tahun	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Lending Account</i> (satuan akun) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Lender</i> kurang dari 19 tahun.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Lending Account</i> (satuan akun) Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Lender</i> kurang dari 19 tahun.
152	- 19-34 Tahun	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Lending Account</i> (satuan akun) Sejak Perusahaan	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Lending Account</i> (satuan akun) Posisi Bulan

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
		Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Lender</i> dari 19 sampai dengan 34 tahun.	Laporan dengan usia <i>Lender</i> dari 19 sampai dengan 34 tahun.
153	- 35-54 Tahun	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Lending Account</i> (satuan akun) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Lender</i> dari 35 sampai dengan 54 tahun.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Lending Account</i> (satuan akun) Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Lender</i> dari 35 sampai dengan 54 tahun.
154	- >54 Tahun	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Lending Account</i> (satuan akun) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Lender</i> lebih dari 54 tahun.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Lending Account</i> (satuan akun) Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Lender</i> lebih dari 54 tahun.
155	2) Akumulasi Jumlah <i>Borrower Credit Account</i> (Satuan Akun)		
156	a. Jawa (Jumlah <i>Credit Account</i> dari <i>Borrower Jawa</i>)	Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) dari	Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) dari

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
		<i>Borrower</i> Jawa Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) dari <i>Borrower</i> wilayah Jawa.	<i>Borrower</i> Jawa Posisi Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) dari <i>Borrower</i> wilayah Jawa.
157	1. Banten	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Jawa.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) Posisi Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Jawa.
158	2. DKI Jakarta		
159	3. Jawa Barat		
160	4. Jawa Tengah		
161	5. DI Yogyakarta		
162	6. Jawa Timur		
163	b. Luar Jawa (Jumlah <i>Credit Account</i> dari <i>Borrower</i> Luar Jawa)	Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) dari <i>Borrower</i> Luar Jawa Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) dari <i>Borrower</i> Luar Jawa Posisi Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Akumulasi

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
		merupakan penjumlahan dari Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) dari <i>Borrower</i> wilayah Luar Jawa.	Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) dari <i>Borrower</i> wilayah Luar Jawa.
164	1. Nangroe Aceh Darussalam	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Luar Jawa.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) Posisi Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Luar Jawa.
165	2. Sumatera Utara		
166	3. Sumatera Barat		
167	4. Riau		
168	5. Kepulauan Riau		
169	6. Kepulauan Bangka Belitung		
170	7. Jambi		
171	8. Sumatera Selatan		
172	9. Bengkulu		
173	10. Lampung		
174	11. Kalimantan Barat		
175	12. Kalimantan Tengah		
176	13. Kalimantan Utara		
177	14. Kalimantan Timur		
178	15. Kalimantan Selatan		
179	16. Sulawesi Utara		
180	17. Gorontalo		
181	18. Sulawesi Tengah		
182	19. Sulawesi Barat		
183	20. Sulawesi Selatan		
184	21. Sulawesi Tenggara		
185	22. Bali		
186	23. Nusa Tenggara Barat		
187	24. Nusa Tenggara Timur		
188	25. Maluku Utara		
189	26. Maluku		
190	27. Papua Barat		
191	28. Papua		
192	29. Papua Tengah		
193	30. Papua Pegunungan		
194	31. Papua Selatan		
195	32. Papua Barat Daya		
196	c. Agregat (Total)	Agregat (Total) Akumulasi	Agregat (Total) Akumulasi

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
		Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) dari <i>Borrower</i> Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan = Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) dari <i>Borrower</i> Jawa (+) Luar Jawa.	Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) dari <i>Borrower</i> Posisi Bulan Laporan = Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) dari <i>Borrower</i> Jawa (+) Luar Jawa.
197	- Laki-laki	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan dari <i>Borrower</i> Perseorangan dengan jenis kelamin Laki-Laki.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) Posisi Bulan Laporan dari <i>Borrower</i> Perseorangan dengan jenis kelamin Laki-Laki.
198	- Perempuan	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) Posisi Bulan Laporan dari

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
		Posisi Bulan Laporan dari <i>Borrower</i> Perseorangan dengan jenis kelamin Perempuan.	<i>Borrower</i> Perseorangan dengan jenis kelamin Perempuan.
199	- Badan Usaha	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan dari <i>Borrower</i> Badan Usaha.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) Posisi Bulan Laporan dari <i>Borrower</i> Badan Usaha.
200	d. Akumulasi Jumlah Akun <i>Borrower</i> Berdasarkan Usia (Bagi <i>Credit Account</i> dari <i>Borrower</i> perseorangan)		
201	- <19 tahun	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> kurang dari 19 tahun.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> kurang dari 19 tahun.
202	- 19-34 Tahun	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Credit</i>	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Credit</i>

No.	<i>Inclusivity</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
		<i>Account</i> (satuan akun) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> dari 19 sampai dengan 34 tahun.	<i>Account</i> (satuan akun) Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> dari 19 sampai dengan 34 tahun.
203	- 35-54 Tahun	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> dari 35 sampai dengan 54 tahun.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> dari 35 sampai dengan 54 tahun.
204	- >54 Tahun	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> lebih dari 54 tahun.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> (satuan akun) Posisi Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> lebih dari 54 tahun.

11. *Transaction Value*

No.	<i>Transaction Value</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
1	Akumulasi jumlah Pendanaan yang telah diberikan dari <i>Lender</i> (dalam Rp)		
2	a. Jawa (<i>Lender</i> dari Jawa)		
3	1. Banten		
4	2. DKI Jakarta		
5	3. Jawa Barat		
6	4. Jawa Tengah		
7	5. DI Yogyakarta		
8	6. Jawa Timur		
9	b. Luar Jawa (<i>Lender</i> dari Luar Jawa)		
10	1. Nangroe Aceh Darussalam		
11	2. Sumatera Utara		
12	3. Sumatera Barat		
13	4. Riau		
14	5. Kepulauan Riau		
15	6. Kepulauan Bangka Belitung		
16	7. Jambi		
17	8. Sumatera Selatan		
18	9. Bengkulu		
19	10. Lampung		
20	11. Kalimantan Barat		
21	12. Kalimantan Tengah		
22	13. Kalimantan Utara		
23	14. Kalimantan Timur		
24	15. Kalimantan Selatan		
25	16. Sulawesi Utara		
26	17. Gorontalo		
27	18. Sulawesi Tengah		
28	19. Sulawesi Barat		
29	20. Sulawesi Selatan		
30	21. Sulawesi Tenggara		
31	22. Bali		
32	23. Nusa Tenggara Barat		
33	24. Nusa Tenggara Timur		
34	25. Maluku Utara		
35	26. Maluku		
36	27. Papua Barat		
37	28. Papua		
38	29. Papua Tengah		
39	30. Papua Pegunungan		
40	31. Papua Selatan		
41	32. Papua Barat Daya		
42	c. Luar Negeri (<i>Lender</i> Luar Negeri)		
43	d. Agregat (Total)		
44	e. Rata-rata		

No.	<i>Transaction Value</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
45	Akumulasi jumlah Pendanaan yang telah diberikan kepada <i>Borrower</i> (dalam Rp)		
46	a. Jawa (<i>Borrower</i> dari Jawa)		
47	1. Banten		
48	2. DKI Jakarta		
49	3. Jawa Barat		
50	4. Jawa Tengah		
51	5. DI Yogyakarta		
52	6. Jawa Timur		
53	b. Luar Jawa (<i>Borrower</i> dari Luar Jawa)		
54	1. Nangroe Aceh Darussalam		
55	2. Sumatera Utara		
56	3. Sumatera Barat		
57	4. Riau		
58	5. Kepulauan Riau		
59	6. Kepulauan Bangka Belitung		
60	7. Jambi		
61	8. Sumatera Selatan		
62	9. Bengkulu		
63	10. Lampung		
64	11. Kalimantan Barat		
65	12. Kalimantan Tengah		
66	13. Kalimantan Utara		
67	14. Kalimantan Timur		
68	15. Kalimantan Selatan		
69	16. Sulawesi Utara		
70	17. Gorontalo		
71	18. Sulawesi Tengah		
72	19. Sulawesi Barat		
73	20. Sulawesi Selatan		
74	21. Sulawesi Tenggara		
75	22. Bali		
76	23. Nusa Tenggara Barat		
77	24. Nusa Tenggara Timur		
78	25. Maluku Utara		
79	26. Maluku		
80	27. Papua Barat		
81	28. Papua		
82	29. Papua Tengah		
83	30. Papua Pegunungan		
84	31. Papua Selatan		
85	32. Papua Barat Daya		
86	c. Agregat (Total)		
87	d. Rata-rata		
88	Total <i>Outstanding Pendanaan</i> per Bulan Laporan (dalam Rp)		
89	a. Jawa		

No.	<i>Transaction Value</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
90	1. Banten		
91	2. DKI Jakarta		
92	3. Jawa Barat		
93	4. Jawa Tengah		
94	5. DI Yogyakarta		
95	6. Jawa Timur		
96	b. Luar Jawa		
97	1. Nangroe Aceh Darussalam		
98	2. Sumatera Utara		
99	3. Sumatera Barat		
100	4. Riau		
101	5. Kepulauan Riau		
102	6. Kepulauan Bangka Belitung		
103	7. Jambi		
104	8. Sumatera Selatan		
105	9. Bengkulu		
106	10. Lampung		
107	11. Kalimantan Barat		
108	12. Kalimantan Tengah		
109	13. Kalimantan Utara		
110	14. Kalimantan Timur		
111	15. Kalimantan Selatan		
112	16. Sulawesi Utara		
113	17. Gorontalo		
114	18. Sulawesi Tengah		
115	19. Sulawesi Barat		
116	20. Sulawesi Selatan		
117	21. Sulawesi Tenggara		
118	22. Bali		
119	23. Nusa Tenggara Barat		
120	24. Nusa Tenggara Timur		
121	25. Maluku Utara		
122	26. Maluku		
123	27. Papua Barat		
124	28. Papua		
125	29. Papua Tengah		
126	30. Papua Pegunungan		
127	31. Papua Selatan		
128	32. Papua Barat Daya		
129	c. Agregat (Total)		
130	Saldo Dana Pada <i>Escrow Account</i> per Bulan Laporan (dalam Rp)		

Petunjuk Pengisian:

No.	<i>Transaction Value</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
1	Akumulasi jumlah Pendanaan yang telah diberikan dari <i>Lender</i> (dalam Rp)		
2	a. Jawa (<i>Lender</i> dari Jawa)	Akumulasi Jumlah Pendanaan (dalam Rp) Yang Telah Diberikan <i>Lender</i> dari Jawa Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Akumulasi Jumlah Pendanaan Yang Telah Diberikan dari <i>Lender</i> wilayah Jawa.	Akumulasi Jumlah Pendanaan (dalam Rp) Yang Telah Diberikan <i>Lender</i> dari Jawa Posisi Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Akumulasi Jumlah Pendanaan Yang Telah Diberikan dari <i>Lender</i> wilayah Jawa.
3	1. Banten	Diisi dengan	Diisi dengan
4	2. DKI Jakarta	Akumulasi	Akumulasi
5	3. Jawa Barat	Jumlah	Jumlah
6	4. Jawa Tengah	Pendanaan	Pendanaan
7	5. DI Yogyakarta	(dalam Rp) Yang	(dalam Rp) Yang
8	6. Jawa Timur	Telah Diberikan <i>Lender</i> dari Jawa Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Jawa.	Telah Diberikan <i>Lender</i> dari Jawa Posisi Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Jawa.
9	b. Luar Jawa (<i>Lender</i> dari Luar Jawa)	Akumulasi Jumlah Pendanaan (dalam Rp) Yang Telah Diberikan <i>Lender</i> dari Luar Jawa Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Akumulasi	Akumulasi Jumlah Pendanaan (dalam Rp) Yang Telah Diberikan <i>Lender</i> dari Luar Jawa Posisi Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Akumulasi Jumlah Pendanaan Yang Telah Diberikan

No.	<i>Transaction Value</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
		Jumlah Pendanaan Yang Telah Diberikan dari <i>Lender</i> wilayah Luar Jawa.	dari <i>Lender</i> wilayah Luar Jawa.
10	1. Nangroe Aceh Darussalam	Diisi dengan Akumulasi	Diisi dengan Akumulasi
11	2. Sumatera Utara	Jumlah	Jumlah
12	3. Sumatera Barat	Pendanaan	Pendanaan
13	4. Riau	(dalam Rp) Yang	(dalam Rp) Yang
14	5. Kepulauan Riau	Telah Diberikan	Telah Diberikan
15	6. Kepulauan Bangka Belitung	<i>Lender</i> dari Luar Jawa Sejak	<i>Lender</i> dari Luar Jawa Posisi
16	7. Jambi	Perusahaan	Bulan Laporan
17	8. Sumatera Selatan	Didirikan s.d Akhir Posisi	untuk masing-masing wilayah
18	9. Bengkulu	Bulan Laporan	Luar Jawa.
19	10. Lampung	untuk masing-	
20	11. Kalimantan Barat	masing wilayah	
21	12. Kalimantan Tengah	Luar Jawa.	
22	13. Kalimantan Utara		
23	14. Kalimantan Timur		
24	15. Kalimantan Selatan		
25	16. Sulawesi Utara		
26	17. Gorontalo		
27	18. Sulawesi Tengah		
28	19. Sulawesi Barat		
29	20. Sulawesi Selatan		
30	21. Sulawesi Tenggara		
31	22. Bali		
32	23. Nusa Tenggara Barat		
33	24. Nusa Tenggara Timur		
34	25. Maluku Utara		
35	26. Maluku		
36	27. Papua Barat		
37	28. Papua		
38	29. Papua Tengah		
39	30. Papua Pegunungan		

No.	<i>Transaction Value</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
40	31. Papua Selatan		
41	32. Papua Barat Daya		
42	c. Luar Negeri (<i>Lender</i> Luar Negeri)	Diisi dengan Akumulasi Jumlah Pendanaan (dalam Rp) Yang Telah Diberikan <i>Lender</i> dari Luar Negeri Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah Pendanaan (dalam Rp) Yang Telah Diberikan <i>Lender</i> dari Luar Negeri Posisi Bulan Laporan.
43	d. Agregat (Total)	Agregat (Total) Akumulasi Jumlah Pendanaan (dalam Rp) Yang Telah Diberikan <i>Lender</i> Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan = Akumulasi Jumlah Pendanaan Yang Diberikan <i>Lender</i> dari Jawa (+) Luar Jawa (+) Luar Negeri.	Agregat (Total) Akumulasi Jumlah Pendanaan (dalam Rp) Yang Telah Diberikan <i>Lender</i> Posisi Bulan Laporan = Akumulasi Jumlah Pendanaan Yang Diberikan <i>Lender</i> dari Jawa (+) Luar Jawa (+) Luar Negeri.
44	e. Rata-rata	Rata-rata Akumulasi Jumlah Pendanaan (dalam Rp) Yang Telah Diberikan <i>Lender</i> Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan = (Agregat (Total) Pendanaan Yang Diberikan <i>Lender</i>) / (Total Akumulasi Jumlah <i>Lending</i>	Rata-rata Akumulasi Jumlah Pendanaan (dalam Rp) Yang Telah Diberikan <i>Lender</i> Posisi Bulan Laporan = (Agregat (Total) Pendanaan Yang Diberikan <i>Lender</i>) / (Total Akumulasi Jumlah <i>Lending</i> Account dari <i>Lender</i>).

No.	<i>Transaction Value</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
		<i>Account dari Lender)</i>	
45	Akumulasi jumlah Pendanaan yang telah diberikan kepada <i>Borrower</i> (dalam Rp)		
46	a. Jawa (<i>Borrower</i> dari Jawa)	Akumulasi Jumlah Pendanaan (dalam Rp) Yang Telah Diberikan Kepada <i>Borrower</i> dari Jawa Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Akumulasi Jumlah Pendanaan Yang Telah Diberikan kepada <i>Borrower</i> dari wilayah Jawa.	Akumulasi Jumlah Pendanaan (dalam Rp) Yang Telah Diberikan Kepada <i>Borrower</i> dari Jawa Posisi Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Akumulasi Jumlah Pendanaan Yang Telah Diberikan kepada <i>Borrower</i> dari wilayah Jawa.
47	1. Banten	Diisi dengan Akumulasi Jumlah Pendanaan (dalam Rp) Yang Telah Diberikan Kepada <i>Borrower</i> dari Jawa Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Jawa.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah Pendanaan (dalam Rp) Yang Telah Diberikan Kepada <i>Borrower</i> dari Jawa Posisi Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Jawa.
48	2. DKI Jakarta		
49	3. Jawa Barat		
50	4. Jawa Tengah		
51	5. DI Yogyakarta		
52	6. Jawa Timur		
53	b. Luar Jawa (<i>Borrower</i> dari Luar Jawa)	Akumulasi Jumlah Pendanaan (dalam Rp) Yang Telah Diberikan Kepada <i>Borrower</i> dari Luar Jawa Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi	Akumulasi Jumlah Pendanaan (dalam Rp) Yang Telah Diberikan Kepada <i>Borrower</i> dari Luar Jawa Posisi Bulan Laporan merupakan

No.	<i>Transaction Value</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
		Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Akumulasi Jumlah Pendanaan Yang Telah Diberikan Kepada <i>Borrower</i> wilayah Luar Jawa.	penjumlahan dari Akumulasi Jumlah Pendanaan Yang Telah Diberikan Kepada <i>Borrower</i> wilayah Luar Jawa.
54	1. Nangroe Aceh Darussalam	Diisi dengan Akumulasi Jumlah Pendanaan (dalam Rp) Yang Telah Diberikan Kepada <i>Borrower</i> Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Luar Jawa.	Diisi dengan Akumulasi Jumlah Pendanaan (dalam Rp) Yang Telah Diberikan Kepada <i>Borrower</i> Posisi Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Luar Jawa.
55	2. Sumatera Utara		
56	3. Sumatera Barat		
57	4. Riau		
58	5. Kepulauan Riau		
59	6. Kepulauan Bangka Belitung		
60	7. Jambi		
61	8. Sumatera Selatan		
62	9. Bengkulu		
63	10. Lampung		
64	11. Kalimantan Barat		
65	12. Kalimantan Tengah		
66	13. Kalimantan Utara		
67	14. Kalimantan Timur		
68	15. Kalimantan Selatan		
69	16. Sulawesi Utara		
70	17. Gorontalo		
71	18. Sulawesi Tengah		
72	19. Sulawesi Barat		
73	20. Sulawesi Selatan		
74	21. Sulawesi Tenggara		
75	22. Bali		
76	23. Nusa Tenggara Barat		
77	24. Nusa Tenggara Timur		
78	25. Maluku Utara		
79	26. Maluku		
80	27. Papua Barat		

No.	<i>Transaction Value</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
81	28. Papua		
82	29. Papua Tengah		
83	30. Papua Pegunungan		
84	31. Papua Selatan		
85	32. Papua Barat Daya		
86	c. Agregat (Total)	Agregat (Total) Akumulasi Jumlah Pendanaan (dalam Rp) Yang Telah Diberikan kepada <i>Borrower</i> Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan = Akumulasi Jumlah Pendanaan Yang Telah Diberikan Kepada <i>Borrower</i> dari Jawa (+) Luar Jawa.	Agregat (Total) Akumulasi Jumlah Pendanaan (dalam Rp) Yang Telah Diberikan kepada <i>Borrower</i> Posisi Bulan Laporan = Akumulasi Jumlah Pendanaan Yang Telah Diberikan Kepada <i>Borrower</i> dari Jawa (+) Luar Jawa.
87	d. Rata-rata	Rata-rata Akumulasi Jumlah Pendanaan (dalam Rp) Yang Diberikan Kepada <i>Borrower</i> Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan = (Agregat (Total) Pendanaan Yang Telah Diberikan kepada <i>Borrower</i>) / (Total Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> dari <i>Borrower</i>).	Rata-rata Akumulasi Jumlah Pendanaan (dalam Rp) Yang Diberikan Kepada <i>Borrower</i> Posisi Bulan Laporan = (Agregat (Total) Pendanaan Yang Telah Diberikan kepada <i>Borrower</i>) / (Total Akumulasi Jumlah <i>Credit Account</i> dari <i>Borrower</i>).
88	Total Outstanding Pendanaan per Bulan Laporan (dalam Rp)		
89	a. Jawa	Total Outstanding Pendanaan	

No.	<i>Transaction Value</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
		(dalam Rp) per Bulan Laporan dari Jawa merupakan penjumlahan dari Total <i>Outstanding Pendanaan</i> dari wilayah Jawa.	
90	1. Banten	Diisi dengan Total <i>Outstanding Pendanaan</i> (dalam Rp) per Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Jawa.	
91	2. DKI Jakarta		
92	3. Jawa Barat		
93	4. Jawa Tengah		
94	5. DI Yogyakarta		
95	6. Jawa Timur		
96	b. Luar Jawa	Total <i>Outstanding Pendanaan</i> (dalam Rp) per Bulan Laporan dari Luar Jawa merupakan penjumlahan dari Total <i>Outstanding Pendanaan</i> dari wilayah Luar Jawa.	
97	1. Nangroe Aceh Darussalam	Diisi dengan Total <i>Outstanding Pendanaan</i> (dalam Rp) per Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Luar Jawa.	
98	2. Sumatera Utara		
99	3. Sumatera Barat		
100	4. Riau		
101	5. Kepulauan Riau		
102	6. Kepulauan Bangka Belitung		
103	7. Jambi		
104	8. Sumatera Selatan		
105	9. Bengkulu		
106	10. Lampung		
107	11. Kalimantan Barat		
108	12. Kalimantan Tengah		
109	13. Kalimantan Utara		
110	14. Kalimantan Timur		

No.	<i>Transaction Value</i>	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
111	15. Kalimantan Selatan		
112	16. Sulawesi Utara		
113	17. Gorontalo		
114	18. Sulawesi Tengah		
115	19. Sulawesi Barat		
116	20. Sulawesi Selatan		
117	21. Sulawesi Tenggara		
118	22. Bali		
119	23. Nusa Tenggara Barat		
120	24. Nusa Tenggara Timur		
121	25. Maluku Utara		
122	26. Maluku		
123	27. Papua Barat		
124	28. Papua		
125	29. Papua Tengah		
126	30. Papua Pegunungan		
127	31. Papua Selatan		
128	32. Papua Barat Daya		
129	c. Agregat (Total)	Agregat (Total) <i>Outstanding Pendanaan</i> (dalam Rp) per Bulan Laporan = Total <i>Outstanding Pendanaan</i> dari Jawa (+) Luar Jawa.	
130	Saldo Dana Pada <i>Escrow Account</i> per Bulan Laporan (dalam Rp)	Diisi dengan Saldo Dana Pada <i>Escrow Account</i> (dalam Rp) per Bulan Laporan.	

12. Kualitas Pendanaan, Biaya Modal, Manfaat Efektif Ekonomi, *Velocity*/Tempo, Sektor Produktif, Informasi terkait dengan Kerja Sama Penyaluran Pendanaan, lainnya

No.	<i>Kualitas Pendanaan</i>	Sejak Perusahaan didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
1	Rasio Pendanaan Lancar		

2	Rasio Pendanaan Dalam Perhatian Khusus		
3	Rasio Pendanaan Kurang Lancar		
4	Rasio Pendanaan Diragukan		
5	Rasio Pendanaan Macet		
6	Total		
7	<i>Debt Collector:</i>		
8	a. Apakah Penyelenggara memiliki fungsi internal yang menangani <i>collection</i> ?		
9	b. Apakah Penyelenggara memiliki kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal <i>collection</i> ?		
No.	Biaya Modal Tahunan	Sejak Perusahaan didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
10	Biaya Modal bagi <i>Borrower</i>		
11	Biaya Modal bagi <i>Borrower</i> terendah p.a.		
12	Biaya Modal bagi <i>Borrower</i> tertinggi p.a.		
13	Rata-rata Biaya Modal bagi <i>Borrower</i> p.a.		
No.	Manfaat Ekonomi Efektif Tahunan	Sejak Perusahaan didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
14	Manfaat Ekonomi Efektif bagi <i>Lender</i>		
15	Manfaat Ekonomi Efektif bagi <i>Lender</i> terendah p.a.		
16	Manfaat Ekonomi Efektif bagi <i>Lender</i> tertinggi p.a.		
17	Rata-rata Manfaat Ekonomi Efektif bagi <i>Lender</i> p.a.		
No.	<i>Velocity</i> /Tempo	Sejak Perusahaan didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
18	Jangka Waktu Pendanaan (tenor)		
19	Jangka waktu Pendanaan tercepat (satuan hari)		
20	Jangka waktu Pendanaan terlama (satuan hari)		
21	Rata-rata realisasi jangka waktu Pendanaan (satuan hari)		

22	Jangka Waktu Pendanaan Disetujui		
23	Jangka waktu Pendanaan tercepat disetujui (satuan hari/jam/menit)		
24	Jangka waktu Pendanaan terlama disetujui (satuan hari/jam/menit)		
25	Rata-rata Jangka waktu Pendanaan disetujui (satuan hari/jam/menit)		
26	Jangka Waktu Pendanaan didanai		
27	Jangka waktu Pendanaan tercepat didanai (satuan hari/jam/menit)		
28	Jangka waktu Pendanaan terlama didanai (satuan hari/jam/menit)		
29	Rata-rata Jangka waktu Pendanaan didanai (satuan hari/jam/menit)		
No.	Sektor Produktif	Sejak Perusahaan didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
30	Sektor Produktif menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)		
31	a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		
32	b. Pertambangan dan Penggalan		
33	c. Industri Pengolahan		
34	d. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin		
35	e. Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi		
36	f. Konstruksi		
37	g. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor		
38	h. Pengangkutan dan Pergudangan		

39	i. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum		
40	j. Informasi dan Komunikasi		
41	k. Aktivitas Keuangan dan Asuransi		
42	l. Real Estat		
43	m. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis		
44	n. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya		
45	o. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		
46	p. Pendidikan		
47	q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial		
48	r. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi		
49	s. Aktivitas Jasa lainnya		
50	t. Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri		
51	u. Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya		
52	Total Pendanaan kepada sektor produktif (dalam Rp)		
53	Total Pendanaan		
54	Persentase Pendanaan sektor produktif terhadap total Pendanaan (dalam %)		
No.	Informasi Terkait Dengan:	Sejak Perusahaan didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
55	Penyaluran Pendanaan Kepada Sektor UMKM		
56	Kerja sama Penyaluran Pendanaan		
57	a. Kerja sama dengan Program Pemerintah:		

58	1) Akumulasi Jumlah Institusi Pemerintah <i>Lender</i> (satuan entitas)		
59	2) Akumulasi Jumlah Pendanaan yang telah diberikan kepada <i>Borrower</i> (dalam Rp)		
60	3) Pendanaan <i>Outstanding</i>		
61	4) Pendanaan <i>Quality</i> :		
62	a) Rasio Pendanaan Lancar		
63	b) Rasio Pendanaan Dalam Perhatian Khusus		
64	c) Rasio Pendanaan Kurang Lancar		
65	d) Rasio Pendanaan Diragukan		
66	e) Rasio Pendanaan Macet		
67	Jumlah		
68	b. Kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan:		
69	1) Akumulasi Jumlah Institusi Pemerintah <i>Lender</i> (satuan entitas)		
70	2) Akumulasi Jumlah Pendanaan yang telah diberikan kepada <i>Borrower</i> (dalam Rp)		
71	3) Pendanaan <i>Outstanding</i>		
72	4) Pendanaan <i>Quality</i> :		
73	a) Rasio Pendanaan Lancar		
74	b) Rasio Pendanaan Dalam Perhatian Khusus		
75	c) Rasio Pendanaan Kurang Lancar		
76	d) Rasio Pendanaan Diragukan		
77	e) Rasio Pendanaan Macet		
78	Jumlah		
No.	<i>Others</i>	Sejak Perusahaan didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
79	Rata-rata biaya <i>collection</i>		
80	Nilai Pendanaan		
81	Nilai Pendanaan tertinggi yang disalurkan kepada 1 <i>Borrower</i>		

82	Nilai Pendanaan terendah yang disalurkan kepada 1 <i>Borrower</i>		
83	Rata-rata nilai Pendanaan yang disalurkan		
84	Jumlah Pengajuan Permohonan Pendanaan (Unit)		
85	Jumlah Pengajuan Permohonan Pendanaan Yang Ditolak/ Tidak Disetujui (Unit)		
86	Jumlah Permohonan Pendanaan Yang Ditolak karena tidak 100% terdanai (Unit)		

Keterangan:

- Biaya Modal bagi *Borrower* merupakan total biaya yang dikenakan kepada *Borrower* atas Pendanaan yang diterima dibanding nilai Pendanaan yang tercantum dalam perjanjian Pendanaan. Total biaya yang dikenakan kepada *Borrower* atas pendanaan yang diterima yaitu bunga/margin/bagi hasil; biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah yang setara dengan biaya dimaksud; dan biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea meterai, dan pajak.
- Manfaat Ekonomi Efektif bagi *Lender* merupakan total imbal hasil yang diberikan kepada *Lender* atas Pendanaan yang diberikan kepada *Borrower*.

Petunjuk Pengisian:

No.	<i>Pendanaan Quality</i>	Sejak Perusahaan didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
1	Rasio Pendanaan Lancar	Rasio Pendanaan Lancar (tidak ada keterlambatan) = (Jumlah outstanding s.d. jatuh tempo hari) / (Agregat (Total) Pendanaan <i>Outstanding</i>) pada posisi akhir bulan laporan. Dibuat dalam format persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (,), contoh 20,00%.	
2	Rasio Pendanaan Dalam Perhatian Khusus	Rasio Pendanaan Dalam Perhatian Khusus (keterlambatan s.d. 30 hari) = (Jumlah outstanding terlambat s.d. 30 hari) / (Agregat (Total) Pendanaan <i>Outstanding</i>) pada posisi akhir bulan laporan. Dibuat dalam	

		format persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (.), contoh 20,00%.
3	Rasio Pendanaan Kurang Lancar	Rasio Pendanaan Kurang Lancar (keterlambatan 31 s.d. 60 hari) = (Jumlah outstanding terlambat 31 s.d. 60 hari) / (Agregat (Total) Pendanaan <i>Outstanding</i>) pada posisi akhir bulan laporan. Dibuat dalam format persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (.), contoh 20,00%.
4	Rasio Pendanaan Diragukan	Rasio Pendanaan Diragukan (keterlambatan 61 s.d. 90 hari) = (Jumlah outstanding terlambat 61 s.d. 90 hari) / (Agregat (Total) Pendanaan <i>Outstanding</i>) pada posisi akhir bulan laporan. Dibuat dalam format persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (.), contoh 20,00%.
5	Rasio Pendanaan Macet	Rasio Pendanaan Macet (terlambat >90 hari) = (Jumlah outstanding terlambat lebih dari 90 hari) / (Agregat (Total) <i>Outstanding</i> Pendanaan per Bulan Laporan). Dibuat dalam format persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (.), contoh 20,00%.
6	Total	Total = Rasio Pendanaan Lancar + Rasio Pendanaan Dalam Perhatian Khusus + Rasio Pendanaan Kurang Lancar + Rasio Pendanaan Diragukan

		+ Rasio Pendanaan Macet	
7	<i>Debt Collector.</i>		
8	a. Apakah Penyelenggara memiliki fungsi internal yang menangani <i>collection</i> ?	Diisi dengan memilih 1 atau 0, pilih 1 jika Ada dan pilih 0 jika Tidak Ada.	
9	b. Apakah Penyelenggara memiliki kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal <i>collection</i> ?	Diisi dengan memilih 1 atau 0, pilih 1 jika Ada dan pilih 0 jika Tidak Ada.	
No.	Biaya Modal Tahunan	Sejak Perusahaan didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
10	Biaya Modal bagi <i>Borrower</i>		
11	Biaya Modal bagi <i>Borrower</i> terendah p.a.	Diisi dengan nilai Biaya Modal bagi <i>Borrower</i> Terendah per <i>annual</i> /per tahun Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan, dengan format persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (,), contoh 15,00%.	Diisi dengan nilai Biaya Modal bagi <i>Borrower</i> Terendah per <i>annual</i> /per tahun Posisi Bulan Laporan, dengan format persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (,), contoh 15,00%.
12	Biaya Modal bagi <i>Borrower</i> tertinggi p.a.	Diisi dengan nilai Biaya Modal bagi <i>Borrower</i> Tertinggi per <i>annual</i> /per tahun Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan, dengan format persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (,), contoh 15,00%.	Diisi dengan nilai Biaya Modal bagi <i>Borrower</i> Tertinggi per <i>annual</i> /per tahun Posisi Bulan Laporan, dengan format persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (,), contoh 15,00%.
13	Rata-rata Biaya Modal bagi <i>Borrower</i> p.a.	Diisi dengan nilai Rata-rata Biaya Modal bagi <i>Borrower</i> per <i>annual</i> /per tahun Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir	Diisi dengan nilai Rata-rata Biaya Modal bagi <i>Borrower</i> per <i>annual</i> /per tahun Posisi

		Posisi Bulan Laporan, dengan format persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (,), contoh 15,00%.	Bulan Laporan, dengan format persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (,), contoh 15,00%.
No.	Manfaat Ekonomi Efektif Tahunan	Sejak Perusahaan didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
14	Manfaat Ekonomi Efektif bagi <i>Lender</i>		
15	Manfaat Ekonomi Efektif bagi <i>Lender</i> terendah p.a.	Diisi dengan nilai Manfaat Ekonomi Efektif bagi <i>Lender</i> Terendah per <i>annual</i> /per tahun Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan, dengan format persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (,), contoh 15,00%.	Diisi dengan nilai Manfaat Ekonomi Efektif bagi <i>Lender</i> Terendah per <i>annual</i> /per tahun Posisi Bulan Laporan, dengan format persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (,), contoh 15,00%.
16	Manfaat Ekonomi Efektif bagi <i>Lender</i> tertinggi p.a.	Diisi dengan nilai Manfaat Ekonomi Efektif bagi <i>Lender</i> Tertinggi per <i>annual</i> /per tahun Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan, dengan format persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (,), contoh 15,00%.	Diisi dengan nilai Manfaat Ekonomi Efektif bagi <i>Lender</i> Tertinggi per <i>annual</i> /per tahun Posisi Bulan Laporan, dengan format persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (,), contoh 15,00%.
17	Rata-rata Manfaat Ekonomi Efektif bagi <i>Lender</i> p.a.	Diisi dengan nilai Rata-rata Manfaat Ekonomi Efektif bagi <i>Lender</i> per <i>annual</i> /per tahun Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan, dengan format persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (,), contoh 15,00%.	Diisi dengan nilai Rata-rata Manfaat Ekonomi Efektif bagi <i>Lender</i> per <i>annual</i> /per tahun Posisi Bulan Laporan, dengan format persen (%) dengan dua angka

			dibelakang koma (,), contoh 15,00%.
No.	<i>Velocity</i> /Tempo	Sejak Perusahaan didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
18	Jangka Waktu Pendanaan (tenor)		
19	Jangka Waktu Pendanaan Tercepat (satuan hari)	Diisi dengan jumlah hari untuk Jangka Waktu Pendanaan Tercepat Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan, dengan format angka.	Diisi dengan jumlah hari untuk Jangka Waktu Pendanaan Tercepat Bulan Laporan, dengan format angka.
20	Jangka Waktu Pendanaan Terlama (satuan hari)	Diisi dengan jumlah hari untuk Jangka Waktu Pendanaan Terlama Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan, dengan format angka.	Diisi dengan jumlah hari untuk Jangka Waktu Pendanaan Terlama Posisi Bulan Laporan, dengan format angka.
21	Rata-rata Realisasi Jangka Waktu Pendanaan (satuan hari)	Diisi dengan jumlah hari untuk Rata-rata Realisasi Jangka Waktu Pendanaan Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan, dengan format angka.	Diisi dengan jumlah hari untuk Rata-rata Realisasi Jangka Waktu Pendanaan Posisi Bulan Laporan, dengan format angka.
22	Jangka Waktu Pendanaan Disetujui		
23	Jangka Waktu Pendanaan Tercepat Disetujui (satuan hari/jam/menit)	Diisi dengan Jangka Waktu Pendanaan Tercepat Disetujui Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan, dengan format jumlah hari/jam/menit. Komponen ini wajib diisi, apabila di bawah 1 menit, silahkan dibulatkan menjadi 1 menit.	Diisi dengan Jangka Waktu Pendanaan Tercepat Posisi Bulan Laporan, dengan format jumlah hari/jam/menit. Komponen ini wajib diisi, apabila di bawah 1 menit, silahkan dibulatkan menjadi 1 menit.
24	Jangka Waktu Pendanaan Terlama Disetujui	Diisi dengan Jangka Waktu Pendanaan Terlama Disetujui	Diisi dengan Jangka Waktu Pendanaan

	(satuan hari/jam/menit)	Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan, dengan format jumlah hari/jam/menit. Komponen ini wajib diisi, apabila di bawah 1 menit, silahkan dibulatkan menjadi 1 menit.	Terlama Disetujui Posisi Bulan Laporan, dengan format jumlah hari/jam/menit. Komponen ini wajib diisi, apabila di bawah 1 menit, silahkan dibulatkan menjadi 1 menit.
25	Rata-rata Jangka Waktu Pendanaan Disetujui (satuan hari/jam/menit)	Diisi dengan Rata-rata Jangka Waktu Pendanaan Disetujui Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan, dengan format jumlah hari/jam/menit. Komponen ini wajib diisi, apabila di bawah 1 menit, silahkan dibulatkan menjadi 1 menit.	Diisi dengan Rata-rata Jangka Waktu Pendanaan Disetujui Posisi Bulan Laporan, dengan format jumlah hari/jam/menit. Komponen ini wajib diisi, apabila di bawah 1 menit, silahkan dibulatkan menjadi 1 menit.
26	Jangka Waktu Pendanaan Didanai		
27	Jangka Waktu Pendanaan Tercepat Didanai (satuan hari/jam/menit)	Diisi dengan Jangka Waktu Pendanaan Tercepat Didanai Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan, dengan format jumlah hari/jam/menit. Komponen ini wajib diisi, apabila di bawah 1 menit, silahkan dibulatkan menjadi 1 menit.	Diisi dengan Jangka Waktu Pendanaan Tercepat Didanai Posisi Bulan Laporan, dengan format jumlah hari/jam/menit. Komponen ini wajib diisi, apabila di bawah 1 menit, silahkan dibulatkan menjadi 1 menit.
28	Jangka Waktu Pendanaan Terlama Didanai (satuan hari/jam/menit)	Diisi dengan Jangka Waktu Pendanaan Terlama Didanai Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan, dengan format jumlah hari/jam/menit. Komponen ini wajib diisi, apabila di bawah 1 menit, silahkan	Diisi dengan Jangka Waktu Pendanaan Terlama Didanai Posisi Bulan Laporan, dengan format jumlah hari/jam/menit. Komponen ini wajib diisi, apabila di bawah 1 menit, silahkan

		dibulatkan menjadi 1 menit.	dibulatkan menjadi 1 menit.
29	Rata-rata Jangka Waktu Pendanaan Didanai (satuan hari/jam/menit)	Diisi dengan Rata-rata Jangka Waktu Pendanaan Didanai Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan, dengan format jumlah hari/jam/menit. Komponen ini wajib diisi, apabila di bawah 1 menit, silahkan dibulatkan menjadi 1 menit.	Diisi dengan Rata-rata Jangka Waktu Pendanaan Didanai Posisi Bulan Laporan, dengan format jumlah hari/jam/menit. Komponen ini wajib diisi, apabila di bawah 1 menit, silahkan dibulatkan menjadi 1 menit.
No.	Sektor Produktif	Sejak Perusahaan didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
30	Sektor Produktif Menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)		
31	a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Diisi dengan nilai Sektor Produktif Menurut KBLI untuk sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Diisi dengan nilai Sektor Produktif Menurut KBLI untuk sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Posisi Bulan Laporan.
32	b. Pertambangan dan Penggalian	Diisi dengan nilai Sektor Produktif Menurut KBLI untuk sektor Pertambangan dan Penggalian Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Diisi dengan nilai Sektor Produktif Menurut KBLI untuk sektor Pertambangan dan Penggalian Posisi Bulan Laporan.
33	c. Industri Pengolahan	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Industri Pengolahan Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Industri Pengolahan Posisi Bulan Laporan.
34	d. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Pengadaan Listrik, Gas,

		Dingin Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Uap/Air Panas dan Udara Dingin Posisi Bulan Laporan.
35	e. Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi Posisi Bulan Laporan.
36	f. Konstruksi	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Konstruksi Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Konstruksi Posisi Bulan Laporan.
37	g. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Posisi Bulan Laporan.
38	h. Pengangkutan dan Pergudangan	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Pengangkutan dan Pergudangan Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Pengangkutan dan Pergudangan Posisi Bulan Laporan.
39	i. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Posisi Bulan Laporan.

40	j. Informasi dan Komunikasi	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Informasi dan Komunikasi Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Informasi dan Komunikasi Posisi Bulan Laporan.
41	k. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi Posisi Bulan Laporan.
42	l. Real Estat	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Real Estat Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Real Estat Posisi Bulan Laporan.
43	m. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Posisi Bulan Laporan.
44	n. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya Posisi Bulan Laporan.
45	o. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Sejak Perusahaan	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

		Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Wajib Posisi Bulan Laporan.
46	p. Pendidikan	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Pendidikan Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Pendidikan Posisi Bulan Laporan.
47	q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Posisi Bulan Laporan.
48	r. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Posisi Bulan Laporan.
49	s. Aktivitas Jasa Lainnya	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Aktivitas Jasa Lainnya Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Aktivitas Jasa Lainnya Posisi Bulan Laporan.
50	t. Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri.	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Posisi Bulan Laporan.
51	u. Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra	Diisi dengan nilai Sektor Produktif menurut KBLI untuk sektor Aktivitas Badan Internasional

	Internasional Lainnya	Internasional Lainnya Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	dan Badan Ekstra Internasional Lainnya Posisi Bulan Laporan.
52	Total Pendanaan Kepada Sektor Produktif (dalam Rp)	Total Pendanaan Kepada Sektor Produktif (dalam Rp) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari nilai sektor produktif menurut KBLI dari berbagai Sektor Produktif.	Total Pendanaan Kepada Sektor Produktif (dalam Rp) Posisi Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari nilai sektor produktif menurut KBLI dari berbagai Sektor Produktif.
53	Total Pendanaan	Diisi dengan nilai Total Pendanaan Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Diisi dengan nilai Total Pendanaan Posisi Bulan Laporan.
54	Persentase Pendanaan Sektor Produktif Terhadap Total Pendanaan (dalam %)	Persentase Pendanaan Sektor Produktif Terhadap Total Pendanaan (dalam %) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan = $\frac{\text{(Total Pendanaan Kepada Sektor Produktif)}}{\text{(Total Pendanaan)}}$	Persentase Pendanaan Sektor Produktif Terhadap Total Pendanaan (dalam %) Posisi Bulan Laporan = $\frac{\text{(Total Pendanaan Kepada Sektor Produktif)}}{\text{(Total Pendanaan)}}$
55	Penyaluran Pendanaan Kepada Sektor UMKM	Diisi dengan Total Penyaluran kepada sektor UMKM (dalam Rp) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan yang merupakan Total Pendanaan Kepada Sektor Produktif yang penyalurannya khusus kepada UMKM.	Diisi dengan Total Penyaluran kepada sektor UMKM (dalam Rp) Posisi Bulan Laporan yang merupakan Total Pendanaan Kepada Sektor Produktif yang penyalurannya khusus kepada UMKM.
No.	Informasi Terkait Dengan:	Sejak Perusahaan didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
56	Kerja sama Penyaluran Pendanaan		
57	a. Kerja sama dengan		

	Program Pemerintah:		
58	1) Akumulasi Jumlah Institusi Pemerintah <i>Lender</i> (satuan entitas)	Akumulasi Jumlah <i>Lender</i> (satuan entitas) Institusi Pemerintah pada Kerja sama Penyaluran Pendanaan dengan Program Pemerintah Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Akumulasi Jumlah <i>Lender</i> (satuan entitas) Institusi Pemerintah pada Kerjasama Penyaluran Pendanaan dengan Program Pemerintah Posisi Bulan Laporan.
59	2) Akumulasi Jumlah Pendanaan yang telah diberikan kepada <i>Borrower</i> (dalam Rp)	Akumulasi Jumlah Pendanaan Yang Telah Diberikan Kepada <i>Borrower</i> (dalam Rp) pada Kerja sama Penyaluran Pendanaan dengan Program Pemerintah Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Akumulasi Jumlah Pendanaan Yang Telah Diberikan Kepada <i>Borrower</i> (dalam Rp) pada Kerjasama Penyaluran Pendanaan dengan Program Pemerintah Posisi Bulan Laporan.
60	3) <i>Pendanaan Outstanding</i> :	Diisi dengan Total <i>Outstanding Pendanaan</i> (dalam Rp) per Bulan Laporan yang berasal dari kerja sama dengan program pemerintah.	
61	4) Pendanaan Quality:		
62	a) Rasio Pendanaan Lancar	Diisi dengan Rasio Pendanaan Lancar dari Pendanaan yang bekerja sama dengan program pemerintah. Dibuat dalam format persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (.), contoh 20,00%.	
63	b) Rasio Pendanaan Dalam Perhatian Khusus	Diisi dengan Rasio Pendanaan Dalam Perhatian Khusus dari Pendanaan yang bekerjasama dengan program pemerintah. Dibuat dalam format persen (%) dengan dua angka dibelakang	

		koma (,), contoh 20,00%.	
64	c) Rasio Pendanaan Kurang Lancar	Rasio Pendanaan Kurang Lancar dari Pendanaan yang bekerjasama dengan program pemerintah. Dibuat dalam format persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (,), contoh 20,00%.	
65	d) Rasio Pendanaan Diragukan	Rasio Pendanaan Diragukan dari Pendanaan yang bekerjasama dengan program pemerintah. Dibuat dalam format persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (,), contoh 20,00%.	
66	e) Rasio Pendanaan Macet	Rasio Pendanaan Macet dari Pendanaan yang bekerjasama dengan program pemerintah. Dibuat dalam format persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (,), contoh 20,00%.	
67	Jumlah	Jumlah kualitas <i>Pendanaan</i> Kerja sama Penyaluran Pendanaan dengan Program Pemerintah = Rasio Pendanaan Lancar + Rasio Pendanaan Dalam Perhatian Khusus + Rasio Pendanaan Kurang Lancar + Rasio Pendanaan Diragukan + Rasio Pendanaan Macet. Jumlahnya harus 100%	
68	b. Kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan:		
69	1) Akumulasi Jumlah Lembaga Keuangan <i>Lender</i>	Akumulasi Jumlah <i>Lender</i> (satuan entitas) Lembaga Keuangan pada Kerja sama Penyaluran Pendanaan dengan Lembaga Jasa	Akumulasi Jumlah <i>Lender</i> (satuan entitas) Lembaga Keuangan pada Kerjasama

	(satuan entitas)	Keuangan Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Penyaluran Pendanaan dengan Lembaga Jasa Keuangan Posisi Bulan Laporan.
70	2) Akumulasi Jumlah Pendanaan yang telah diberikan kepada <i>Borrower</i> (dalam Rp)	Akumulasi Jumlah Pendanaan Yang Telah Diberikan Kepada <i>Borrower</i> (dalam Rp) pada Kerja sama Penyaluran Pendanaan dengan Lembaga Jasa Keuangan Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Akumulasi Jumlah Pendanaan Yang Telah Diberikan Kepada <i>Borrower</i> (dalam Rp) pada Kerjasama Penyaluran Pendanaan dengan Lembaga Jasa Keuangan Posisi Bulan Laporan.
71	3) Pendanaan Outstanding :	Diisi dengan Total <i>Outstanding Pendanaan</i> (dalam Rp) per Bulan Laporan yang berasal dari kerja sama dengan LJK.	
72	4) <i>Pendanaan Quality</i> :		
73	Rasio Pendanaan Lancar	Diisi dengan Rasio Pendanaan Lancar dari Pendanaan yang bekerjasama dengan program pemerintah. Dibuat dalam format persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (,), contoh 20,00%.	
74	Rasio Pendanaan Dalam Perhatian Khusus	Diisi dengan Rasio Pendanaan Dalam Perhatian Khusus dari Pendanaan yang bekerjasama dengan program pemerintah. Dibuat dalam format persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (,), contoh 20,00%.	
75	Rasio Pendanaan Kurang Lancar	Rasio Pendanaan Kurang Lancar dari Pendanaan yang bekerjasama dengan program pemerintah. Dibuat dalam format persen (%) dengan dua angka dibelakang	

		koma (,), contoh 20,00%.	
76	Rasio Pendanaan Diragukan	Rasio Pendanaan Diragukan dari Pendanaan yang bekerjasama dengan program pemerintah. Dibuat dalam format persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (,), contoh 20,00%.	
77	Rasio Pendanaan Macet	Rasio Pendanaan Macet dari Pendanaan yang bekerjasama dengan program pemerintah. Dibuat dalam format persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (,), contoh 20,00%.	
78	Jumlah	Jumlah kualitas <i>Pendanaan</i> Kerjasama Penyaluran Pendanaan dengan Program Pemerintah = Rasio Pendanaan Lancar + Rasio Pendanaan Dalam Perhatian Khusus + Rasio Pendanaan Kurang Lancar + Rasio Pendanaan Diragukan + Rasio Pendanaan Macet. Jumlahnya harus 100%	
No.	<i>Others</i>	Sejak Perusahaan didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan	Posisi Bulan Laporan
79	Rata-rata biaya <i>collection</i>	Rata-rata Biaya <i>Collection</i> Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan, dengan format persen (%).	Rata-rata Biaya <i>Collection</i> Posisi Bulan Laporan, dengan format persen (%).
80	Nilai Pendanaan		
81	Nilai Pendanaan tertinggi yang disalurkan kepada 1 <i>Borrower</i>	Nilai Pendanaan Tertinggi Yang Disalurkan Kepada 1 <i>Borrower</i> Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Nilai Pendanaan Tertinggi Yang Disalurkan Kepada 1 <i>Borrower</i> Posisi Bulan Laporan.
82	Nilai Pendanaan terendah yang	Nilai Pendanaan Terendah Yang	Nilai Pendanaan Terendah Yang

	disalurkan kepada 1 <i>Borrower</i>	Disalurkan Kepada 1 <i>Borrower</i> Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Disalurkan Kepada 1 <i>Borrower</i> Posisi Bulan Laporan.
83	Rata-rata nilai Pendanaan yang disalurkan	Rata-rata Nilai Pendanaan Yang Disalurkan Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Rata-rata Nilai Pendanaan Yang Disalurkan Posisi Bulan Laporan.
84	Jumlah Pengajuan Permohonan Pendanaan (Unit)	Jumlah Pengajuan Permohonan Pendanaan (Unit) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Jumlah Pengajuan Permohonan Pendanaan (Unit) Posisi Bulan Laporan.
85	Jumlah Pengajuan Permohonan Pendanaan Yang Ditolak/ Tidak Disetujui (Unit)	Jumlah Pengajuan Permohonan Pendanaan Yang Ditolak/ Tidak Disetujui (Unit) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Jumlah Pengajuan Permohonan Pendanaan Yang Ditolak/ Tidak Disetujui (Unit) Posisi Bulan Laporan.
86	Jumlah Permohonan Pendanaan Yang Ditolak karena tidak 100% terdanai (Unit)	Jumlah Permohonan Pendanaan Yang Ditolak Karena Tidak 100% Terdanai (Unit) Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.	Jumlah Permohonan Pendanaan Yang Ditolak Karena Tidak 100% Terdanai (Unit) Posisi Bulan Laporan.

13. Detil *Outstanding* Pendanaan Penyelenggara

No.	Deskripsi	Detail <i>Outstanding</i>	
		Jumlah <i>Unique Account</i>	Nilai Nominal
1	<i>Lender</i>		
2	1 Dalam Negeri		
3	A Perorangan		
4	B Institusi – Perbankan		
5	1 Bank Umum (tidak termasuk BPD)		
6	2 BPD		
7	3 BPR		
8	C Institusi - Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)		
9	1 Perusahaan Pembiayaan		
10	2 Perusahaan Modal Ventura		
11	3 Dana Pensiun		
12	4 Perusahaan Perasuransian		
13	5 Lembaga Keuangan Mikro		
14	6 LJKNB Lainnya		

No.	Deskripsi	Detail Outstanding	
		Jumlah <i>Unique Account</i>	Nilai Nominal
15	D Institusi – Koperasi		
16	E Institusi - Badan Hukum Lainnya		
17	2 Luar Negeri		
18	A Perorangan		
19	B Institusi - Perbankan		
20	C Institusi - Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)		
21	1 Perusahaan Pembiayaan		
22	2 Perusahaan Modal Ventura		
23	3 Dana Pensiun		
24	4 Perusahaan Perasuransian		
25	5 LJKNB Lainnya		
26	D Institusi - Badan Hukum Lainnya		
27	<i>Borrower</i>		
28	1 Perorangan		
29	A UMKM		
30	B NON UMKM		
31	2 Institusi (Badan Hukum)		
32	A UMKM		
33	B NON UMKM		

Petunjuk Pengisian:

Nilai pendanaan outstanding merupakan nilai pokok pendanaan (*principal*) yang masih berjalan.

No.	Deskripsi	Detail Outstanding	
		Jumlah <i>Unique Account</i>	Nilai Nominal
1	<i>Lender</i>	Jumlah <i>Unique Account Lender</i> = Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Dalam Negeri (+) Luar Negeri	Nilai Nominal <i>Lender</i> = Nilai Nominal <i>Lender</i> Dalam Negeri (+) Luar Negeri
2	1 Dalam Negeri	Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Dalam Negeri = Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Dalam Negeri Perorangan (+) Institusi Perbankan (+) Institusi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) (+) Institusi Koperasi (+) Institusi Badan Hukum Lainnya	Nilai Nominal <i>Lender</i> Dalam Negeri = Nilai Nominal <i>Lender</i> Dalam Negeri Perorangan (+) Institusi Perbankan (+) Institusi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) (+) Institusi Koperasi (+) Institusi Badan Hukum Lainnya

No.	Deskripsi	Detail Outstanding	
		Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Dalam Negeri	Nilai Nominal
3	A. Perorangan	Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Dalam Negeri Perorangan.	Nilai Nominal <i>Lender</i> Dalam Negeri Perorangan.
4	B. Institusi - Perbankan	Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Dalam Negeri Institusi Perbankan = Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Dalam Negeri Institusi Perbankan pada Bank Umum (tidak termasuk BPD) (+) BPD (+) BPR.	Nilai Nominal <i>Lender</i> Dalam Negeri Institusi Perbankan = Nilai Nominal <i>Lender</i> Dalam Negeri Institusi Perbankan pada Bank Umum (tidak termasuk BPD) (+) BPD (+) BPR.
5	1. Bank Umum (tidak termasuk BPD)	Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Dalam Negeri Institusi Perbankan pada Bank Umum (tidak termasuk BPD).	Nilai Nominal <i>Lender</i> Dalam Negeri Institusi Perbankan pada Bank Umum (tidak termasuk BPD).
6	2. BPD	Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Dalam Negeri Institusi Perbankan pada BPD.	Nilai Nominal <i>Lender</i> Dalam Negeri Institusi Perbankan pada BPD.
7	3. BPR	Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Dalam Negeri Institusi Perbankan pada BPR.	Nilai Nominal <i>Lender</i> Dalam Negeri Institusi Perbankan pada BPR.
8	C. Institusi - Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)	Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Dalam Negeri Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) = Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Dalam Negeri pada Perusahaan Pembiayaan (+) Perusahaan Modal Ventura (+) Perusahaan Dana Pensiun (+) Perusahaan	Nilai Nominal <i>Lender</i> Dalam Negeri Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) = Nilai Nominal <i>Lender</i> Dalam Negeri pada Perusahaan Pembiayaan (+) Perusahaan Modal Ventura (+) Perusahaan Dana Pensiun (+) Perusahaan

No.	Deskripsi	Detail <i>Outstanding</i>	
		Jumlah <i>Unique Account</i>	Nilai Nominal
		Dana Pensiun (+) Perusahaan Perasuransian (+) Lembaga Keuangan Mikro (+) LKJNB Lainnya.	Perasuransian (+) Lembaga Keuangan Mikro (+) LKJNB Lainnya.
9	1 Perusahaan Pembiayaan	Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Dalam Negeri pada Perusahaan Pembiayaan.	Nilai Nominal <i>Lender</i> Dalam Negeri pada Perusahaan Pembiayaan.
10	2 Perusahaan Modal Ventura	Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Dalam Negeri pada Perusahaan Modal Ventura.	Nilai Nominal <i>Lender</i> Dalam Negeri pada Perusahaan Modal Ventura.
11	3 Dana Pensiun	Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Dalam Negeri pada Perusahaan Dana Pensiun.	Nilai Nominal <i>Lender</i> Dalam Negeri pada Perusahaan Dana Pensiun.
12	4 Perusahaan Perasuransian	Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Dalam Negeri pada Perusahaan Perasuransian.	Nilai Nominal <i>Lender</i> Dalam Negeri pada Perusahaan Perasuransian.
13	5 Lembaga Keuangan Mikro	Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Dalam Negeri pada Lembaga Keuangan Mikro.	Nilai Nominal <i>Lender</i> Dalam Negeri pada Lembaga Keuangan Mikro.
14	6 LJKNB Lainnya	Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Dalam Negeri pada LJKNB Lainnya.	Nilai Nominal <i>Lender</i> Dalam Negeri pada LJKNB Lainnya.
15	D. Institusi - Koperasi	Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Dalam Negeri pada Institusi Koperasi.	Nilai Nominal <i>Lender</i> Dalam Negeri pada Institusi Koperasi.
16	E. Institusi - Badan Hukum Lainnya	Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Dalam Negeri pada Institusi Badan Hukum Lainnya.	Nilai Nominal <i>Lender</i> Dalam Negeri pada Institusi Badan Hukum Lainnya.
17	2 Luar Negeri	Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Luar Negeri = Jumlah <i>Unique</i>	Nilai Nominal <i>Lender</i> Luar Negeri = Nilai Nominal <i>Lender</i>

No.	Deskripsi	Detail Outstanding	
		Jumlah <i>Unique Account</i>	Nilai Nominal
		<i>Account Lender</i> Luar Negeri Perorangan (+) Institusi Perbankan (+) Institusi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) (+) Institusi Badan Hukum Lainnya	Luar Negeri Perorangan (+) Institusi Perbankan (+) Institusi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) (+) Institusi Badan Hukum Lainnya
18	A. Perorangan	Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Luar Negeri Perorangan.	Nilai Nominal <i>Lender Luar Negeri</i> Perorangan.
19	B. Institusi - Perbankan	Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Luar Negeri Institusi Perbankan.	Nilai Nominal <i>Lender Luar Negeri</i> Institusi Perbankan.
20	C. Institusi - Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)	Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Luar Negeri Industri Keuangan Non- Bank (IKNB) = Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Luar Negeri pada Perusahaan Pembiayaan (+) Perusahaan Modal Ventura (+) Perusahaan Dana Pensiun (+) Perusahaan Perasuransian (+) LKJNB Lainnya.	Nilai Nominal <i>Lender Luar Negeri</i> Industri Keuangan Non- Bank (IKNB) = Nilai Nominal <i>Lender Luar Negeri</i> pada Perusahaan Pembiayaan (+) Perusahaan Modal Ventura (+) Perusahaan Dana Pensiun (+) Perusahaan Perasuransian (+) LKJNB Lainnya.
21	1 Perusahaan Pembiayaan	Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Luar Negeri pada Perusahaan Pembiayaan.	Nilai Nominal <i>Lender Luar Negeri</i> pada Perusahaan Pembiayaan.
22	2 Perusahaan Modal Ventura	Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Luar Negeri pada Perusahaan Modal Ventura.	Nilai Nominal <i>Lender Luar Negeri</i> pada Perusahaan Modal Ventura.
23	3 Dana Pensiun	Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Luar Negeri pada Dana Pensiun.	Nilai Nominal <i>Lender Luar Negeri</i> pada Dana Pensiun.

No.	Deskripsi	Detail Outstanding	
		Jumlah <i>Unique Account Lender</i>	Nilai Nominal
24	4 Perusahaan Perasuransian	Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Luar Negeri pada Perusahaan Perasuransian.	Nilai Nominal <i>Lender</i> Luar Negeri pada Perusahaan Perasuransian.
25	5 LJKNB Lainnya	Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Luar Negeri pada LJKNB Lainnya.	Nilai Nominal <i>Lender</i> Luar Negeri pada LJKNB Lainnya.
26	D. Institusi - Badan Hukum Lainnya	Jumlah <i>Unique Account Lender</i> Luar Negeri pada Institusi Badan Hukum Lainnya.	Nilai Nominal <i>Lender</i> Luar Negeri pada Institusi Badan Hukum Lainnya.
27	<i>Borrower</i>	Jumlah <i>Unique Account Borrower</i> = Jumlah <i>Unique Account Borrower</i> Perorangan (+) Institusi (Badan Hukum).	Nilai Nominal <i>Borrower</i> = Nilai Nominal <i>Borrower</i> Perorangan (+) Institusi (Badan Hukum).
28	1. Perorangan	Jumlah <i>Unique Account Borrower</i> Perorangan = Jumlah <i>Unique Account Borrower</i> Perorangan UMKM (+) NON UMKM.	Nilai Nominal <i>Borrower</i> Perorangan = Nilai Nominal <i>Borrower</i> Perorangan UMKM (+) NON UMKM.
29	A. UMKM	Jumlah <i>Unique Account Borrower</i> Perorangan UMKM.	Nilai Nominal <i>Borrower</i> Perorangan UMKM.
30	B. NON UMKM	Jumlah <i>Unique Account Borrower</i> Perorangan NON UMKM.	Nilai Nominal <i>Borrower</i> Perorangan NON UMKM.
31	2. Institusi (Badan Hukum)	Jumlah <i>Unique Account Borrower</i> Institusi (Badan Hukum) = Jumlah <i>Unique Account Borrower</i> Institusi (Badan Hukum) UMKM (+) NON UMKM.	Nilai Nominal <i>Borrower</i> Institusi (Badan Hukum) = Nilai Nominal <i>Borrower</i> Institusi (Badan Hukum) UMKM (+) NON UMKM.
32	A. UMKM	Jumlah <i>Unique Account Borrower</i> Institusi (Badan Hukum) UMKM.	Nilai Nominal <i>Borrower</i> Institusi (Badan Hukum) UMKM.
33	B. NON UMKM	Jumlah <i>Unique Account Borrower</i>	Nilai Nominal <i>Borrower</i>

No.	Deskripsi	Detail <i>Outstanding</i>	
		Jumlah <i>Unique Account</i>	Nilai Nominal
		Institusi (Badan Hukum) NON UMKM.	Institusi (Badan Hukum) NON UMKM.

14. Data Kualitas Pendanaan *Outstanding*

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Outstanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
1.	1. Pendanaan Lancar		
2.	a. Jawa		
3.	1. Banten		
4.	2. DKI Jakarta		
5.	3. Jawa Barat		
6.	4. Jawa Tengah		
7.	5. DI Yogyakarta		
8.	6. Jawa Timur		
9.	b. Luar Jawa		
10.	1. Nangroe Aceh Darussalam		
11.	2. Sumatera Utara		
12.	3. Sumatera Barat		
13.	4. Riau		
14.	5. Kepulauan Riau		
15.	6. Kepulauan Bangka Belitung		
16.	7. Jambi		
17.	8. Sumatera Selatan		
18.	9. Bengkulu		
19.	10. Lampung		
20.	11. Kalimantan Barat		
21.	12. Kalimantan Tengah		
22.	13. Kalimantan Utara		
23.	14. Kalimantan Timur		
24.	15. Kalimantan Selatan		
25.	16. Sulawesi Utara		
26.	17. Gorontalo		
27.	18. Sulawesi Tengah		
28.	19. Sulawesi Barat		
29.	20. Sulawesi Selatan		
30.	21. Sulawesi Tenggara		
31.	22. Bali		
32.	23. Nusa Tenggara Barat		

No.	Kategori Kualitas Pendanaan Outstandig (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
33.	24. Nusa Tenggara Timur		
34.	25. Maluku Utara		
35.	26. Maluku		
36.	27. Papua Barat		
37.	28. Papua		
38.	29. Papua Tengah		
39.	30. Papua Pegunungan		
40.	31. Papua Selatan		
41.	32. Papua Barat Daya		
42.	c. Total <i>Outstanding</i> Pendanaan Lancar		
43.	- Laki-laki		
44.	- Perempuan		
45.	- Badan Usaha		
46.	d. Usia <i>Borrower</i> Perseorangan yang masuk dalam kategori Pendanaan Lancar		
47.	- <19 tahun		
48.	- 19-34 Tahun		
49.	- 35-54 Tahun		
50.	- >54 Tahun		
51.	2. Pendanaan Dalam Perhatian Khusus		
52.	a. Jawa		
53.	1. Banten		
54.	2. DKI Jakarta		
55.	3. Jawa Barat		
56.	4. Jawa Tengah		
57.	5. DI Yogyakarta		
58.	6. Jawa Timur		
59.	b. Luar Jawa		
60.	1. Nangroe Aceh Darussalam		
61.	2. Sumatera Utara		
62.	3. Sumatera Barat		
63.	4. Riau		
64.	5. Kepulauan Riau		
65.	6. Kepulauan Bangka Belitung		
66.	7. Jambi		
67.	8. Sumatera Selatan		

No.	Kategori Kualitas Pendanaan Outstandig (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
68.	9. Bengkulu		
69.	10. Lampung		
70.	11. Kalimantan Barat		
71.	12. Kalimantan Tengah		
72.	13. Kalimantan Utara		
73.	14. Kalimantan Timur		
74.	15. Kalimantan Selatan		
75.	16. Sulawesi Utara		
76.	17. Gorontalo		
77.	18. Sulawesi Tengah		
78.	19. Sulawesi Barat		
79.	20. Sulawesi Selatan		
80.	21. Sulawesi Tenggara		
81.	22. Bali		
82.	23. Nusa Tenggara Barat		
83.	24. Nusa Tenggara Timur		
84.	25. Maluku Utara		
85.	26. Maluku		
86.	27. Papua Barat		
87.	28. Papua		
88.	29. Papua Tengah		
89.	30. Papua Pegunungan		
90.	31. Papua Selatan		
91.	32. Papua Barat Daya		
92.	c. Total <i>Outstanding</i> Dalam Perhatian Khusus		
93.	- Laki-laki		
94.	- Perempuan		
95.	- Badan Usaha		
96.	d. Usia <i>Borrower</i> Perseorangan yang masuk dalam kategori Pendanaan Dalam Perhatian Khusus		
97.	- <19 tahun		
98.	- 19-34 Tahun		
99.	- 35-54 Tahun		
100.	- >54 Tahun		
101.	3. Pendanaan Kurang Lancar		
102.	a. Jawa		
103.	1. Banten		
104.	2. DKI Jakarta		

No.	Kategori Kualitas Pendanaan Outstandig (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
105.	3. Jawa Barat		
106.	4. Jawa Tengah		
107.	5. DI Yogyakarta		
108.	6. Jawa Timur		
109.	b. Luar Jawa		
110.	1. Nangroe Aceh Darussalam		
111.	2. Sumatera Utara		
112.	3. Sumatera Barat		
113.	4. Riau		
114.	5. Kepulauan Riau		
115.	6. Kepulauan Bangka Belitung		
116.	7. Jambi		
117.	8. Sumatera Selatan		
118.	9. Bengkulu		
119.	10. Lampung		
120.	11. Kalimantan Barat		
121.	12. Kalimantan Tengah		
122.	13. Kalimantan Utara		
123.	14. Kalimantan Timur		
124.	15. Kalimantan Selatan		
125.	16. Sulawesi Utara		
126.	17. Gorontalo		
127.	18. Sulawesi Tengah		
128.	19. Sulawesi Barat		
129.	20. Sulawesi Selatan		
130.	21. Sulawesi Tenggara		
131.	22. Bali		
132.	23. Nusa Tenggara Barat		
133.	24. Nusa Tenggara Timur		
134.	25. Maluku Utara		
135.	26. Maluku		
136.	27. Papua Barat		
137.	28. Papua		
138.	29. Papua Tengah		
139.	30. Papua Pegunungan		
140.	31. Papua Selatan		
141.	32. Papua Barat Daya		
142.	c. Total <i>Outstanding</i> Pendanaan Kurang Lancar		
143.	- Laki-laki		

No.	Kategori Kualitas Pendanaan Outstandig (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
144.	- Perempuan		
145.	- Badan Usaha		
146.	d. Usia <i>Borrower</i> Perseorangan yang masuk dalam kategori Pendanaan Kurang Lancar		
147.	- <19 tahun		
148.	- 19-34 Tahun		
149.	- 35-54 Tahun		
150.	- >54 Tahun		
151.	4 Pendanaan Diragukan		
152.	a. Jawa		
153.	1. Banten		
154.	2. DKI Jakarta		
155.	3. Jawa Barat		
156.	4. Jawa Tengah		
157.	5. DI Yogyakarta		
158.	6. Jawa Timur		
159.	b. Luar Jawa		
160.	1. Nangroe Aceh Darussalam		
161.	2. Sumatera Utara		
162.	3. Sumatera Barat		
163.	4. Riau		
164.	5. Kepulauan Riau		
165.	6. Kepulauan Bangka Belitung		
166.	7. Jambi		
167.	8. Sumatera Selatan		
168.	9. Bengkulu		
169.	10. Lampung		
170.	11. Kalimantan Barat		
171.	12. Kalimantan Tengah		
172.	13. Kalimantan Utara		
173.	14. Kalimantan Timur		
174.	15. Kalimantan Selatan		
175.	16. Sulawesi Utara		
176.	17. Gorontalo		
177.	18. Sulawesi Tengah		
178.	19. Sulawesi Barat		
179.	20. Sulawesi Selatan		
180.	21. Sulawesi Tenggara		
181.	22. Bali		
182.	23. Nusa Tenggara Barat		

No.	Kategori Kualitas Pendanaan Outstanding (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
183.	24. Nusa Tenggara Timur		
184.	25. Maluku Utara		
185.	26. Maluku		
186.	27. Papua Barat		
187.	28. Papua		
188.	29. Papua Tengah		
189.	30. Papua Pegunungan		
190.	31. Papua Selatan		
191.	32. Papua Barat Daya		
192.	c. Total <i>Outstanding</i> Pendanaan Diragukan		
193.	- Laki-laki		
194.	- Perempuan		
195.	- Badan Usaha		
196.	d. Usia <i>Borrower</i> Perseorangan yang masuk dalam kategori Pendanaan Diragukan		
197.	- <19 tahun		
198.	- 19-34 Tahun		
199.	- 35-54 Tahun		
200.	- >54 Tahun		
201.	5 Pendanaan Macet		
202.	a. Jawa		
203.	1. Banten		
204.	2. DKI Jakarta		
205.	3. Jawa Barat		
206.	4. Jawa Tengah		
207.	5. DI Yogyakarta		
208.	6. Jawa Timur		
209.	b. Luar Jawa		
210.	1. Nangroe Aceh Darussalam		
211.	2. Sumatera Utara		
212.	3. Sumatera Barat		
213.	4. Riau		
214.	5. Kepulauan Riau		
215.	6. Kepulauan Bangka Belitung		
216.	7. Jambi		
217.	8. Sumatera Selatan		
218.	9. Bengkulu		
219.	10. Lampung		
220.	11. Kalimantan Barat		

No.	Kategori Kualitas Pendanaan Outstandig (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
221.	12. Kalimantan Tengah		
222.	13. Kalimantan Utara		
223.	14. Kalimantan Timur		
224.	15. Kalimantan Selatan		
225.	16. Sulawesi Utara		
226.	17. Gorontalo		
227.	18. Sulawesi Tengah		
228.	19. Sulawesi Barat		
229.	20. Sulawesi Selatan		
230.	21. Sulawesi Tenggara		
231.	22. Bali		
232.	23. Nusa Tenggara Barat		
233.	24. Nusa Tenggara Timur		
234.	25. Maluku Utara		
235.	26. Maluku		
236.	27. Papua Barat		
237.	28. Papua		
238.	29. Papua Tengah		
239.	30. Papua Pegunungan		
240.	31. Papua Selatan		
241.	32. Papua Barat Daya		
242.	c. Total <i>Outstanding</i> Pendanaan Macet		
243.	- Laki-laki		
244.	- Perempuan		
245.	- Badan Usaha		
246.	d. Usia <i>Borrower</i> Perseorangan yang masuk dalam kategori Pendanaan Macet		
247.	- <19 tahun		
248.	- 19-34 Tahun		
249.	- 35-54 Tahun		
250.	- >54 Tahun		
251.	6 Total <i>Outstanding</i> Pendanaan		
252.	7 TKB 90 (dalam %)		
253.	8 TWP 90 (dalam %)		

Petunjuk Pengisian:

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Outstanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
1.	1. Pendanaan Lancar		
2.	a. Jawa	Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Lancar di Jawa Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Lancar di wilayah Jawa.	Nilai Nominal Pendanaan Lancar di Jawa Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Nilai Nominal Pendanaan Lancar di wilayah Jawa.
3.	1. Banten	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Jawa.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Jawa.
4.	2. DKI Jakarta		
5.	3. Jawa Barat		
6.	4. Jawa Tengah		
7.	5. DI Yogyakarta		
8.	6. Jawa Timur		
9.	b. Luar Jawa	Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Lancar di Luar Jawa Yang Masih Memiliki Pendanaan	Nilai Nominal Pendanaan Lancar di Luar Jawa Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Oustanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
		<i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Lancar wilayah Luar Jawa.	merupakan penjumlahan dari Nilai Nominal Pendanaan Lancar wilayah Luar Jawa.
10.	1. Nangroe Aceh Darussalam	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Luar Jawa.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Luar Jawa.
11.	2. Sumatera Utara		
12.	3. Sumatera Barat		
13.	4. Riau		
14.	5. Kepulauan Riau		
15.	6. Kepulauan Bangka Belitung		
16.	7. Jambi		
17.	8. Sumatera Selatan		
18.	9. Bengkulu		
19.	10. Lampung		
20.	11. Kalimantan Barat		
21.	12. Kalimantan Tengah		
22.	13. Kalimantan Utara		
23.	14. Kalimantan Timur		
24.	15. Kalimantan Selatan		
25.	16. Sulawesi Utara		
26.	17. Gorontalo		
27.	18. Sulawesi Tengah		
28.	19. Sulawesi Barat		
29.	20. Sulawesi Selatan		
30.	21. Sulawesi Tenggara		
31.	22. Bali		
32.	23. Nusa Tenggara Barat		
33.	24. Nusa Tenggara Timur		
34.	25. Maluku Utara		
35.	26. Maluku		

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Outstanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
36.	27. Papua Barat		
37.	28. Papua		
38.	29. Papua Tengah		
39.	30. Papua Pegunungan		
40.	31. Papua Selatan		
41.	32. 32. Papua Barat Daya		
42.	c. Total <i>Outstanding</i> Pendanaan Lancar	Total Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan = Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Lancar di Jawa (+) Luar Jawa.	Total Nilai Nominal Pendanaan Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan = Nilai Nominal Pendanaan Lancar di Jawa (+) Luar Jawa.
43.	- Laki-laki	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> dengan jenis kelamin Laki-laki.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> dengan jenis kelamin Laki-laki.
44.	- Perempuan	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Lancar Yang	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Lancar Yang <i>Outstanding</i>

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Oustanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
		Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> dengan jenis kelamin Perempuan.	Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> dengan jenis kelamin Perempuan.
45.	- Badan Usaha	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> Badan Usaha.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> Badan Usaha.
46.	d. Usia <i>Borrower</i> Perseorangan yang masuk dalam kategori Pendanaan Lancar		
47.	- <19 tahun	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> kurang dari 19 tahun.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> kurang dari 19 tahun.
48.	- 19-34 Tahun	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Lancar Yang

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Oustanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
		Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> dari 19 sampai dengan 34 tahun.	<i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> dari 19 sampai dengan 34 tahun.
49.	- 35-54 Tahun	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> dari 35 sampai dengan 54 tahun.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> dari 35 sampai dengan 54 tahun.
50.	- >54 Tahun	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> lebih dari 54 tahun.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> lebih dari 54 tahun.
51.	2. Pendanaan Dalam Perhatian Khusus		
52.	a. Jawa	Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan	Nilai Nominal Pendanaan Dalam

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Oustanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
		Dalam Perhatian Khusus di Jawa Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Dalam Perhatian Khusus di wilayah Jawa.	Perhatian Khusus di Jawa Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Nilai Nominal Pendanaan Dalam Perhatian Khusus di wilayah Jawa.
53.	1. Banten	Diisi dengan	Diisi dengan
54.	2. DKI Jakarta	Jumlah <i>Unique</i>	Nilai Nominal
55.	3. Jawa Barat	<i>Borrower</i>	Pendanaan
56.	4. Jawa Tengah	Pendanaan	Dalam
57.	5. DI Yogyakarta	Dalam	Perhatian
58.	6. Jawa Timur	Perhatian Khusus Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Jawa.	Perhatian Khusus Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Jawa.
59.	b. Luar Jawa	Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Dalam Perhatian Khusus di Luar Jawa Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i>	Nilai Nominal Pendanaan Dalam Perhatian Khusus di Luar Jawa Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Oustanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
		Hingga Akhir Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Dalam Perhatian Khusus wilayah Luar Jawa.	merupakan penjumlahan dari Nilai Nominal Pendanaan Dalam Perhatian Khusus wilayah Luar Jawa.
60.	1. Nangroe Aceh Darussalam	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Dalam Perhatian Khusus Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Luar Jawa.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Dalam Perhatian Khusus Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Luar Jawa.
61.	2. Sumatera Utara		
62.	3. Sumatera Barat		
63.	4. Riau		
64.	5. Kepulauan Riau		
65.	6. Kepulauan Bangka Belitung		
66.	7. Jambi		
67.	8. Sumatera Selatan		
68.	9. Bengkulu		
69.	10. Lampung		
70.	11. Kalimantan Barat		
71.	12. Kalimantan Tengah		
72.	13. Kalimantan Utara		
73.	14. Kalimantan Timur		
74.	15. Kalimantan Selatan		
75.	16. Sulawesi Utara		
76.	17. Gorontalo		
77.	18. Sulawesi Tengah		
78.	19. Sulawesi Barat		
79.	20. Sulawesi Selatan		
80.	21. Sulawesi Tenggara		
81.	22. Bali		
82.	23. Nusa Tenggara Barat		

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Outstanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
83.	24. Nusa Tenggara Timur		
84.	25. Maluku Utara		
85.	26. Maluku		
86.	27. Papua Barat		
87.	28. Papua		
88.	29. Papua Tengah		
89.	30. Papua Pegunungan		
90.	31. Papua Selatan		
91.	32. Papua Barat Daya		
92.	c. Total <i>Outstanding</i> Pendanaan Dalam Perhatian Khusus	Total Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Dalam Perhatian Khusus Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan = Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Dalam Perhatian Khusus di Jawa (+) Luar Jawa.	Total Nilai Nominal Pendanaan Dalam Perhatian Khusus Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan = Nilai Nominal Pendanaan Dalam Perhatian Khusus di Jawa (+) Luar Jawa.
93.	- Laki-laki	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Dalam Perhatian Khusus Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Dalam Perhatian Khusus Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i>

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Oustanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
		Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> dengan jenis kelamin Laki-laki.	dengan jenis kelamin Laki-laki.
94.	- Perempuan	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Dalam Perhatian Khusus Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> dengan jenis kelamin Perempuan.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Dalam Perhatian Khusus Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> dengan jenis kelamin Perempuan.
95.	- Badan Usaha	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Dalam Perhatian Khusus Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> Badan Usaha.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Dalam Perhatian Khusus Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> Badan Usaha.
96.	d. Usia <i>Borrower</i> Perseorangan yang masuk dalam kategori Pendanaan Dalam Perhatian Khusus		
97.	- <19 tahun	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Dalam

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Oustanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
		Dalam Perhatian Khusus Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> kurang dari 19 tahun.	Perhatian Khusus Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> kurang dari 19 tahun.
98.	- 19-34 Tahun	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Dalam Perhatian Khusus Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> dari 19 sampai dengan 34 tahun.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Dalam Perhatian Khusus Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> dari 19 sampai dengan 34 tahun.
99.	- 35-54 Tahun	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Dalam Perhatian Khusus Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> dari 35 sampai	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Dalam Perhatian Khusus Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> dari 35 sampai dengan 54 tahun.

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Outstanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
		dengan 54 tahun.	
100.	- >54 Tahun	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Dalam Perhatian Khusus Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> lebih dari 54 tahun.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Dalam Perhatian Khusus Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> lebih dari 54 tahun.
101.	3. Pendanaan Kurang Lancar		
102.	a. Jawa	Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar di Jawa Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar di wilayah Jawa.	Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar di Jawa Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar di wilayah Jawa.
103.	1. Banten	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar Yang Masih Memiliki	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir
104.	2. DKI Jakarta		
105.	3. Jawa Barat		
106.	4. Jawa Tengah		
107.	5. DI Yogyakarta		
108.	6. Jawa Timur		

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Outstanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
		Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Jawa.	Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Jawa.
109.	b. Luar Jawa	Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar di Luar Jawa Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar wilayah Luar Jawa.	Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar di Luar Jawa Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar wilayah Luar Jawa.
110.	1. Nangroe Aceh Darussalam	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Luar Jawa.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Luar Jawa.
111.	2. Sumatera Utara		
112.	3. Sumatera Barat		
113.	4. Riau		
114.	5. Kepulauan Riau		
115.	6. Kepulauan Bangka Belitung		
116.	7. Jambi		
117.	8. Sumatera Selatan		
118.	9. Bengkulu		
119.	10. Lampung		
120.	11. Kalimantan Barat		
121.	12. Kalimantan Tengah		
122.	13. Kalimantan Utara		

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Outstanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
123.	14. Kalimantan Timur		
124.	15. Kalimantan Selatan		
125.	16. Sulawesi Utara		
126.	17. Gorontalo		
127.	18. Sulawesi Tengah		
128.	19. Sulawesi Barat		
129.	20. Sulawesi Selatan		
130.	21. Sulawesi Tenggara		
131.	22. Bali		
132.	23. Nusa Tenggara Barat		
133.	24. Nusa Tenggara Timur		
134.	25. Maluku Utara		
135.	26. Maluku		
136.	27. Papua Barat		
137.	28. Papua		
138.	29. Papua Tengah		
139.	30. Papua Pegunungan		
140.	31. Papua Selatan		
141.	32. Papua Barat Daya		
142.	c. Total <i>Outstanding</i> Pendanaan Kurang Lancar	Total Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan = Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar di Jawa (+) Luar Jawa.	Total Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan = Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar di Jawa (+) Luar Jawa.
143.	- Laki-laki	Diisi dengan Jumlah <i>Unique</i>	Diisi dengan Nilai Nominal

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Oustanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
		<i>Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> dengan jenis kelamin Laki-laki.	Pendanaan Kurang Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> dengan jenis kelamin Laki-laki.
144.	- Perempuan	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> dengan jenis kelamin Perempuan.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> dengan jenis kelamin Perempuan.
145.	- Badan Usaha	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> Badan Usaha.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> Badan Usaha.
146.	d. Usia <i>Borrower</i> Perseorangan yang masuk dalam kategori Pendanaan Kurang Lancar		

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Oustanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
147.	- <19 tahun	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> kurang dari 19 tahun.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> kurang dari 19 tahun.
148.	- 19-34 Tahun	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> dari 19 sampai dengan 34 tahun.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> dari 19 sampai dengan 34 tahun.
149.	- 35-54 Tahun	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> dari 35 sampai dengan 54 tahun.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> dari 35 sampai dengan 54 tahun.

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Oustanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
150.	- >54 Tahun	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> lebih dari 54 tahun.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> lebih dari 54 tahun.
151.	4. Pendanaan Diragukan		
152.	a. Jawa	Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar di Jawa Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar di wilayah Jawa.	Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar di Jawa Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar di wilayah Jawa.
153.	1. Banten	Diisi dengan	Diisi dengan
154.	2. DKI Jakarta	Jumlah <i>Unique</i>	Nilai Nominal
155.	3. Jawa Barat	<i>Borrower</i>	Pendanaan
156.	4. Jawa Tengah	Pendanaan	Kurang
157.	5. DI Yogyakarta	Kurang Lancar	Lancar Yang
158.	6. Jawa Timur	Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan	<i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan untuk masing-

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Oustanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
		untuk masing-masing wilayah Jawa.	masing wilayah Jawa.
159.	b. Luar Jawa	Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar di Luar Jawa Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar di wilayah Luar Jawa.	Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar di Luar Jawa Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar di wilayah Luar Jawa.
160.	1. Nangroe Aceh Darussalam	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Luar Jawa.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Luar Jawa.
161.	2. Sumatera Utara		
162.	3. Sumatera Barat		
163.	4. Riau		
164.	5. Kepulauan Riau		
165.	6. Kepulauan Bangka Belitung		
166.	7. Jambi		
167.	8. Sumatera Selatan		
168.	9. Bengkulu		
169.	10. Lampung		
170.	11. Kalimantan Barat		
171.	12. Kalimantan Tengah		
172.	13. Kalimantan Utara		
173.	14. Kalimantan Timur		

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Outstanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
174.	15. Kalimantan Selatan		
175.	16. Sulawesi Utara		
176.	17. Gorontalo		
177.	18. Sulawesi Tengah		
178.	19. Sulawesi Barat		
179.	20. Sulawesi Selatan		
180.	21. Sulawesi Tenggara		
181.	22. Bali		
182.	23. Nusa Tenggara Barat		
183.	24. Nusa Tenggara Timur		
184.	25. Maluku Utara		
185.	26. Maluku		
186.	27. Papua Barat		
187.	28. Papua		
188.	29. Papua Tengah		
189.	30. Papua Pegunungan		
190.	31. Papua Selatan		
191.	32. Papua Barat Daya		
192.	c. Total <i>Outstanding</i> Pendanaan Diragukan	Total Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan = Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar di Jawa (+) Luar Jawa.	Total Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan = Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar di Jawa (+) Luar Jawa.
193.	- Laki-laki	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Kurang

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Oustanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
		Kurang Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> dengan jenis kelamin Laki-laki.	Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> dengan jenis kelamin Laki-laki.
194.	- Perempuan	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> dengan jenis kelamin Perempuan.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> dengan jenis kelamin Perempuan.
195.	- Badan Usaha	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> Badan Usaha.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> Badan Usaha.
196.	d. Usia <i>Borrower</i> Perseorangan yang masuk dalam kategori Pendanaan Diragukan		
197.	- <19 tahun	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i>	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Oustanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
		Pendanaan Kurang Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> kurang dari 19 tahun.	Kurang Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> kurang dari 19 tahun.
198.	- 19-34 Tahun	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> dari 19 sampai dengan 34 tahun.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> dari 19 sampai dengan 34 tahun.
199.	- 35-54 Tahun	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> dari 35 sampai dengan 54 tahun.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> dari 35 sampai dengan 54 tahun.
200.	- >54 Tahun	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i>	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Oustanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
		Pendanaan Kurang Lancar Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> lebih dari 54 tahun.	Kurang Lancar Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> lebih dari 54 tahun.
201.	5. Pendanaan Macet		
202.	a. Jawa	Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Macet di Jawa Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Macet di wilayah Jawa.	Nilai Nominal Pendanaan Macet di Jawa Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Nilai Nominal Pendanaan Macet di wilayah Jawa.
203.	1. Banten	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Macet Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Jawa.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Macet Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Jawa.
204.	2. DKI Jakarta		
205.	3. Jawa Barat		
206.	4. Jawa Tengah		
207.	5. DI Yogyakarta		
208.	6. Jawa Timur		
209.	b. Luar Jawa	Jumlah <i>Unique Borrower</i>	Nilai Nominal Pendanaan

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Oustanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
		Pendanaan Macet di Luar Jawa Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Macet di wilayah Luar Jawa.	Macet di Luar Jawa Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan merupakan penjumlahan dari Nilai Nominal Pendanaan Macet di wilayah Luar Jawa.
210.	1. Nangroe Aceh Darussalam	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Macet Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Luar Jawa.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Macet Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan untuk masing-masing wilayah Luar Jawa.
211.	2. Sumatera Utara		
212.	3. Sumatera Barat		
213.	4. Riau		
214.	5. Kepulauan Riau		
215.	6. Kepulauan Bangka Belitung		
216.	7. Jambi		
217.	8. Sumatera Selatan		
218.	9. Bengkulu		
219.	10. Lampung		
220.	11. Kalimantan Barat		
221.	12. Kalimantan Tengah		
222.	13. Kalimantan Utara		
223.	14. Kalimantan Timur		
224.	15. Kalimantan Selatan		
225.	16. Sulawesi Utara		
226.	17. Gorontalo		
227.	18. Sulawesi Tengah		
228.	19. Sulawesi Barat		
229.	20. Sulawesi Selatan		
230.	21. Sulawesi Tenggara		
231.	22. Bali		

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Outstanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
232.	23. Nusa Tenggara Barat		
233.	24. Nusa Tenggara Timur		
234.	25. Maluku Utara		
235.	26. Maluku		
236.	27. Papua Barat		
237.	28. Papua		
238.	29. Papua Tengah		
239.	30. Papua Pegunungan		
240.	31. Papua Selatan		
241.	32. Papua Barat Daya		
242.	c. Total <i>Outstanding</i> Pendanaan Macet	Total Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Macet Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan = Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Macet di Jawa (+) Luar Jawa.	Total Nilai Nominal Pendanaan Macet Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan = Nilai Nominal Pendanaan Macet di Jawa (+) Luar Jawa.
243.	- Laki-laki	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Macet Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> dengan jenis kelamin Laki-laki.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Macet Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> dengan jenis kelamin Laki-laki.

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Oustanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
244.	- Perempuan	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Macet Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> dengan jenis kelamin Perempuan.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Macet Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> dengan jenis kelamin Perempuan.
245.	- Badan Usaha	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Macet Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> Badan Usaha.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Macet Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan pada <i>Borrower</i> Badan Usaha.
246.	d. Usia <i>Borrower</i> Perseorangan yang masuk dalam kategori Pendanaan Macet		
247.	- <19 tahun	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Macet Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i>	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Macet Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> kurang dari 19 tahun.

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Oustanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
		kurang dari 19 tahun.	
248.	- 19-34 Tahun	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Macet Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> dari 19 sampai dengan 34 tahun.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Macet Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> dari 19 sampai dengan 34 tahun.
249.	- 35-54 Tahun	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Macet Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> dari 35 sampai dengan 54 tahun.	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Macet Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> dari 35 sampai dengan 54 tahun.
250.	- >54 Tahun	Diisi dengan Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Macet Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia	Diisi dengan Nilai Nominal Pendanaan Macet Yang <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan dengan usia <i>Borrower</i> lebih dari 54 tahun.

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Outstanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
		<i>Borrower</i> lebih dari 54 tahun.	
251.	6. Total <i>Outstanding</i> Pendanaan	Total Jumlah <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Yang Masih Memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan = <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Lancar + <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Dalam Perhatian Khusus + <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Kurang Lancar + <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Diragukan + <i>Unique Borrower</i> Pendanaan Macet	Total Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan = Nilai Nominal Pendanaan Lancar + Nilai Nominal Pendanaan Dalam Perhatian Khusus + Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar + Nilai Nominal Pendanaan Diragukan + Nilai Nominal Pendanaan Macet.
252.	7. TKB 90 (dalam %)		TKB 90 (dalam %) Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan = (Nilai Nominal Pendanaan Lancar +

No.	Kategori Kualitas Pendanaan <i>Outstanding</i> (dalam Rp)	Jumlah <i>Unique Borrower</i> yang masih memiliki Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir Bulan Laporan	Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> hingga akhir bulan Laporan
			<p>Nilai Nominal Pendanaan Dalam Perhatian Khusus + Nilai Nominal Pendanaan Kurang Lancar + Nilai Nominal Pendanaan Diragukan) / (Total <i>Outstanding</i> Pendanaan), disajikan dengan format persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (,) contoh (95,00%).</p>
253.	8. TWP 90 (dalam %)		<p>TWP 90 (dalam %) Nilai Nominal Pendanaan <i>Outstanding</i> Hingga Akhir Bulan Laporan = (Pendanaan Macet) / (Total <i>Outstanding</i> Pendanaan), disajikan dengan format persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (,) contoh (5,00%).</p>

15. Data Hapus Buku & Hapus Tagih dan Klaim Asuransi/Penjaminan

No.	Data Hapus Buku & Hapus Tagih dan Klaim Asuransi/Penjaminan	Rincian
1	Akumulasi Penyaluran Pendanaan	
2	Pendanaan <i>Oustanding</i>	
3	Akumulasi Jumlah Pengembalian Pendanaan	
4	Akumulasi Pendanaan yang dihapus buku & hapus tagih	
5	Akumulasi Pendanaan yang dilakukan klaim Asuransi/Penjaminan	
6	Paid Ratio	
7	Unpaid Ratio	

Petunjuk Pengisian:

No.	Kategori Kualitas Pendanaan Outstandig (dalam Rp)	Rincian
1	Akumulasi Penyaluran Pendanaan	Sama dengan Agregat (Total) Akumulasi jumlah Pendanaan yang telah diberikan kepada <i>Borrower</i> (dalam Rp) pada tabel Transaction Value kolom Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.
2	Pendanaan Oustanding	Sama dengan Agregat (Total) Total <i>Outstanding Pendanaan</i> per Bulan Laporan (dalam Rp) pada tabel Transaction Value
3	Akumulasi Jumlah Pengembalian Pendanaan	Diisi dengan nominal jumlah pendanaan (pokok pendanaan) yang telah dibayarkan kembali kepada <i>Lender</i> (repayment) dalam Rupiah Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.
4	Akumulasi Pendanaan yang dihapus buku & dihapus tagih	Diisi dengan nominal jumlah pendanaan (pokok pendanaan) yang telah dihapus buku & dihapus tagih oleh <i>Lender</i> dalam Rupiah Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.
5	Akumulasi Pendanaan yang dilakukan klaim Asuransi/Penjaminan	Diisi dengan nominal jumlah pendanaan (pokok pendanaan) yang telah diklaim oleh asuransi/penjaminan dalam Rupiah Sejak Perusahaan Didirikan s.d Akhir Posisi Bulan Laporan.
6	<i>Paid Ratio</i>	Merupakan Rasio yang menghitung: Akumulasi Jumlah Pengembalian Pendanaan dibagi dengan Akumulasi Penyaluran Pendanaan. Dibuat dalam bentuk persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (,), contohnya 80,00%.

No.	Kategori Kualitas Pendanaan Outstandig (dalam Rp)	Rincian
7	<i>Unpaid Ratio</i>	Merupakan Rasio yang menghitung: (Akumulasi Pendanaan yang dihapus buku & dihapus tagih + Akumulasi Pendanaan yang dilakukan klaim Asuransi/Penjaminan + Total <i>Outstanding</i> Pendanaan Macet pada tabel Data Kualitas Pendanaan Outstanding) dibagi dengan Akumulasi Penyaluran Pendanaan. Dibuat dalam bentuk persen (%) dengan dua angka dibelakang koma (,), contohnya 10,00%.

16. Laporan Kegiatan Yang Telah Dilakukan

No.	Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan	Jumlah Orang yang Terlibat
1				
2				
3, dst				

Detail Pengisian:

No.	Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan	Jumlah Orang yang Terlibat
1	Diisi dengan Tanggal Kegiatan Yang Telah Dilakukan, format yang diinputkan yyyyymmdd.	Diisi dengan Nama Kegiatan Yang Telah Dilakukan.	Diisi dengan Tempat Yang Telah Dilakukan.	Diisi dengan Jumlah Orang yang Terlibat pada Kegiatan Yang Telah Dilakukan.

17. Rincian Kas dan Setara Kas

No	Uraian	Jenis Kas dan Setara Kas	Nomor Rekening	Jumlah	Keterangan (Tujuan Penggunaan)
1	Rincian Kas dan Setara Kas baris ke-1				
2	Rincian Kas dan Setara Kas baris ke-2				
3, dst	Rincian Kas dan Setara Kas baris ke-3 dan seterusnya				
	Total				

Detail Pengisian:

No.	Uraian	Jenis Kas dan Setara Kas	Nomor Rekening	Jumlah	Keterangan (Tujuan Penggunaan)
1	Rincian Kas dan Setara Kas.	Diisi dengan Jenis Kas dan Setara Kas.	Diisi dengan Nomor Rekening dari Kas dan Setara Kas.	Diisi dengan Jumlah dari Kas dan Setara Kas.	Diisi dengan Keterangan (Tujuan Penggunaan) dari Kas dan Setara Kas.
2	Total			Total dari Jumlah Rincian Kas dan Setara Kas merupakan penjumlahan dari semua Jumlah Rincian Kas dan Setara Kas.	

18. Rincian Piutang Lancar Lainnya

No	Uraian	Nama Debitur	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah Piutang Lancar Lainnya	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Piutang Lancar Lainnya baris ke-1							
2	Rincian Piutang Lancar Lainnya baris ke-2							
3, dst	Rincian Piutang Lancar Lainnya baris ke-3 dan seterusnya							
	Total							

Detail Pengisian:

No	Uraian	Nama Debitur	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah Piutang Lancar Lainnya	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Piutang	Diisi dengan Nama	Diisi dengan nilai Piutang	Diisi dengan	Jumlah Piutang	Diisi dengan	Diisi dengan Tanggal Jatuh	Diisi dengan Keterangan (Tujuan

No	Uraian	Nama Debitur	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah Piutang Lancar Lainnya	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
	Lancar Lainnya.	Debitur Piutang Lancar Lainnya	Lancar Lainnya pada Pihak Berelasi dengan Debitur.	nilai Piutang Lancar Lainnya pada Pihak Ketiga dari Debitur.	Lancar Lainnya = nilai Piutang Lancar Lainnya pada Pihak Berelasi dengan Debitur (+) Pihak Ketiga dari Debitur.	Tanggal Pencairan Piutang Lancar Lainnya, format yyyymmdd.	Tempo Piutang Lancar Lainnya, format yyyymmdd.	Pengguna) Piutang Lancar Lainnya.
2	Total		Total Nilai Piutang Lancar Lainnya pada Pihak Berelasi dengan Debitur merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Piutang Lancar Lainnya pada Pihak Berelasi.	Total Nilai Piutang Lancar Lainnya pada Pihak Ketiga dari Debitur merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Piutang Lancar Lainnya	Total Jumlah Piutang Lancar Lainnya merupakan penjumlahan dari semua Jumlah Rincian Piutang Lancar Lainnya.			

No	Uraian	Nama Debitur	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah Piutang Lancar Lainnya	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
				pada Pihak Ketiga.				

19. Rincian Aset Takberwujud

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Aset Takberwujud baris ke-1					
2	Rincian Aset Takberwujud baris ke-2					
3, dst	Rincian Aset Takberwujud baris ke-3 dan seterusnya					
	Total					

Detail Pengisian:

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Diisi nama Aset Takberwujud.	Diisi dengan nilai rincian aset Takberwujud pada awal bulan periode pelaporan.	Diisi dengan nilai penambahan rincian aset Takberwujud selama bulan periode pelaporan (jika ada).	Diisi dengan nilai pengurangan rincian aset Takberwujud selama bulan periode pelaporan (jika ada).	Diisi dengan nilai rincian aset Takberwujud pada akhir bulan periode pelaporan.	Diisi dengan Keterangan (Tujuan Penggunaan) Aset Takberwujud.

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir	Keterangan (Tujuan penggunaan)
2	Total	Total Nilai Aset Takberwujud pada kolom Saldo Awal merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Aset Takberwujud pada kolom Saldo Awal.	Total Nilai Aset Takberwujud pada kolom Penambahan merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Aset Takberwujud pada kolom Penambahan.	Total Nilai Aset Takberwujud pada kolom Pengurangan merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Aset Takberwujud pada kolom Pengurangan.	Total Nilai Aset Takberwujud pada kolom Saldo Akhir merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Aset Takberwujud pada kolom Saldo Akhir.	

20. Rincian Piutang Tidak Lancar Lainnya

No	Uraian	Nama Debitur	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah Piutang Tidak Lancar Lainnya	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Piutang Tidak Lancar Lainnya baris ke-1							
2	Rincian Piutang Tidak Lancar Lainnya baris ke-2							
3 dst	Rincian Piutang Tidak Lancar Lainnya baris ke-3 dan seterusnya							
	Total							

Detail Pengisian:

No	Uraian	Nama Debitur	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah Piutang Tidak Lancar Lainnya	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Piutang Tidak Lancar Lainnya	Diisi dengan Nama Debitur Piutang Tidak Lancar Lainnya.	Diisi dengan nilai Piutang Tidak Lancar Lainnya pada Pihak Berelasi dengan Debitur.	Diisi dengan nilai Piutang Tidak Lancar Lainnya pada Pihak Ketiga dari Debitur.	Jumlah Piutang Tidak Lancar Lainnya = nilai Piutang Tidak Lancar Lainnya pada Pihak Berelasi dengan Debitur (+) Pihak Ketiga dari Debitur.	Diisi dengan Tanggal Pencairan Piutang Tidak Lancar Lainnya, format yyyymmdd .	Diisi dengan Tanggal Jatuh Tempo Piutang Tidak Lancar Lainnya, format yyyymmdd .	Diisi dengan Keterangan (Tujuan Pengguna) Piutang Tidak Lancar Lainnya.
2	Total		Total Nilai Piutang Tidak Lancar Lainnya pada Pihak Berelasi dengan Debitur merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian	Total Nilai Piutang Tidak Lancar Lainnya pada Pihak Ketiga dari Debitur merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Piutang Tidak Lancar	Total Jumlah Piutang Tidak Lancar Lainnya merupakan penjumlahan dari semua Jumlah Rincian Piutang Tidak Lancar Lainnya.			

No	Uraian	Nama Debitur	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah Piutang Tidak Lancar Lainnya	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
			Piutang Tidak Lancar Lainnya pada Pihak Berelasi.	Lainnya pada Pihak Ketiga.				

21. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	Nama Kreditur	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya baris ke-1							
2	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya baris ke-2							
3, ds t	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya baris ke-3 dan seterusnya							
	Total							

Petunjuk Pengisian:

No	Uraian	Nama Kreditur	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya	Diisi dengan Nama Kreditur Utang Jangka Pendek Lainnya.	Diisi dengan nilai Utang Jangka Pendek Lainnya pada Pihak Berelasi dengan Kreditur.	Diisi dengan nilai Utang Jangka Pendek Lainnya pada Pihak Ketiga dari Kreditur.	Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya = nilai Utang Jangka Pendek Lainnya pada Pihak Berelasi dengan Kreditur (+) Pihak Ketiga dari Kreditur.	Diisi dengan Tanggal Pencairan Utang Jangka Pendek Lainnya, format yyyyymmdd.	Diisi dengan Tanggal Jatuh Tempo Utang Jangka Pendek Lainnya, format yyyyymmdd.	Diisi dengan Keterangan (Tujuan Penggunaan) Utang Jangka Pendek Lainnya.
2	Total		Total Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya pada Pihak Berelasi dengan Kreditur merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada Pihak Berelasi.	Total Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya pada Pihak Ketiga merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada Pihak Ketiga.	Total Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan penjumlahan dari semua Jumlah Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya.			

22. Rincian Utang Jangka Panjang Lainnya

No	Uraian	Nama Kreditur	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah Utang Jangka Panjang Lainnya	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Utang Jangka Panjang Lainnya baris ke-1							
2	Rincian Utang Jangka Panjang Lainnya baris ke-2							
3, dst	Rincian Utang Jangka Panjang Lainnya baris ke-3 dan seterusnya							
	Total							

Detail Pengisian:

No	Uraian	Nama Kreditur	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah Utang Jangka Panjang Lainnya	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Utang Jangka Panjang Lainnya	Diisi dengan Nama Kreditur Utang Jangka Panjang Lainnya.	Diisi dengan nilai Utang Jangka Panjang Lainnya pada Pihak Berelasi dengan Kreditur.	Diisi dengan nilai Utang Jangka Panjang Lainnya pada Pihak	Jumlah Utang Jangka Panjang Lainnya = nilai Utang Jangka Panjang	Diisi dengan Tanggal Pencairan Utang Jangka Panjang Lainnya, format yyyyymmdd.	Diisi dengan Tanggal Jatuh Tempo Utang Jangka Panjang Lainnya, format yyyyymmdd.	Diisi dengan Keterangan (Tujuan Penggunaan) Utang Jangka Panjang Lainnya.

No	Uraian	Nama Kreditur	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah Utang Jangka Panjang Lainnya	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
				Ketiga dari Kreditur.	Lainnya pada Pihak Berelasi dengan Kreditur (+) Pihak Ketiga dari Kreditur.			
2	Total		Total Nilai Utang Jangka Panjang Lainnya pada Pihak Berelasi dengan Kreditur merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Utang Jangka Panjang Lainnya pada Pihak Berelasi.	Total Nilai Utang Jangka Panjang Lainnya pada Pihak Ketiga dari Kreditur merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Utang Jangka Panjang Lainnya	Total Jumlah Utang Jangka Panjang Lainnya merupakan penjumlahan dari semua Jumlah Rincian Utang Jangka Panjang Lainnya.			

No	Uraian	Nama Kreditur	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah Utang Jangka Panjang Lainnya	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
				pada Pihak Ketiga.				

23. Rincian Biaya yang masih harus dibayar

No	Uraian	Jumlah Biaya	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Nama Pihak Berelasi/Pihak Ketiga baris ke-1			
2	Rincian Nama Pihak Berelasi/Pihak Ketiga baris ke-2			
3, dst	Rincian Nama Pihak Berelasi/Pihak Ketiga baris ke-3 dan seterusnya			
	Total			

Detail Pengisian:

No	Uraian	Jumlah Biaya	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Nama Pihak Berelasi/Pihak Ketiga	Diisi dengan nilai jumlah biaya pada rincian nama pihak berelasi/pihak ketiga pada rincian Biaya yang masih harus dibayar selama bulan periode pelaporan.	Diisi dengan Tanggal Jatuh Tempo Biaya yang masih harus dibayar, format yyyyymmdd.	Diisi dengan Keterangan (Tujuan Pengguna) Biaya yang masih harus dibayar.
2	Total	Total Nilai Biaya yang masih harus dibayar pada kolom Saldo Awal merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Biaya		

No	Uraian	Jumlah Biaya	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
		yang masih harus dibayar pada kolom Jumlah Biaya.		

24. Rincian Pendapatan Komisi *Platform*

No	Uraian	Total Komisi	Komisi Sudah Diakui	Komisi Belum Diakui	Keterangan
1	Pendapatan Komisi <i>Platform</i>				

Detail Pengisian:

No	Uraian	Total Komisi	Komisi Sudah Diakui	Komisi Belum Diakui	Keterangan
1	Pendapatan Komisi <i>Platform</i>	Diisi dengan nilai jumlah pendapatan komisi <i>Platform</i> selama bulan periode pelaporan (baik yang sudah diakui dan belum diakui dalam pencatatan). Total Komisi = Komisi Sudah Diakui + Komisi Belum Diakui	Diisi dengan nilai jumlah pengakuan pendapatan komisi <i>Platform</i> yang telah diakui dalam pencatatan selama bulan periode pelaporan.	Diisi dengan nilai jumlah pengakuan pendapatan komisi <i>Platform</i> yang belum diakui dalam pencatatan selama bulan periode pelaporan.	Diisi dengan Keterangan Pendapatan Komisi <i>Platform</i> .

25. Rincian Pendapatan Denda

No	Uraian	Total Denda	Komisi Denda Sudah Diakui	Komisi Denda Belum Diakui	Keterangan
1	Pendapatan Denda				

Detail Pengisian:

No	Uraian	Total Komisi	Komisi Sudah Diakui	Komisi Belum Diakui	Keterangan
1	Pendapatan Denda	Diisi dengan nilai jumlah pendapatan denda selama bulan periode pelaporan (baik yang sudah diakui dan belum diakui dalam pencatatan). Total Pendapatan Denda = Komisi Denda Sudah Diakui + Komisi Denda Belum Diakui	Diisi dengan nilai jumlah pengakuan pendapatan denda yang telah diakui dalam pencatatan selama bulan periode pelaporan.	Diisi dengan nilai jumlah pengakuan pendapatan denda yang belum diakui dalam pencatatan selama bulan periode pelaporan.	Diisi dengan Keterangan Pendapatan Denda.

26. Uraian Pendapatan Non Operasional

No	Uraian	Jumlah	Keterangan (Sumber Aktivitas Pendapatan)
1	Nama Pendapatan ke-1		
2	Nama Pendapatan ke-2		
3	Nama Pendapatan ke-3		
	Total		

Detail Pengisian:

No	Uraian	Jumlah	Keterangan (Sumber Aktivitas Pendapatan)
1	Diisi nama Pendapatan Non Operasional	Diisi dengan nilai jumlah pendapatan pada rincian Pendapatan Non Operasional selama bulan periode Pelaporan (termasuk pendapatan bunga apabila ada).	Diisi dengan Keterangan (Sumber Aktivitas Pendapatan) Pendapatan Non Operasional.
2	Total	Total Nilai Pendapatan Non Operasional pada kolom Jumlah merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Pendapatan Non Operasional.	

27. Rincian Beban Pemasaran dan Periklanan

No	Uraian	Nama Pihak Berelasi/Pihak Ketiga	Jumlah	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Beban Pemasaran dan Periklanan baris ke-1			
2	Rincian Beban Pemasaran dan Periklanan baris ke-2			
3, dst	Rincian Beban Pemasaran dan Periklanan baris ke-3 dan seterusnya			
	Total			

Detail Pengisian:

No	Uraian	Nama Pihak Berelasi/Pihak Ketiga	Jumlah	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Beban Pemasaran dan Periklanan	Diisi dengan Nama Pihak Berelasi/Pihak Ketiga atas transaksi Beban Pemasaran dan Periklanan	Diisi Nilai Beban Pemasaran dan Periklanan.	Diisi dengan Keterangan (Tujuan Penggunaan) Beban Pemasaran dan Periklanan.
2	Total		Total Jumlah Beban Pemasaran dan Periklanan merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Beban Pemasaran dan Periklanan.	

28. Rincian Beban Pengembangan dan Pemeliharaan IT

No	Uraian	Jumlah	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Beban Pengembangan dan Pemeliharaan IT baris ke-1		
2	Rincian Beban Pengembangan dan Pemeliharaan IT baris ke-2		
3, dst	Rincian Beban Pengembangan dan Pemeliharaan IT baris ke-3 dan seterusnya		
	Total		

Detail Pengisian:

No	Uraian	Jumlah	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Diisi dengan Nama Beban Pengembangan dan Pemeliharaan IT.	Diisi Nilai Beban Pengembangan dan Pemeliharaan.	Diisi dengan Keterangan (Tujuan Penggunaan) Beban Pengembangan dan Pemeliharaan.
2	Total	Total Jumlah Beban Pengembangan dan Pemeliharaan IT merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Beban Pengembangan dan Pemeliharaan IT.	

29. Rincian Laporan Arus Kas

No	Uraian	Keterangan	Jumlah
1.	A. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi		
2.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi ke -1		
3.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi ke -2		
4.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi ke -3		
5.	Total Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi		
6.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi ke -1		
7.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi ke -2		
8.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi ke -3		
9.	Total Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi		
10.	B. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi		
11.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi ke -1		
12.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi ke -2		
13.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi ke -3		

No	Uraian	Keterangan	Jumlah
14.	Total Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi		
15.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi ke -1		
16.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi ke -2		
17.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi ke -3		
18.	Total Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi		
19.	C. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pembiayaan		
20.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan ke -1		
21.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan ke -2		
22.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan ke -3		
23.	Total Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan		
24.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan ke -1		
25.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan ke -2		
26.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan ke -3		
27.	Total Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan		
28.	D. Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas		
29.	Rincian Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas ke-1		
30.	Rincian Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas ke-2		
31.	Rincian Kenaikan (Penurunan) dari		

No	Uraian	Keterangan	Jumlah
	Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas ke-3, dan seterusnya		
32.	Total Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas		

Detail Pengisian:

No	Uraian	Keterangan	Jumlah
1.	A. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi		Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi = Total Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi (-) Total Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi.
2.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi ke-1	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi ke-1	Diisi dengan nilai dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi ke-1
3.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi ke-2	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi ke-2	Diisi dengan nilai dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi ke-2
4.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi ke-3, dst	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi ke-3, dst.	Diisi dengan nilai dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi ke-3, dst.
5.	Total Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi		Total Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi merupakan penjumlahan dari Nilai Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi.
6.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi ke -1	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Operasi ke-1	Diisi dengan nilai dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Operasi ke-1
7.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi ke -2	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Operasi ke-2	Diisi dengan nilai dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Operasi ke-2
8.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi ke -3, dst	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Operasi ke-1, dst.	Diisi dengan nilai dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Operasi ke-3, dst.

No	Uraian	Keterangan	Jumlah
9.	Total Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi		Total Arus Kas Keluar dari Kegiatan Operasi merupakan penjumlahan dari Nilai Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Operasi.
10.	B. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi		Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi = Total Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi (-) Total Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi
11.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi ke - 1	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi ke-1	Diisi dengan nilai dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi ke-1
12.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi ke - 2	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi ke-2	Diisi dengan nilai dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi ke-2
13.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi ke-3, dst	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi ke-3, dst.	Diisi dengan nilai dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi ke-3, dst.
14.	Total Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi		Total Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi merupakan penjumlahan dari Nilai Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi
15.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi ke - 1	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Investasi ke-1	Diisi dengan nilai dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Investasi ke-1
16.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi ke - 2	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Investasi ke-2	Diisi dengan nilai dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Investasi ke-2
17.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi ke - 3, dst	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Investasi ke-3, dst.	Diisi dengan nilai dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Investasi ke-3, dst.
18.	Total Arus Kas Keluar untuk		Total Arus Kas Keluar dari Kegiatan Investasi merupakan penjumlahan

No	Uraian	Keterangan	Jumlah
	Kegiatan Investasi		dari Nilai Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Investasi
19.	C. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pembiayaan		Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pembiayaan = Total Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan (-) Total Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pembiayaan
20.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan ke -1	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan ke-1	Diisi dengan nilai dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan ke-1
21.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan ke -2	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan ke-2	Diisi dengan nilai dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan ke-2
22.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan ke -3, dst	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan ke-3, dst.	Diisi dengan nilai dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan ke-3, dst.
23.	Total Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan		Total Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan merupakan penjumlahan dari Nilai Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan
24.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan ke -1	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pembiayaan ke-1	Diisi dengan nilai dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pembiayaan ke-1
25.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan ke -2	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pembiayaan ke-2	Diisi dengan nilai dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pembiayaan ke-2
26.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan ke -3, dst	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pembiayaan ke-3, dst.	Diisi dengan nilai dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pembiayaan ke-3, dst
27.	Total Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan		Total Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pembiayaan merupakan penjumlahan dari Nilai Rincian Arus Kas

No	Uraian	Keterangan	Jumlah
			Keluar dari Kegiatan Pembiayaan
28.	D. Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas		
29.	Rincian Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas ke-1	Diisi dengan nama akun dari Rincian Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas ke-1	Diisi dengan nilai Rincian Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas ke-1
30.	Rincian Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas ke-2	Diisi dengan nama akun dari Rincian Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas ke-2	Diisi dengan nilai Rincian Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas ke-2
31.	Rincian Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas ke-3	Diisi dengan nama akun dari Rincian Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas ke-3, dst	Diisi dengan nilai Rincian Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas ke-3, dst
Komponen ini dapat diinput lebih dari 3 baris data dengan memasukkan kode komponen yang sama.			
32.	Total Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas		Total Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas merupakan penjumlahan dari Nilai Rincian Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas

30. Rincian Pendanaan yang Dihapus Buku dan Dihapus Tagih

No	Uraian	Nama <i>Lender</i>	Nomor Dokumen Persetujuan Hapus Buku dan Hapus Tagih	Tanggal Persetujuan Hapus Buku dan Hapus Tagih	Jumlah <i>Borrower</i> yang Hapus Buku dan Hapus Tagih (satuan Akun)	Jumlah yang di Hapus Buku dan Hapus Tagih
1	Rincian Pendanaan yang Dihapus Buku dan Dihapus Tagih ke-1					
2	Rincian Pendanaan yang Dihapus Buku dan Dihapus Tagih ke-2					
3, dst	Rincian Pendanaan yang Dihapus Buku dan Dihapus Tagih ke-3					
	Total					

Detail Pengisian:

No	Uraian	Nama <i>Lender</i>	Nomor Dokumen Persetujuan Hapus Buku dan Hapus Tagih	Tanggal Persetujuan Hapus Buku dan Hapus Tagih	Jumlah <i>Borrower</i> yang Hapus Buku dan Hapus Tagih (satuan akun)	Jumlah yang Dihapus Buku dan Hapus Tagih
1	Rincian Pendanaan yang di Hapus Buku dan Dihapus Tagih.	Diisi dengan Nama <i>Lender</i> Pendanaan yang Dihapus Buku dan Dihapus Tagih.	Diisi dengan Nomor Dokumen Persetujuan Hapus Buku dan Hapus Tagih.	Diisi dengan Tanggal Persetujuan Hapus Buku dan Hapus Tagih, dengan format yyymmdd.	Diisi dengan Jumlah <i>Borrower</i> yang Hapus Buku dan Hapus Tagih dalam satuan akun.	Diisi dengan Jumlah yang Dihapus Buku dan Hapus Tagih.

No	Uraian	Nama <i>Lender</i>	Nomor Dokumen Persetujuan Hapus Buku dan Hapus Tagih	Tanggal Persetujuan Hapus Buku dan Hapus Tagih	Jumlah <i>Borrower</i> yang Hapus Buku dan Hapus Tagih (satuan akun)	Jumlah yang Dihapus Buku dan Hapus Tagih
2	Total				Total Jumlah <i>Borrower</i> yang Hapus Buku dan Hapus Tagih (satuan akun) merupakan penjumlahan dari semua rincian Jumlah <i>Borrower</i> yang Hapus Buku dan Hapus Tagih dalam satuan akun.	Total Jumlah yang Dihapus Buku dan Hapus Tagih merupakan penjumlahan dari semua Jumlah yang Dihapus Buku dan Hapus Tagih.

31. Rincian Penggunaan Asuransi/Penjaminan

No	Uraian	Nama Produk Asuransi/Penjaminan	Nama Pihak Penyedia Asuransi/Penjaminan	Jumlah Transaksi Pendanaan yang disalurkan pada bulan tersebut	Jumlah Nominal Transaksi Pendanaan yang disalurkan pada bulan tersebut
1	Rincian Penggunaan Asuransi/Penjaminan baris ke-1				

No	Uraian	Nama Produk Asuransi/Penjaminan	Nama Pihak Penyedia Asuransi/Penjaminan	Jumlah Transaksi Pendanaan yang disalurkan pada bulan tersebut	Jumlah Nominal Transaksi Pendanaan yang disalurkan pada bulan tersebut
2	Rincian Penggunaan Asuransi/Penjaminan baris ke-2				

No	Uraian (Lanjutan)	Jumlah Transaksi Pendanaan yang outstanding	Jumlah Nominal Transaksi Pendanaan yang outstanding	Jumlah premi yang dibayarkan pada bulan berjalan	Jumlah polis yang sudah diklaim pada bulan berjalan	Keterangan
1	Rincian Penggunaan Asuransi/Penjaminan baris ke-1					
2	Rincian Penggunaan Asuransi/Penjaminan baris ke-2					

Detail Pengisian:

No	Uraian	Nama Produk Asuransi/Penjaminan	Nama Pihak Penyedia Asuransi/Penjaminan
1	Diisi dengan Rincian Penggunaan Asuransi/Penjaminan baris 1 s.d. selesai	Diisi dengan nama produk asuransi/penjaminan yang digunakan untuk aktivitas pendanaan LPBBTI.	Diisi dengan nama pihak penyedia asuransi/penjaminan yang digunakan untuk aktivitas pendanaan LPBBTI.

No	Jumlah Transaksi Pendanaan yang disalurkan pada bulan tersebut	Jumlah Nominal Transaksi Pendanaan yang disalurkan pada bulan tersebut	Jumlah Transaksi Pendanaan yang outstanding	Jumlah Nominal Transaksi Pendanaan yang outstanding
2 (Lanjutan)	Diisi dengan jumlah transaksi pendanaan yang disalurkan (<i>disbursement</i>) hanya pada bulan pelaporan.	Diisi dengan jumlah nominal pendanaan yang disalurkan (<i>disbursement</i>) hanya pada bulan pelaporan.	Diisi dengan jumlah transaksi pendanaan yang <i>outstanding</i> per bulan pelaporan.	Diisi dengan jumlah nominal pendanaan yang <i>outstanding</i> per bulan pelaporan.

No	Jumlah premi yang dibayarkan pada bulan berjalan	Jumlah polis yang sudah diklaim pada bulan berjalan	Keterangan
3 (Lanjutan)	Diisi dengan jumlah premi yang dibayarkan pada bulan pelaporan.	Diisi dengan jumlah polis yang sudah diklaim pada bulan pelaporan.	Diisi dengan Keterangan Penggunaan Asuransi/Penjaminan.

32. Rincian Pengalihan Kuasa Penagihan Kepada Penyelenggara Jasa Penagihan Pihak Ketiga

No	Uraian	Nama Pihak Ketiga	Tanggal Pengalihan	Jumlah <i>Borrower</i> yang Dialihkan (Satuan Akun)	Nominal Pendanaan yang Dialihkan
1	Rincian Pendanaan ke-1 yang kuasa penagihannya dialihkan kepada penyelenggara jasa penagihan pihak ketiga				
2	Rincian Pendanaan ke-2 yang kuasa penagihannya dialihkan kepada penyelenggara jasa penagihan pihak ketiga				
3, dst	Rincian Pendanaan ke-3 yang kuasa penagihannya dialihkan kepada penyelenggara jasa penagihan pihak ketiga				
	Total				

Detail Pengisian:

No	Uraian	Nama Pihak Ketiga	Tanggal Pengalihan	Jumlah <i>Borrower</i> yang Dialihkan (Satuan Akun)	Nominal Pendanaan yang Dialihkan
1	Rincian Pengalihan Kuasa Penagihan Kepada Penyelenggara Jasa Penagihan Pihak Ketiga.	Diisi dengan Nama Pihak Ketiga Penyelenggara Jasa Penagihan.	Diisi dengan Tanggal Pengalihan Kuasa Penagihan kepada Penyelenggara Jasa Penagihan Pihak Ketiga, dengan format yyymmdd.	Diisi dengan Jumlah <i>Borrower</i> yang dialihkan Dialihkan penagihannya kepada Penyelenggara Jasa Penagihan Pihak Ketiga dalam satuan akun.	Diisi dengan nilai Nominal Pendanaan yang Dialihkan Dialihkan penagihannya kepada Penyelenggara Jasa Penagihan Pihak Ketiga.
2	Total			Total Jumlah <i>Borrower</i> Yang Dialihkan (satuan akun) merupakan penjumlahan dari semua Jumlah <i>Borrower</i> yang Dialihkan dalam satuan akun.	Total Nominal Pendanaan yang Dialihkan merupakan penjumlahan dari semua Nilai Nominal Pendanaan yang Dialihkan.

33. Rincian Pendanaan Outstanding

No	Uraian	IJK/non IJK	Afiliasi/non Afiliasi	Jumlah <i>Borrower</i> yang Menerima Pendanaan (satuan Akun)	Nominal Outstanding Pendanaan
1	Rincian Pendanaan ke-1				
2	Rincian Pendanaan ke-2				
3, dst	Rincian Pendanaan ke-3, dst.				
	Total				

Detail Pengisian:

No	Uraian	IJK/non IJK	Afiliasi/non Afiliasi	Jumlah <i>Borrower</i> yang Menerima Pendanaan (satuan Akun)	Nominal Outstanding Pendanaan
1	Diisi dengan Nama Perusahaan Pemberi Pendanaan.		Diisi dengan Nomor Kontrak Pendanaan.	Diisi dengan Jumlah <i>Borrower</i> yang Menerima Pendanaan dalam satuan akun.	Diisi dengan nilai Nominal Outstanding Pendanaan.
2	Total			Total Jumlah <i>Borrower</i> yang Menerima Pendanaan (satuan akun) merupakan penjumlahan dari semua Jumlah <i>Borrower</i> yang Menerima Pendanaan dalam satuan akun.	Total Nominal Outstanding Pendanaan merupakan penjumlahan dari semua nilai Nominal Outstanding Pendanaan.

B. Laporan Tahunan

1. Profil Perusahaan

No	Uraian	Informasi Umum
1	Nama Perusahaan	
2	Nama <i>Platform</i>	
3	Alamat <i>Website</i>	
4	<i>Mobile Platform</i> (ada atau tidak ada)	
5	Nama <i>Mobile Platform</i>	
6	Bulan dan Tahun mulai beroperasi	
7	Tanggal Terdaftar	
8	Tanggal Berizin	
9	Nama Direktur Utama	
10	Nomor HP Direktur Utama	
11	Email Direktur Utama	
12	Nama <i>Contact Person</i>	
13	Jabatan <i>Contact Person</i>	
14	Nomor HP <i>Contact Person</i>	
15	Email <i>Contact Person</i>	
16	Alamat Kantor	
17	DATI I (Provinsi)	
18	DATI II (Kabupaten/Kotamadya)	
19	Telepon Kantor	
20	TKB 90 (dalam %)	
21	Nilai Pendanaan <i>Outstanding</i>	
22	Nama Produk Layanan Pendanaan	
23	Jumlah Tenaga Kerja Pria	
24	Jumlah Tenaga Kerja Wanita	
25	Jumlah Kantor Cabang	
26	Nama Kantor Akuntan Publik	
27	Nama Akuntan Publik	
28	Opini Akuntan Publik	

Petunjuk Pengisian:

No	Uraian / Nama Komponen	Details Pengisian (Informasi Umum)
1	Nama Perusahaan	Diisi dengan Nama Perusahaan Penyelenggara
2	Nama <i>Platform</i>	Diisi dengan Nama <i>Platform</i> Penyelenggara
3	Alamat <i>Website</i>	Diisi dengan Alamat <i>Website</i> Penyelenggara

4	<i>Mobile Platform</i> (ada atau tidak ada)	Ada / Tidak <i>Mobile Platform</i> Penyelenggara. Input berupa angka (jika ada: 1; tidak ada: 0)
5	Nama <i>Mobile Platform</i>	Jika pada komponen <i>Mobile Platform</i> diisi 1(ada), maka wajib isi komponen dengan Nama <i>Mobile Platform</i> Penyelenggara
6	Bulan dan Tahun mulai beroperasi	Diisi dengan Bulan Tahun beroperasi (format isi: <i>yyyymmDD</i>)
7	Tanggal Terdaftar	Diisi dengan Tanggal terdaftar (format isi: <i>yyyymmDD</i>)
8	Tanggal Berizin	Diisi dengan Tanggal Berizin (format isi: <i>yyyymmDD</i>)
9	Nama Direktur Utama	Diisi dengan Nama Direktur Utama Penyelenggara
10	Nomor HP Direktur Utama	Diisi dengan Nomor HP Direktur Utama Penyelenggara (format isi berupa angka, contoh: 628123456789)
11	Email Direktur Utama	Diisi dengan email Direktur Utama Penyelenggara (format isi email, contoh: <i>xxxx@xxx.com</i>)
12	Nama <i>Contact Person</i>	Diisi dengan Nama <i>Contact Person</i> Penyelenggara yang membidangi pelaporan
13	Jabatan <i>Contact Person</i>	Diisi dengan Jabatan <i>Contact Person</i> Penyelenggara yang membidangi pelaporan
14	Nomor HP <i>Contact Person</i>	Diisi dengan Nomor HP <i>Contact Person</i> yang membidangi pelaporan (format isi berupa angka, contoh: 628123456789)
15	Email <i>Contact Person</i>	Diisi dengan email <i>Contact Person</i> Penyelenggara yang membidangi pelaporan (format isi email, contoh: <i>xxxx@xxx.com</i>)
16	Alamat Kantor	Diisi dengan Alamat Kantor Penyelenggara
17	DATI I (Provinsi)	Diisi dengan kode sandi DATI I (Provinsi) yang terdaftar pada tabel referensi
18	DATI II (Kabupaten/Kotamadya)	Diisi dengan kode sandi DATI II (Kabupaten/Kotamadya) yang terdaftar pada tabel referensi.
19	Telepon Kantor	Diisi dengan No. Telepon Kantor Penyelenggara (format diisi dengan angka dan char “(-)”, contoh: (021)-1234567)
20	TKB 90 (dalam %)	Diisi dengan Tingkat Keberhasilan Bayar 90 hari setelah jatuh tempo, nilai yang diinput terbaca dalam persen dengan format decimal 2 angka dibelakang koma, contoh: 75,00)
21	Nilai Pendanaan <i>Outstanding</i>	Diisi dengan nilai outstanding Pendanaan dalam satuan Rupiah
22	Nama Produk Layanan Pendanaan	Diisi dengan Nama Produk Layanan Pendanaan Penyelenggara

23	Jumlah Tenaga Kerja Pria	Diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Pria (format isi berupa angka)
24	Jumlah Tenaga Kerja Wanita	Diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Wanita (format isi berupa angka)
25	Jumlah Kantor Cabang	Diisi dengan jumlah Kantor Cabang/Kantor Selain Kantor Pusat (format isi berupa angka)
26	Nama Kantor Akuntan Publik	Diisi dengan Nama Kantor Akuntan Publik Penyelenggara
27	Nama Akuntan Publik	Diisi dengan Nama Akuntan Publik Penyelenggara
28	Opini Akuntan Publik	Diisi dengan Opini Akuntan Publik Penyelenggara

2. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan merupakan laporan Keuangan yang menggambarkan posisi keuangan Penyelenggara yaitu Aset, Liabilitas, dan Ekuitas pada akhir periode laporan. Mata uang pelaporan adalah Rupiah. Nilai akun pada Laporan Posisi Keuangan Tahunan diisi dalam satuan Rupiah untuk posisi per akhir periode laporan.

No.	Informasi	Nominal
1	Aset	
2	Aset Lancar	
3	Kas dan Setara Kas	
4	Piutang Usaha	
5	Pihak Berelasi	
6	Pihak Ketiga	
7	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	
8	Pajak dibayar di muka	
9	Biaya dibayar di muka	
10	Uang Jaminan/Deposit	
11	Investasi Jangka Pendek	
12	Piutang Lancar Lainnya	
13	Pihak Berelasi	
14	Pihak Ketiga	
15	Aset Lancar Lainnya	
16	Jumlah Aset Lancar	
17	Aset Tidak Lancar	
18	Aset Takberwujud	
19	Akumulasi Amortisasi	
20	Gedung, Tanah dan Peralatan	
21	Akumulasi Penyusutan	
22	Investasi Jangka Panjang	
23	Aset Pajak Tangguhan	
24	Piutang Tidak Lancar Lainnya	
25	Pihak Berelasi	
26	Pihak Ketiga	
27	Aset Tidak Lancar Lainnya	
28	Jumlah Aset Tidak Lancar	
29	Jumlah Aset	
30	Liabilitas	
31	Liabilitas Jangka Pendek	
32	Pendapatan Diterima Di Muka	

No.	Informasi	Nominal
33	Utang Usaha - Pihak Ketiga	
34	Utang Jangka Pendek lainnya	
35	Pihak Berelasi	
36	Pihak Ketiga	
37	Utang Pajak	
38	Beban yang masih harus dibayar	
39	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	
40	Liabilitas Jangka Panjang	
41	Utang Jangka Panjang Lainnya	
42	Pihak Berelasi	
43	Pihak Ketiga	
44	Liabilitas imbalan pasca kerja	
45	Liabilitas Sewa	
46	Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	
47	Jumlah Liabilitas	
48	Ekuitas	
49	Modal Saham	
50	Tambahan Modal Disetor	
51	Uang Muka Setoran Modal	
52	Laba (Rugi) Ditahan	
53	Laba (Rugi) Periode Berjalan	
54	Kepentingan Non-Pengendali	
55	Ekuitas Lainnya	
56	Jumlah Ekuitas	
57	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	

Petunjuk Pengisian:

No	Informasi	Keterangan
1	Aset	
2	Aset Lancar	Aset Lancar adalah aset yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonominya melalui penjualan atau pemakaian, dalam kurun waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan
3	Kas dan Setara Kas	Kas antara lain terdiri atas kas rupiah dan valuta asing, giro pada bank, dan <i>deposit on call</i> . Kas juga dapat berupa saldo rupiah atau valuta asing pada <i>e-wallet</i> milik Penyelenggara LPBBTI yang telah menjadi hak perusahaan untuk penggunaannya. Kas juga termasuk saldus rupiah pada <i>escrow account</i> Penyelenggara LPBBTI yang telah menjadi hak Penyelenggara untuk penggunaannya. Setara kas antara lain terdiri dari deposito dengan jangka waktu tiga bulan, meliputi <i>deposit on call</i> , deposito berjangka dan sertifikat deposito yang berjangka waktu maksimal 3 bulan (walaupun deposito tersebut <i>automatic roll over</i>).
4	Piutang Usaha	Piutang usaha adalah hak perusahaan untuk menagih kepada pihak lain dalam bentuk

No	Informasi	Keterangan
		uang yang timbul dari transaksi usaha LPBBTI.
5	Pihak Berelasi	Diisi dengan nilai Piutang Usaha kepada orang atau perusahaan yang terkait dengan Penyelenggara.
6	Pihak Ketiga	Diisi dengan nilai Piutang Usaha kepada pihak selain pihak berelasi atau yang tidak ada hubungannya dengan Penyelenggara.
7	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai dari piutang usaha berdasarkan data historis dan potensi gagal bayar pelanggan di masa depan dengan menambah simbol negatif (-) di depan angka nominal.
8	Pajak dibayar di muka	Diisi dengan nilai Pajak Dibayar Di Muka pada posisi Tahun Laporan.
9	Biaya dibayar di muka	Diisi dengan nilai pembayaran yang dilakukan oleh Penyelenggara kepada pihak ketiga namun manfaatnya belum dinikmati seluruhnya dalam satu periode pelaporan pada posisi Tahun Laporan.
10	Utang Jaminan/Deposit	Diisi dengan nilai yang dipakai sebagai jaminan atas transaksi yang telah disepakati dengan pihak ketiga sampai batas waktu yang telah ditentukan. Uang jaminan termasuk dalam aset karena suatu saat akan dapat ditagih kembali ke perusahaan apabila syarat pengembalian terpenuhi.
11	Investasi Jangka Pendek	Diisi dengan nilai Investasi Jangka Pendek yang dilakukan oleh Penyelenggara pada posisi Tahun Laporan.
12	Piutang Lancar Lainnya	Piutang Lancar Lainnya merupakan piutang lancar Penyelenggara yang belum diungkapkan dalam akun tersendiri. Nilai ini sama dengan nilai Piutang Lancar Lainnya Pihak Berelasi ditambah Piutang Lancar Lainnya Pihak Ketiga.
13	Pihak Berelasi	Diisi dengan nilai Piutang Lancar Lainnya kepada orang atau perusahaan yang terkait dengan Penyelenggara pada posisi Tahun Laporan.
14	Pihak Ketiga	Diisi dengan nilai Piutang Lancar Lainnya kepada pihak selain pihak berelasi atau yang tidak ada hubungannya dengan Penyelenggara pada posisi Tahun Laporan.
15	Aset Lancar Lainnya	Diisi dengan nilai Aset Lancar Lainnya yang belum diungkapkan dalam akun tersendiri pada posisi Tahun Laporan.
16	Jumlah Aset Lancar	Jumlah Aset Lancar = Kas dan Setara Kas (+) Pajak Dibayar Di Muka (+) Biaya Dibayar Di Muka (+) Investasi Jangka Pendek (+) Piutang Lancar Lainnya (+) Aset Lancar Lainnya

No	Informasi	Keterangan
17	Aset Tidak Lancar	Aset tidak lancar adalah aset yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi melalui pemakaian atau pelepasan, dalam kurun waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
18	Aset tidak Berwujud	Aset Tidak Berwujud antara lain berupa lisensi atas penggunaan perangkat lunak. Aset Tidak Berwujud diakui pada saat terjadinya beban untuk memperoleh aset tersebut sebesar biaya perolehan.
19	Akumulasi Amortisasi	Diisi dengan nilai Akumulasi Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud milik Penyelenggara dengan menambah simbol negatif (-) di depan angka nominal pada posisi Tahun Laporan.
20	Gedung, Tanah dan Peralatan	Diisi dengan nilai perolehan Gedung, Tanah dan Peralatan milik Penyelenggara pada posisi Tahun Laporan. Nilai ini diakui pertama kali sesuai dengan harga perolehannya.
21	Akumulasi Penyusutan	Diisi dengan nilai Akumulasi Penyusutan atas Gedung, Tanah dan Peralatan milik Penyelenggara pada posisi Tahun Laporan dengan menambah simbol negatif (-) di depan angka nominal pada posisi Tahun Laporan.
22	Investasi Jangka Panjang	Diisi dengan nilai Investasi Jangka Panjang yang dilakukan oleh Penyelenggara pada posisi Tahun Laporan.
23	Aset Pajak Tangguhan	Diisi dengan nilai Aset Pajak Tangguhan pada posisi Tahun Laporan.
24	Piutang Tidak Lancar Lainnya	Piutang Tidak Lancar Lainnya merupakan piutang tidak lancar Penyelenggara yang belum diungkapkan dalam akun tersendiri. Nilai ini sama dengan nilai Piutang Tidak Lancar Lainnya Pihak Berelasi ditambah Piutang Tidak Lancar Lainnya Pihak Ketiga.
25	Pihak Berelasi	Diisi dengan nilai Piutang Tidak Lancar Lainnya kepada orang atau Perusahaan yang terkait dengan Penyelenggara pada posisi Tahun Laporan.
26	Pihak Ketiga	Diisi dengan nilai Piutang Tidak Lancar Lainnya kepada pihak selain pihak berelasi atau yang tidak ada hubungannya dengan Penyelenggara pada posisi Tahun Laporan.
27	Aset Tidak Lancar Lainnya	Diisi dengan nilai Aset Tidak Lancar Lainnya yang belum diungkapkan dalam akun tersendiri pada posisi Tahun Laporan.
28	Jumlah Aset Tidak Lancar	Jumlah Aset Tidak Lancar = Aset Tidak Berwujud (+) (Akumulasi Amortisasi) (+) Gedung, Tanah dan Peralatan (+) (Akumulasi Penyusutan) (+) Investasi Jangka Panjang (+) Aset Pajak Tangguhan (+) Piutang Tidak Lancar Lainnya (+) Aset Tidak Lancar Lainnya.

No	Informasi	Keterangan
29	Jumlah Aset	Jumlah Aset = Jumlah Aset Lancar (+) Jumlah Aset Tidak Lancar.
30	Liabilitas	Liabilitas adalah kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi.
31	Liabilitas Jangka Pendek	
32	Pendapatan Diterima Di Muka	Diisi dengan nilai Pendapatan Diterima Di Muka pada posisi Tahun Laporan. Pendapatan ini timbul karena Penyelenggara telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut.
33	Utang Usaha - Pihak Ketiga	Diisi dengan nilai utang usaha yang meliputi antara lain liabilitas kepada pemasok untuk pengadaan peralatan, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Contoh: pengadaan server, utang kartu kredit, utang jasa <i>payment gateway</i> , atau utang kepada pihak ketiga dalam mendukung operasional yang sudah disepakati diawal untuk dibayarkan.
34	Utang Jangka Pendek lainnya	Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek Penyelenggara yang belum diungkapkan dalam akun tersendiri. Nilai ini sama dengan nilai Utang Jangka Pendek Lainnya Pihak Berelasi ditambah Utang Jangka Pendek Lainnya Lainnya Pihak Ketiga.
35	Pihak Berelasi	Diisi dengan nilai Utang Jangka Pendek Lainnya kepada orang atau Perusahaan yang terkait dengan Penyelenggara pada posisi Tahun Laporan.
36	Pihak Ketiga	Diisi dengan nilai Utang Jangka Pendek Lainnya kepada pihak selain pihak berelasi atau yang tidak ada hubungannya dengan Penyelenggara pada posisi Tahun Laporan.
37	Utang Pajak	Diisi dengan nilai pajak yang harus dibayar oleh Penyelenggara tetapi belum disetorkan ke kas negara berdasarkan ketentuan yang berlaku pada posisi Tahun Laporan. Utang pajak diakui pada saat terjadinya transaksi atau kejadian yang telah mewajibkan Penyelenggara untuk membayar atau menyetor pajak kepada negara.
38	Beban yang masih harus dibayar	Diisi dengan nilai beban yang masih harus dibayarkan, tetapi pembayarannya belum dilakukan sampai periode selanjutnya. Pada umumnya beban ini belum dibayar karena dokumen penagihan belum diterima atau akibat jatuh tempo pembayaran. Nilai ini

No	Informasi	Keterangan
		antara lain berupa beban langganan listrik, telepon, air, gas, internet kantor, dan lain lain serta beban yang sudah diterima manfaatnya dan belum dilunasi pada tanggal pelaporan, misalnya beban gaji dan tunjangan.
39	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek = Pendapatan Diterima Di Muka (+) Utang Usaha Pihak Ketiga (+) Utang Jangka Pendek Lainnya (+) Utang Pajak (+) Beban Akrual (+) Kewajiban Keuangan (+) Kewajiban Pajak Yang Ditangguhkan.
40	Liabilitas Jangka Panjang	
41	Utang Jangka Panjang Lainnya	Utang Jangka Panjang Lainnya merupakan utang jangka panjang Penyelenggara yang belum diungkapkan dalam akun tersendiri. Nilai ini sama dengan nilai Utang Jangka Panjang Lainnya Pihak Berelasi ditambah Utang Jangka Panjang Lainnya Lainnya Pihak Ketiga.
42	Pihak Berelasi	Diisi dengan nilai Utang Jangka Panjang lainnya kepada orang atau Perusahaan yang terkait dengan Penyelenggara pada posisi Tahun Laporan.
43	Pihak Ketiga	Diisi dengan nilai Utang Jangka Panjang lainnya kepada pihak selain pihak berelasi atau yang tidak ada hubungannya dengan Penyelenggara pada posisi Tahun Laporan.
44	Liabilitas imbalan pasca kerja	Diisi dengan nilai imbalan yang akan diterima oleh karyawan perusahaan setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pasca kerja meliputi tunjangan purna karya seperti pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya: asuransi jiwa pasca kerja, tunjangan kesehatan pasca kerja, tunjangan penghargaan, dan pesangon.
45	Liabilitas Sewa	Diisi dengan nilai pembayaran suatu kontrak yang merupakan atau mengandung sewa yang belum dibayar sampai pada tanggal pelaporan.
46	Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	Jumlah Liabilitas Jangka Panjang = Utang Jangka Panjang Lainnya (+) Liabilitas Imbalan Pasca Kerja.
47	Jumlah Liabilitas	Jumlah Liabilitas = Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (+) Jumlah Liabilitas Jangka Panjang.
48	Ekuitas	
49	Modal Saham	Diisi dengan nilai Modal Disetor oleh pemegang saham sesuai dengan nilai nominal sahamnya.
50	Tambahan Modal Disetor	Diisi dengan Tambahan Modal Disetor pada posisi Tahun Laporan antara lain terdiri dari agio saham, selisih transaksi saham treasury, selisih transaksi dengan entitas tidak

No	Informasi	Keterangan
		<p>sepengendali, dan selisih kombinasi dan pelepasan bisnis entitas sepengendalian. Agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.</p> <p>Selisih transaksi saham treasury merupakan selisih yang timbul dari perolehan dan pelepasan kembali atas saham yang diterbitkan perusahaan.</p> <p>Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali timbul dari transaksi pelepasan sebagian kepemilikan pada anak perusahaan tetapi tidak menyebabkan perusahaan kehilangan pengendalian atas anak perusahaan tersebut.</p> <p>Selisih kombinasi dan pelepasan bisnis entitas sepengendali timbul dari transaksi perolehan bisnis dari, atau pelepasan bisnis kepada, entitas sepengendali.</p>
51	Uang Muka Setoran Modal	Diisi dengan nilai penempatan dana oleh pemegang saham yang ditujukan untuk modal disetor dan akan/masih diproses persetujuan OJK.
52	Laba (Rugi) Ditahan	Diisi dengan nilai Laba (Rugi) Komprehensif yang belum didistribusikan periode sebelumnya pada posisi Tahun Laporan.
53	Laba (Rugi) Periode Berjalan	Diisi dengan nilai Laba (Rugi) Komprehensif yang belum didistribusikan periode berjalan pada posisi Tahun Laporan.
54	Kepentingan Non-Pengendali	Diisi dengan nilai Kepentingan Non-Pengendali pada posisi Tahun Laporan.
55	Ekuitas Lainnya	Diisi dengan komponen ekuitas lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain kepemilikan saham oleh karyawan atau employee stock option plan (ESOP).
56	Jumlah Ekuitas	Jumlah Ekuitas = Modal Disetor (+) Tambahan Modal Disetor (+) Laba (Rugi) Ditahan (+) Laba (Rugi) Periode Berjalan (+) Kepentingan Non-Pengendali.
57	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas = Jumlah Liabilitas (+) Jumlah Ekuitas.

3. Laporan Laba/Rugi

Laporan Laba/Rugi merupakan laporan keuangan yang menyajikan seluruh pos pendapatan dan beban yang diakui dalam suatu periode laporan. Mata uang pelaporan adalah Rupiah. Nilai akun pada Laporan Laba/Rugi Bulanan diisi dalam satuan Rupiah merupakan akumulasi Pendapatan atau Beban dari awal tahun laporan (1 Januari) hingga akhir periode laporan (akhir tahun laporan).

No.	Informasi	Nominal
1	Pendapatan Operasional	
2	Pendapatan atas Komisi/Ujrah	
3	Pendapatan atas Denda	

4	Jumlah Pendapatan Operasional	
5	Beban Operasional	
6	Beban atas Pendapatan	
7	Beban atas Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	
8	Beban Ketenagakerjaan	
9	Beban Peningkatan Kompetensi dan Keahlian SDM	
10	Beban Pemasaran dan Periklanan	
11	Beban Umum dan Administrasi	
12	Beban Pengembangan dan Pemeliharaan IT	
13	Beban penyusutan	
14	Beban Amortisasi	
15	Jumlah Beban Operasional	
16	Laba (Rugi) Operasional	
17	Pendapatan Non Operasional	
18	Pendapatan Bunga (Konvensional)/ Pendapatan Bagi Hasil (Syariah)	
19	Pendapatan Lainnya	
20	Jumlah Pendapatan Non Operasional	
21	Beban Non Operasional	
22	Beban Bunga (Konvensional)/ Distribusi Bagi Hasil (Syariah)	
23	Beban Administrasi Bank	
24	Laba (Rugi) Selisih Kurs	
25	Beban Lainnya	
26	Jumlah Beban Non Operasional	
27	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	
28	Beban Pajak	
29	Laba (Rugi) Setelah Pajak	
30	Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya	
31	Laba (Rugi) Komprehensif	

Petunjuk Pengisian:

No	Informasi	Keterangan
1	Pendapatan Operasional	
2	Pendapatan atas Komisi/Ujrah	Diisi dengan pendapatan dari arus masuk yang diterima oleh Penyelenggara LPBBTI karena telah mempertemukan antara penerima dana dan pemberi dana.
3	Pendapatan atas Denda	Diisi dengan nilai Pendapatan yang berasal dari Denda pada posisi Tahun Laporan.
4	Jumlah Pendapatan Operasional	Jumlah Pendapatan Operasional = Pendapatan atas Komisi/Ujrah (+) Pendapatan atas Denda.
5	Beban Operasional	
6	Beban atas Pendapatan	Diisi dengan biaya yang timbul berkaitan langsung atas penyediaan jasa Penyelenggara LPBBTI.

No	Informasi	Keterangan
7	Beban atas Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	Diisi dengan biaya yang muncul dari pembuatan penyisihan piutang yang tidak akan tertagih.
8	Beban Ketenagakerjaan	Diisi dengan nilai Beban Ketenagakerjaan pada posisi Tahun Laporan.
9	Beban Peningkatan Kompetensi dan Keahlian SDM	Diisi dengan nilai alokasi dari beban ketenagakerjaan (SDM) untuk peningkatan kompetensi dan keahlian SDM.
10	Beban Pemasaran dan Periklanan	Diisi dengan beban yang timbul dari kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran produk pada posisi Tahun Laporan.
11	Beban Umum dan Administrasi	Diisi dengan nilai beban yang muncul dari kegiatan kantor dan tidak berhubungan secara langsung dengan operasi utama perusahaan pada posisi Tahun Laporan.
12	Beban Pengembangan dan Pemeliharaan IT	Diisi dengan nilai beban pengembangan dan pemeliharaan IT.
13	Beban Penyusutan	Diisi dengan nilai Beban Penyusutan pada posisi Tahun Laporan.
14	Beban Amortisasi	Diisi dengan nilai Beban Amortisasi pada posisi Tahun Laporan.
15	Jumlah Beban Operasional	Jumlah Beban Operasional = Beban atas Pendapatan (+) Beban atas Penyisihan Piutang Ragu-Ragu (+) Beban Ketenagakerjaan (+) Beban Pemasaran dan Periklanan (+) Beban Umum dan Administrasi (+) Beban Pengembangan dan Pemeliharaan IT (+) Beban Penyusutan (+) Beban Amortisasi.
16	Laba (Rugi) Operasional	Laba (Rugi) Operasional = Jumlah Pendapatan Operasional (-) Jumlah Beban Operasional.
17	Pendapatan Non Operasional	
18	Pendapatan Bunga (Konvensional)/ Pendapatan Bagi Hasil (Syariah)	Konvensional: Diisi dengan nilai Pendapatan Bunga pada posisi Tahun Laporan. Syariah: Diisi dengan nilai Pendapatan Bagi Hasil pada posisi Tahun Laporan.
19	Pendapatan Lainnya	Diisi dengan nilai Pendapatan Lainnya yang belum diungkapkan dalam akun tersendiri pada posisi Tahun Laporan.
20	Jumlah Pendapatan Non Operasional	Jumlah Pendapatan Non Operasional = Pendapatan Bunga (Konvensional) atau Pendapatan Bagi Hasil (Syariah) (+) Pendapatan Lainnya
21	Beban Non Operasional	

No	Informasi	Keterangan
22	Beban Bunga (Konvensional)/ Distribusi Bagi Hasil (Syariah)	Konvensional: Diisi dengan nilai Beban Bunga pada posisi Tahun Laporan. Syariah: Diisi dengan nilai Distribusi Bagi Hasil pada posisi Tahun Laporan.
23	Beban Administrasi Bank	Diisi dengan nilai Beban Administrasi Bank pada posisi Tahun Laporan.
24	Laba (Rugi) Selisih Kurs	Diisi dengan nilai Laba (Rugi) dari Selisih Kurs pada posisi Tahun Laporan.
25	Beban Lainnya	Diisi dengan nilai Beban Lainnya yang belum disajikan dalam akun tersendiri pada posisi Tahun Laporan.
26	Jumlah Beban Non Operasional	Jumlah Beban Non Operasional = Beban Bunga (Konvensional) atau Distribusi Bagi Hasil (Syariah) (+) Beban Administrasi Bank (+) Laba (Rugi) Selisih Kurs (+) Beban Lainnya
27	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Laba (Rugi) Sebelum Pajak = Laba (Rugi) Operasional (+) Jumlah Pendapatan Non Operasional (-) Jumlah Beban Non Operasional.
28	Beban Pajak	Diisi dengan jumlah pajak terutang dari penghasilan kena pajak pada posisi Tahun Berjalan. Beban Pajak diakui dalam laporan laba rugi sebesar penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif PPh Badan yang berlaku.
29	Laba (Rugi) Setelah Pajak	Laba (Rugi) Setelah Pajak = Laba (Rugi) Sebelum Pajak (-) Beban Pajak
30	Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya	Diisi dengan nilai Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya pada posisi Tahun Laporan.
31	Laba (Rugi) Komprehensif	Laba (Rugi) Komprehensif = Laba (Rugi) Setelah Pajak (+) Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan ekuitas yang terjadi selama periode laporan. Mata uang pelaporan adalah Rupiah. Nilai akun pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahunan diisi dalam satuan Rupiah untuk posisi dari awal tahun hingga akhir periode laporan.

No.	Informasi	Nominal
1	Saldo Ekuitas Awal Periode	
2	Penambahan (Pengurangan) Ekuitas	
3	Tambahan modal selama periode berjalan	
4	Laba (Rugi) Komprehensif periode berjalan	
5	Transaksi Lainnya yang menyebabkan perubahan kepemilikan	
6	Dividen	
7	Saldo Ekuitas Akhir Periode	

Petunjuk Pengisian:

No	Informasi	Keterangan
1	Saldo Ekuitas Awal Periode	Diisi dengan nilai Saldo Ekuitas Awal Periode pada posisi Tahun Laporan.
2	Penambahan (Pengurangan) Ekuitas	
3	Tambahan Modal Selama Periode Berjalan	Diisi dengan nilai Tambahan Modal Selama Periode Berjalan pada posisi Tahun Laporan.
4	Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	Diisi dengan nilai Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan dari Laporan Laba/Rugi.
5	Transaksi Lainnya Yang Menyebabkan Perubahan Kepemilikan	Diisi dengan nilai Transaksi Lainnya Yang Menyebabkan Perubahan Kepemilikan pada posisi Tahun Laporan. Apabila transaksi tersebut bersifat mengurangi ekuitas, maka diberikan simbol negatif (-) di depan angka nominal.
6	Dividen	Diisi dengan nilai Dividen pada posisi Tahun Laporan.
7	Saldo Ekuitas Akhir Periode	Saldo Ekuitas Akhir Periode = Saldo Ekuitas Awal Periode (+) Tambahan Modal Selama Periode Berjalan (+) Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan (+) Transaksi Lainnya Yang Menyebabkan Perubahan Kepemilikan (-) Dividen.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam aktivitas Penyelenggara selama periode pelaporan dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan/pembiayaan. Mata uang pelaporan adalah Rupiah. Nilai akun pada Laporan Arus Kas Tahunan diisi dalam satuan Rupiah untuk posisi dari awal hingga akhir tahun laporan.

No.	Informasi	Nominal
1	A. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi	
2	1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi	
3	2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi	
4	B. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi	
5	1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi	
6	2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi	
7	C. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pembiayaan	

8	1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan	
9	2. Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pembiayaan	
10	D. Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas	
11	E. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	
12	F. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	
13	G. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	

Petunjuk Pengisian:

No	Informasi	Keterangan
1	A. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi	Arus kas dari kegiatan operasi merupakan arus kas yang diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan Penyelenggara, oleh karena itu, arus kas ini pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba rugi. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi pada posisi Tahun Laporan = Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi (-) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi.
2	1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi	Diisi dengan nilai Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi pada posisi Tahun Laporan.
3	2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi	Diisi dengan nilai Arus Kas Keluar dari Kegiatan Operasi pada posisi Tahun Laporan.
4	B. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi	Arus kas dari kegiatan investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan perolehan dan/atau pelepasan sumber daya yang bertujuan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi pada posisi Tahun Laporan = Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi (-) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi.
5	1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi	Diisi dengan nilai Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi pada posisi Tahun Laporan.
6	2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi	Diisi dengan nilai Arus Kas Keluar dari Kegiatan Investasi pada posisi Tahun Laporan.

7	C. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pembiayaan	Arus kas dari kegiatan pembiayaan atau disebut juga sebagai arus kas dari kegiatan pendanaan merupakan arus kas yang timbul dari penerimaan dan pengeluaran kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas dan Pendanaan Penyelenggara. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pembiayaan pada tahun laporan = Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan (-) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan.
8	1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan	Diisi dengan nilai Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan pada posisi Tahun Laporan.
9	2. Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pembiayaan	Diisi dengan nilai Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pembiayaan pada posisi Tahun Laporan.
10	D. Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas	Diisi dengan nilai Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas pada posisi Tahun Laporan.
11	E. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas pada posisi Tahun Laporan = Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi (+) Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi (+) Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pembiayaan (+) Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas.
12	F. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	Diisi dengan nilai Kas dan Setara Kas pada Awal Periode posisi Tahun Laporan.
13	G. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode pada posisi Tahun Laporan = Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas (+) Kas dan Setara Kas pada Awal Periode.

6. Catatan atas Laporan Keuangan

PT XXX

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE YANG BERAKHIR PADA DD MM YYYY
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Diisi dengan catatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan berupa informasi tambahan untuk jumlah yang diungkapkan dalam laporan 'utama' kecuali yang telah diungkapkan pada formulir/ tabel pelaporan lainnya, termasuk diantaranya kebijakan akuntansi, estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting untuk diungkapkan, pengungkapan atas

modal dan instrumen keuangan lain yang dapat diklasifikasikan sebagai ekuitas.

7. Rincian Kas dan Setara Kas

No	Uraian	Jenis Kas dan Setara Kas	Nomor Rekening	Jumlah	Keterangan (Tujuan Penggunaan)
1	Rincian Kas dan Setara Kas baris ke-1				
2	Rincian Kas dan Setara Kas baris ke-2				
3, dst	Rincian Kas dan Setara Kas baris ke-3 dan seterusnya				
	Total				

Petunjuk Pengisian:

No	Uraian	Jenis Kas dan Setara Kas	Nomor Rekening	Jumlah	Keterangan (Tujuan Penggunaan)
1	Rincian Kas dan Setara Kas.	Diisi dengan Jenis Kas dan Setara Kas.	Diisi dengan Nomor Rekening dari Kas dan Setara Kas.	Diisi dengan Jumlah dari Kas dan Setara Kas.	Diisi dengan Keterangan (Tujuan Penggunaan) dari Kas dan Setara Kas.
2	Total			Total dari Jumlah Rincian Kas dan Setara Kas merupakan penjumlahan dari semua Jumlah Rincian Kas dan Setara Kas.	

8. Rincian Piutang Lancar Lainnya

No	Uraian	Nama Debitur	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah Piutang Lancar Lainnya	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Piutang Lancar Lainnya baris ke-1							
2	Rincian Piutang Lancar Lainnya baris ke-2							
3, dst	Rincian Piutang Lancar Lainnya baris ke-3 dan seterusnya							
	Total							

Petunjuk dan Pengisian:

No	Uraian	Nama Debitur	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah Piutang Lancar Lainnya	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Piutang Lancar Lainnya .	Diisi dengan Nama Debitur Piutang Lancar Lainnya.	Diisi dengan nilai Piutang Lancar Lainnya pada Pihak Berelasi dengan Debitur.	Diisi dengan nilai Piutang Lancar Lainnya pada Pihak Ketiga dari Debitur.	Jumlah Piutang Lancar Lainnya = nilai Piutang Lancar Lainnya pada Pihak Berelasi dengan Debitur (+) Pihak Ketiga dari Debitur.	Diisi dengan Tanggal Pencairan Piutang Lancar Lainnya, format yyyyymmdd.	Diisi dengan Tanggal Jatuh Tempo Piutang Lancar Lainnya, format yyyyymmdd.	Diisi dengan Keterangan (Tujuan Pengguna) Piutang Lancar Lainnya.

No	Uraian	Nama Debitur	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah Piutang Lancar Lainnya	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
2	Total		Total Nilai Piutang Lancar Lainnya pada Pihak Berelasi dengan Debitur merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Piutang Lancar Lainnya pada Pihak Berelasi.	Total Nilai Piutang Lancar Lainnya pada Pihak Ketiga dari Debitur merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Piutang Lancar Lainnya pada Pihak Ketiga.	Total Jumlah Piutang Lancar Lainnya merupakan penjumlahan dari semua Jumlah Rincian Piutang Lancar Lainnya.			

9. Rincian Aset Takberwujud

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Aset Tak Berwujud ke-1					
2	Rincian Aset Tak Berwujud ke-2					
3, ds t	Rincian Aset Tak Berwujud ke-3					
	Total					

Petunjuk Pengisian:

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Diisi nama Aset Takberwujud.	Diisi dengan nilai rincian aset Takberwujud pada awal bulan periode pelaporan.	Diisi dengan nilai penambahan rincian aset Takberwujud selama bulan periode pelaporan (jika ada).	Diisi dengan nilai pengurangan rincian aset Takberwujud selama bulan periode pelaporan (jika ada).	Diisi dengan nilai rincian aset Takberwujud pada akhir bulan periode pelaporan.	Diisi dengan Keterangan (Tujuan Pengguna) Aset Takberwujud.
2	Total	Total Nilai Aset Takberwujud pada kolom Saldo Awal merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Aset Takberwujud pada kolom Saldo Awal.	Total Nilai Aset Takberwujud pada kolom Penambahan merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Aset Takberwujud pada kolom Penambahan.	Total Nilai Aset Takberwujud pada kolom Pengurangan merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Aset Takberwujud pada kolom Pengurangan.	Total Nilai Aset Takberwujud pada kolom Saldo Akhir merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Aset Takberwujud pada kolom Saldo Akhir.	

10. Rincian Piutang Tidak Lancar Lainnya

No	Uraian	Nama Debitur	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah Piutang Tidak Lancar Lainnya	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Piutang Tidak Lancar Lainnya baris ke-1							
2	Rincian Piutang Tidak Lancar Lainnya baris ke-2							
3, dst	Rincian Piutang Tidak Lancar Lainnya baris ke-3 dan seterusnya							

No	Uraian	Nama Debitur	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah Piutang Tidak Lancar Lainnya	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
	Total							

Petunjuk Pengisian:

No	Uraian	Nama Debitur	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah Piutang Tidak Lancar Lainnya	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Piutang Tidak Lancar Lainnya	Diisi dengan Nama Debitur Piutang Tidak Lancar Lainnya.	Diisi dengan nilai Piutang Tidak Lancar Lainnya pada Pihak Berelasi dengan Debitur.	Diisi dengan nilai Piutang Tidak Lancar Lainnya pada Pihak Ketiga dari Debitur.	Jumlah Piutang Tidak Lancar Lainnya = nilai Piutang Tidak Lancar Lainnya pada Pihak Berelasi dengan Debitur (+) Pihak Ketiga dari Debitur.	Diisi dengan Tanggal Pencairan Piutang Tidak Lancar Lainnya, format yyyymmdd.	Diisi dengan Tanggal Jatuh Tempo Piutang Tidak Lancar Lainnya, format yyyymmdd.	Diisi dengan Keterangan (Tujuan Pengguna) Piutang Tidak Lancar Lainnya.
2	Total		Total Nilai Piutang Tidak Lancar Lainnya pada Pihak Berelasi dengan Debitur merupakan	Total Nilai Piutang Tidak Lancar Lainnya pada Pihak Ketiga	Total Jumlah Piutang Tidak Lancar Lainnya merupakan penjumlahan dari semua Jumlah Rincian Piutang			

			penjumlahan dari semua nilai Rincian Piutang Tidak Lancar Lainnya pada Pihak Berelasi.	dari Debitur merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Piutang Tidak Lancar Lainnya pada Pihak Ketiga.	Tidak Lancar Lainnya.			
--	--	--	--	---	-----------------------	--	--	--

11. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	Nama Kreditur	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya baris ke-1							
2	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya baris ke-2							
3, dst	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya baris ke-3 dan seterusnya							
	Total							

Petunjuk Pengisian:

No	Uraian	Nama Kreditur	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya	Diisi dengan Nama Kreditur Utang Jangka Pendek Lainnya.	Diisi dengan nilai Utang Jangka Pendek Lainnya pada Pihak Berelasi dengan Kreditur.	Diisi dengan nilai Utang Jangka Pendek Lainnya pada Pihak Ketiga dari Kreditur.	Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya = nilai Utang Jangka Pendek Lainnya pada Pihak Berelasi dengan Kreditur (+) Pihak Ketiga dari Kreditur.	Diisi dengan Tanggal Pencairan Utang Jangka Pendek Lainnya, format yyyyymmdd.	Diisi dengan Tanggal Jatuh Tempo Utang Jangka Pendek Lainnya, format yyyyymmdd.	Diisi dengan Keterangan (Tujuan Penggunaan) Utang Jangka Pendek Lainnya.
2	Total		Total Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya pada Pihak Berelasi dengan Kreditur merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada	Total Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya pada Pihak Ketiga dari Kreditur merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya	Total Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan penjumlahan dari semua Jumlah Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya.			

No	Uraian	Nama Kreditur	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
			Pihak Berelasi.	pada Pihak Ketiga.				

12. Rincian Biaya yang masih harus dibayar

No	Uraian	Nama Pihak Berelasi/Pihak Ketiga	Jumlah Biaya	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Pihak Berelasi/Pihak Ketiga ke-1				
2	Rincian Pihak Berelasi/Pihak Ketiga ke-2				
3, dst	Rincian Pihak Berelasi/Pihak Ketiga ke-3				
	Total				

Petunjuk Pengisian:

No	Uraian	Nama Pihak Berelasi/Pihak Ketiga	Jumlah Biaya	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Nama Pihak Berelasi/Pihak Ketiga		Diisi dengan nilai jumlah biaya pada rincian nama pihak berelasi/pihak ketiga pada rincian Biaya yang masih harus dibayar selama bulan periode pelaporan.	Diisi dengan Tanggal Jatuh Tempo Biaya yang masih harus dibayar, format yyyymmdd.	Diisi dengan Keterangan (Tujuan Pengguna) Biaya yang masih harus dibayar.
2	Total		Total Nilai Biaya yang masih harus dibayar pada kolom Saldo Awal merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Biaya yang masih harus dibayar pada kolom Jumlah Biaya.		

13. Rincian Utang Jangka Panjang Lainnya

No	Uraian	Nama Kreditur	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah Utang Jangka Panjang Lainnya	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya baris ke-1							
2	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya baris ke-2							
3, dst	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya baris ke-3 dan seterusnya							
	Total							

Petunjuk Pengisian:

No	Uraian	Nama Kreditur	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempo	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Utang Jangka Panjang Lainnya	Diisi dengan Nama Kreditur Utang Jangka Panjang Lainnya.	Diisi dengan nilai Utang Jangka Panjang Lainnya pada Pihak Berelasi dengan Kreditur.	Diisi dengan nilai Utang Jangka Panjang Lainnya pada Pihak Ketiga dari Kreditur.	Jumlah Utang Jangka Panjang Lainnya = nilai Utang Jangka Panjang Lainnya pada Pihak Berelasi dengan Kreditur (+) Pihak Ketiga dari Kreditur.	Diisi dengan Tanggal Pencairan Utang Jangka Panjang Lainnya, format yyyymmdd.	Diisi dengan Tanggal Jatuh Tempo Utang Jangka Panjang Lainnya, format yyyymmdd.	Diisi dengan Keterangan (Tujuan Penggunaan) Utang Jangka Panjang Lainnya.
2	Total		Total Nilai Utang Jangka Panjang	Total Nilai Utang Jangka Panjang	Total Jumlah Utang Jangka Panjang Lainnya merupakan			

			Lainnya pada Pihak Berelasi dengan Kreditur merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Utang Jangka Panjang Lainnya pada Pihak Berelasi.	Lainnya pada Pihak Ketiga dari Kreditur merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Utang Jangka Panjang Lainnya pada Pihak Ketiga.	penjumlahan dari semua Jumlah Rincian Utang Jangka Panjang Lainnya.				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

14. Rincian Beban Pemasaran dan Periklanan

No	Uraian	Nama Pihak Berelasi/Pihak Ketiga	Jumlah	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Beban Pemasaran dan Periklanan baris ke-1			
2	Rincian Beban Pemasaran dan Periklanan baris ke-2			
3, dst	Rincian Beban Pemasaran dan Periklanan baris ke-3 dan seterusnya			
	Total			

Detail Pengisian:

No	Uraian	Nama Pihak Berelasi/Pihak Ketiga	Jumlah	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Beban Pemasaran dan Periklanan	Diisi dengan Nama Pihak Berelasi/Pihak Ketiga atas transaksi Beban Pemasaran dan Periklanan	Diisi Nilai Beban Pemasaran dan Periklanan.	Diisi dengan Keterangan (Tujuan Penggunaan) Beban Pemasaran dan Periklanan.
2	Total		Total Jumlah Beban Pemasaran dan Periklanan merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Beban Pemasaran dan Periklanan.	

15. Rincian Beban Pengembangan dan Pemeliharaan IT

No	Uraian	Jumlah	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Rincian Beban Pengembangan dan Pemeliharaan IT baris ke-1		
2	Rincian Beban Pengembangan dan Pemeliharaan IT baris ke-2		
3, dst	Rincian Beban Pengembangan dan Pemeliharaan IT baris ke-3 dan seterusnya		
	Total		

Detail Pengisian:

No	Uraian	Jumlah	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Diisi dengan Nama Beban Pengembangan dan Pemeliharaan IT.	Diisi Nilai Beban Pengembangan dan Pemeliharaan.	Diisi dengan Keterangan (Tujuan Penggunaan) Beban Pengembangan dan Pemeliharaan.
2	Total	Total Jumlah Beban Pengembangan dan Pemeliharaan IT merupakan penjumlahan dari semua nilai Rincian Beban Pengembangan dan Pemeliharaan IT.	

16. Rincian Pendapatan Non Operasional

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Nama Pendapatan ke-1		
2	Nama Pendapatan ke-2		
3, dst	Nama Pendapatan ke-3		
	Total		

Petunjuk Pengisian:

No	Uraian	Jumlah	Keterangan (Sumber Aktivitas Pendapatan)
1	Diisi nama Pendapatan Non Operasional	Diisi dengan nilai jumlah pendapatan pada rincian Pendapatan Non Operasional selama bulan periode Pelaporan (termasuk pendapatan bunga apabila ada).	Diisi dengan Keterangan (Sumber Aktivitas Pendapatan) Pendapatan Non Operasional.
2	Total	Total Nilai Pendapatan Non Operasional pada kolom Jumlah merupakan penjumlahan dari semua	

		nilai Rincian Pendapatan Non Operasional.	
--	--	---	--

17. Rincian Laporan Arus Kas

No	Uraian	Keterangan	Jumlah
1.	A. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi		
2.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi ke -1		
3.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi ke -2		
4.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi ke -3		
5.	Total Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi		
6.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi ke -1		
7.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi ke -2		
8.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi ke -3		
9.	Total Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi		
10.	B. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi		
11.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi ke -1		
12.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi ke -2		
13.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi ke -3		
14.	Total Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi		
15.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi ke -1		
16.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi ke -2		
17.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi ke -3		
18.	Total Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi		
19.	C. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pembiayaan		
20.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan ke -1		

No	Uraian	Keterangan	Jumlah
21.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan ke -2		
22.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan ke -3		
23.	Total Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan		
24.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan ke -1		
25.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan ke -2		
26.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan ke -3		
27.	Total Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan		
28.	D. Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas		
29.	Rincian Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas ke-1		
30.	Rincian Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas ke-2		
31.	Rincian Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas ke-3		
32.	Total Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas		

Petunjuk Pengisian:

No	Uraian	Keterangan
1.	A. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi	
2.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi ke-1	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi ke-1
3.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi ke-2	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi ke-2
4.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi ke-3, dst	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi ke-3, dst.
5.	Total Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi	

No	Uraian	Keterangan
6.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi ke -1	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Operasi ke-1
7.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi ke -2	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Operasi ke-2
8.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi ke -3, dst	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Operasi ke-1, dst.
9.	Total Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi	
10.	B. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi	
11.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi ke -1	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi ke-1
12.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi ke -2	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi ke-2
13.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi ke-3, dst	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi ke-3, dst.
14.	Total Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi	
15.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi ke -1	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Investasi ke-1
16.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi ke -2	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Investasi ke-2
17.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi ke -3, dst	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Investasi ke-3, dst.
18.	Total Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi	
19.	C. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pembiayaan	
20.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan ke -1	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan ke-1
21.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan ke -2	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan ke-2
22.	Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan ke -3, dst	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan ke-3, dst.
23.	Total Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan	
24.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan ke -1	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pembiayaan ke-1

No	Uraian	Keterangan
25.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan ke -2	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pembiayaan ke-2
26.	Rincian Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan ke -3, dst	Diisi dengan nama akun dari Rincian Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pembiayaan ke-3, dst.
27.	Total Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan	
28.	D. Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas	
29.	Rincian Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas ke-1	Diisi dengan nama akun dari Rincian Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas ke-1
30.	Rincian Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas ke-2	Diisi dengan nama akun dari Rincian Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas ke-2
31.	Rincian Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas ke-3	Diisi dengan nama akun dari Rincian Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas ke-3, dst
32.	Total Kenaikan (Penurunan) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL
VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO,
DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/SEOJK.06/2024
TENTANG
TATA CARA DAN MEKANISME PENYAMPAIAN DATA TRANSAKSI
PENDANAAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN
BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

FORMAT 1: SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK AKSES PUSAT DATA
FINTECH LENDING (PUSDAFIL)

Nomor : , 20 ...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Hak Akses Pusat Data
Fintech Lending (PUSDAFIL)

Kepada Yth.
Direktur Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Wisma Mulia 2
Jalan Gatot Subroto Kav. 42, Jakarta 12710

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../SEOJK.06/... tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelaporan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, kami bermaksud mendaftarkan perusahaan kami sebagai pengguna (*user*) Pusat Data *Fintech Lending* (PUSDAFIL). Berikut kami sampaikan data Anggota Direksi Penanggung Jawab dan Petugas Penyusun untuk mohon didaftarkan sebagai *Administrator Responsible Officer* (ARO) yang bertanggung jawab atas penyampaian data transaksi pendanaan secara waktu nyata PT*) melalui PUSDAFIL sebagai berikut:

Sandi Penyelenggara	:	
Nama Perusahaan	:	
NPWP	:	
Alamat	:	
DATI 1	:	
DATI 2	:	
Kode pos	:	
Telepon	:	
Fax	:	
<i>Email</i>	:	
<i>Website</i>	:	
Tanggal Pelaksanaan Operasional	:	

Keterangan	Direksi Penanggung Jawab	Petugas Penyusun (ARO)
Nama		
Jabatan		
<i>Email</i>		
Telepon		

Keterangan: wajib dilengkapi seluruhnya, email ARO diisi dengan alamat email perusahaan untuk keperluan pelaporan ke OJK.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu*) kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direksi PT*)

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Sebutkan

**) Coret yang tidak perlu

FORMAT 2: SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK AKSES SISTEM JARINGAN KOMUNIKASI DATA OTORITAS JASA KEUANGAN

Nomor : , 20 ...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Hak Akses Sistem Jaringan Komunikasi Data Otoritas Jasa Keuangan

Kepada Yth.
Direktur Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Wisma Mulia 2
Jl. Gatot Subroto Kav. 42, Jakarta 12710

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../SEOJK.06/... tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelaporan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, kami bermaksud mendaftarkan perusahaan kami sebagai pengguna (*user*) Sistem Jaringan Komunikasi Data Otoritas Jasa Keuangan. Berikut kami sampaikan nama Anggota Direksi Penanggung Jawab dan Petugas Penyusun untuk mohon didaftarkan sebagai *Administrator Responsible Officer* (ARO) yang bertanggung jawab atas penyampaian laporan berkala PT*) melalui SILARAS sebagai berikut:

Keterangan	Direksi Penanggung Jawab	Petugas Penyusun (ARO)
Nama		
Jabatan		
<i>Email</i>		
Telepon		

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu*) kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direksi PT*)

.....
(Nama jelas, tanda tangan,
dan cap basah)

*) Sebutkan

**) Coret yang tidak perlu

FORMAT 3: SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB DAN/ATAU PETUGAS PENYUSUN DATA TRANSAKSI PENDANAAN DAN/ATAU LAPORAN BERKALA

Nomor : , 20 ...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perubahan Anggota Direksi Anggota Penanggung Jawab dan/atau Petugas Penyusun Pelaporan Data Transaksi Pendanaan dan/atau Laporan Berkala)

Kepada Yth.
Direktur Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Wisma Mulia 2
Jl. Gatot Subroto Kav. 42, Jakarta 12710

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../SEOJK.06/... tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelaporan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk:

1. Perubahan anggota direksi penanggung jawab pelaporan Data Transaksi Pendanaan dan/atau Laporan Berkala; dan/atau
 2. Perubahan petugas penyusun pelaporan Data Transaksi Pendanaan dan/atau Laporan Berkala,
- dengan perubahan sebagai berikut.

Jabatan	Keterangan	Sebelum	Setelah
Anggota Direksi Penanggung Jawab	Nama		
	Jabatan		
	<i>Email</i>		
	Telp/Fax		
Petugas Penyusun Pelaporan Data Transaksi Pendanaan dan/atau Laporan Berkala	Nama		
	Jabatan		
	<i>Email</i>		
	Telp/Fax		

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu*) kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direksi PT*)

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Sebutkan

**) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL
VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO,
DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja